



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KOTA SURABAYA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 95);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2016 tentang Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2017.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Walikota adalah Walikota Surabaya.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Bina Program adalah Kepala Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Bagian, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun sebelumnya dan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD).
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 3**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
  - a. acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
  - b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2017.

## **Pasal 4**

Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun 2017 hasil pembahasan dengan DPRD, maka KUA dan PPAS Tahun 2017 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.

## **Pasal 5**

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Kepala Bagian Bina Program paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan dan/atau;
  - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KERALA BAGIAN HUKUM,**



**IRA TURSILOWATI, S.H. M.H.**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut berarti, RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS yang telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
  24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025;
  25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya RKPD Kota Surabaya Tahun 2017 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surabaya Periode 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

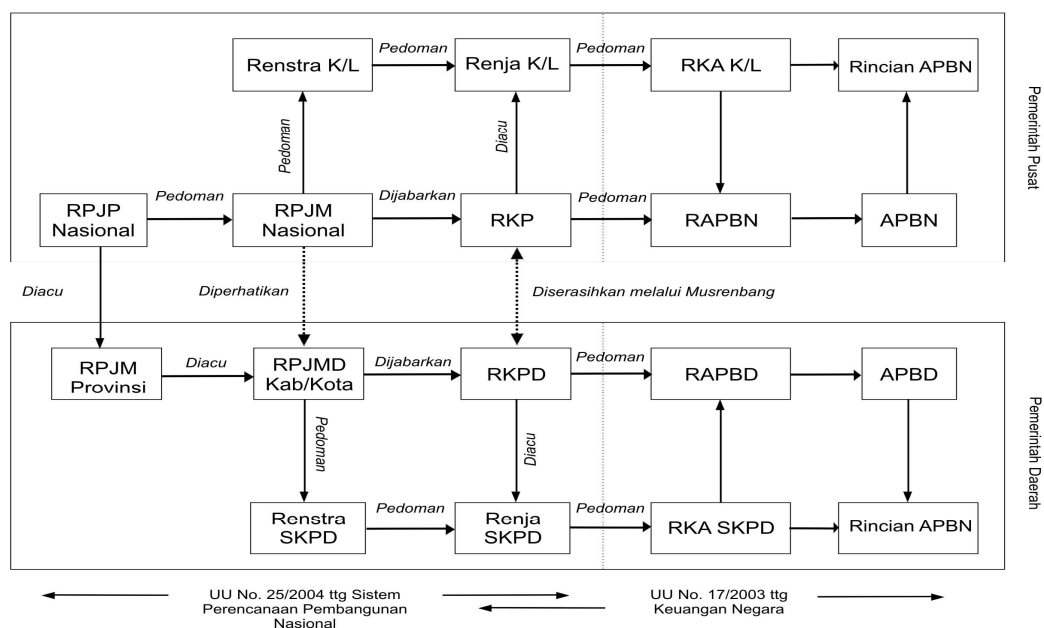
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kota Surabaya akan dijadikan landasan bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Surabaya Tahun 2017.

Sesuai tahapan penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa RKPD perlu mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional. RKPD digunakan

untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD Kota Surabaya menyusun Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam perumusan RKPD meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah sampai dengan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta perumusan program prioritas.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1  
Alur Penyusunan RKPD



Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 tentang Keuangan Negara

## **1.4 Sistematika Dokumen RKPD**

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

### **II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### **III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **IV. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan

### **V. Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah**

### **VI. Penutup**

## **1.5 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2017 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2017 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Renja SKPD;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

## **BAB II**

# **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

### **2. 1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

#### **2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi**

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya antara lain; batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo dan batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, dan batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar 0,26 km<sup>2</sup> wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi wilayah pada sebelah barat (12,77 persen) dan sebelah selatan (6,52 persen) merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Jenis batuan yang ada terdiri dari 4 jenis yang pada dasarnya merupakan tanah liat atau unit-unit pasir. Sedangkan jenis tanah, sebagian besar berupa tanah alluvial, selebihnya tanah dengan kadar kapur yang tinggi (daerah perbukitan). Sebagaimana daerah tropis lainnya, Surabaya mengenal 2 musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan rata-rata 172 mm, dengan temperatur berkisar maksimum 30°C dan minimum 25°C.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berfungsi membawa dan menyalurkan banjir yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, antara lain Kali Surabaya dengan debit (Q) rata-rata = 26,70 m<sup>3</sup>/detik, Kali Mas dengan Q rata-rata = 6,26 m<sup>3</sup>/detik dan Kali Jagir dengan Q rata-rata = 7,06 m<sup>3</sup>/detik. Sebagai daerah

hilir, Kota Surabaya dengan sendirinya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 154 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1368 Rukun Warga (RW) dan 9118 Rukun Tetangga (RT). Sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuruk Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.

Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki jembatan Suramadu dan kawasan teluk Lamong;

Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;

Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;

Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.



Data klimatologi diperoleh dari 3 sumber yang berbeda yaitu Stasiun Meteorologi dan Geofisika Perak I, Perak II dan Juanda. Ketiga Stasiun ini mempunyai kepentingan yang berbeda, dan diharapkan dapat memberikan informasi klimatologi yang saling melengkapi untuk wilayah Kota Surabaya. Stasiun Perak I yang terletak di Jln. Tanjung Sadari semula mempunyai kepentingan terutama bagi penerbangan pesawat TNI AL di Lanudal Morokrengan. Saat ini kegiatan penerbangan di Lanudal Morokrengan sudah tidak ada, dipindah ke Juanda. Meskipun demikian Stasiun Perak I ini masih tetap difungsikan untuk mengetahui pengaruh cuaca daratan Surabaya Utara. Stasiun Perak II terletak di Jln. Kalimas Baru, mempunyai kepentingan terutama bagi dunia pelayaran. Stasiun ini banyak dipengaruhi cuaca laut. Stasiun Juanda sebenarnya terletak di kabupaten Sidoarjo. Sesuai fungsinya, stasiun ini diperlukan bagi dunia penerbangan, baik pesawat sipil maupun pesawat TNI AL. Letaknya yang berbatasan dengan wilayah Surabaya Timur dapat memberikan informasi keadaan cuaca daratan Surabaya Tenggara.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya memiliki penduduk hingga akhir tahun 2010 2.929.528 jiwa, di tahun 2011 sebesar 3.024.321 jiwa, 3.125.576 jiwa pada tahun 2012, tahun 2013 sebesar 3.200.454 jiwa dan tahun 2014 menjadi 2.853.661 jiwa, sedangkan tahun 2015 sebesar 2.943.528 jiwa. Berikut adalah rincian jumlah penduduk Kota Surabaya menurut Kecamatan pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya menurut Kecamatan  
Tahun 2014 - 2015

No.	KECAMATAN	2014	2015
1	ASEMROWO	42.973	45.901
2	BENOWO	55.754	58.613
3	BUBUTAN	101.812	103.942
4	BULAK	40.642	42.176
5	DUKUH PAKIS	58.429	60.048
6	GAYUNGAN	44.092	45.415
7	GENTENG	59.273	60.462
8	GUBENG	136.621	139.355
9	GUNUNG ANYAR	52.120	54.127
10	JAMBANGAN	47.548	49.310

No.	KECAMATAN	2014	2015
11	KARANG PILANG	70.322	72.379
12	KENJERAN	146.757	154.531
13	KREMBANGAN	115.638	119.159
14	LAKARSANTRI	53.472	55.403
15	MULYOOREJO	82.773	85.344
16	PABEAN CANTIAN	82.383	82.601
17	PAKAL	48.484	50.866
18	RUNGKUT	104.046	108.494
19	SAMBIKEREP	58.566	60.375
20	SAWAHAN	201.721	207.101
21	SEMAMPIR	182.531	190.158
22	SIMOKERTO	97.713	100.050
23	SUKOLILO	104.893	108.292
24	SUKOMANUNGGAL	97.909	100.794
25	TAMBAKSARI	217.100	223.906
26	TANDES	89.469	91.497
27	TEGALSARI	101.716	104.109
28	TENGGILIS MEJOYO	54.861	56.482
29	WIYUNG	65.742	68.080
30	WONOCOLO	78.337	80.436
31	WONOKROMO	159.964	164.122
<b>JUMLAH</b>		<b>2.853.661</b>	<b>2.943.528</b>

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, komposisi penduduk Surabaya berdasarkan jenis kelamin relatif seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih besar dari jumlah penduduk perempuan. Secara detail perbandingan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut.

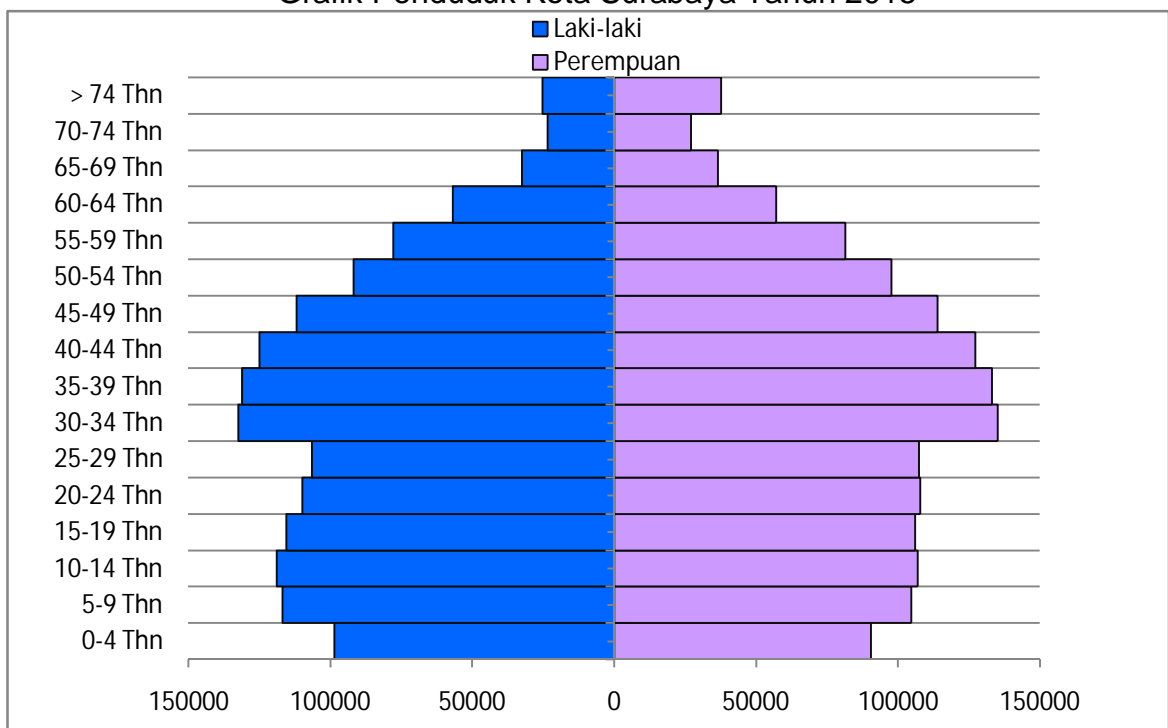
Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2014 - Tahun 2015

Tahun	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
2014	1.430.985	1.422.676	2.853.661
2015	1.473.640	1.469.888	2.943.528

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015

Apabila dilihat berdasarkan strukturnya, sampai dengan tahun 2015 penduduk Kota Surabaya lebih banyak berusia produktif yaitu 35 tahun sampai 54 tahun atau sebesar 31,65 persen dari total penduduk, selanjutnya pada usia 15 tahun sampai 34 tahun atau sebesar 31,26 persen. Sedangkan proporsi penduduk usia muda atau anak-anak dengan usia kurang dari 14 tahun sebesar 21,62 persen dan sisanya proporsi penduduk usia tua hanya sebesar 15,47 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010 dan 2014, proporsi penduduk usia muda atau anak-anak meningkat sebesar 2,25 persen; proporsi penduduk usia tua sedikit meningkat dari 14,89 persen di tahun 2014 dan proporsi penduduk usia produktif 15-54 tahun cenderung tetap. Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015 pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1  
Grafik Penduduk Kota Surabaya Tahun 2015



Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2015 diolah

Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 yaitu usia 0-6 tahun sebanyak 275.069 jiwa, usia 7-12 tahun sebanyak 270.157 jiwa, usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 jiwa dan usia 16-18 tahun sebanyak 128.721 jiwa. Rincian data penduduk kota Surabaya berdasarkan usia sekolah tahun 2015 disajikan pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3  
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Usia Sekolah  
Tahun 2015

No	KECAMATAN	0-6 TAHUN	7-12 TAHUN	13-15 TAHUN	16-18 TAHUN
1	KARANG PILANG	6.717	6.569	3.494	3.144
2	WONOCOLO	7.203	6.895	3.694	3.398
3	RUNGKUT	10.601	9.821	5.209	4.736
4	WONOKROMO	13.946	14.935	7.885	7.590
5	TEGALSARI	8.807	8.721	4.695	4.441
6	SAWAHAN	19.132	19.332	9.884	9.036
7	GENTENG	5.052	5.061	2.726	2.538
8	GUBENG	12.088	12.136	6.327	5.904
9	SUKOLILO	10.244	9.587	4.793	4.473
10	TAMBAK SARI	20.718	20.100	10.327	9.490
11	SIMOKERTO	9.135	8.821	4.537	4.380
12	PABEAN CANTIAN	7.004	7.282	3.636	3.567
13	BUBUTAN	9.283	9.544	5.015	4.733
14	TANDES	9.065	8.615	4.062	3.711
15	KREMBANGAN	10.808	10.628	5.564	5.214
16	SEMAMPIR	18.323	18.143	9.080	8.513
17	KENJERAN	16.118	15.745	7.899	7.541
18	LAKAR SANTRI	5.659	5.526	2.751	2.476
19	BENOWO	5.952	5.979	2.983	2.885
20	WIYUNG	6.537	6.240	3.318	3.062
21	DUKUH PAKIS	5.497	5.231	2.688	2.445
22	GAYUNGAN	3.899	3.844	2.051	1.893
23	JAMBANGAN	4.885	4.543	2.225	2.057
24	TENGGILIS MEJOYO	5.175	4.878	2.461	2.280
25	GUNUNG ANYAR	5.374	5.040	2.436	2.365
26	MULYOOREJO	7.803	7.536	3.893	3.462
27	SUKOMANUNGGAL	9.600	9.195	4.543	4.234
28	ASEMROWO	4.776	4.807	2.322	2.153
29	BULAK	4.355	4.322	2.235	1.984
30	PAKAL	5.171	5.314	2.637	2.484
31	SAMBI KEREP	6.142	5.767	2.803	2.532
<b>JUMLAH</b>		<b>275.069</b>	<b>270.157</b>	<b>138.173</b>	<b>128.721</b>

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2015

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam satu

tahun. PDRB umumnya digunakan sebagai indikator kinerja perekonomian suatu negara. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi, sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat nilai pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan perhitungan PDRB sebelumnya, dasar perhitungan PDRB saat ini tidak lagi menggunakan angka tahun dasar 2000 melainkan menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan BPS setiap 5 atau 10 tahun sekali yang mana perubahan tersebut bertujuan untuk mengukur keakuratan perkembangan perekonomian terkini. Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Salah satu implikasi perubahan ini adalah meningkatnya nominal PDRB dan perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 sektor ekonomi menjadi 17 kategori lapangan usaha.

Untuk mengetahui perkembangan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Seri Tahun Dasar 2010 pada tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Kota Surabaya ADHB menunjukkan tren yang semakin meningkat meskipun peningkatannya mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nilai PDRB ADHB Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp365.073.140,3 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp407.703.251,8 juta.

Berdasarkan strukturnya, sampai saat ini kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya, dengan kontribusi sebesar 26,97 persen pada tahun 2015. Pada urutan kedua, kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB yaitu kategori industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 19,46 persen pada tahun 2015, diikuti kategori penyediaan akomodasi makan dan minum dengan kontribusi sebesar 15,30 persen. Berikut ini adalah rekapitulasi nilai dan kontribusi kategori dalam PDRB ADHB Tahun 2014-2015.

Tabel 2.4  
 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan  
 Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Seri Tahun Dasar 2010  
 Tahun 2014 – 2015 (dalam Juta Rp)

kategori	Uraian	2014		2015*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.564,32	0,18	750.070,84	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	24.336,14	0,01	27.587,48	0,01
C	Industri Pengolahan	70.661.843,08	19,36	79.334.006,95	19,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.978.907,22	0,54	1.997.909,41	0,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,35	0,16	613.427,06	0,15
F	Konstruksi	37.891.835,80	10,38	41.833.616,63	10,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,35	27,38	109.971.647,28	26,97
H	Transportasi dan Pergudangan	18.927.734,93	5,18	21.544.921,57	5,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,64	14,81	62.389.404,16	15,30
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,27	5,52	22.080.942,63	5,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,51	5,28	21.872.423,78	5,36
L	Real Estate	9.372.176,45	2,57	10.420.100,50	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,16	2,43	9.814.203,90	2,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.183.606,08	1,42	5.420.318,82	1,33
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,73	2,54	10.444.758,10	2,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.814.318,82	0,77	3.210.798,99	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,44	1,47	5.977.113,72	1,47
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>365.073.140,32</b>	<b>100,00</b>	<b>407.703.251,80</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

Tabel 2.5  
 Nilai dan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Menurut Lapangan  
 Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010  
 Tahun 2014–2015 (dalam Juta Rp)

kategori	Uraian	2014		2015*	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	522.264,93	0,17	544.254,16	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	18.674,88	0,01	19.287,42	0,01
C	Industri Pengolahan	59.358.226,45	19,44	63.544.418,51	19,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.569.076,33	0,51	1.519.805,94	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	474.422,91	0,16	479.309,46	0,15
F	Konstruksi	31.368.882,67	10,27	32.287.990,94	9,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.711.515,05	28,4	91.681.928,75	28,32
H	Transportasi dan Pergudangan	14.843.763,22	4,86	15.878.997,20	4,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.503.082,56	13,92	45.780.530,20	14,14
J	Informasi dan Komunikasi	19.701.365,86	6,45	20.938.611,64	6,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.842.875,73	4,86	15.852.550,77	4,90
L	Real Estate	8.264.384,54	2,71	8.774.297,06	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	7.011.356,21	2,3	7.437.646,67	2,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.004.411,47	1,31	4.032.041,91	1,25
P	Jasa Pendidikan	7.144.694,86	2,34	7.593.381,70	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.348.390,77	0,77	2.527.338,14	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.620.617,78	1,51	4.790.194,45	1,48
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>305.308.006,20</b>	<b>100,00</b>	<b>323.682.584,92</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa PDRB Kota Surabaya ADHK terus mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan pada PDRB ADHB. Peningkatan ini didukung oleh seluruh peningkatan kategori ekonomi pembentuk PDRB. Nilai PDRB ADHK Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp305.308.006,2 juta dan pada tahun 2015 sebesar Rp323.682.584,9 juta.

Berdasarkan komposisinya, sama halnya dengan PDRB ADHB, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 menjadi leading sector dalam pembentukan PDRB Kota Surabaya terbesar dengan kontribusi masing-masing tahun dengan nilai Rp86.711.515,1 juta pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 sebesar Rp91.681.928,7 juta. Adapun kategori lapangan usaha lainnya yang memberikan kontribusi tinggi selanjutnya yaitu kategori industri pengolahan dan penyedia akomodasi dan makanan minuman. Berikut ini

disajikan tabel kontribusi kategori lapangan usaha PDRB ADHB dan ADHK Kota Surabaya tahun 2014-2015 dalam satuan persentase

Tabel 2.6  
Perkembangan Kontribusi Kategori dalam PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Seri Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 –2015 (dalam Juta Rp)

kategori	Uraian	2014		2015*	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,17	0,18	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,36	19,44	19,46	19,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,51	0,49	0,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,15	0,15
F	Konstruksi	10,38	10,27	10,26	9,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,38	28,4	26,97	28,32
H	Transportasi dan Pergudangan	5,18	4,86	5,28	4,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,81	13,92	15,30	14,14
J	Informasi dan Komunikasi	5,52	6,45	5,42	6,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,28	4,86	5,36	4,90
L	Real Estate	2,57	2,71	2,56	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,43	2,3	2,41	2,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	1,31	1,33	1,25
P	Jasa Pendidikan	2,54	2,34	2,56	2,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,77	0,77	0,79	0,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,47	1,51	1,47	1,48
	<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Angka Sementara

## b. Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi selama 5 tahun terakhir, inflasi rata-rata Kota Surabaya mulai tahun 2011-2015 sebesar 5,59 persen. Angka tersebut tergolong dalam inflasi ringan yang nilainya dibawah angka 10 persen. Inflasi yang ringan dibutuhkan dalam perekonomian untuk mendorong produsen agar memproduksi lebih banyak barang dan jasa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

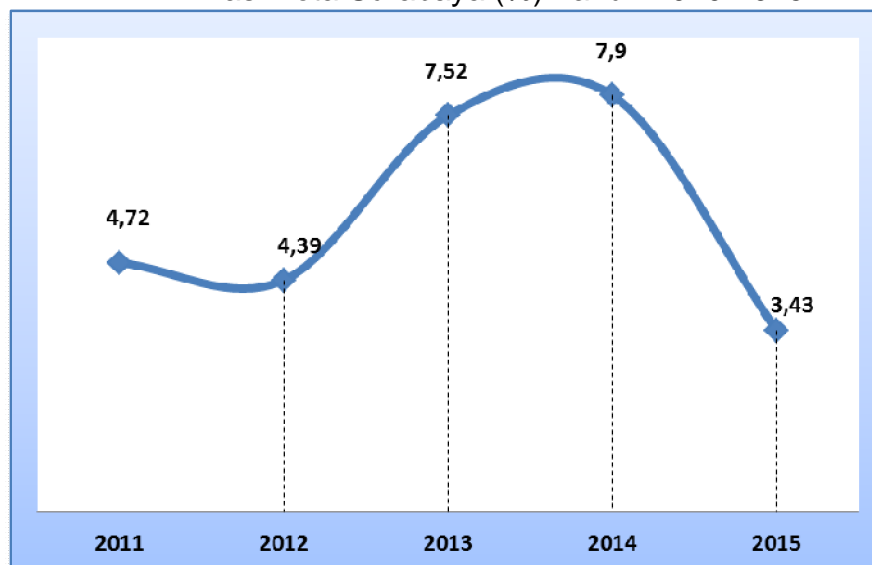
Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2014 mencapai 7,90 persen. Tekanan inflasi terbesar sepanjang tahun 2014 terjadi pada inflasi yang berasal dari kelompok administered price seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan tarif listrik serta kenaikan harga bahan



bakar rumah tangga. Ditambah lagi, pemicu inflasi tahun 2014 yaitu meningkatnya harga tarif angkutan kota sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar ditahun tersebut.

Tekanan inflasi mereda di tahun 2015 yang ditunjukkan oleh capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 yang terkendali sebesar 3,43 persen. Capaian realisasi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh faktor permintaan dan ketersediaan. Sehingga pada tahun 2015, inflasi lebih banyak disumbang oleh komoditi dalam kelompok *volatile food* (bahan makanan) sementara kelompok administered price cenderung menjadi penahan laju inflasi selama tahun 2015 ini. Inflasi pada kelompok volatile food tersebut dipengaruhi oleh kemarau panjang yang disebabkan oleh adanya fenomena El Nino yang mengakibatkan pola tanam dan panen tidak berjalan sesuai dengan pola normalnya yang akhirnya mengganggu ketersediaan pasokan bahan makanan. Komoditi-komoditi penyumbang terbesar inflasi Kota Surabaya selama tahun 2015 beras, daging ayam ras, tarif kereta api, tarif listrik, nasi dengan lauk, soto, daging sapi, bawang merah dan telur ayam ras. Meskipun rata-rata inflasi Kota Surabaya tergolong dalam inflasi rendah namun tetap perlu dilakukan pemantauan (kontrol) secara berkala terhadap komoditas-komoditas yang berpotensi memicu inflasi Kota Surabaya meningkat lebih tinggi.

Gambar 2.2  
Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Tabel 2.7  
Inflasi Kota Surabaya (%) Tahun 2010-2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Inflasi (%)	7,33	4,72	4,39	7,52	7,9	3,43

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

### c. PDRB Per Kapita

Kinerja ekonomi suatu wilayah dapat dinilai dengan berbagai ukuran. Secara umum, kinerja tersebut diukur melalui sebuah besaran yaitu PDRB perkapita. PDRB per kapita merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Besaran PDRB per kapita diperoleh dari output yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tersebut. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu wilayah dari tahun ke tahun. Dengan melakukan perbandingan seperti itu, kita dapat mengamati apakah kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah secara rata-rata telah meningkat. Berikut rangkuman data yang menggambarkan tingkat pendapatan perkapita penduduk di Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.8  
PDRB Perkapita Dan Pendapatan Regional Perkapita Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

Tahun	2014*	2015**
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	2.853.661	2.870.200
ATAS DASAR HARGA BERLAKU		
PDRB (Milyar Rp)	365.073,14	407.303,25
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	127,93	141,91
ATAS DASAR HARGA KONSTAN		
PDRB (Milyar Rp)	305.308,01	323.682,58
PDRB Per Kapita (Juta Rp)	106,99	112,77

Sumber: BPS Kota Surabaya, \*)Angka Sementara \*\*)Data Proyeksi, data dirilis tahun (t+1)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, PDRB perkapita Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar Rp106,99 juta/jiwa/tahun. Sedangkan pada tahun 2015 PDRB perkapita meningkat menjadi Rp112,77 juta/jiwa/tahun.

### **2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

#### **a. Pendidikan**

Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi Angka Melek Huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, serta Angka Partisipasi Murni.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperandalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai macam program dan kegiatan di bidang pendidikan baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Adapun indikator yang menunjukkan hasil kinerja bidang pendidikan pada jalur non formal adalah angka melek huruf (AMH). Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Angka melek huruf penduduk Kota Surabaya sebesar 100 persen pada tahun 2014-2015. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya dengan usia 15 tahun ke atas tercatat sebanyak 2.199.721 jiwa, pada tahun 2015 sebanyak 2.121.329 dan seluruhnya dapat membaca dan menulis.

Rekapitulasi data perkembangan AMH Kota Surabaya disajikan pada tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9  
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 tahun yang Bisa Membaca dan Menulis	2.199.721	2.121.329
2	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun Keatas	2.199.721	2.121.329
3	Angka Melek Huruf (%)	100,00%	100,00%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM tahun 2014 jenjang SD/MI sebesar 97,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,87 persen; jenjang SMA/MA/SMK sebesar 93,47 persen. APM tahun 2015 jenjang SD/MI sebesar 95,02, jenjang SMP/MTs sebesar 95,03 persen, jenjang SMA/MA/SMK sebesar 92,55 persen. Rekap data APM Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.10  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	252.434	256.703
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157
1.3	APM SD/MI (%)	97,02	95,02
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	124.018	131.306
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173
2.3	APM SMP/MTs (%)	95,87	95,03
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	118.692	119.131
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	126.983	128.721
3.3	APM SMA/MA/SMK (%)	93,47	92,55

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs, tahun 2014 sebesar 100,37 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Rekap data APK Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 2.11 sebagai berikut.

Tabel 2.11  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.789	284.313
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157
1.3	APK SD/MI (%)	108,3	105,24
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.845	145.123
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173
2.3	APK SMP/MTs (%)	100,37	105,03
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	154.732	135.260
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	126.983	128.721
3.3	APK SMA/MA/SMK (%)	121,85	105,08

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

## b. Kesehatan

Kesejahteraan sosial di bidang kesehatan diukur melalui beberapa indikator, diantaranya meliputi Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Usia Harapan Hidup.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya dapat diukur dengan meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Pada tahun 2010 hingga 2013, AHH selalu mengalami peningkatan yakni 71,01 persen pada tahun 2010, 71,27 persen pada tahun 2011, 71,53 persen pada tahun 2012 dan 72,12 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 73,85. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12  
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2010- 2014

Indikator	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (%)	71,01	71,27	71,53	72,12	73,85

Sumber: BPS Kota Surabaya, April 2015

Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase gizi buruk tahun 2014 sebesar 0,21 persen dan 0,16 persen pada tahun 2015. Berikut ini merupakan rekapitulasi data persentase balita gizi buruk tahun 2014-2015.

Tabel 2.13  
Perkembangan Balita Gizi Buruk Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita Disurvei	% Gizi Buruk
2014	366	174.087	0,21
2015	282	176.728	0,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2015

### c. Ketenagakerjaan

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya didominasi oleh penduduk usia produktif, maka ketersediaan lapangan kerja menjadi indikator yang penting, di samping mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat usia produktif.

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.14 menunjukkan jumlah angkatan kerja Kota Surabaya yang bekerja dan mencari pekerjaan. Berikut adalah rekap data penduduk bekerja dan mencari kerja di Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.14  
Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Surabaya Menurut Golongan Umur  
Tahun 2014-2015

No.	Golongan Umur	2014			2015		
		Angkatan Kerja		Jumlah	Angkatan Kerja		Jumlah
		Bekerja	Mencari Pekerjaan		Bekerja	Mencari Pekerjaan	
1	15-19	51,799	25,307	77,106	45,923	23,289	69,212
2	20-24	134,873	31,449	166,322	156,253	38,194	194,447
3	25-29	188,850	8,725	197,575	188,405	19,949	208,354
4	30-34	230,950	5,255	236,205	201,262	5,362	206,624
5	35-39	177,735	4,686	182,421	178,120	2,001	180,121
6	40-44	188,379	1,071	189,450	162,859	3,730	166,589
7	45-49	128,094	2,192	130,286	141,305	3,140	144,445
8	50-54	126,944	1,190	128,134	120,863	2,543	123,406
9	55-59	73,830	3,730	77,560	90,158	2,576	92,734
10	60+	78,703	1,840	80,543	80,032	2,130	82,162
	Jumlah	1,380,157	85,445	1,465,602	1,365,180	102,914	1,468,094

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2014

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk memperlihatkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya. Untuk melaksanakan pembangunan seni, budaya dan olahraga, perlu dilakukan berbagai upaya penggalangan dan penggalian terhadap potensi yang ada, baik dalam bidang sistem pembinaan,

lembaga/organisasi, maupun adanya landasan hukum yang digunakan sebagai dasar pembangunan seni, budaya dan keolahragaan.

Dasar pembangunan seni budaya tentu adalah minat masyarakat kota Surabaya terhadap seni budaya itu sendiri, terutama minat akan budaya lokal. Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Surabaya tahun 2014 sebanyak 226, dan tahun 2015 sebanyak 70 grup kesenian. Sedangkan jumlah gedung kesenian, klub olahraga, gedung olahraga jumlahnya tetap.

Tabel 2.15  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Capaian Pembangunan	2014	2015
1	Jumlah Grup Kesenian	226	70
2	Jumlah Gedung Kesenian	4	4
3	Jumlah Klub Olahraga	43	43
4	Jumlah Gedung Olahraga	3	3

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga, 2015

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan:

##### a. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Kota Surabaya di arahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal ini dapat dijelaskan antara lain melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kelulusan (AL) dan Angka Putus Sekolah (APS).

##### Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat



partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK jenjang SD/MI pada tahun pada tahun 2014 sebesar 108,3 persen, dan pada tahun 2015 sebesar 105,24 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs 100,37 persen tahun 2014, dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 105,03 persen. APK jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 121,85 persen dan pada tahun 2015 sebesar 105,08 persen. Rekapitulasi data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.16  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.789	284.313
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157
1.3	APK SD/MI (%)	108,3	105,24
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.845	145.123
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173
2.3	APK SMP/MTs (%)	100,37	105,03
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	154.732	135.260
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	126.983	128.721
3.3	APK SMA/MA/SMK (%)	121,85	105,08

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 2.17  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Menurut Kecamatan  
Tahun 2015

KECAMATAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK		
	jumlah penduduk usia 7-12 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SD/MI	APK	jumlah penduduk usia 13-15 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMP/MTs	APK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	jumlah seluruh siswa di jenjang SMA/MA/SMK	APK
Asemrowo	4807	3777	78,57%	2322	1786	76,92%	2153	643	29,87%
Benowo	5979	6436	107,64%	2983	1460	48,94%	2885	2360	81,80%
Bubutan	9544	9275	97,18%	5015	2804	55,91%	4733	2545	53,77%
Bulak	4322	5950	137,67%	2235	2712	121,34%	1984	1900	95,77%
Dukuh Pakis	5231	6322	120,86%	2688	2981	110,90%	2445	2961	121,10%
Gayungan	3844	6546	170,29%	2051	2953	143,98%	1893	5706	301,43%
Genteng	5061	7256	143,37%	2726	5973	219,11%	2538	13065	514,78%
Gubeng	12136	11924	98,25%	6327	4521	71,46%	5904	11618	196,78%
Gununganyar	5040	4710	93,45%	2436	1602	65,76%	2365	570	24,10%
Jambangan	4543	4325	95,20%	2225	3878	174,29%	2057	3372	163,93%
Karangpilang	6569	7167	109,10%	3494	4432	126,85%	3144	1509	48,00%
Kenjeran	15745	16344	103,80%	7899	8538	108,09%	7541	3595	47,67%
Krembangan	10628	12888	121,26%	5564	9531	171,30%	5214	6211	119,12%
Lakarsantri	5526	6850	123,96%	2751	4950	179,93%	2476	2229	90,02%
Mulyorejo	7536	9546	126,67%	3893	6163	158,31%	3462	5484	158,41%
Pabean Cantian	7282	4552	62,51%	3636	1970	54,18%	3567	2444	68,52%
Pakal	5314	6784	127,66%	2637	3667	139,06%	2484	796	32,05%
Rungkut	9821	10477	106,68%	5209	5744	110,27%	4736	2926	61,78%
Sambikerep	5767	4916	85,24%	2803	2749	98,07%	2532	1416	55,92%
Sawahan	19332	16526	85,49%	9884	5058	51,17%	9036	9402	104,05%
Semampir	18143	20208	111,38%	9080	6207	68,36%	8513	3944	46,33%
Simokerto	8821	6615	74,99%	4537	4134	91,12%	4380	1748	39,91%
Sukolilo	9587	11675	121,78%	4793	7093	147,99%	4473	9284	207,56%
Sukomanunggal	9195	10316	112,19%	4543	6795	149,57%	4234	5390	127,30%
Tambaksari	20100	17656	87,84%	10327	7285	70,54%	9490	4900	51,63%
Tandes	8615	11172	129,68%	4062	5296	130,38%	3711	3315	89,33%
Tegalsari	8721	10760	123,38%	4695	4286	91,29%	4441	2667	60,05%
Tenggiling Mejoyo	4878	5725	117,36%	2461	3358	136,45%	2280	1746	76,58%
Wiyung	6240	6492	104,04%	3318	2903	87,49%	3062	1384	45,20%
Wonocolo	6895	8961	129,96%	3694	4508	122,04%	3398	11226	330,37%
Wonokromo	14935	12162	81,43%	7885	9786	124,11%	7590	8904	117,31%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

### Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut.

APM jenjang SD/MI tahun 2014 sebesar 97,02 dan tahun 2015 sebesar 95,02 persen. APM jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 95,87 persen dan tahun 2015 sebesar 95,03 persen. APM jenjang SMA/MA/SMK tahun 2014 sebesar 93,47 persen dan tahun 2015 sebesar 92,55 persen. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	252.434	256.703
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157
1.3	APM SD/MI (%)	97,02	95,02
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	124.018	131.306
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173
2.3	APM SMP/MTs (%)	95,87	95,03
3	SMA/MA/SMK		
3.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 16-18 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK	118.692	119.131
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	126.983	128.721
3.3	APM SMA/MA/SMK (%)	93,47	92,55

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Tabel 2.19  
Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Menurut Kecamatan  
Tahun 2015

KECAMATAN	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK		
	Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa usia 16-18 tahun di jenjang SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
Asemrowo	3413	4807	71,00%	1614	2322	69,51%	565	2153	26,24%
Benowo	5809	5979	97,16%	1319	2983	44,22%	2077	2885	71,99%
Bubutan	8377	9544	87,77%	2532	5015	50,49%	2240	4733	47,33%
Bulak	5374	4322	124,34%	2450	2235	109,62%	1672	1984	84,27%
Dukuh Pakis	5709	5231	109,14%	2691	2688	100,11%	2605	2445	106,54%
Gayungan	5913	3844	153,82%	2669	2051	130,13%	5022	1893	265,29%
Genteng	6547	5061	129,36%	5399	2726	198,06%	11500	2538	453,11%
Gubeng	10764	12136	88,69%	4084	6327	64,55%	10222	5904	173,14%
Gununganyar	4252	5040	84,37%	1446	2436	59,36%	501	2365	21,18%
Jambangan	3906	4543	85,98%	3504	2225	157,48%	2966	2057	144,19%
Karangpilang	6472	6569	98,52%	4005	3494	114,63%	1325	3144	42,14%
Kenjeran	14758	15745	93,73%	7716	7899	97,68%	3164	7541	41,96%
Krembangan	11639	10628	109,51%	8614	5564	154,82%	5467	5214	104,85%
Lakarsantri	6182	5526	111,87%	4472	2751	162,56%	1959	2476	79,12%
Mulyorejo	8614	7536	114,30%	5565	3893	142,95%	4825	3462	139,37%
Pabean Cantian	4112	7282	56,47%	1779	3636	48,93%	2150	3567	60,27%
Pakal	6131	5314	115,37%	3315	2637	125,71%	699	2484	28,14%
Rungkut	9461	9821	96,33%	5191	5209	99,65%	2573	4736	54,33%
Sambikerep	4438	5767	76,96%	2481	2803	88,51%	1240	2532	48,97%
Sawahan	14916	19332	77,16%	4570	9884	46,24%	8275	9036	91,58%
Semampir	18246	18143	100,57%	5605	9080	61,73%	3468	8513	40,74%
Simokerto	5977	8821	67,76%	3737	4537	82,37%	1537	4380	35,09%
Sukolilo	10539	9587	109,93%	6408	4793	133,69%	8169	4473	182,63%
Sukomanunggal	9313	9195	101,28%	6139	4543	135,13%	4739	4234	111,93%
Tambaksari	15941	20100	79,31%	6581	10327	63,73%	4310	9490	45,42%
Tandes	10086	8615	117,07%	4785	4062	117,80%	2917	3711	78,60%
Tegalsari	9714	8721	111,39%	3873	4695	82,49%	2348	4441	52,87%
Tenggiling Mejoyo	5169	4878	105,97%	3033	2461	123,24%	1537	2280	67,41%
Wiyung	5860	6240	93,91%	2622	3318	79,02%	1218	3062	39,78%
Wonocolo	8088	6895	117,30%	4074	3694	110,29%	9881	3398	290,79%
Wonokromo	10983	14935	73,54%	8842	7885	112,14%	7832	7590	103,19%

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

### Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir.

AL untuk jenjang SD/MI tahun 2014 sampai 2015 mencapai angka 100 persen. Sedangkan AL untuk jenjang SMP/MTs tahun 2014 sebesar 99,99 persen dan tahun 2015 mencapai 100 persen. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK nilai AL sebesar 99,95 persen pada tahun 2014 dan 99,97 persen pada tahun 2015. Untuk jenjang SMK, nilai AL tahun 2014 sebesar 99,95 persen dan 99,97 persen pada tahun 2015. Rekapitulasi data

perkembangan Angka Kelulusan Kota Surabaya tahun 2014-2015 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20  
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah siswa SD/MI yang lulus	45.498	45.990
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	45.498	45.990
1.3	AL SD/MI (%)	100	100
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus	38.319	43.090
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	38.321	43.090
2.3	AL SMP/MTs (%)	99,99	100
3	SMA/MA		
3.1	Jumlah siswa SMA/MA yang lulus	18.785	17.573
3.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12	18.794	17.578
3.3	AL SMA/MA (%)	99,95	99,97
4	SMK		
4.1	Jumlah siswa SMK yang lulus	18.785	18.183
4.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12	18.794	18.189
4.3	AL SMK (%)	99,95	99,97

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

#### Angka Putus Sekolah (APS)

APS diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa seluruhnya. APS SD/MI tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2011 tidak terdapat anak putus sekolah (0 persen), terdapat 8 anak putus sekolah (0,003 persen) pada tahun 2012, mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 0 persen atau tidak terdapat anak putus sekolah dan meningkat kembali menjadi 0,0025 persen atau terdapat 7 anak putus sekolah pada tahun 2014.

APS SMP/MTs maupun SMA/MA dan SMK mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2012 . APS SMP/MTs pada tahun 2010 sebesar 0,05 persen dan mengalami fluktuasi selama tahun 2012-2014 secara urut sebesar 0,002 persen; 0,003 persen; 0,002 persen dan pada tahun 2015 menjadi 0 persen. APS SMA/MA menurun secara signifikan dari tahun 2011 sebesar 0,05 persen menjadi 0,003 persen pada tahun 2012 kemudian mengalami fluktuasi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan

nilai secara urut 0,009 persen; 0,01 persen dan 0,004 persen pada tahun 2015. APS SMK terus mengalami penurunan dengan nilai 0,05 persen pada tahun 2011 dan menurun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 secara urut sebesar 0,026 persen; 0,01 persen; 0,01 persen dan 0,007 persen pada tahun 2015. Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya Tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21  
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1	Jumlah siswa SD/MI putus sekolah	7	0
1.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SD/MI Kelas 6	281.789	284.313
1.3	APS SD/MI (%)	0,0025	0
2	SMP/MTs		
2.1	Jumlah siswa SMP/MTs yang putus sekolah	3	0
2.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMP/MTs Kelas 9	129.845	145.123
2.3	APS SMP/MTs (%)	0,002	0
3	SMA/MA		
3.1	Jumlah siswa SMA/MA yang putus sekolah	5	3
3.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12	77.448	67.280
3.3	APS SMA/MA (%)	0,01	0,004
4	SMK		
4.1	Jumlah siswa SMK yang putus sekolah	6	5
4.2	Jumlah Keseluruhan Siswa SMK Kelas 12	77.284	67.980
4.3	APS SMK (%)	0,01	0,007

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

#### Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.

Pada tahun 2014, jumlah gedung sekolah SD/MI yang ada sebanyak 971 gedung. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 260.193 orang, berarti rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:268. Diukur kembali pada tahun 2015, sejumlah 862 gedung

sekolah SD/MI dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 270.157, maka rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:313, di mana 1 gedung sekolah dipakai untuk menampung 313 orang penduduk usia sekolah jenjang SD/MI.

Pada tingkat pendidikan SMP/MTs, jumlah gedung sekolah yang ada pada tahun 2014 sebanyak 375 gedung. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 129.367 orang, berarti rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:345. Diukur kembali pada tahun 2015, sejumlah 356 gedung sekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 138.173 orang, maka rasio/ketersediaan sekolah sebesar 1:388 di mana 1 gedung sekolah dipakai untuk menampung 388 orang penduduk usia sekolah jenjang SD/MI. Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015
1	SD/MI		
1.1.	Jumlah gedung sekolah	971	862
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	260.193	270.157
1.3.	Rasio	1 : 268	1 : 313
2	SMP/MTs		
2.1.	Jumlah gedung sekolah	375	356
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	129.367	138.173
2.3.	Rasio	1 : 345	1 : 388

Sumber : Dinas Pendidikan, 2016

Melihat pada Tabel 2.23, rasio antara jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah sekolah di kota Surabaya menurut kecamatan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa untuk tingkat SD/MI, kecamatan yang memiliki rasio terbesar adalah kecamatan Gununganyar dengan nilai rasio sebesar 1:418 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan Tenggilis Mejoyo menampung 418 siswa sebaliknya kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:169 dimana rata-rata 1 SD/MI di kecamatan Dukuh Pakis menampung 169 siswa. Pada tingkat SMP/MTs kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:609 dimana 1 SMP/MTs di Benowo rata-rata menampung 609 siswa dan kecamatan Dukuh

Pakis merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:181 dimana 1 SMP/MTs di Semampir rata-rata menampung 181 siswa. Pada tingkat SMA/MA/SMK kecamatan Wiyung memiliki rasio tertinggi yaitu 1:1576 dimana 1 SMA/MA/SMK di Wiyung rata-rata menampung 1576 siswa dan kecamatan Genteng merupakan kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:143 dimana 1 SMA/MA/SMK di Genteng rata-rata menampung 143 siswa. Rasio antara jumlah penduduk usia sekolah dibandingkan dengan jumlah gedung sekolah menurut kecamatan di kota Surabaya pada tahun 2015 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.23  
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2015

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK						
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Jumlah Siswa Per Kecamatan	Rasio
Asemrowo	15	5	20	4782	1:240	4	0	4	2340	1:585	1	0	1	2	2181	565	1 : 1
Benowo	11	5	16	5897	1:369	3	2	5	3044	1:609	2	1	1	4	2843	2075	1 : 1
Bubutan	37	2	39	9422	1:242	9	0	9	4972	1:553	1	0	3	4	4754	1374	1 : 1
Bulak	16	5	21	4306	1:206	5	1	6	2257	1:377	2	0	1	3	2028	1675	1 : 1
Dukuh Pakis	30	1	31	5228	1:169	14	1	15	2702	1:181	6	0	0	6	2489	2588	1 : 2
Gayungan	18	1	19	3798	1:200	8	1	9	2035	1:227	5	0	2	7	1953	4995	1 : 3
Genteng	23	1	24	4993	1:209	11	0	11	2727	1:248	13	0	5	18	2568	11432	1 : 5
Gubeng	44	4	48	12085	1:252	18	0	18	6268	1:349	9	0	8	17	6008	9744	1 : 2
Gununganyar	12	0	12	5014	1:418	7	0	7	2438	1:349	0	0	2	2	2398	496	1 : 1
Jambangan	11	4	15	4508	1:301	6	0	6	2282	1:381	3	0	3	6	2054	2791	1 : 2
Karangpilang	19	3	22	6453	1:294	12	0	12	3550	1:296	5	0	4	9	3234	1314	1 : 1
Kenjeran	27	23	50	15519	1:311	14	4	18	8062	1:448	3	0	2	5	7447	3165	1 : 1
Krembangan	31	8	39	10493	1:270	17	1	18	5592	1:311	7	0	2	9	5331	5458	1 : 2
Lakarsantri	19	5	24	5502	1:230	7	2	9	2771	1:308	6	0	1	7	2467	1933	1 : 1
Mulyorejo	36	2	38	7365	1:194	12	0	12	3933	1:328	5	0	3	8	3550	4800	1 : 2
Pabean Cantian	18	4	22	7202	1:328	8	0	8	3700	1:463	3	0	2	5	3564	2113	1 : 1
Pakal	17	7	24	5233	1:219	6	3	9	2650	1:295	4	1	1	6	2532	699	1 : 1
Rungkut	23	5	28	9820	1:351	7	2	9	5133	1:571	5	2	2	9	4874	2543	1 : 1
Sambikerep	13	6	19	5682	1:300	9	1	10	2894	1:290	7	1	4	12	2508	1223	1 : 1

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs					SMA/MA/SMK						
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio	Jumlah SMA	Jumlah MA	Jumlah SMK	Total	Jumlah Penduduk Usia 16-18	Jumlah Siswa Per Kecamatan	Rasio
Sawahan	57	1	58	19154	1:331	16	2	18	9882	1:549	7	0	9	16	9317	8322	1 : 1
Semampir	50	31	81	17875	1:221	22	5	27	9240	1:343	4	1	4	9	8614	3446	1 : 1
Simokerto	27	6	33	8702	1:264	9	2	11	4611	1:420	6	1	3	10	4395	1527	1 : 1
Sukolilo	39	0	39	9531	1:245	17	1	18	4821	1:268	12	0	10	22	4482	8164	1 : 2
Sukomanunggal	39	1	40	9123	1:229	18	0	18	4562	1:254	6	1	8	15	4339	4724	1 : 2
Tambaksari	50	8	58	19867	1:343	18	5	23	10478	1:456	8	2	4	14	9650	4279	1 : 1
Tandes	21	9	30	8574	1:286	13	2	15	4112	1:275	1	2	1	4	3749	2902	1 : 1
Tegalsari	36	3	39	8634	1:222	17	0	17	4646	1:274	4	0	0	4	4496	2365	1 : 1
Tenggilis Mejoyo	18	0	18	4842	1:269	9	0	9	2468	1:275	3	0	0	3	2366	1537	1 : 1
Wiyung	17	1	18	6123	1:341	6	0	6	3329	1:555	1	1	0	2	3151	1214	1 : 1
Wonocolo	25	3	28	6828	1:244	10	2	12	3671	1:306	9	3	7	19	3429	9912	1 : 3
Wonokromo	42	7	49	14666	1:300	19	1	20	7985	1:400	11	0	9	20	7623	7866	1 : 2

Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI yang ada sebanyak 12.011 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 orang, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:24. Jumlah guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 sebanyak 6.225 orang dengan jumlah murid sebanyak 145.123 orang, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:24.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk SD dan SMP atau yang sederajat sebesar 20:1, sedangkan untuk MI dan MTs atau yang sederajat sebesar 1:15. Dengan demikian, rasio guru Kota Surabaya telah memenuhi standar dan telah dioptimalkan fungsi dan perannya.

#### **b. Kesehatan**

Jumlah posyandu balita dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan terus meningkat. Tujuan peningkatan sarana kesehatan tersebut adalah untuk menekan angka gizi buruk serta meningkatkan derajat kesehatan agar lebih maksimal dan terjangkau oleh masyarakat umum. Upaya promotif dan preventif tetap dilaksanakan diantaranya pemberian makanan tambahan penyuluhan untuk anak balita serta adanya penimbangan balita yang dilakukan secara berkala di seluruh Posyandu Kota Surabaya. Pada tahun 2014 jumlah posyandu 2.820 unit dengan jumlah balita sebanyak 218.774 jiwa sehingga rasio Posyandu per 1.000 penduduk sebesar 12,89 dan pada tahun 2015 sebesar 12,97. Jumlah posyandu dan balita Kota Surabaya Tahun 2014-2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24  
Jumlah Posyandu dan Balita Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Posyandu	2.820	2.826
2	Jumlah Balita	218.774	217.873
3	Rasio Posyandu per 1.000 penduduk	12,89	12,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Jumlah puskesmas dan jumlah klinik juga mengalami penambahan dari tahun 2014 sampai 2015. Pada tahun 2014 jumlah puskesmas sebanyak 62 puskesmas dan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 sehingga rasio puskesmas per 1.000 penduduk sebesar 0,022. dan pada tahun 2015 sebesar 0,022. Peningkatan rasio juga terjadi pada rasio klinik per 1.000 penduduk dari 0,085 pada tahun 2014 menjadi 0,090 pada tahun 2015. Rasio puskesmas pembantu mengalami penurunan akibat jumlah puskesmas pembantu yang juga mengalami penurunan. Selengkapnya rekapitulasi data dapat dilihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.25  
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.902.736
2	Puskesmas		
2.1	Jumlah Puskesmas	62	63
2.2	Rasio Puskesmas per 1.000 penduduk	0,022	0,022
3	Klinik		
3.1	Jumlah	243	261
3.2	Rasio Klinik per 1.000 penduduk	0,085	0,090
4	Pustu		
4.1	Jumlah	60	59
4.2	Rasio Pustu per 1.000 penduduk	0,021	0,020

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.853.661 jiwa dan jumlah rumah sakit 61 unit dengan demikian rasio rumah sakit per 1.000 penduduk adalah 0,0214 dan pada

tahun 2015 sebesar 0,0210. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26  
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.902.736
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	3	2
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	5	3
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	8
5	Rumah Sakit Daerah	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	44	46
Jumlah Rumah Sakit		61	61
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0214	0,0210

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak 2.853.661 jiwa dan jumlah dokter sebanyak 6.364 orang. Dengan demikian rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 2,23. Jumlah dokter mengalami peningkatan pada tahun 2015 sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah menjadi 2.36. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27  
Jumlah Dokter Kota Surabaya Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.902.736
2	Jumlah Dokter	6.364	6.839
3	Rasio Dokter per 1.000 penduduk	2,23	2,36

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2016

### c. Pekerjaan Umum

Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2010 adalah 1.459,696 Km dari total panjang jalan 1.504,348 Km, sehingga persentase panjang jalan kondisi baik adalah sebesar 97,032%. Persentase panjang jalan kondisi baik mengalami peningkatan dikarenakan jumlah panjang jalan dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan. Persentase panjang jalan kondisi baik yaitu pada tahun 2011 menjadi 97,033%, pada tahun 2012 menjadi 97,095%, pada tahun 2013 menjadi 98,187%, pada tahun 2014 menjadi 98,196%, dan pada

tahun 2015 menjadi 98,64%. Untuk panjang jalan dalam kondisi baik Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28  
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km)	1.648,840	1.660,174
2	Panjang Jalan (Km)	1.679,140	1.683,116
3	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	98,196%	98,64%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan, 2016

#### d. Perumahan Rakyat

Pertumbuhan penduduk secara pesat terutama di perkotaan umumnya merupakan akibat dari urbanisasi, di mana timbul ancaman tidak seimbang pertumbuhan penduduk dengan pelayanan kota. Hal ini mengakibatkan meluasnya lingkungan hunian atau permukiman kumuh di perkotaan. Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan penanganan multisektoral. Program Perumahan dan Permukiman diarahkan untuk mengatasi permasalahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar mendapat manfaat rumah layak huni.

Sejalan dengan gerakan 100-0-100, yaitu pemenuhan 100 persen akses air minum, 0 persen luasan permukiman kumuh perkotaan dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan di bidang perumahan dan permukiman di Kota Surabaya tidak hanya membangun perumahan atau permukiman baru, akan tetapi juga menjaga kualitas sarana prasarana permukiman itu menjadi lebih baik, lebih sehat dan tidak kumuh.

Pemerintah Kota Surabaya juga mengupayakan penyediaan lahan bagi terbangunnya rumah sederhana layak huni yang memiliki konsep pembangunan vertikal untuk mengatasi permasalahan lahan. Pembangunan tersebut juga didukung oleh dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi MBR di Kota Surabaya agar bisa mendapatkan manfaat rumah layak huni. Selain mengupayakan konsep pembangunan rumah sederhana layak huni vertikal, Pemerintah Kota

Surabaya mengupayakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana di lingkungan permukiman kumuh/tidak layak huni melalui kegiatan rutin antara lain Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman, Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Makam serta Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Data perbaikan rumah tidak layak huni melalui RSDK tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.29 berikut.

Tabel 2.29  
Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Seluruh Rumah	679.091	679.091
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	602	723
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,09	0,11

Sumber: Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016 (diolah)

Rekapitulasi data rumah tidak layak huni di Kota Surabaya juga disajikan dalam data per kecamatan seperti pada Tabel 2.30 berikut ini.

Tabel 2.30  
Rumah Tidak Layak Huni menurut Kecamatan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%
1	Kec. Asemrowo	9.290	0	0,00	9.290	0	0,0
2	Kec. Benowo	18.382	24	0,13	18.382	12	0,1
3	Kec. Bubutan	21.014	58	0,28	21.014	32	0,2
4	Kec. Bulak	9.760	5	0,05	9.760	25	0,3
5	Kec. Dukuh Pakis	14.793	22	0,15	14.793	20	0,1
6	Kec. Gayungan	15.687	0	0,00	15.687	47	0,3
7	Kec. Genteng	14.117	6	0,04	14.117	68	0,5
8	Kec. Gubeng	34.124	0	0,00	34.124	30	0,1
9	Kec. Gunung Anyar	13.796	5	0,04	13.796	20	0,1
10	Kec. Jambangan	10.276	22	0,21	10.276	22	0,2
11	Kec. Karangpilang	18.486	1	0,01	18.486	0	0,0
12	Kec. Kenjeran	25.116	55	0,22	25.116	8	0,0
13	Kec. Krembangan	26.586	5	0,02	26.586	40	0,2

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	Jumlah Seluruh Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%
14	Kec. Lakarsantri	14.883	28	0,19	14.883	3	0,0
15	Kec. Mulyorejo	30.705	5	0,02	30.705	33	0,1
16	Kec. Pabean Cantian	19.190	10	0,05	19.190	40	0,2
17	Kec. Pakal	9.896	0	0,00	9.896	20	0,2
18	Kec. Rungkut	24.924	10	0,04	24.924	0	0,0
19	Kec. Sambikerep	11.125	5	0,04	11.125	20	0,2
20	Kec. Sawahan	44.444	36	0,08	44.444	14	0,0
21	Kec. Semampir	32.550	30	0,09	32.550	26	0,1
22	Kec. Simokerto	20.794	5	0,02	20.794	36	0,2
23	Kec. Sukolilo	22.733	25	0,11	22.733	44	0,2
24	Kec. Sukomanunggal	24.929	44	0,18	24.929	34	0,1
25	Kec. Tambaksari	59.463	44	0,07	59.463	13	0,0
26	Kec. Tandes	27.716	23	0,08	27.716	41	0,1
27	Kec. Tegalsari	19.779	55	0,28	19.779	15	0,1
28	Kec. Tenggilis Mejoyo	16.312	35	0,21	16.312	8	0,0
29	Kec. Wiyung	9.847	22	0,22	9.847	21	0,2
30	Kec. Wonocolo	19.275	22	0,11	19.275	0	0,0
31	Kec. Wonokromo	39.099	0	0,00	39.099	31	0,1
<b>Total</b>		<b>679.091</b>	<b>602</b>	<b>0,09</b>	<b>679.091</b>	<b>723</b>	<b>0,11</b>

Sumber : Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kota Surabaya 2008, Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016

#### e. Penataan Ruang

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang kota. Berdasarkan jenisnya, terdapat 3 (tiga) jenis IMB yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya yaitu IMB rumah tinggal, IMB non rumah tinggal serta IMB Reklame. Jumlah IMB yang diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31

IMB yang diterbitkan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Rumah Tinggal	4.461	6.411
2	Non Rumah Tinggal	1.306	1.239
3	Reklame	1.413	902
Total		7.180	8.552

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, 2016



#### f. Perencanaan Pembangunan

Dokumen RPJMD kota Surabaya merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan petunjuk bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya dan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di tahun bersangkutan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015. Dokumen tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 untuk RPJPD dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 tahun 2012 untuk RPJMD. Dengan ditetapkannya dokumen perencanaan tersebut sebagai peraturan daerah, Pemerintah Kota telah memiliki dokumen perencanaan yang memiliki kekuatan hukum. Pada saat ini dokumen RPJMD 2016-2020 masih dalam proses penyusunan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32  
Dokumen Perencanaan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Jenis Dokumen	2014	2015
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	Ada	Ada
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Ada	Ada
3	Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rencana capaian kinerja program pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2010-2015 telah mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Program-program pembangunan yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD tahun 2010-2015 merupakan instrumen kebijakan untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Implementasi kebijakan dilaksanakan melalui program pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2015 sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2014-2015 Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan 60 program, dengan rincian 58 program strategi dan 2 program non urusan dan seluruhnya telah dilaksanakan melalui RKPD Kota Surabaya. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD disajikan dalam Tabel 2.33 berikut.

Tabel 2.33  
Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan	60	60
2	Jumlah Program RKPD	60	60
3	Persentase Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, 2016

#### g. Perhubungan

Kota Surabaya sampai dengan saat ini masih memiliki 4 terminal yang melayani angkutan umum dengan jenis bis dan angkutan kota (angkot) yang terdiri dari 2 terminal tipe A yaitu Terminal Purabaya dan Terminal Tambak Oso Wilangun, 1 terminal tipe B yaitu Terminal Joyoboyo dan 1 terminal tipe C yaitu Terminal Bratang dengan jumlah angkutan darat pada tahun 2014 sebanyak 10.256 kendaraan, dan pada tahun 2015 menjadi 10.369 kendaraan, seperti yang disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34  
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Terminal Bis	4	4
2	Jumlah Angkutan Darat	10.256	10.369

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan dari tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 sebanyak 6.870 ijin dengan jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 jiwa sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0024 dan pada tahun 2015 sebanyak 7.370 ijin dengan jumlah penduduk

sebanyak 2.943.528 sehingga rasio ijin trayek sebesar 0,0025, seperti yang disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35  
Rasio Ijin Trayek Kota Surabaya Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528
2	Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan	6.870	7.370
3	Rasio Ijin Trayek	0,0024	0,0025

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Selain untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan kendaraan melalui uji Kir. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala dengan jumlah kendaraan yang lulus uji pada tahun 2014 sebanyak 104.069 kendaraan, dan pada tahun 2015 sebanyak 103.902 kendaraan, di mana rekapitulasi data disajikan ke dalam Tabel 2.36.

Tabel 2.36  
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	33.071	33.971
2	Jumlah kendaraan wajib uji KIR	100.091	102.052
3	Jumlah kendaraan yang diuji KIR	109.191	141.742
4	Jumlah kendaraan lulus uji KIR	104.069	103.902

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2016

Upaya peningkatan keselamatan lalu lintas tetap dilakukan baik melalui sosialisasi/pembinaan keselamatan bagi pelajar dan warga kota, uji emisi simpatik, serta melalui penyediaan perlengkapan jalan dan APILL. Salah satu bentuk penyediaan perlengkapan jalan adalah berupa pemasangan rambu baik rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah maupun rambu petunjuk. Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2014 sejumlah 9.910 buah, dan pada tahun 2015 sejumlah 11.283 buah. Dengan penambahan jumlah rambu tersebut, diharapkan mampu mengubah perilaku para pengguna jalan dalam berkendara serta lebih taat terhadap peraturan.

## h. Lingkungan Hidup

Volume produksi sampah Kota Surabaya didasarkan pada asumsi timbulan sampah yang dihasilkan tiap orang per hari. Volume produksi sampah Kota Surabaya dalam satuan m<sup>3</sup>/hari yaitu pada tahun 2014 sebanyak 9.185,94, dan pada tahun 2015 sebanyak 9.475,21, dimana rekap data dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37  
Volume Produksi Sampah dan Jumlah Sampah Yang Ditangani di  
TPA Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Volume Produksi Sampah (m <sup>3</sup> /hari)	9.185,94	9.475,21
2	Jumlah Sampah yang Ditangani di TPA (m <sup>3</sup> /hari)	4.853	4.926
3	Persentase Sampah yang Ditangani di TPA (%)	53	52

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2016

Untuk memberikan pelayanan persampahan kepada penduduk Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dan meningkatkan jumlah TPS yaitu pada tahun 2014 ada sebanyak 184, dan pada tahun 2015 sebanyak 185. Nilai rasio TPS dapat dilihat pada Tabel 2.38 berikut ini.

Tabel 2.38  
Rasio Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS)  
per Satuan Penduduk Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528
2	TPS		
2.1	Jumlah (Unit)	184	185
2.2	Jumlah Daya Tampung (Ton)	1.270	1.321,8
3	Rasio TPS	0,000445	0,000449

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2016

Disamping masalah persampahan diatas terdapat pula permasalahan lingkungan lainnya, yaitu pencemaran lingkungan. Berdasarkan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan pada tahun 2014 ada sebanyak 81 kasus, dan pada tahun 2015 ada sebanyak 78 kasus. Berikut rekapitulasi data persentase penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39  
Permasalahan Lingkungan Hidup Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Kasus Lingkungan yang ada	81	78
2	Jumlah Kasus Lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Kota	81	78
3	Persentase Penegakan Hukum (%)	100	100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup, 2016

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup di Kota Surabaya dilakukan melalui rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap instansi, atau pelayan publik atau tingkah laku aparat pengadilan dengan melakukan monitoring dan atau observasi dan atau konfirmasi dan atau klarifikasi dan atau investigasi (pemeriksaan) untuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan tersebut. Kasus lingkungan dianggap selesai jika:

1. Hasil uji laboratorium dan pantau pengukuran saat di lapangan tidak melebihi baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan;
2. Pelimpahan ke Satpol PP untuk dilakukan penertiban (untuk kegiatan usaha tidak memilik izin);
3. Sudah ada kesepakatan antar pihak;
4. Pernyataan dari pengadu/ pelapor bahwa sudah tidak merasakan dampak gangguan/ pencemaran.

#### i. **Pertanahan**

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya. Dalam mengelola dan mengawasi tanah sebanyak itu tentu bukan perkara mudah, perlu adanya bukti kepemilikan memadai, pengawasan dan pemeliharaan reguler agar tanah itu bermanfaat dan menghasilkan pendapatan. Ini yang sekarang tengah dihadapi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam pengurusan aset-aset tanah tersebut Pemerintah Kota berpedoman pada regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan barang milik daerah dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pengamanan barang milik daerah, yang mana dalam pengawasan dan pengamanan aset tanah disyaratkan bahwa barang milik negara/ daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/ pemerintah daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40  
Daftar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No	Status Tanah	2010			2011			2012			2013			Jan - Mei 2014			2015		
		Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang	Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang	Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang	Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang	Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang	Jumlah (M2)	Persentase (%)	Jumlah Sertifikat /Bidang
1.	Hak Pengelolaan (HPL)	7.687.775,00	33,93	86 sertifikat	7.687.775,00	32,65	86 Sertifikat	7.704.855,00	32,27	87 Bidang	7.704.855,00	31,99	87 BIDANG	7.704.855,00	31,99	87 BIDANG	7.687.775,00	32,78	87 BIDANG
2.	HAK PAKAI (HP)	1.143.386,50	5,05	154 sertifikat	5.440.014,50	23,11	507 Sertifikat	5.693.428,50	23,85	531 Bidang	5.901.705,50	24,54	555 BIDANG	5.901.705,50	24,54	555 BIDANG	5.371.239,00	22,9	601 BIDANG
3.	BA P2TUN	3.525.644,00	15,56	297 sertifikat	622.669,50	2,64	10 Bidang	622.669,50	2,61	10 Bidang	622.669,50	2,59	10 BIDANG	622.669,50	2,59	10 BIDANG	622.669,50	2,66	10 BIDANG
4.	BESLIT	622.669,50	2,75	10 Bidang	379.993,29	1,61	177 Bidang	379.993,29	1,59	177 Bidang	379.993,29	1,58	177 BIDANG	379.993,29	1,58	177 BIDANG	379.993,29	1,62	177 BIDANG
5.	EIGENDOM	379.993,29	1,68	177 Bidang	4.171.741,00	17,72	46 Bidang	4.171.741,00	17,47	46 Bidang	4.171.741,00	17,32	46 BIDANG	4.171.741,00	17,32	46 BIDANG	4.171.741,00	17,79	46 BIDANG
6.	Tanah Negara	4.171.741,00	18,41	46 Bidang	978.044,00	4,15	11 Bidang	978.044,00	4,1	11 Bidang	978.044,00	4,06	11 BIDANG	978.044,00	4,06	11 BIDANG	978.044,00	4,17	11 BIDANG
7.	Fasum/Fasos Penyerahan dari Pengembang	978.044,00	4,32	11 Bidang	896.107,00	3,81	354 Bidang	896.107,00	3,8	351 Bidang	969.266,51	4,02	451 BIDANG	969.266,51	4,02	451 BIDANG	896.107,00	3,82	451 BIDANG
8.	Petok D BTKD penyerahan dari Bagian Pemerintahan	896.107,00	3,96	354 Bidang	3.249.919,00	13,8	116 Petok D	3.249.919,00	13,77	116 Petok D	3.249.919,00	13,49	116 PETOK D	3.249.919,00	13,49	116 PETOK D	3.249.919,00	13,86	116 PETOK D
9.	Hak Milik (SHM)	3.249.919,00	14,35	116 Petok D	98.231,00	0,42	6 Sertifikat	91.376,00	0,38	4 Bidang	91.376,00	0,38	4 BIDANG	91.376,00	0,38	4 BIDANG	91.376,00	0,39	6 BIDANG
10.	Hak Guna Bangunan (HGB) Penyerahan dari Bagian Perlengkapan	-	-	-	788	0	1 Sertifikat	788	0	1 Bidang	788	0	1 BIDANG	788	0	1 BIDANG	788	0	1 BIDANG
11.	Pembelian/Perdagangan Tanah	-	-	-	6.948,00	0,03	4 Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	10.805,70	0,05	4 Bidang	11.908,70	0,05	5 Bidang	4.799,70	0,03	3 BIDANG	4.799,70	0,03	3 BIDANG	3019	0,01	7 BIDANG

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2016

**j. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Dalam aspek perencanaan, aspek kependudukan adalah aspek yang paling penting untuk menentukan strategi perencanaan yang akan diambil. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib lagi dalam pengurusan dokumennya.

Pada tahun 2014 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya per 31 Desember 2014, jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sejumlah 2.026.310 jiwa dari total 2.160.362 wajib KTP. Sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sejumlah 2.043.450 jiwa dari total 2.193.282 wajib KTP.

**k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan untuk menuju kesetaraan gender.

Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya

Pada tahun 2014 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.112 orang dari 566.649 orang atau sebesar 1,78 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10.525 orang dari 559.357



orang atau sebesar 1,88 persen dari keseluruhan pekerja perempuan yang ada di Surabaya. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Surabaya  
Tahun 2014 –2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pekerja Perempuan	566.649	559.357
2	Jumlah Perempuan yang Bekerja di Pemerintah Kota Surabaya	10.112	10.525
3	% partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kota	1,78	1,88

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2016

#### Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Dibandingkan dengan laki-laki, tingkat partisipasi perempuan cenderung lebih rendah, tidak hanya karena peran ganda mereka dalam rumah tangga tetapi juga berkaitan dengan komitmen perempuan dalam angkatan kerja selama kehidupannya. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2014 sebanyak 599.414 orang dan yang bekerja sebanyak 566.649 orang atau sebesar 94,53 persen dari angkatan kerja perempuan, pada tahun 2015 jumlah angkatan kerja sebanyak 585.114 orang dan yang bekerja sebanyak 559.357 orang atau sebesar 95,59 persen dari angkatan kerja perempuan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.42

Tabel 2.42  
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	599.414	585.144
2	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	566.649	559.357
3	% partisipasi angkatan kerja perempuan	94,53	95,59

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja, 2016

### Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.43 di bawah ini.

Tabel 2.43  
KDRT Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Rumah Tangga	846.472	896.967
2	Jumlah KDRT	70	41
3	Rasio KDRT	0,008	0,005

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, 2016

Jumlah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 sebanyak 70 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 41 kasus. Pemerintah Kota Surabaya telah mampu melakukan fasilitasi terhadap semua kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan atas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut dilakukan dengan tindakan konseling, medis berupa rujukan ke pusat pelayanan terpadu/rumah sakit, hukum berupa konsultasi hukum serta pendampingan ke Polisi, Pengadilan Agama (PA) maupun Pengadilan Negeri (PN), Psikososial meliputi identifikasi kasus, konseling, home visit, out reach, sosialisasi serta reintegrasi (pelatihan ketrampilan) dan pemberdayaan (bimbingan rohani, pemberian ketrampilan serta pendampingan pemulangan dan *shelter* (Rumah Aman).

### Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat digambarkan dalam indikator jumlah penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *Trafficking* (perdagangan

orang), untuk rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44  
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak  
dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak	219	287
2	Jumlah Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terselesaikan	219	287
3	% penyelesaian pengaduan	100	100

Sumber : Bapemas dan KB kota Surabaya, 2016

Jumlah pengaduan kasus KDRT, non KDRT dan *trafficking* terhadap perempuan dan anak pada tahun 2014 sebanyak 219 kasus dan pada tahun 2015 sebanyak 287 kasus, semua pengaduan kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga terselesaikan seluruhnya.

#### I. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dilakukan melalui pengendalian angka kelahiran. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Surabaya telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB.

##### Jumlah Akseptor KB

Jumlah akseptor KB pada tahun 2014 sebanyak 62.205 atau sebesar 12,91 persen dari jumlah PUS 481.687 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 53.989 akseptor KB atau sebesar 10,62 persen dari 508.380 PUS. Akseptor KB dimaksud merupakan akseptor KB baru yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang pertama kali menggunakan alat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah mengalami keguguran/melahirkan. Selengkapnya untuk rekap data pasangan usia subur dan jumlah akseptor KB dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45  
Rasio Akseptor KB Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380
2	Jumlah Akseptor KB	62.205	53.989
3	Rasio Akseptor KB (%)	12,91	10,62

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2016

#### Jumlah Cakupan Peserta KB Aktif

Jumlah peserta KB Aktif pada tahun 2014 sebanyak 392.206 atau sebesar 81,42 persen dari 481.687 Pasangan Usia Subur (PUS), dan pada tahun 2015, jumlah peserta KB Aktif tahun 2015 sebanyak 407.724 atau sebesar 80,20 persen dari 508.380 Pasangan Usia Subur (PUS). Terjadinya penurunan peserta program KB aktif tidak dapat dilepaskan dari angka *Drop Out* peserta KB jenis Pil, Suntik dan Kondom. Selengkapnya untuk rekap data jumlah pasangan usia subur dan jumlah peserta program KB aktif dapat dilihat pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46  
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pasangan Usia Subur	481.687	508.380
2	Jumlah Peserta Program KB Aktif	392.206	407.724
3	Cakupan Peserta KB Aktif	81,42	80,20

Sumber : Bapemas dan KB Kota Surabaya, tahun 2016

#### Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah memiliki angka kelahiran total yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan lebih tinggi. Upaya Pemerintah Kota mengendalikan laju pertumbuhan penduduk memberikan prioritas kepada kelompok masyarakat miskin dengan cara menurunkan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penyediaan pelayanan KB gratis bagi masyarakat yang berasal dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I). Selain itu, secara mikro kegiatan tersebut juga bertujuan

meningkatkan kualitas keluarga dengan kecilnya jumlah anggota suatu keluarga maka keluarga tersebut diharapkan dapat meningkatkan gizi makanan, tingkat kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal yaitu 1) melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; 2) pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih; 3) seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian; 4) bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah; 5) bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan.

Pada tahun 2014 jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 193.550 atau 27,18 persen dari 712.172 keluarga. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tahun 2015 masih dalam proses pendataan.

#### **m. Sosial**

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan kejadian bencana. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, PMKS terdiri dari 26 jenis yaitu abak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengannhukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan

perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas narapidana, orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan napza, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran yang bermasalah sosial, korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

#### PMKS yang Memperoleh Bantuan dan yang Ditangani

Pada tahun 2014 jumlah PMKS terdata sebanyak 47.199 orang dan yang ditangani sebanyak 27.652 orang. Sedangkan, selama tahun 2015 jumlah PMKS terdata sebanyak 49.881 orang dan yang ditangani sebanyak 28.907 orang. Adapun penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanaan, dan pelayanan di 5 (lima) Liponsos di bawah UPTD Dinas Sosialis . Data PMKS yang ditangani dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47  
Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah PMKS yang ada	41.805	42.236	44.597	47.199	49.881
2	Jumlah PMKS yang ditangani	33.937	16.241	17.718	27.652	28.907
3	Persentase PMKS yang ditangani (%)	81,18	38,45	39,73	58,59	57,95

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2016

#### n. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Surabaya menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Peningkatan jumlah kesempatan kerja yang tercipta turut mendukung kondisi tersebut. Hal ini ditandai dengan peningkatan angka partisipasi angkatan kerja.

### Angka Partisipasi Kerja

Dari tabel 2.49 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 1.465.502 menjadi 1.468.094 pada tahun 2015.

Tabel 2.48  
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Angkatan Kerja 15 Tahun Keatas	1.465.502	1.468.094
2	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	2.201.854	2.334.871
3	Rasio angkatan kerja	0,66	0,62

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

### Sengketa Pengusaha dan Pekerja

Jumlah perusahaan di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari sebanyak 12.690 perusahaan di tahun 2014 menjadi 12.782 perusahaan pada tahun 2015. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan tersebut di Kota Surabaya ternyata tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah sengketa antara pekerja dan pengusaha. Pada tahun 2014 terdapat 366 kasus sengketa pengusaha dengan pekerja dan pada tahun 2015 jumlah sengketa pekerja pengusaha sebanyak 244. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara pekerja dengan pengusaha antara lain adanya pengaduan terkait masalah jamsostek, masalah upah pekerja, dan sistem kontrak kerja waktu tertentu. Secara rinci rekap data sengketa pekerja-pengusaha dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49  
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Sengketa Pekerja Pengusaha	366	244
2	Jumlah Perusahaan	12.690	12.782
3	Rasio sengketa	2,88	1,91

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2016

### Tingkat Pengangguran Terbuka

Banyaknya perusahaan yang ada di Surabaya diikuti dengan persaingan pencari kerja. Dari pencari kerja tersebut ada yang sudah ditempatkan dan ada yang masih mencari atau pengangguran terbuka. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Surabaya antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*) dan faktor pemutusan hubungan kerja.

Angka pengangguran terbuka di tahun 2014 sebesar 5,82 persen dan tahun 2015 sebesar 7,01 persen. Berikut adalah rekap data tentang tingkat pengangguran terbuka Tahun 2014 - 2015 disajikan pada Tabel 2.50.

Tabel 2.50  
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya  
Tahun 2014 -2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja	85.345	102.914
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	1.465.502	1.468.094
3	% pengangguran terbuka	5,82	7,01

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2016

### Pencari Kerja yang Ditempatkan dan Difasilitasi

Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel 2.51.



Tabel 2.51  
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.902	5.225
2	Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	12.307	85.345

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa program kegiatan pelatihan ketrampilan kerja, pemagangan, bimbingan *softskill*, bursa kerja, dan sebagainya tersebut sangat membantu pengurangan angka pengangguran terbuka di Kota Surabaya.

Pada tahun 2014 pencari kerja yang difasilitasi sebanyak 3.902 orang, sedangkan pada 2015 jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan berjumlah 5.225 orang.

#### Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Keselamatan dan perlindungan Tenaga Kerja merupakan aspek yang penting dalam masalah pekerjaan. Dengan adanya keselamatan dan perlindungan tenaga kerja atau K3, dapat memberikan dampak banyaknya masyarakat yang berkerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka. Secara rinci rekap data presentase perusahaan yang menerapkan K3 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52  
Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  
Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	3.242	3.303
2	Jumlah Perusahaan	12.476	12.782
3	Persentase Perusahaan yang Menerapkan K3 (%)	25,98	25,84

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2016

Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada tahun 2014 sebanyak 3.242 perusahaan dari 12.476 perusahaan atau sebesar 25,98 persen, sedangkan pada tahun 2015 perusahaan yang menerapkan sistem K3 terdapat 3.303 perusahaan dari 12.782 perusahaan yang ada di Surabaya, yaitu sebesar 25,84 persen.

#### **o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian, Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro.

#### **Koperasi**

Pada tahun 2014 jumlah koperasi aktif mencapai 82,90 persen atau sebanyak 1.357 unit dari 1.637 total jumlah koperasi sedangkan sampai dengan tahun 2015 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.403 unit atau sebesar 84,06 persen dari jumlah total koperasi yang ada sebanyak 1.669 unit. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53  
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
1	Jumlah koperasi	1.637	1.669
2	Jumlah koperasi aktif	1.357	1.403
3	% koperasi aktif	82,90	84,06

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2016

#### **UMKM**

Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat dasar perekonomian juga ditunjukkan dengan peningkatan jumlah UMKM. Pada tahun 2014 jumlah UMKM di Kota Surabaya tercatat sebanyak 28.759 UMKM yang terdiri dari 18.921 Usaha Mikro, 7.116 Usaha Kecil dan 2.722 Usaha Menengah. Sampai tahun 2015 tercatat sebanyak 29.507 UMKM yang terdiri dari 19.650 Usaha Mikro, 7.150 Usaha Kecil dan 2.707 Usaha

Menengah. Secara rinci rekap data presentase usaha mikro dan kecil Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54  
Persentase Usaha Mikro dan Kecil  
Kota Surabaya Tahun 2014 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah seluruh UMKM	28.759	29.507
2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	26.037	26.800
3	%Usaha Mikro dan Kecil	90,54	90,83

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2016

#### p. Penanaman Modal

Pengaruh penanaman modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah dapat di lihat melalui *multiplier effect* yang di timbulkannya. *Multiplier effect* atau efek pengganda dari investasi dipengaruhi oleh besarnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi.

#### PMA dan PMDN

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini tabel realisasi penanaman modal langsung PMDN dan PMA di Kota Surabaya. Jumlah proyek PMDN dan PMA kota Surabaya selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.55 di bawah ini.

Tabel 2.55  
Jumlah Proyek PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Proyek PMDN	9	8
2	Jumlah Proyek PMA	24	13
3	Total	33	21

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan penanaman Modal, 2016

Pada tahun 2014 jumlah investasi PMA dan PMDN sebanyak 33 proyek, dan sampai dengan tahun 2015 tercatat sejumlah 21 proyek PMA dan PMDN yang berinvestasi.

### Jumlah Investasi PMA dan PMDN

Kegiatan perekonomian baik yang di lakukan lewat Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mampu memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Surabaya. Laporan realisasi Penanaman Modal di Surabaya merupakan potret atas aktifitas penanaman modal berdasarkan persetujuan perijinan baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel 2.56  
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Persetujuan		
1.1	Jumlah Proyek	76	83
1.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.653,75	3.658,70
	(USD Juta)	184,17	100,44
2	Realisasi		
2.1	Jumlah Proyek	33	21
2.2	Nilai Investasi (Rp Milyar)	639,63	828,42
	(USD Juta)	45,29	14,67

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Pada tahun 2014 nilai realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar 639,63 milyar rupiah dan 45,29 juta USD. Sampai dengan 2015 dari nilai realisasi investasi PMA dan PMDN di kota Surabaya mengalami peningkatan menjadi 828,42 milyar rupiah yang diperoleh dari investasi 21 unit PMA dan PMDN. Investasi / penanaman modal langsung (*direct invesment*) berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru.

### Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Adanya investasi PMA dan PMDN di Kota Surabaya menimbulkan dampak positif terhadap tingkat tenaga kerja di Surabaya. Peningkatan nilai dan proyek investasi PMA dan PMDN berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru yang mana berkaitan dengan daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung, dimana rekap tabel dapat dilihat pada Tabel 2.57 di bawah ini.

Tabel 2.57  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah PMA/PMDN	33	21
2	Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Perusahaan PMA/PMDN	2.171	1.223
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	94,39	58,24

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN, pada tahun 2014 terdapat 33 proyek realisasi PMA dan PMDN dengan jumlah tenaga kerja terserap 2.171 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 94,39. Sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi proyek PMA dan PMDN sebanyak 21 proyek dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.223 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 58,24.

#### q. Kebudayaan

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka mendukung bidang kepariwisataan banyak mengadakan kegiatan festival seni dan budaya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kota maupun pihak swasta.

##### Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Pada tahun 2014 sebanyak 449 festival seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Surabaya, sedangkan tahun 2015 sebanyak 613 festival seni dan budaya. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman – seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya, dimana untuk rekap penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel 2.58 di bawah ini.

Tabel 2.58  
 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya  
 Tahun 2014- 2015

Tahun	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2014	449
2015	613

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

#### Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung / tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian / berekspresi. Pada tahun 2014 terdapat 18 sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Surabaya, dan sampai dengan tahun 2015 terdapat 17 sarana penyelenggaraan seni dan budaya karena 1 gedung sedang di renovasi yaitu gedung merah putih. Adapun 17 sarana penyelenggaraan seni dan budaya tersebut adalah:

1. Gedung Pringgodani di UPTD THR
2. Gedung Srimulat di UPTD THR
3. Gedung Ludruk di UPTD THR
4. Gedung serbaguna di UPTD THR
5. Pendopo di UPTD THR
6. Teater terbuka di UPTD THR
7. Lapangan di UPTD THR
8. Panggung musik di UPTD Kenjeran
9. Pendopo agung di UPTD Kenjeran
10. Lapangan di UPTD Kenjeran
11. Gedung Balai Budaya
12. Gedung Balai Pemuda Barat
13. Halaman Balai Pemuda
14. Pendopo gedung GNI
15. Gedung serbaguna di UPTD Ampel
16. Lapangan di Tugu Pahlawan
17. Auditorium di Museum 10 Nopember 1945

Tabel 2.59  
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
2014	18
2015	17

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

### Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2014 sebanyak 257 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 sebanyak 266.

Pada tahun 2014 dan 2015, seluruh benda, situs dan kawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya dilindungi dan dilestarikan, di mana 257 Benda, Situs dan Kawasan pada tahun 2014 dan 266 benda, situs dan kawasan pada tahun 2015 dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Berikut ini adalah rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel 2.60 di bawah ini

Tabel 2.60  
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan  
Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	257	266
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	257	266
3	% pelestarian	100	100

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

#### r. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Dalam pembinaan kegiatan kepemudaan sangat memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana baik bersifat outdoor maupun indoor antara lain seperti gelanggang/balai remaja yang sangat dibutuhkan sebagai pusat kegiatan-kegiatan aktif remaja dan pemuda di perkotaan. Salah satu yang masih dimiliki Pemerintah Kota Surabaya adalah Gedung Gelanggang Remaja di Kecamatan Tambaksari, yang termasuk dalam Kawasan Kompleks Olahraga Gelora 10 Nopember. Gelanggang Remaja masih aktif digunakan untuk kegiatan olahraga, kesenian, dan sosial kemasyarakatan lainnya. Selain itu juga terdapat sekitar 116 gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) yang tersebar di lingkungan permukiman, kawasan militer, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, KONI, maupun Pemerintah Provinsi yang dapat digunakan warga dan masyarakat umum Kota Surabaya, sehingga rasio Gelanggang/Balai Remaja 0,547 dan pada tahun 2015 sebesar 0,44.

Tabel 2.61  
Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) Kota Surabaya  
Tahun 2014 – Tahun 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia Remaja (15-20 tahun)	212.152	261.248
2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	116	116
3	Rasio Gelanggang/Balai Remaja	0,547	0,44

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2016

Pencapaian prestasi cabang olahraga tidak lepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang sesuai dengan standar. Prasarana olahragamilik Pemerintah Kota Surabaya yang bersifat terbuka (lapangan olahraga) maupun tertutup (gelanggang olahraga) yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya diantaranya adalah Lapangan THOR, Lapangan Softball, Lapangan Hockey, Gelora 10 Nopember, Gelora Bung Tomo dan pada tahun 2015 telah dibangun sebanyak 67 lapangan olahraga. Selain itu terdapat juga Lapangan maupun Gelanggang milik instansi lain (selain milik swasta) yang tersebar pada lingkungan perumahan, perguruan tinggi, pendidikan kedinasan, kawasan militer, KONI dan Pemerintah Provinsi



yaitu sebanyak 557 lapangan pada tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2015 jumlah lapangan olahraga di Kota Surabaya meningkat menjadi 624 lapangan olahraga. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62  
Lapangan Olahraga di Kota Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.902.736
2	Jumlah Lapangan Olahraga	557	624
3	Rasio Lapangan Olahraga	0,195	0,215

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil dan Dinas Pemuda & Olahraga, 2016

#### s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sesuai dengan ketentuan umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) merupakan bagian dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka setiap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Ormas yang tidak berbadan hukum dan memenuhi persyaratan akan mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari lembaga yang berwenang, sedangkan bagi Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili. Untuk Ormas yang

berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2014 jumlah Ormas terdaftar dan aktif sebanyak 146 Ormas. Jumlah ini meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 151 Ormas terdaftar dan aktif. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.63 berikut.

Tabel 2.63  
Jumlah Ormas Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Ormas Aktif	146	151
2	Jumlah Ormas Tidak Aktif	-	-
3	Jumlah Ormas Terdaftar	146	151

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Pemerintah Kota Surabaya melakukan pembinaan/pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas. Dalam melakukan pemberdayaan Ormas, Pemerintah Kota Surabaya menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut.

Tabel 2.64  
Kegiatan Pembinaan terhadap Ormas Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas	3	2

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Disamping melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Politik. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan politik bagi masyarakat khususnya anggota organisasi politik. Untuk rincian dapat dilihat pada Tabel 2.65 berikut.

Tabel 2.65  
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	2	2

Sumber : Bakesbangpol dan Linmas 2016

**t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

**Penegakan Perda**

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Anggota Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 497 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 jiwa maka rasio jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 1,74 orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2015 jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 532 orang, maka rasio jumlah tenaga Polisi Pamong Praja per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 1,80 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel 2.66 berikut.

Tabel 2.66  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	497	532
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	1,74	1,80

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya memberikan ketentuan bahwa Satpol PP bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Salah satu upaya untuk melaksanakan tugas tersebut melalui patroli dalam rangka pemantauan dan penertiban pelanggaran perda/K3.

Pada tahun 2014 jumlah patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 yaitu sejumlah 147 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya, dan padatahun 2015 jumlah patroli dilaksanaka dengan frekuensi yang sama, yaitu 147 kali patroli dalam 24 jam/setiap harinya. Untuk rincian dapat dilihat pada tabel 2.67 berikut.

Tabel 2.67  
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

Tahun	Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3
2014	147 kali
2015	147 Kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Tabel 2.68  
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	84,382	72,218
2	Jumlah Pelanggaran K3	84,382	72,218
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja 2016

Anggota Linmas di kota Surabaya pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 35.556 orang. Dengan jumlah penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 2.853.661 jiwa maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 124,6 orang. Sedangkan sampai dengan 2015 jumlah linmas adalah sebanyak 36.969 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebesar 125,59 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 jiwa.

Tabel 2.69  
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Linmas	35.556	36.969
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528
3	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	124,60	125,59

Sumber: Bakesbangpol dan Linmas 2016

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk Kota Surabaya dari tahun ke tahun maka perlu peningkatan kemampuan tenaga Linmas. Peningkatan kemampuan Linmas dilakukan setiap tahun salah satunya adalah pelatihan tentang penanggulangan bencana, sehingga bila sewaktu-waktu terjadi bencana dapat melakukan tindakan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

#### Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2015 tumbuh sebesar 6,02 persen yang tumbuh sedikit melambat dibandingkan tahun 2014. Perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015 dipengaruhi oleh tekanan-tekanan baik dari ketidakstabilan perekonomian nasional maupun perekonomian global. Sistem ekonomi Kota Surabaya yang menganut sistem *small open economy* sehingga interaksi dengan negara lain tentu saja akan mempengaruhi perekonomian domestik. Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan tentunya berimbas kepada perekonomian Kota Surabaya khususnya terhadap kinerja ekspor impor. Meskipun demikian, tingginya daya beli masyarakat Kota Surabaya mampu menstimulus kinerja ekonomi pada aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Industri Pengolahan seiring meningkatnya permintaan barang dan jasa.

Tabel 2.70  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	PDRB (n)	351.509.065,03	407.703.251,80
2	PDRB (n-1)	305.689.586,81	365.073.140,32
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,02	6,02

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

#### Pelayanan Publik

Selama tahun 2014, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pembangunan sebanyak 5 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan guna mendukung kinerja pemerintah kota Surabaya. Adapun sampai dengan

tahun 2015 Pemerintah Kota telah membangun 5 sistem informasi pelayanan perijinan dan 5 sistem informasi pelayanan non perijinan.

Tabel 2.71  
Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Online Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan	5	5
2	Sistem Informasi Pelayanan Non Perijinan	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. IKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Surabaya disajikan pada tabel 2.72 berikut.

Tabel 2.72  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – 2016

Uraian	2014	2015	2016
Survey IKM	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, 2016

Penyusunan IKM mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan BPS, diperoleh 18 (delapan belas) unsur yang menjadi acuan pengukuran IKM. Kedelapan belas unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kepastian petugas pelayanan;
2. Kedisiplinan petugas pelayanan;
3. Tanggung jawab petugas pelayanan;
4. Kemampuan petugas pelayanan;

5. Kecepatan pelayanan;
6. Keadilan mendapatkan pelayanan;
7. Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan;
8. Kesesuaian waktu pelayanan;
9. Kenyamanan lingkungan pelayanan;
- 10.Keamanan pelayanan;
- 11.Kemudahan informasi prosedur pelayanan;
- 12.Kecepatan penanganan pengaduan masyarakat;
- 13.Prosedur pelayanan;
- 14.Kesesuaian biaya pelayanan;
- 15.Kewajaran biaya pelayanan;
- 16.Kesesuaian persyaratan dengan jenis layanan;
- 17.Ketersediaan dan kelengkapan prasarana dan sarana pelayanan;
- 18.Transparansi biaya pelayanan

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan dengan nilai interval 25-43,75 masuk kategori tidak baik, nilai interval 43,76-62,50 masuk kategori kurang baik, nilai interval 62,51-81,25 masuk kategori baik dan nilai interval 81,26-100 masuk kategori sangat baik. Survey IKM tahun 2014 dilaksanakan pada 31 Kecamatan, 62 Puskesmas dan 22 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kecamatan sejumlah 24 Kecamatan masuk kategori baik dan 7 Kecamatan masuk kategori sangat baik serta untuk Puskesmas sejumlah 59 Puskesmas masuk kategori baik dan 3 Puskesmas masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 22 Dinas/Lembaga Teknis/BUMD di Kota Surabaya masuk dalam kategori baik.

Pada tahun 2014 terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik sehingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku. Substansi materi Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, terdapat 9 unsur, yakni:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan, pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan



Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

#### 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2015 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Survey IKM tahun 2015 dilaksanakan pada 31 Kelurahan, 31 Kecamatan, 62 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya. Dari survey tersebut diperoleh hasil untuk Kelurahan sejumlah 25 Kelurahan masuk kategori baik dan 6 Kelurahan masuk kategori sangat baik, serta untuk Kecamatan sejumlah 26 Kecamatan masuk kategori baik dan 5 Kecamatan masuk kategori sangat baik. Sedangkan untuk 62 Puskesmas dan 1 Laboratorium Kesehatan, keseluruhannya masuk kategori baik.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2016 masih dalam tahap survey sehingga hasilnya akan diketahui pada bulan September 2016. Terdapat penambahan sasaran penyelenggara pelayanan publik sehingga mencakup 154 Kelurahan, 31 Kecamatan, 62 Puskesmas, 2 Rumah Sakit, 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2 UPTSA dan 1 Laboratorium Kesehatan di Kota Surabaya.

Salah satu pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani bencana kebakaran yakni cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Surabaya. Cakupan tersebut diukur dari persentase jumlah mobil pemadam kebakaran terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2014, persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,0019 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 orang, dan sampai dengan tahun 2015 persentase jumlah mobil pemadam kebakaran adalah 0,002 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 2.943.528 orang sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.73  
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran	57	60
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	0,0019	0,0020

Sumber : Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2016

Sepanjang tahun 2014 tercatat telah terjadi 596 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya  $\leq 15$  menit setelah pengaduan sebanyak 536 kejadian. Pada tahun 2015, dari 608 kejadian kebakaran yang tercatat, 604 kejadian di antaranya dengan waktu tanggap  $\leq 15$  menit sebagaimana tabel 2.74 dan tabel 2.75.

Tabel 2.74  
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) $\leq 15$ menit	536	604
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	596	608

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Surabaya, 2016

Tabel 2.75  
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	19	20
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528

Sumber: Dinas Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2016

#### Aparatur dan Pemerintahan

Salah satu unsur yang menandai pelaksanaan *good governance* adalah aparatur pemerintahan yang bersih, disiplin serta bertanggung jawab. Pada tahun 2014 orang aparatur yang mendapatkan sanksi sebanyak 27 orang aparatur dan pada tahun 2015 terdapat 27 orang aparatur yang mendapat sanksi pelanggaran disiplin aparatur pemerintah Kota Surabaya. Pelanggaran disiplin aparatur Pemerintah Kota Surabaya disebabkan karena banyak terjadi kasus baru dan penjatuhan sanksi kasus tahun 2013 di tahun

2014. Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.76  
Jumlah Sanksi Pelanggaran Disiplin Aparatur Pemerintah  
Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

JENIS SANKSI		Tahun	
		2014	2015
Hukuman Disiplin			
a.	Ringan :		
	Tegoran Lisan	0	3
	Tegoran Tertulis	0	0
	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	4	2
	Jumlah Disiplin Ringan	4	5
b.	Sedang :		
	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 (Satu) Tahun	1	1
	Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Kenaikan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun (PP.30 Tahun 1980)	0	0
	Penundaan Kenaikan Pangkat Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun	3	2
	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama 1 ( Satu ) Tahun	0	0
	Jumlah Disiplin Sedang	4	3
c.	Berat :		
	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	1	5
	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	0
	Pembebasan Dari Jabatan	2	4
	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	7	4
	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	2	3
	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	0	0
	Jumlah Disiplin Berat	12	16
	TOTAL PERTAHUN DISIPLIN	20	24
d	Pemberhentian Sementara (PP. No. 04 Tahun 1966)	7	2
e	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	1
f	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0
g	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0
h	Rehabilitasi	0	
	Jumlah	7	3
	TOTAL PERTAHUN	27	27

Sumber : Inspektorat, 2016

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan pembinaan dan sosialisasi tentang disiplin pegawai, disamping itu pemberian sanksi yang tegas (sampai dengan pemberhentian kerja) kepada pegawai yang melakukan tindakan-tindakan indisipliner merupakan langkah untuk memberikan *shock therapy* yang berimplikasi kepada seluruh pegawai.

#### u. Ketahanan Pangan

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 443.021.157 kg, dengan jumlah penduduk sebesar 2.853.661 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita sebesar 155,24 kg/kapita/th. Pada tahun 2015 jumlah ketersediaan pangan sebesar 404.158.210 kg, dengan jumlah penduduk sebesar 2.902.736 jiwa maka rata-rata ketersediaan pangan per kapita sebesar 139,23 kg/kapita/th.

Tabel 2.77  
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014	2015
1	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	443,021,157	404,158,210
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	2,853,661	2,902,736
3	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	155.24	139.23

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya dan Dispendukcapil, 2016

Tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2015 berdasarkan data dari Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya rata-rata sebesar 64,97 kg/kapita/th, sehingga rata-rata ketersediaan pangan masih dapat mencukupi tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya.

#### v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan

masyarakat. Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain; b) Lembaga Adat; c) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; d) RT/RW; e) Karang Taruna; f) Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah LKMK yaitu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. LKMK dibentuk di setiap kelurahan dan mempunyai tugas a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif; b) Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Jumlah lembaga LKMK di Kota Surabaya sebanyak 154 lembaga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang penggabungan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Tim Penggerak PKK Kelurahan di Pemerintah Kota Surabaya adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2.78  
Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kota Surabaya  
Tahun 2014–2015

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
1	Asemrowo	3	593	198	3	593	198
2	Benowo	4	734	184	4	734	184
3	Bubutan	5	1390	232	5	1390	232
4	Bulak	4	513	103	4	513	103
5	Dukuh Pakis	4	732	183	4	732	183
6	Gayungan	4	604	121	4	604	121
7	Genteng	5	1007	252	5	1007	252
8	Gubeng	6	1593	266	6	1593	266

No.	Kecamatan	2014			2015		
		Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah PKK	Jumlah Kelompok Binaan	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
9	Gunung Anyar	4	745	149	4	745	149
10	Jambangan	4	774	129	4	774	129
11	Karangpilang	4	1028	171	4	1028	171
12	Kenjeran	4	4970	1243	4	4970	1243
13	Krembangan	5	1168	292	5	1168	292
14	Lakarsantri	6	761	152	6	761	152
15	Mulyorejo	6	657	131	6	657	131
16	Pabean Cantian	5	1201	240	5	1201	240
17	Pakal	4	820	205	4	820	205
18	Rungkut	6	1474	211	6	1474	211
19	Sambikerep	4	587	147	4	587	147
20	Sawahan	6	3679	736	6	3679	736
21	Semampir	5	3974	662	5	3974	662
22	Simokerto	5	1230	308	5	1230	308
23	Sukolilo	7	1527	255	7	1527	255
24	Sukomanunggal	6	1119	280	6	1119	280
25	Tambaksari	8	2598	325	8	2598	325
26	Tandes	6	1347	269	6	1347	269
27	Tegalsari	5	1339	335	5	1339	335
28	Tenggilis Mejoyo	4	1285	214	4	1285	214
29	Wiyung	4	755	189	4	755	189
30	Wonocolo	5	1060	177	5	1060	177
31	Wonokromo	6	2856	714	6	2856	714
<b>Total</b>		<b>154</b>	<b>44.120</b>	<b>286</b>	<b>154</b>	<b>44.120</b>	<b>286</b>

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Jumlah PKK di Kota Surabaya sebanyak 44.120 atau rata-rata 286 dari jumlah PKK pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah kelompok binaan PKK di Kota Surabaya sebanyak 44.120 atau rata-rata 286 dari jumlah PKK.

Kelompok binaan PKK merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan meliputi PKK RW, PKK RT dan Dasa Wisma. Besarnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79  
Kelompok Binaan PKK Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah PKK	154	154
2	Jumlah Kelompok Binaan	44,12	44,12
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	286	286

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan salah satu program penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan keterampilan yang terdiri dari bidang usaha makanan dan minuman, handycraft, menjahit, pijat refleksi, dan aneka usaha seperti salon, tata rias, membatik, pembuatan pembersih rumah tangga. Pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sedangkan Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat adalah KSM yang aktif melakukan usaha ekonomi produktif.

Kepedulian Pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan dalam indikator jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif. Pada tahun 2014, jumlah keluarga miskin yang telah melakukan usaha ekonomi produktif sebanyak 1.655 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 1.725 orang telah melakukan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jenis usaha ekonomi produktif yang telah dilakukan terdiri dari bidang usaha *handycraft*, menjahit, makanan dan aneka produk rumah tangga, seperti pada tabel 2.80.

Tabel 2.80  
Keluarga Miskin Yang Melakukan Usaha Ekonomi Produktif di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Keluarga Miskin Yang Telah Melakukan Usaha Ekonomi Produktif	1655	1725

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

Pada tahun 2014 dan 2015, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 100 persen dari total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di tingkat dasar yang telah dibentuk, baik yang bersifat aktif maupun pasif dalam pengembangan hasil produknya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.81  
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat  
Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Total Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	431	95
2	Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dikembangkan dan Dipelihara Masyarakat	431	95
3	% Program Pemberdayaan Masyarakat	100	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, 2016

#### w. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Program yang dijalankan dalam penyelenggaraan kearsipan pemerintah daerah adalah program perbaikan sistem administrasi kearsipan, dengan indikatornya adalah persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku).

SKPD yang menerapkan arsip secara baku merupakan SKPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan keluar. Data pengelolaan arsip secara baku selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.83.



Tabel 2.82  
Pengelolaan Arsip Secara Baku Kota Surabaya Tahun 2014 –2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	193	226
2	Jumlah SKPD	232	226
3	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	83	100

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2014 SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 193 SKPD atau 83 persen. Sedangkan tahun 2015 dari 226 SKPD yang ada (sesuai Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014) telah menerapkan arsip secara baku. Berikut ini adalah tabel 2.84 tentang peningkatan SDM pengelola kearsipan Kota Surabaya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 2.83  
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kota Surabaya  
Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	3	3

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Pada tahun 2014, kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan melalui pendampingan dan evaluasi serta lomba teknis sistem tata kearsipan pola baru. Pendampingan dan monitoring dilakukan dengan penerapan penggunaan sistem pola baru yang akan dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan kegiatan tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2015.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kearsipan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih predikat. Juara I Lomba Kearsipan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur untuk

Kelurahan Karah, serta meraih predikat Juara Pertama Lomba Kearsipan Daerah Kota Teladan Tingkat Nasional Tahun 2013.

#### x. Komunikasi dan Informatika

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 untuk mendukung Komunikasi di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemeliharaan terhadap tower sebanyak 90 Unit dengan rincian tower dengan ketinggian 12 meter sebanyak 21 unit, 16 meter sebanyak 10 unit, 20 meter sebanyak 24 unit, 24 meter sebanyak 7 unit, 30 meter sebanyak 13 unit, 40 meter sebanyak 14 unit, dan 105 meter sebanyak 1 unit.

Tabel 2.84  
Jaringan Komunikasi Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

Uraian	2014	2015
Menara (Tower) (unit)	91	90

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

Pemerintah Kota Surabaya memiliki situs resmi yang dapat diakses pada alamat <http://www.surabaya.go.id>. Selain halaman utama, juga terdapat Terdapat 26 sub domain dalam website tersebut yang dikelola oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 2.85  
Website Milik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

Uraian	2014	2015
Website Milik Pemerintah Kota	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2016

#### y. Perpustakaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009, perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya dalam mengembangkan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan dan TBM, menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Kecamatan, Kelurahan, RW, Rumah Sakit, Taman, Dinas, Rusun, Liponsos dan Terminal serta menyediakan layanan TBM yaitu perpustakaan keliling.

Tabel 2.86  
Jumlah Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Perpustakaan Milik Pemda	2	2
2	Perpustakaan Milik Non Pemda	59	59
3	Total	61	61

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Berdasarkan data pada tabel 2.88, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 jumlah perpustakaan milik Pemda dan Perpustakaan milik Non Pemda tetap sebanyak 61 unit.

Jumlah pengunjung perpustakaan daerah setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 3.243.366 orang, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 4.711.419 orang.

Tabel 2.87  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2015

Uraian	2014	2015
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Milik Pemkot	3.243.366	4,711,419

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

Pada tahun 2014, penambahan jumlah koleksi buku baru sebanyak 141.716 buku dan penambahan jumlah koleksi judul buku baru sebanyak 6.843 judul buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 20 buku. Pada tahun 2015 terdapat penambahan koleksi buku baru sebanyak 74.488 buku dengan penambahan koleksi judul buku baru sebanyak 6.230 judul buku. Rata-rata 1 koleksi judul buku tersedia sebanyak 11 buku.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghargaan yaitu Perpustakaan Kelurahan Pagesangan Kecamatan

Jambangan meraih predikat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, dan Perpustakaan Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut meraih predikat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

Tabel 2.88  
Penambahan Koleksi Buku Baru di Perpustakaan Daerah Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Penambahan Koleksi Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	141,716	74,488
2	Jumlah Penambahan Koleksi Judul Buku Baru yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	6,843	6,230
3	Rasio Koleksi Judul Buku	0.05	0.08

Sumber: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2016

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Penganalisisan gambaran umum kondisi daerah dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan:

#### a. Pertanian

Kontribusi kategori pertanian/perkebunan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surabaya cenderung tetap, hal ini dapat dilihat pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,18 persen dan pada tahun 2015 kontribusi kategori pertanian tercatat sebesar 0,18 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku. Selengkapnya untuk rekap tabel Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel 2.89.

Tabel 2.89  
Kontribusi Kategori Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB Kota  
Surabaya Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dari Kategori Pertanian/Perkebunan (Juta Rp)	671.564,30	750.070,80
2.	Jumlah PDRB (Juta Rp)	365.073.140,3	407.7.03.251,8
3.	Kontribusi Kategori Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB (%)	0,18	0,18

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Pada tabel 2.90, kontribusi sektor pertanian terhadap jumlah total produksi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah total produksi sektor pertanian/perkebunan Kota Surabaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap jumlah total produksi sektor pertanian/perkebunan sebesar 3,24 persen, sedangkan pada tahun 2015 kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap total produksi sektor pertanian/perkebunan tercatat sebesar 6,54 persen.

Tabel 2.90  
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Produksi Sektor Pertanian (Palawija) (ton)	501,90	1.052,19
2.	Jumlah Total Produksi Sektor Pertanian/Perkebunan (ton)	15.492,93	16.309,86
3.	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) (%)	3,24	6,45

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

Pelaksanaan program nasional yaitu upaya khusus swasembada pangan, dengan mengoptimalkan lahan pertanian melalui penerapan teknologi jajar legowo, memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal yang dihasilkan di Kota Surabaya. Produktivitas tanaman padi meningkat dari 5,59 ton/hektar pada tahun 2014 menjadi 6,35 ton per hektar di tahun 2015. Sedangkan luas areal tanam padi yang meingkat disebabkan adanya perubahan pola tanam yang semula 1 kali tanam dalam setahun, ada yang menjadi 2 kali tanam dalam setahun.

Tabel 2.91  
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar  
Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ton)	9.424,51	11.177,96
2.	Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	1.687,00	1.760,31
3.	Produktivitas (ton/ha)	5,59	6,35

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

Produksi hasil pertanian mulai dari padi, jagung, lombok, sayur sebagian besar mengalami kenaikan, kecuali produksi buah yang mengalami penurunan. Produksi padi mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 9.424,51 ton menjadi 11.177,96 ton pada tahun 2015. Produksi jagung, lombok dan sayur pada tahun 2014 secara berurutan sebesar 366,43 ton; 115,43 ton dan 566,37 ton; produksi ketiganya mengalami peningkatan pada tahun 2015 secara berurutan menjadi 948,79 ton; 299 ton dan 584,81 ton. Produksi buah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 5.020,19 ton menjadi 3.299,30 ton pada tahun 2015 Rincian jumlah produksi hasil pertanian dapat dilihat pada tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92  
Produksi Hasil Pertanian Menurut Jenis Komoditi Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Produksi Padi (ton)	9.424,51	11.177,96
2.	Jumlah Produksi Jagung (ton)	366,43	948,79
3.	Jumlah Produksi Lombok (ton)	115,43	299,00
4.	Jumlah Produksi Sayur (ton)	566,37	584,81
5.	Jumlah Produksi Buah (ton)	5.020,19	3.299,30

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya, 2016

#### b. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi pasal 25 menyatakan bahwa konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat, mencakup seluruh tahap pengelolaan energi. Dalam undang-undang ini juga disebutkan dalam pasal 21 bahwa Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Listrik.

Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi bentuk energi lain. Energi listrik adalah produk konversi energi dari energi lain seperti energi kinetik air terjun, energi uap/panas bumi, energi

minyak diesel, energi batubara dan lain sebagainya. Yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana mendapatkan energi listrik yang murah, bersih, aman dan dapat terbarukan. Minyak, batubara termasuk energi yang tidak terbarukan karena sumber energi ini terbatas dan suatu saat akan habis. Energi matahari misalnya dikonversi dengan solar cell, disimpan kedalam baterai penyimpan dan inverter DC/AC serta disebut sebagai energi terbarukan karena sumbernya melimpah dan selalu tersedia.

Sedangkan penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien dimana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan. Masyarakat dapat menghemat biaya dengan melakukan penghematan energi, sedangkan pengguna komersial dan industri dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan dengan melakukan penghematan energi.

Saat ini Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan upaya konversi dan konservasi energi. Upaya konversi energi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan pemasangan solar sel pada lampu PJU dan gedung-gedung sekolah, pembangunan kincir angin dan biogas sampah. Konservasi energi dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengadakan audit energi di beberapa sektor kegiatan/ usaha yang ada di Kota Surabaya. Dengan adanya audit energi dan pendampingan diharapkan akan diketahui konsumsi energi dan rekomendasi terkait penghematan energi. Pada tahun 2015 telah dibangun 4 unit kincir angin di THP Kenjeran. Audit energi telah dilakukan sejak tahun 2013, dan pada tabel 2.93 disajikan Audit energi yang dilaksanakan pada tahun 2014-2015.

Tabel 2.93  
Pelaksanaan Audit Energi pada Kegiatan/ Usaha  
Tahun 2014 - 2015

Tahun	Audit Energi	Keterangan
2014	Rumah Sakit	Audit awal energi 3 Rumah Sakit, audit rinci energi 1 rumah sakit
2015	Hotel	Audit awal energi 52 Hotel, audit rinci energi 9 Hotel
	Mall	Audit awal energi 1 Mall
	Kantor	Audit awal energi 5 kantor
	Kantor Pemerintahan	Audit awal energi 21 Kantor Pemerintahan
	Puskesmas	Audit awal energi 62 Puskesmas
	Industri	Audit awal energi 16 Industri

Sumber: Badan Lingkungan Hidup, 2016

### c. Pariwisata

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan dan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya. Jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata sebagaimana tertera pada tabel 2.97 hanya memperhitungkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada 20 obyek wisata yang ada di kota Surabaya, belum memperhitungkan wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata kuliner, lapangan golf, mall, maupun obyek wisata lainnya seperti hutan mangrove, museum Bank Indonesia, rumah pahlawan, dsb.

Dari data pada tabel 2.97 dapat dilihat bahwa kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata tersebut pada tahun 2014 sebanyak 5.583.822 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 6.034.129 orang dengan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah kawasan wisata religi Ampel.

Semakin berkembangnya sektor pariwisata di kota Surabaya berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.94 mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke Kota Surabaya.



Tabel 2.94  
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara ke Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	742.084	638.583
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	15.929.745	15.099.061
Jumlah		16.671.829	15.737.644

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016

Tabel 2.95  
Obyek Kunjungan Wisata Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014		2015	
		Jumlah Kunjungan	(%)	Jumlah Kunjungan	(%)
1	THP Kenjeran	526.617	9,43	493.191	0,082
2	Kenjeran Park	670.529	12,01	715.690	0,119
3	Taman Prestasi	32.872	0,59	31.553	0,005
4	Taman Hiburan Rakyat	15.359	0,28	16.960	0,003
5	Taman Remaja Surabaya	382.276	6,85	354.230	0,059
6	Monumen Tugu Pahlawan	166.565	2,98	223.463	0,037
7	Kawasan Wisata Religi Ampel	1.950.698	34,93	2.040.476	0,338
8	Masjid Al-Akbar	25.149	0,45	38.027	0,006
9	Masjid Cheng Ho	18.583	0,33	24.914	0,004
10	Kebun Binatang	1.121.246	20,08	1.148.465	0,190
11	Monumen Kapal Selam	18.286	0,33	181.032	0,030
12	Monumen Jalesveva Jayamahe	43.734	0,78	15.065	0,002
13	Loka Jala Srana	42.217	0,76	30.762	0,005
14	Makam WR. Soepratman	960	0,02	470	0,000
15	Makam DR. Soetomo	9.602	0,17	3.554	0,001
16	Patung Djoko Dolog	3.114	0,06	1.627	0,000
17	Balai Pemuda	80.241	1,44	264.875	0,044
18	House Of Sampoerna	176.710	3,16	194.700	0,032
19	Ciputra Water Park	283.722	5,08	233.388	0,039
20	Museum Kesehatan	15.342	0,27	21.687	0,004
	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata	5.583.822	100	6.034.129	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2016

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kota Surabaya berdampak pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar 14,85 persen atau sebesar Rp52.210.919,56 rupiah dari total PDRB sebesar Rp305.308.006,20 rupiah. Sedangkan pada tahun 2015 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya sebesar 15,30 persen atau sebesar Rp62.389.404,20 juta rupiah dari total PDRB sebesar Rp407.703.251,80 juta rupiah. Berikut adalah rekap tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Surabaya tahun 2014-2015.

Tabel 2.96  
Kontribusi Kategori Pariwisata Terhadap PDRB Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014*	2015**
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (Juta Rp)	52.210.919,56	62.389.404,20
2.	Jumlah PDRB (Juta Rp)	305.308.006,20	407.703.251,80
3.	Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata (%)	14,85	15,30

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2016

#### d. Kelautan dan Perikanan

Perubahan cuaca (anomali iklim) yang berakibat pada penurunan jumlah tangkapan sehingga terjadi penurunan produksi pada perikanan laut. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,04%. Pada tahun 2014 jumlah produksi perikanan sebesar 15.266,08 ton. dan pada tahun 2015 tercatat 14.954,15 ton.

Tabel 2.97  
Jumlah Produksi Perikanan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Jenis Usaha	Jumlah Produksi (ton)	
		2014	2015
1.	Perikanan Laut	7.292,45	6.840,06
2.	Perikanan Tambak	6.530,32	6.785,15
3.	Perairan umum	277,02	88,49
4.	Kolam	1.025,88	1101,27
5.	Jaring Apung	140,41	139,18
Jumlah		15.266,08	14.954,15

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2016

Meskipun jumlah produksi perikanan Kota Surabaya mengalami penurunan tetapi capaian konsumsi ikan dari yang ditargetkan nasional

mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 84,37 persen menjadi 88 persen pada tahun 2015. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencapai target nasional tingkat konsumsi ikan adalah dengan menggalakkan gerakan gemar makan ikan. urban farming bidang perikanan. serta melalui kegiatan pengembangan diversifikasi pangan produk perikanan.

Tabel 2.98  
Konsumsi Ikan Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	32,06	35,2
2	Target Nasional (Kg/kap/thn)	38	40
3	Persentase Konsumsi Ikan (%)	84,37	88

Sumber: Dinas Pertanian Kota Surabaya. 2016

#### e. Perdagangan

Selama ini capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang tinggi ditopang oleh kontribusi lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pembentukan PDRB dari kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun 2014 sebesar Rp99.966.844,30 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp109.971.647,30 juta. Besarnya kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didukung oleh tingginya perilaku masyarakat Kota Surabaya akan konsumsi barang dan jasa yang akhirnya mendorong tingginya pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Berikut tabel terkait kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Surabaya pada tahun 2014-2015.

Tabel 2.99  
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap PDRB Kota Surabaya Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp)	99.966.844.30	109.971.647.30
2	Jumlah PDRB (Juta Rp)	365.073.140.30	407.703.251.80
3	Kontribusi Kategori Perdagangan (%)	27.38	26.97

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Dari sisi permintaan, selain dari tingkat konsumsi masyarakat dan besarnya investasi yang ditanamkan, PDRB Kota Surabaya juga dikontribusi oleh kinerja ekspor impor. Pada tahun 2014 neraca perdagangan non migas Kota Surabaya mengalami surplus sebesar US\$965.797.636, yang disebabkan oleh lebih tingginya nilai ekspor non migas yaitu sebesar US\$ 18.022.413.011 jika dibandingkan dengan nilai impor non migas yaitu sebesar US\$ 17.056.615.375. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2015, di mana kinerja neraca perdagangan non migas Kota Surabaya mengalami surplus yaitu sebesar US\$1.564.305.491. Meskipun mengalami surplus, kinerja ekspor impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibanding tahun 2014. Perlambatan kinerja tersebut sejalan dengan penurunan permintaan ekspor dari mitra dagang Kota Surabaya dan nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi memicu menurunnya permintaan barang-barang impor.

Tabel 2.100  
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Nilai Ekspor (US \$)	18.022.413.011,00	16.452.486.419,00
2	Nilai Impor (US \$)	17.056.615.375,00	14.888.180.928,00
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	965.797.636	1.564.305.491

Sumber: Bank Indonesia. 2016

#### Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal langsung (*direct investment*) maupun penanaman modal portofolio surat berharga (*portofolio investment*). Berikut ini disajikan tabel jumlah investor Kota Surabaya Tahun 2014-2015 serta jumlah proyek dan nilai investasi PMDN dan PMA di Kota Surabaya.

Tabel 2.101  
Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

Uraian	2014	2015
PMDN	9	8
PMA	24	13
Total	33	21

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

Tabel 2.102  
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2014	76	Rp. 1.653.750.400.500 US \$ 184.170.400	33	Rp. 1.072.942.200 US \$ 45.152.500
2015	83	Rp. 3.658.697.400.000 US \$ 100.436.700	21	Rp. 828.418.000.000 US \$ 14.675.100

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

#### Rasio daya serap tenaga kerja

Investasi/penanaman modal langsung (*direct investment*) berkontribusi dalam membuka lapangan kerja baru. Pada tabel 2.105 berikut ini disajikan rasio daya serap tenaga kerja sebagai dampak investasi langsung. Berdasarkan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN tahun 2014 terdapat 33 proyek realisasi PMA dan PMDN dengan jumlah tenaga kerja terserap 2.170 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 65.76. Sampai dengan tahun 2015 jumlah realisasi proyek PMA dan PMDN sebanyak 21 proyek dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.223 orang dengan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 58.24.

Tabel 2.103  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah seluruh PMA/PMDN	33	21
2	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	2.170	1.223
3	Rasio daya serap tenaga kerja	65.76	58.24

Sumber : Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, 2016

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Konsumsi merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Konsumsi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumsi memiliki keterkaitan langsung dengan aspek pendapatan. Konsumsi sendiri memiliki hubungan yang searah dengan tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin besar konsumsi yang akan dikeluarkan. Maka dapat disimpulkan jika semakin besar anggaran yang dianggarkan untuk konsumsi meningkat dapat diindikasikan jika tingkat pendapatan seseorang tersebut semakin meningkat.

Sampai saat ini, peranan konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat akan mendorong naiknya permintaan barang dan jasa. Peningkatan tersebut selanjutnya akan mendorong perkembangan sektor industri dan sektor perdagangan yang secara otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, jumlah pengeluaran perkapita rumah tangga di Kota Surabaya pada tahun 2013 sebesar Rp1.402.088 perbulan dan meningkat ditahun 2014 menjadi sebesar Rp1.388.848 per bulan.

Tabel 2.104  
Angka Konsumsi RT per Kapita Kota Surabaya  
Tahun 2013 - 2014

No	Uraian	2013	2014*
1	Total Pengeluaran RT	1.042.088	1.388.848
2	Jumlah RT	822.669	775.559
3	Rasio	1,26	1,79

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Jika diuraikan berdasarkan jenisnya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi 2 (dua), yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita atas konsumsi pangan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita atas konsumsi non pangan. Nampak data pada tabel 2.107 yang menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi non pangan mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2013 sebesar Rp612.342 dan pada tahun 2014 sebesar Rp877.523. Besarnya komponen pengeluaran rumah tangga akan non pangan mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya meningkat.

Tabel 2.105  
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2013	2014
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	612.342	877.523
2	Total Pengeluaran	1.042.088	1.388.848
3	Rasio	58,76%	63.18%

Sumber: BPS Kota Surabaya. 2016

Pasang surutnya perekonomian suatu wilayah tampak dari perkembangan nilai perproduktivitasnya. Semakin besar produktivitas yang dihasilkan maka dipastikan semakin banyak kegiatan arus perekonomiannya. Pada tahun 2014 nilai PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp365.073.140,30 juta sehingga nilai produktivitas per kategori Kota Surabaya sebesar Rp249,11 juta per orang. Tingginya produktivitas Kota Surabaya tersebut berasal dari meningkatnya produktivitas dari setiap kategori setiap tahunnya, yang utamanya disumbang oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan serta kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Kategori tersebut terus menunjukkan perkembangan yang positif searah dengan perkembangan Kota Surabaya sebagai kota bisnis sehingga peran ketiga kategori tersebut menjadi lebih dominan dibanding kategori lainnya. Masih tingginya aktivitas ekonomi di Kota Surabaya mendorong produktivitas total daerah meningkat menjadi Rp277,71 juta per orang pada tahun 2015.

Rincian terkait produktivitas total daerah Kota Surabaya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2.106  
Produktivitas Per Sektor Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

Kategori	Uraian	2014		2015*	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.564,30	0,18	750.070,80	0,18
B	Pertambangan dan Penggalian	24.336,10	0,01	27.587,50	0,01
C	Industri Pengolahan	70.661.843,10	19,36	79.334.006,90	19,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.978.907,20	0,54	1.997.909,40	0,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,40	0,16	613.427,10	0,15
F	Konstruksi	37.891.835,80	10,38	41.833.616,60	10,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,30	27,38	109.971.647,30	26,97
H	Transportasi dan Pergudangan	18.927.734,90	5,18	21.544.921,60	5,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,60	14,81	62.389.404,20	15,3
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,30	5,52	22.080.942,60	5,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,50	5,28	21.872.423,80	5,36
L	Real Estate	9.372.176,50	2,57	10.420.100,50	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,20	2,43	9.814.203,90	2,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.183.606,10	1,42	5.420.318,80	1,33
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,70	2,54	10.444.758,10	2,56
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.814.318,80	0,77	3.210.799,00	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,40	1,47	5.977.113,70	1,47
PDRB		365.073.140,30	100,00	407.703.251,80	100,00
Angkatan Kerja		1.465.502		1.468.094	
Produktivitas		249,11		277,71	

Sumber: BPS Kota Surabaya. 2016



### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### a. Perhubungan

Jumlah kendaraan di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya penggunaan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Untuk memenuhi kebutuhan volume kendaraan yang semakin tinggi, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk melakukan peningkatan yaitu dengan cara membangun jalan baru dengan menghubungkan jaringan jalan yang ada serta menambah kapasitas jalan yang ada. Hal tersebut dapat terlihat pada tabel berikut, di manapada tahun 2014 jumlah kendaraan sebanyak 2.285.382 kendaraan dan meningkat menjadi 2.361.250 kendaraan pada tahun 2015.

Tabel 2.107  
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Panjang Jalan (m)	1.679.140	1.683.116
2	Jumlah Kendaraan	2.285.382	2.361.250
3	Rasio Panjang Jalan	0.734	0.712

Sumber: Dinas Perhubungan, 2016

#### b. Penataan Ruang

Sebagian besar luasan wilayah budidaya di Kota Surabaya adalah berupa wilayah produktif yaitu sebesar 93,27 persen. Wilayah produktif di Kota Surabaya antara lain berupa kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum, komersial, industri dan militer.

Berdasarkan luasannya, wilayah industri di Kota Surabaya terbagi menjadi kawasan industri dan zona industri. Kawasan industri berlokasi di kawasan Rungkut dan kawasan Margomulyo, sedangkan zona industri berlokasi tersebar di beberapa tempat antara lain kawasan Kalirungkut, kawasan Karangpilang, kawasan Tanjungsari dan kawasan Kalianak.

Berdasarkan tabel 2.109, dapat terlihat bahwa luasan wilayah genangan Kota Surabaya mengalami penurunan. Pada tahun 2014 luasan wilayah genangan Kota Surabaya sebesar 1.303 ha dan pada tahun 2015 sebesar 1.271 ha.

Tabel 2.108  
Rasio Luas Wilayah Genangan Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

Uraian	2014	2015
Luas Wilayah Genangan (ha)	1.303	1.271

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, 2016

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan. pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan. pelayanan sosial. dan kegiatan ekonomi. Seluruh kawasan budidaya yang ada di Kota Surabaya adalah merupakan kawasan perkotaan karena kegiatan utama pada kawasan budidaya di Kota Surabaya adalah bukan pertanian.

### c. Lingkungan Hidup

Seiring meningkatnya jumlah penduduk. perkembangan jumlah penduduk yang terlayani air bersih dari tahun 2014 ke 2015 juga mengalami peningkatan. Apabila jumlah penduduk yang terlayani air bersih dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. maka prosentase cakupan layanan air bersih mengalami peningkatan. Cakupan layanan air bersih pada tahun 2014 sebesar 92.64 persen dan pada tahun 2015 sebesar 92.66 persen.

Tabel 2.109  
Persentase Cakupan Layanan Air Bersih Kota Surabaya  
Tahun 2014- 2015

No.	Uraian	2014	2015
1	Total Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih	2.585.137	2.997.360
2	Jumlah Penduduk*	2.790.414	3.234.925
3	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	92.64	92.66

Sumber: PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 2016

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### a. Keamanan dan Ketertiban

Untuk meningkatkan iklim investasi. Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110  
Jumlah Demonstrasi Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Bidang politik	86	90
2	Ekonomi	91	126
3	Kasus pemogokan kerja	63	115
4	Jumlah unjuk rasa	240	331

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2016

Seperti ditampilkan pada tabel di atas. jumlah unjuk rasa di kota Surabaya mengalami peningkatan. namun kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan. hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketentraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.

Seperti disajikan pada tabel 2.113. dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menerbitkan peraturan yang mendukung iklim usaha Kota Surabaya. antara lain perda terkait perijinan. lalu lintas barang dan jasa. serta perda terkait ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 diterbitkan 3 Peraturan Daerah terkait Perijinan. dan pada tahun 2015 telah diterbitkan 1 Peraturan Daerah terkait Perijinan dan 1 Peraturan Daerah terkait Ketenagakerjaan.

Tabel 2.111  
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No.	Uraian	2014	2015
1.	Jumlah Perda Terkait Perijinan	3	1
2.	Jumlah Perda Terkait Lalu Lintas Barang Dan Jasa	0	0
3.	Jumlah Perda Terkait Ketenagakerjaan	0	1

Sumber : Bagian Hukum, 2016

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### a. Ketenagakerjaan

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang penting. disebabkan adanya kesenjangan antara kualitas tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri.

Tabel 2.112  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya  
Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah lulusan S1	291.423	297.023
2	Jumlah lulusan S2	18.914	19.647
3	Jumlah lulusan S3	1.100	1.204
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	311.437	317.874
5	Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528
6	Rasio lulusan S1/S2/S3	0.109	0.108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Seperti tampak pada tabel di atas. rasio kelulusan S1/S2/S3 Kota Surabaya terhadap jumlah penduduk masih cukup rendah dan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 0.109 menjadi 0.108 pada tahun 2015.

Menyambut iklim Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). penduduk Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dengan penduduk negara-negara ASEAN lainnya. Rasio lulusan S1/S2/S3 menjadi salah satu indikasi potensi daerah untuk mengembangkan dan memajukan wilayahnya dengan kekuatan

ekonomi yang prima melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

#### b. Tingkat ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun dengan jumlah penduduk yang belum/tidak produktif, yaitu penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.113  
Rasio Ketergantungan Kota Surabaya  
Tahun 2014 - 2015

No	Uraian	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia <15 tahun	613.554	636.425
2	Jumlah penduduk usia >64 tahun	170.895	182.446
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	784.449	818.871
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	2.069.212	2.124.657
6	Rasio ketergantungan	0.379	0.385

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016

Tabel 2.115 menunjukkan struktur usia penduduk dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu (1) kelompok usia muda, di bawah 15 tahun; (2) kelompok umur produktif, usia 15-64 tahun dan (3) kelompok umur tua yaitu usia 64 tahun ke atas. Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Surabaya mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, rasio ketergantungan sebesar 0.379 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 0.385.

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan strategi dan kebijakan pembangunan Tahun 2016, sebagaimana dituangkan dalam RKPD ini, berpijak pada capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun tahun 2015, juga memperhatikan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi daerah.

Adapun capaian kinerja pembangunan Kota Surabaya berdasarkan urusan pemerintahan daerah, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, serta triwulan I Tahun 2016 dijelaskan pada Tabel 2.114 dan 2.115 tentang Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Tahun Berjalan sebagaimana berikut.

Tabel 2.114  
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2014-2015  
Kota Surabaya

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.01 Pendidikan</b>									
<b>1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	97,00%	97,02%	100,02%	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	99%	99,01%	100,01%	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97,00%	97,50%	100,52%	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99%	99,02%	100,02%	
0067 Pelatihan Bina Keluarga Balita	Jumlah peserta pelatihan bina keluarga balita	800 Orang	800 Orang	100,00%	Jumlah peserta pelatihan bina keluarga balita	1.000 Orang	834 Orang	83,40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0059 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di 2477 lembaga	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00%	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100,00%	100,00%	
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,30%	99,99%	100,69%	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,50%	100,00%	100,50%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	97,02%	102,13%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,00%	95,02%	100,02%	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	108,30%	102,95%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,20%	105,24%	100,038%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	95,87%	100,92%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00%	95,03%	100,03%	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	100,37%	95,59%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,00%	105,03%	100,03%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,00%	N/A	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%	0%	100,00%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0,00%	N/A	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0,0000%	100,00%	
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,50%	99,60%	100,10%	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	0,995	99,54%	100,04%	
0082 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup	680 orang	700 orang	102,94%	Jumlah pelajar yang mendapatkan pendidikan tentang pengelolaan lingkungan hidup	700 orang	700 orang	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0083 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang tersedia	29 Item	30 Item	103,45%					Bagian Perlengkapan
0080 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah lokasi sekolah pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun/direhabilitasi	102 lokasi	105 lokasi	102,94%	Jumlah lokasi sekolah pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun/direhabilitasi	105 lokasi	105 lokasi	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
1081 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan dasar sembilan tahun (tahun jamak/multiyear)	Jumlah gedung pendidikan dasar sembilan tahun yang dibangun dalam tahun jamak	10 unit	9 unit	90,00%					Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0089 Pemanfaatan Jasa Internet Untuk Pendidikan	Jumlah lokasi pendidikan yang memanfaatkan layanan Internet 578 titik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0084 Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu Dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKDAS) Yang Dibiayai Dari DAK Bidang Pendidikan	Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan dasar	12 Bulan	7 Bulan	58,33%	Jumlah jenis kegiatan yang dibiayai dari DAK bidang pendidikan	2 jenis	0 jenis	0,00%	Dinas Pendidikan
0085 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Jumlah peserta ujian nasional SD dan SMP	86002 siswa	128,129 siswa	148,98%	Jumlah peserta ujian nasional SD dan SMP	85.020 siswa	90.174 siswa	106,06%	Dinas Pendidikan
0086 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKDAS	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	2680 orang	3,417 orang	127,50%	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	4.824 orang	2.710 orang	56,18%	Dinas Pendidikan
0087 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pembinaan kepada 102 lembaga pelayanan pendidikan dasar	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan	102 lembaga	102 lembaga	100,00%	Dinas Pendidikan
0088 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 463 SD Negeri, 52 SMP Negeri, dan 12 SMP Terbuka	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan BOPDA	424 lembaga	424 lembaga	100,00%	Dinas Pendidikan
0092 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan dasar di 516 lembaga	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas operasional sekolah	413 lembaga	441 lembaga	106,78%	Dinas Pendidikan

Urusan-Program-Kegiatan	Indikator	2014			2015			SKPD		
		Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	
0093 Sosialisasi Tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah DIKDAS	Jumlah lembaga yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS	400 lembaga	400 lembaga	100.00%				Dinas Pendidikan		
0094 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	70689 orang	67,779 orang	95.88%	Jumlah kegiatan Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	14 kegiatan	14 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan	
0095 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	1784 orang	4,061 orang	227.63%	Jumlah siswa yang mendapatkan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKDAS	9.582 siswa	10.895 siswa	113,70%	Dinas Pendidikan	
0096 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan dasar	22 sekolah	22 sekolah	100.00%	Jumlah jenis sarana pendidikan yang diberikan	6 jenis	6 jenis	100,00%	Dinas Pendidikan	
0097 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	2 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan	
0097 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Pendidikan					Lokasi pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pendidikan	1 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	
0090 Operasional Bis Sekolah	Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pelayanan angkutan 4 bus sekolah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan	
0079 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Waktu pelaksanaan 10 kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 100 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kalijudan dan pemberian beasiswa kepada 125 mahasiswa	12 Bulan	12 Bulan	100.00%					Dinas Sosial	
1.01.17 Program Pendidikan Menengah	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,15%	99,93%	100,79%	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	99,50%	99,97%	100,47%		
	Angka Kelulusan (AL) SMK	99,11%	99,95%	100,85%	Angka Kelulusan (AL) SMK	99,21%	99,97%	100,77%		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	93,47%	101,05%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,50%	92,55%	100,05%		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	121,85%	116,05%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,00%	105,08%	100,08%		
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	110,42%	116,23%	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA	95,00%	100,04%	105,31%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	0,01%	N/A	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,00%	0,004%	100,00%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,00%	0,01%	N/A	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,00%	0,007%	99,99%		
	Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65,00%	61,40%	94,46%	Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	70,00%	67,00%	95,72%		
	0070 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Jumlah Delegasi Pendidikan yang Difasilitasi Ke Luar Negeri	88 Orang	89 Orang	101,14%	Jumlah Delegasi Pendidikan yang Difasilitasi Ke Luar Negeri	78 orang	79 orang	101,28%	Bagian Kerjasama
	0073 Pengadaan Sarana Sekolah Pendidikan Menengah	Jumlah sarana sekolah Pendidikan Menengah yang tersedia	21 Item	21 Item	100.00%					Bagian Perlengkapan
0071 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah (Dana Insentif Daerah)	Jumlah lokasi sekolah Pendidikan Menengah yang dibangun/direhabilitasi	13 lokasi	13 lokasi	100.00%	Jumlah gedung sekolah pendidikan menengah yang dibangun/direhabilitasi	13 lokasi	13 lokasi	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
1072 pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan menengah (tahun jamak/multivear)	Jumlah gedung pendidikan menengah yang dibangun dalam tahun jamak	5 unit	5 unit	100.00%					Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
0066 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	189 sekolah	119 sekolah	62.96%					Dinas Pendidikan	
0074 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Jumlah peserta ujian nasional SMA dan SMK	37625 siswa	37,960 siswa	100.89%	Jumlah peserta ujian nasional SMA dan SMK	37.625 siswa	38.768 siswa	103,04%	Dinas Pendidikan	
0075 Peningkatan Mutu Pembelajaran DIKMEN	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	520 orang	812 orang	156.15%	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan mutu pembelajaran	6.970 orang	9.171 orang	131,58%	Dinas Pendidikan	
0076 Penerimaan Peserta Didik Baru	Waktu persiapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru	3 bulan	3 bulan	100.00%	Jumlah kegiatan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan	



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0077 Pembinaan Pelayanan Pendidikan Menengah	waktu pelaksanaan pembinaan kepada 7 lembaga pelayanan pendidikan menengah	12 bulan	11 bulan	91.67%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan	7 lembaga	7 lembaga	100,00%	Dinas Pendidikan
0078 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan pemberian BOPDA kepada 22 SMA Negeri, 2 SMA Terbuka dan 10 SMK Negeri	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan BOPDA	33 lembaga	33 lembaga	100,00%	Dinas Pendidikan
0079 Penyediaan Sarana Peningkatan Mutu dan Rehabilitasi Gedung Pendidikan (DIKMEN) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan	Waktu penyediaan sarana peningkatan mutu dan rehabilitasi gedung pendidikan (DIKMEN)	12 bulan	12 bulan	100.00%					Dinas Pendidikan
0081 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Waktu pelaksanaan operasional sekolah pendidikan menengah di 32 lembaga	12 bulan	11 bulan	91.67%	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitas operasional sekolah	32 lembaga	32 lembaga	100,00%	Dinas Pendidikan
0082 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN	Jumlah siswa yang mendapatkan Pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas	2075 orang	750 orang	36.14%	Jumlah siswa yang mendapatkan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa DIKMEN	8.827 siswa	5.822 siswa	65,96%	Dinas Pendidikan
0083 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	Jumlah sekolah yang mendapatkan sarana pendidikan menengah	30 sekolah	37 sekolah	123.33%	Jumlah jenis sarana pendidikan yang diberikan	3 jenis	1 jenis	33,33%	Dinas Pendidikan
0084 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	4 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	3 kegiatan	2 kegiatan	66,67%	Dinas Pendidikan
0084 Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah					Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam promosi kompetensi siswa pendidikan menengah	200 sekolah	122 sekolah	61,00%	Dinas Pendidikan
0080 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar	Jumlah Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar	24 kali	24 kali	100.00%	Jumlah Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Bagi Pelajar	24 Kali	24 Kali	100,00%	Dinas Perhubungan
<b>1.01.18 Program Pendidikan Non Formal</b>	Angka Melek Huruf (AMH)	100,00%	100,00%	100,00%	Angka Melek Huruf (AMH)	100%	100,00%	100,00%	
0014 Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah	Waktu pembinaan peningkatan mutu kepada 13062 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah	12 bulan	11 bulan	91.67%	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan pendidikan luar sekolah	12 kegiatan	12 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan
0015 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS yang dilaksanakan bagi 1435 siswa	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan pengembangan minat, bakat, dan kreatifitas siswa PLS	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00%	Dinas Pendidikan
0016 Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	2 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	Jumlah kegiatan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	1 kegiatan	0 kegiatan	0,00%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga</b>	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	96,08%	97,05%	101,01%	Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi	100%	97,50%	97,50%	
0007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2	152 orang	304 orang	200.00%	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 dan S2	68 orang	68 orang	100,00%	Dinas Pendidikan
0014 Fasilitasi Pengembangan Mutu Program Pendidikan	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan mutu program pendidikan bagi 38050 orang	7 kegiatan	6 kegiatan	85.71%	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan mutu program pendidikan	6 kegiatan	7 kegiatan	116,67%	Dinas Pendidikan
0015 Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Waktu Pelaksanaan Penunjang BOSDA Madin didalam pemberian biaya penyelenggaraan pendidikan Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	6 bulan	6 bulan	100.00%	Jumlah guru swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho yang mendapatkan peningkatan mutu	1.595 orang	1.486 orang	93,17%	Dinas Pendidikan
0016 Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	2 kegiatan	0 kegiatan	0.00%	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dilaksanakan	1 kegiatan	0 kegiatan	0,00%	Dinas Pendidikan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Dinas Pendidikan
<b>1.02 Kesehatan</b>									
<b>1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100,00%	100,00%	100,00%	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	100,00%	100,00%	
	Cakupan Keluruhan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100,00%	100,00%	100,00%	Cakupan Keluruhan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	100,00%	100,00%	
0007 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Tersedianya penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0009 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0014 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah sampel sanitasi lingkungan yang diuji	5258 sampel	5,258 sampel	100.00%	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyehatan Lingkungan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0017 Peningkatan Surveilans Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	Jumlah kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang dilaksanakan	893 Kegiatan	893 Kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah yang dilaksanakan	497 Kegiatan	497 Kegiatan	100,00%	Dinas Kesehatan
0018 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Waktu Pelaksanaan 4 layanan Kesehatan Khusus di 62 Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terlaksananya 5 layanan Kesehatan Khusus di 62 Puskesmas	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0019 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diuji	534 sampel	534 sampel	100.00%	Jumlah sampel makanan dan minuman yang diuji	534 Sampel	534 Sampel	100,00%	Dinas Kesehatan
0020 Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	Jumlah pelatihan kepada 1371 kader dan tenaga kesehatan yang dilaksanakan	19 Pelatihan	19 Pelatihan	100.00%	Jumlah kegiatan peningkatan profesionalisme SDM Kesehatan yang dilaksanakan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00%	Dinas Kesehatan
0021 Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi dalam Sertifikasi dan Akreditasi	900 orang	900 orang	100.00%	Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi dalam Sertifikasi dan Akreditasi	900 Orang	900 Orang	100,00%	Dinas Kesehatan
0022 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00%	Dinas Kesehatan
0023 Pengadaan Obat Dan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Ketersediaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas	92 Item	74 Item	80.43%	Ketersediaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas	45 Item	45 Item	100,00%	Dinas Kesehatan
0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di puskesmas dan jaringannya / rumah sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100.00%					Dinas Kesehatan
0026 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi 2.170 Penderita Penyakit Menular	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Penyakit Menular	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0016 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Penunjang Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Kesehatan	1 Lokasi	0 Lokasi	0.00%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0027 Jaminan Kesehatan Masyarakat					Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100,00%	Dinas Kesehatan
0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100.00%	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit	Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	100.00%					RSUD Bhakti Dharma Husada
0024 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya / Rumah Sakit	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100.00%	Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100 Persen	100 Persen	100.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
0025 Pelayanan perawatan dan gizi pasien rumah sakit	Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit	12 bulan	12 bulan	100.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19	20	105,26%	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	21	21	100,00%	
	Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8	9	112,50%	Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	10	10	100,00%	
0024 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi	6 unit	6 unit	100.00%	Jumlah puskesmas/puskesmas pembantu yang dibangun/direhabilitasi dan diawasi:	5 lokasi	8 lokasi	160,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0025 Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Waktu layanan kesehatan spesialis di 9 puskesmas yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu layanan kesehatan spesialis di 9 puskesmas yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0026 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen pengembangan standart pelayanan kesehatan	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Jumlah Sistem pengembangan standart pelayanan kesehatan	1 Sistem	1 Sistem	100,00%	Dinas Kesehatan
0027 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan	79 Item	79 Item	100.00%	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan	81 Jenis	81 Jenis	100,00%	Dinas Kesehatan
0028 Operasional Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terpenuhinya penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0029 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	2 Jenis	2 Jenis	100.00%	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	8 Jenis	8 Jenis	100,00%	Dinas Kesehatan
1.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	96,45%	100,47%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%	96,92%	100,96%	Dinas Kesehatan
	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90,00%	97,10%	107,89%	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90%	92,15%	102,39%	
	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90,00%	93,59%	103,99%	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90%	92,91%	103,23%	
	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90,00%	88,85%	98,72%	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 3 + HB 3	90%	91,49%	101,66%	
	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90,00%	88,66%	98,51%	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90%	91,02%	101,13%	
	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90,00%	94,13%	104,59%	Cakupan bayi 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90%	93,04%	103,38%	
	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100,00%	100,00%	100,00%	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100,00%	100,00%	
	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98,00%	98,22%	100,22%	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98%	98,41%	100,42%	
	Cakupan kunjungan bayi	90,00%	94,71%	105,23%	Cakupan kunjungan bayi	90%	93,69%	104,10%	
0004 Pelayanan Kesehatan Keluarga	Waktu pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terlaksananya pelayanan kesehatan keluarga	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0005 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi	4108 orang	4,108 orang	100.00%	Jumlah balita dan Ibu Hamil/menyusui yang mendapat peningkatan dan perbaikan gizi	3.640 Orang	3.640 Orang	100,00%	Dinas Kesehatan
1.02.33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhie	Kelas B	Kelas B	Kelas B	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit RSUD dr. M. Soewandhie	Kelas B	Kelas B	100%	
	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	Kelas C	Kelas C	Peningkatan Klasifikasi Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	Kelas B	Kelas C	-	
0009 Pembangunan Gedung Dan Peralatan RSUD Dr. Soewandhie (Tahun Jamak/Multivears)	Jumlah Gedung RSUD Dr. Soewandhie yang dibangun	1 Unit	0 Unit	0.00%	Jumlah gedung RSUD Dr. Soewandhie yang dibangun	1 unit	1 unit	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Waktu penyediaan 15 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	16 Jenis	16 Jenis	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0002 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Waktu pelaksanaan 8 kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0003 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah fasilitasi pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi RS	5 Kali	5 Kali	100.00%	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan pelatihan	375 Orang	411 Orang	109,60%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0004 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau	Jumlah sarana kesehatan bagi penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	100.00%	Jumlah sarana kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0011 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jumlah obat dan bahan medis yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0012 Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit					Persentase pasien rumah sakit yang terlayani	100 Persen	100 Persen	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan					Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersumber dari DAK bidang kesehatan	6 Jenis	6 Jenis	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0001 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	waktu penyediaan 3 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%					RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0003 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.00%	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0004 Pengadaan Sarana Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok yang Bersumber dari Cukai Hasil Tembakau	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	5 Jenis	5 Jenis	100.00%	Tersedianya Alat dan Perlengkapan Kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	5 Jenis	5 Jenis	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0005 Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	Waktu penyediaan alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyediaan alokasi jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0006 Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pelayanan rumah sakit yang terlaksana	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100.00%	Jumlah pelayanan rumah sakit yang terstandarisasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0010 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit					waktu penyediaan 3 jenis dan pemeliharaan alat kesehatan selama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0011 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyediaan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
0012 Pelayanan Perawatan Dan Gizi Pasien Rumah Sakit					Waktu Penyediaan Pelayanan Perawatan dan Gizi Pasien Rumah Sakit	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan					Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersumber dari DAK bidang kesehatan	16 Jenis	16 Jenis	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RSUD. Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Layak	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Layak	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kesehatan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa RSUD Bhakti Dharma Husada	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan Pengadaan Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
<b>1.03 Pekerjaan Umum</b>									
<b>1.03.28 Program pengendalian banjir</b>	Luas wilayah genangan	2111 ha	1303.13 Ha	138,27%	Luas wilayah genangan	2027 ha	1270,55 Ha	137,32%	
	rata-rata Lama terjadinya genangan	60 menit	54,75 menit atau 0,91 jam	108,75%	rata-rata Lama terjadinya genangan	60 menit	53,38 menit	111,03%	
	rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	20 cm	16,82 cm	115,90%	rata-rata Tinggi genangan yang terjadi	20 cm	16,40 cm	118,00%	
0012 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	23 lokasi	23 lokasi	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0013 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan	37 dokumen	38 dokumen	102.70%	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan	30 dokumen	53 dokumen	176.67%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0014 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Saluran Pematusan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota	110 dokumen	105 dokumen	95.45%	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi pematusan kota	82 dokumen	127 dokumen	154,88%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0015 Pengadaan Sarana Prasarana Pematusan	Jumlah pengadaan dan pembangunan sarana prasarana pematusan kota	3 jenis	3 jenis	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0016 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pematusan	12 kali	12 kali	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0018 Posko Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	waktu pelaksanaan posko pengendalian dan penanggulangan banjir	12 bulan	12 bulan	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0021 Rehabilitasi Saluran Drainase/Sungai	Jumlah lokasi rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	604 lokasi	496 lokasi	82.12%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0022 Pengerukan/Normalisasi Saluran Drainase/Sungai	Terpeliharanya saluran pematusan/sungai/kali	12 bulan	12 bulan	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1019 Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan (tahun jamak/multiyears)	Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun	2 lokasi	2 lokasi	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1020 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong (tahun jamak/multiyears)	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab pematusan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0024 Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan					Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	523 Lokasi	586 Lokasi	112,05%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0025 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem					Terpeliharanya Saluran Pematusan/Sungai/Kali	12 Kali	12 Kali	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.03.31 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</b>	% Cakupan Layanan Air Bersih	88,06%	92,64%	105,20%	% Cakupan Layanan Air Bersih	90,00%	92,66%	102,96%	
	% kebocoran air bersih	31,95%	26,80%	116,12%	% kebocoran air bersih	31,45%	25,74%	118,16%	

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0002 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air Minum)	Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun	33 lokasi	1 lokasi	3.03%	Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun	22 lokasi	16 lokasi	72.73%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jaringan air bersih	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.03.32 Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit	6 jam 30 menit	101.76%	Lama jam sibuk	6 jam 21 menit	6 jam 22 menit	100.26%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0001 Pembangunan/Peningkatan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dibangun/ditingkatkan	15 lokasi	30 lokasi	200.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0002 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab	39 lokasi	8 lokasi	20.51%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0003 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jalan	40 dokumen	43 dokumen	107.50%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0004 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jalan	123 dokumen	92 dokumen	74.80%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0005 Rehabilitasi untuk Kemantapan Jalan	Jumlah lokasi jalan yang direhab/dipelihara	54 lokasi	16 lokasi	29.63%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0006 Pengadaan Tanah	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan	12 lokasi	8 lokasi	66.67%	Jumlah lokasi lahan yang dibebaskan	8 lokasi	13 lokasi	162.50%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0007 Pembangunan Kelengkapan Jalan	Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan	15 lokasi	4 lokasi	26.67%	Jumlah lokasi pembangunan kelengkapan jalan	20 lokasi	36 lokasi	180.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0008 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana bina marga	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan dan Alat Angkut	12 kali	12 kali	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	4 dokumen	5 dokumen	125.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0010 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan	12 dokumen	24 dokumen	200.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0011 Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)	jumlah lokasi jalan dan jembatan yang dibangun	1 lokasi	0 lokasi	0.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0012 Koordinasi Jaringan Utilitas	waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas	12 bulan	12 bulan	100.00%	waktu pelaksanaan koordinasi jaringan utilitas	12 kali	12 kali	100.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0013 Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	waktu pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan kelengkapannya	12 bulan	17 bulan	141.67%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0017 Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan					Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	46 Lokasi	52 Lokasi	113.04%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0018 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Kelengkapannya	35 Lokasi	45 Lokasi	128.57%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0019 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan jalan dan jembatan	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan	32 Dokumen	63 Dokumen	196,88%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1014 Pembangunan dan rehabilitasi jembatan (tahun jamak/multiyears)	jumlah lokasi jembatan yang dibangun dan direhab	2 lokasi	5 lokasi	250.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1015 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jembatan (tahun jamak/multiyears)	jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0020 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan					Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang disusun	95 Dokumen	137 Dokumen	144,21%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1014 Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan (tahun jamak/multiyears)					jumlah lokasi jembatan yang dibangun	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1015 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan dan Jembatan (tahun jamak/multiyears)					jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab jembatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.04 Perumahan Rakyat</b>									
<b>1.04.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>									
	Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101	209	belum tercapai	Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	101	206	-3,96%	
	Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	82,00%	89,93%	109,67%	Pencapaian Waktu tanggap kurang < 15 menit	85%	99,34%	116,87%	
	Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	91,00%	92,56%	101,71%	Cakupan pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	95%	92,56%	97,43%	
0001 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran	Jumlah gedung Pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang dibangun	1 unit	1 unit	100.00%	Jumlah gedung pos Pemadam Kebakaran (PMK) yang dibangun	2 unit	2 unit	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0002 Penanggulangan Bahaya Kebakaran	waktu pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebakaran
0003 Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	Jumlah Gedung/Bangunan yang keandalan sistem proteksi kebakarannya diperiksa	5940 gedung/bangunan	5,334 gedung/bangunan	89.80%	Jumlah Gedung/Bangunan yang keandalan sistem proteksi kebakarannya diperiksa	6.534 Gedung/Bangunan	5.047 Gedung/Bangunan	77,24%	Dinas Kebakaran
0004 Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan	132 kegiatan	124 kegiatan	93.94%	Pembinaan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan	145 Kegiatan	154 Kegiatan	106,21%	Dinas Kebakaran
0005 Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran	715 orang	704 orang	98.46%	Jumlah peserta simulasi dan latihan bersama penanggulangan kebakaran	787 Orang	752 Orang	95,55%	Dinas Kebakaran
0006 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	1701 unit	1,689 unit	99.29%	Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran yang diadakan	2.009 Unit	2.140 Unit	106,52%	Dinas Kebakaran
0007 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebakaran

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1008 Pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran (tahun jamak/multivears)	Jumlah pengadaan sarana penanggulangan bahaya kebakaran	1 unit	1 unit	100.00%					Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.04.22 Program Utilitas Perkotaan</b>	Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83,36%	94,54%	113,41%	Rasio Panjang Jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	86,76%	99,43%	114,60%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0001 Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik PJU yang dipasang	4000 titik	6,173 titik	154.33%	Jumlah titik PJU yang dipasang	3.000 titik	3.880 titik	129,33%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0002 Pemeliharaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Waktu pelaksanaan pembayaran biaya rekening listrik untuk PJU	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pembayaran biaya rekening listrik untuk PJU	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.04.23 Program Perumahan dan Permukiman</b>	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3361	3242	96,46%	Jumlah MBR yang telah mendapatkan manfaat rumah layak huni (KK)	3649	3479	95,34%	
	Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	508	510,91	100,57%	Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman (Ha)	604	630,97	104,47%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
	Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,47	0,21	155,32%	Rasio angka ketersediaan makam selama lima tahun ke depan	0,85	16,88	171,56%	
0001 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah permukiman yang dibangun sarana dan prasarana dasarnya	7 lokasi	6 lokasi	85.71%	Jumlah permukiman yang dibangun sarana dan prasarana dasarnya	6 lokasi	7 lokasi	116,67%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Waktu operasional pengadaan sarana dan prasarana sanitasi yang dilaksanakan	12 bulan	0 bulan	0.00%	Terlaksananya pembangunan dan pendampingan sarana prasarana sanitasi di 9 kelurahan	12 bulan	9 bulan	75,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0005 Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	Waktu pemeliharaan 13 makam dan pembangunan sarana dan prasarana makam di 59 lokasi	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pemeliharaan 13 makam dan pembangunan sarana dan prasarana makam	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0004 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman	419 lokasi	140 lokasi	33.41%	Jumlah lokasi pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana permukiman	425 lokasi	440 lokasi	103,53%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0003 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	waktu pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengelolaan rumah susun sederhana sewa	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 6 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Tersedianya 6 jenis barang dan jasa perkantoran selama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebakaran
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 7 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan dan dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebakaran
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 3 jenis sarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0047 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk prasarana kantor pemerintahan	5 Lokasi	1 Lokasi	20.00%	Lokasi tanah dan/atau bangunan yang dibebaskan untuk sarana penunjang pemerintahan	2 lokasi	2 lokasi	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.05 Penataan Ruang</b>									
<b>1.05.18 Program Penataan Ruang</b>	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	81,12%	88,92%	109,62%	Proporsi luas area yang telah terlayani oleh rencana tata ruang	100%	92,31%	92,31%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0018 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang					Tersusunnya dokumen Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0019 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya					Tersusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0001 Penyusunan Review Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen Regulasi Zoning RDTRK yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100,00%					Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0001 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota					Tersusunnya Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kota	12 unit pengembangan	12 unit pengembangan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0002 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	Terlaksananya pelayanan tata ruang/tata bangunan berupa survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota yang diajukan pemohon	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0003 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang	24 dokumen	24 dokumen	100,00%	Tersusunnya hasil pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang	24 dokumen	24 dokumen	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0004 Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah dokumen hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan yang disusun	3 dokumen	2 dokumen	66,67%	Tersusunnya hasil penataan dan penyelenggaraan bangunan	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0005 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Waktu Pengawasan Pengendalian dan Penertiban bangunan di 31 Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Terselenggaranya Pengawasan Pengendalian dan Penertiban bangunan di 31 Kecamatan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0006 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota	12 buku	12 buku	100,00%	Tersusunnya hasil pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0007 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	waktu Kegiatan Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	12 bulan	12 bulan	100,00%	Terlaksananya Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 berkas	775 berkas	155,00%	Terbitnya ijin usaha jasa konstruksi	500 berkas	1.188 berkas	237,60%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0009 Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	Jumlah dokumen hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS yang disusun	19 dokumen	19 dokumen	100,00%	Tersusunnya hasil pendataan bidang tatakota dan bangunan berbasis GIS	15 dokumen	14 dokumen	93,33%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0010 Penanganan Pembelaan Gugatan Hukum Terhadap Penataan Ruang dan Perijinan Bangunan	Jumlah kasus penataan ruang dan perijinan bangunan yang ditangani	6 kasus	8 kasus	133,33%					Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0011 Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot Surabaya yang disusun	1 Peraturan	1 Peraturan	100,00%	Jumlah peraturan tentang pengelolaan dan ijin tanah/bangunan aset Pemkot Surabaya yang disusun	1 peraturan	1 peraturan	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0012 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	20 Kasus	20 Kasus	100,00%	Jumlah masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	20 kasus	20 kasus	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0013 Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	10 Kasus	10 Kasus	100,00%	Jumlah masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	10 kasus	10 kasus	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0014 Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan Pengendalian dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/ Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 Buku	12 Buku	100,00%	Jumlah pengendalian dan penertiban Pemanfaatan Tanah/ Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	12 buku	12 buku	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0015 Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	Jumlah laporan pendataan dan pemanfaatan terhadap BTKD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Jumlah pendataan dan pemanfaatan terhadap BTKD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0016 Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen hasil pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0017 Verifikasi Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil verifikasi bangunan yang dikuasai/dikelola Pemerintah kota Surabaya	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	Jumlah laporan hasil verifikasi bangunan dikuasai/dikelola Pemkot Surabaya	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana anatarur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0046 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi	84 unit	82 unit	97.62%	Jumlah gedung fisik praja/pemerintahan dan budaya lokal yang dibangun/rehabilitasi dan diawasi	58 lokasi	58 lokasi	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.06 Perencanaan</b>									
<b>1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%	% Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	100%	100%	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan
0005 Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2015-2020					Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2015-2020 yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang diselenggarakan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0013 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dokumen hasil data dan informasi yang disusun	7 dokumen	7 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0014 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0015 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0016 Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD	Jumlah dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen Nota Keuangan Rancangan APBD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0018 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen LKPJ Kepala Daerah yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0025 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sistem transportasi berkelanjutan	2 Dokumen	5 Dokumen	250,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0026 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen perencanaan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	5 dokumen	5 dokumen	100.00%					Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0028 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan pencegahan/penanggulangan n kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penunjang perencanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Dokumen	2 Dokumen	200,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0029 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Tersusunnya dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%					Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0031 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah dokumen penunjang penyusunan perencanaan bidang aparatur pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penunjang penyusunan perencanaan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0033 Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penunjang perencanaan bidang pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0034 Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Penunjang Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Penunjang Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0035 Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dana pembangunan dari dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0036 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penyusunan dan analisa data / informasi	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0037 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dan PDRB yang disusun	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah dan PDRB yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen indikator ekonomi daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0038 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penyusunan rencana pengembangan potensi unggulan di kota Surabaya	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0039 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0042 Penunjang Perhubungan Dan Pematusan	Jumlah dokumen penunjang perhubungan dan pematusan	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil penunjang kegiatan perhubungan dan pematusan	3 Dokumen	5 Dokumen	166,67%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
0040 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun	5 Dokumen	6 Dokumen	120.00%	Dokumen Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD yang disusun	5 Dokumen	7 Dokumen	140,00%	Bagian Bina Program
0041 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Bina Program
0019 Evaluasi Program Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesehatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang kesehatan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
0020 Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan bidang kesejahteraan sosial dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial dan pemberdayaan keluarga yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
0021 Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi kebijakan bidang pendidikan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan evaluasi program bidang pendidikan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
0024 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	monitoring dan evaluasi	12 bulan	12 bulan	100.00%	monitoring dan evaluasi	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Kec. Asemrowo
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Kec. Benowo
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	Kec. Bubutan
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	Kec. Bulak
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	Kec. Gayungan
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	Kec. Genteng
0023 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	Kec. Gubeng



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
<b>1.07 Perhubungan</b>									
<b>1.07.21 Program Pengembangan Sistem Transportasi</b>									
	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	23,73	31,23	131,61%	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri primer	25,63	28,88	112,68%	
	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	21,47	28,75	133,91%	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	23,19	28,79	124,15%	
	Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72	25,91	23,98%	Headway angkutan umum (menit) untuk mikrolet	14,72	26,21	21,94%	
	Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20	43,12	belum tercapai	Headway angkutan umum (menit) untuk biskota	20	43,86	-19,30%	
0001 Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan	Lokasi yang dibebaskan untuk fasilitas penunjang sarana transportasi perkotaan	2 Lokasi	0 Lokasi	0.00%					Dinas Perhubungan
0002 Pengadaan / Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah jenis rambu lalu lintas dan marka yang disediakan	17 jenis	17 jenis	100.00%	Jumlah jenis rambu lalu lintas dan marka yang disediakan	22 Jenis	23 Jenis	104,55%	Dinas Perhubungan
0003 Pengadaan / Pemeliharaan APILL	Waktu pengadaan/pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pengadaan/pemeliharaan 6 jenis APILL dan prasarana ITS-ATCS	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0004 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas	8 dokumen	8 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen penyelenggaraan manajemen lalu lintas	6 Dokumen	15 Dokumen	250,00%	Dinas Perhubungan
0005 Peningkatan/Pembangunan Terminal Angkutan Umum	Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan	7 lokasi	6 lokasi	85.71%	Jumlah terminal angkutan umum yang dibangun/ditingkatkan	4 Lokasi	4 Lokasi	100,00%	Dinas Perhubungan
0006 Pengembangan Sarana Prasarana Perhubungan	Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat	3 lokasi	3 lokasi	100.00%	Jumlah Lokasi pengembangan prasarana perhubungan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi darat	2 Lokasi	2 Lokasi	100,00%	Dinas Perhubungan
0007 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Umum	6 kali	5 kali	83.33%	Terlaksananya Sosialisasi Angkutan Umum	6 Kali	6 Kali	100,00%	Dinas Perhubungan
0008 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0009 Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Waktu Penyelenggaraan Pelayanan perijinan angkutan umum	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Pelayanan perijinan angkutan umum	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0010 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Jasa Angkutan	Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa angkutan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0012 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penertiban, pengawasan dan pengendalian parkir, terminal dan LLAJ	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0013 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu pengelolaan terminal angkutan umum	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pengelolaan terminal angkutan umum	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0014 Pembinaan Dan Pengawasan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	5 kali	5 kali	100.00%	Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	5 Kali	5 Kali	100,00%	Dinas Perhubungan
0015 Keselamatan Transportasi Darat Yang Dibiayai Dari DAK	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guard Rail	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00%	Dinas Perhubungan
0017 Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan (Tahun Jamak/Multivears)	Pembangunan Park and Ride	1 lokasi	0 lokasi	0.00%	Pembangunan Park and Ride	1 Lokasi	1 Lokasi	100,00%	Dinas Perhubungan
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pemeliharaan dan Pengadaan 4 Jenis Sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
<b>1.08 Lingkungan Hidup</b>									
<b>1.08.16 Program Pengendalian</b>	Kualitas air limbah industri				Kualitas air limbah industri				
	BOD	72,00%	73,26%	101,75%	BOD	76,00%	77,91%	102,51%	
	COD	66,00%	67,67%	102,53%	COD	70,00%	71,77%	102,53%	
	TSS	66,00%	67,40%	102,12%	TSS	72,00%	74,07%	102,88%	
	Kualitas air limbah domestik				Kualitas air limbah domestik				
	BOD	46,00%	49,50%	107,61%	BOD	52,00%	56,02%	107,73%	
	TSS	48,00%	48,51%	101,06%	TSS	54,00%	55,26%	102,33%	
	Kualitas air limbah RS				Kualitas air limbah RS				
	BOD	63,00%	64,58%	102,51%	BOD	70,00%	72,09%	102,99%	
	COD	62,00%	63,87%	103,02%	COD	70,00%	72,65%	103,79%	
	TSS	60,00%	61,18%	101,97%	TSS	72,00%	74,01%	102,79%	
	Kualitas air limbah hotel				Kualitas air limbah hotel				
	BOD	48,00%	49,83%	103,81%	BOD	56,00%	58,42%	104,32%	
	COD	36,00%	36,57%	101,58%	COD	46,00%	47,05%	102,28%	
	TSS	42,00%	43,72%	104,10%	TSS	50,00%	52,58%	105,16%	
	Kualitas udara emisi di kawasan industri				Kualitas udara emisi di kawasan industri				
	SO2	80,00%	81,37%	101,71%	SO2	85,00%	87,15%	102,53%	
	NO2	70,00%	70,85%	101,21%	NO2	85,00%	86,24%	101,46%	
0001 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	jumlah koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura yang dilaksanakan	55 kali	55 kali	100.00%	jumlah koordinasi dalam rangka penilaian Kota Sehat/Adipura yang dilaksanakan	50 kali	50 kali	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0017 Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji guna pemantauan kualitas air laut	32 sampel	32 sampel	100.00%	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	32 sampel	32 sampel	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0018 Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim	157 kali	156 kali	99.36%	Jumlah car free day yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian dampak perubahan iklim	160 kali	160 kali	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0019 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup	1100 peserta	1,100 peserta	100.00%	Jumlah peserta yang mendapatkan pengetahuan di bidang lingkungan hidup	1.100 orang	1.264 orang	114,91%	Badan Lingkungan Hidup
0020 Pengembangan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	100.00%	jumlah aplikasi sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0021 Pemantauan Kualitas Air	waktu pelaksanaan pemantauan kualitas air	12 bulan	12 bulan	100.00%	Pelaksanaan Pemantauan Air Llimbah terhadap 151 IPAL kegiatan Usaha dan 194 IPAL Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0022 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	81 kasus	108.00%	Prosentase jumlah permasalahan lingkungan yang direpson	100%	104009%	104,01%	Badan Lingkungan Hidup
0023 Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	waktu Operasional dan pengadaan 1 paket peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien	12 bulan	12 bulan	100.00%	Terselenggaranya Operasional, Pemeliharaan dan pengadaan 1 paket peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0024 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pengendalian dampak perubahan iklim yang dilaksanakan	3 dokumen	3 dokumen	100.00%	terlaksananya pendampingan Kampung iklim 1 lokasi dan audit energi	10 lokasi	10 lokasi	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0026 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Waktu operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup	12 bulan	12 bulan	100.00%	terselenggaranya operasional dan pemeliharaan 1 unit laboratorium lingkungan hidup	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0027 Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi terkait penggunaan sumber daya air	100 Kegiatan/Usaha	100 Kegiatan/Usaha	100.00%	jumlah Kegiatan/Usaha yang dibina dan diawasi terkait penggunaan sumber daya air	100 KU	100 KU	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0028 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup (DAK Bidang Lingkungan Hidup)	waktu operasional pelaksanaan DAK bidang LH	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup yang disediakan	2 paket	2 paket	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0029 Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel yang diambil dan diuji untuk pengendalian dampak lingkungan	738 sampel	738 sampel	100.00%	Terlaksananya pengambilan dan pengujian sampel untuk pengendalian dampak lingkungan	543 sampel	547 sampel	100,74%	Badan Lingkungan Hidup

Urusan-Program-Kegiatan	2014			2015			SKPD		
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target		Realisasi	Capaian
0032 Peningkatan Pelayanan Perijinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang mendapatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	26 Kegiatan/Usaha	115 Kegiatan/Usaha	442,31%	Prosentase Jumlah Permohonan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Ditindaklanjuti	100%	815200%	815,20%	Badan Lingkungan Hidup
0034 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Limbah Domestik Kota Surabaya					Waktu pelaksanaan peningkatan pelayanan pengelolaan limbah domestik Kota Surabaya	12 bulan	8 bulan	66,67%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0033 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor	51 kali	51 kali	100,00%	Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor	51 Kali	51 Kali	100,00%	Dinas Perhubungan
<b>1.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	47,37%	32,76%	69,16%	Prosentase Luas RTH yang berfungsi Optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	51,88%	34,56%	66,62%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pertanian
0005 Penataan RTH	Jumlah lokasi Ruang terbuka Hijau yang ditata di Kota Surabaya	45 lokasi	45 lokasi	100,00%	Jumlah lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ditata di Kota Surabaya	28 lokasi	53 lokasi	189,29%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0015 Pengembangan Dekorasi Kota	Waktu pelaksanaan kegiatan dekorasi kota	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan kegiatan dekorasi kota	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0016 Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan prasarana taman rekreasi	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pemeliharaan dan pengadaan prasarana taman rekreasi	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0017 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	Waktu pelaksanaan pemeliharaan taman dan jalur hijau	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan taman dan jalur hijau	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0012 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	3 Lokasi	3 Lokasi	100,00%	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Ruang Terbuka Hijau	2 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0013 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Luasan kawasan lindung yang dikelola dengan penanaman mangrove	60 Ha	142.510 Ha	237,52%	Luasan kawasan lindung yang dikelola dengan penanaman mangrove	120 Ha	42,610 Ha	35,51%	Dinas Pertanian
0014 Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	Optimalisasi hutan kota	17,2 Ha	17.200 Ha	100,00%	Optimalisasi Hutan Kota	17,200 Ha	8,610 Ha	50,06%	Dinas Pertanian
<b>1.08.25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>	Cakupan layanan Kebersihan	173/175	184/175	106,06%	Cakupan layanan Kebersihan	175/175	175/185	105,71%	
	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1192,87	1455,9	77,95%	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1180,94	1477,65	74,88%	
	Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3482,23	3883,8	88,47%	Rata-rata jumlah sampah yang diangkut dari TPS (m3)	3447,41	3940,4	85,70%	
0002 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	24 Jenis	24 Jenis	100,00%	Waktu pelaksanaan pengadaan 8 jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0003 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di 29 lokasi	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	jumlah kegiatan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan sampah mandiri	6 Kegiatan	8 Kegiatan	133,33%	Jumlah lokasi pendampingan Pengelolaan sampah mandiri	6 lokasi	6 lokasi	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0005 Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pengawasan operasional penyapuan jalan dan angkutan sampah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0006 Operasional Pengangkutan Sampah	Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan operasional angkutan sampah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0007 Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	Jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Jumlah dokumen perencanaan teknis kebersihan dan pertamanan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	200,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0008 Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT	365 hari	365 hari	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan IPLT	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0009 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 229 kendaraan operasional dan 17 alat berat	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan 190 kendaraan operasional dan 16 alat berat	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0010 Operasional Pengolahan Sampah	Waktu pelaksanaan operasional pengolahan sampah	365 hari	365 hari	100,00%	Waktu pelaksanaan operasional pengolahan sampah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0011 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan	104 Hari	108 Hari	103.85%	Waktu pelaksanaan operasional posko Pelayanan Kebersihan	104 hari	104 hari	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0012 Operasional Penyapuan Jalan	Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan seluas 832.402 m2	365 Hari	365 Hari	100,00%	Waktu pelaksanaan operasional penyapuan jalan	365 hari	365 hari	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0013 Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah di saluran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan operasional pengangkutan sampah di saluran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0014 Operasional Pengelolaan Rumah Kompos					Waktu pelaksanaan operasional rumah kompos	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0015 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Sarana Kebersihan					Lokasi pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana kebersihan	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	120 orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	120 orang	100,00%	Kec. Asemrowo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Benowo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	350 orang	350 orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	350 Orang	350 Orang	100,00%	Kec. Bubutan
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	209 Orang	99,52%	Kec. Bulak
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	120 orang	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	102 Orang	102 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	102 orang	102 orang	100,00%	Kec. Gayungan
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100,00%	Kec. Genteng
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100,00%	Kec. Gubeng
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 orang	200 orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 orang	200 orang	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100,00%	Kec. Jambangan
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100,00%	Kec. Karangpilang
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100,00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 Orang	120 Orang	100,00%	Kec. Kenjeran



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	270 Orang	270 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	270 Orang	270 Orang	100,00%	Kec. Krembangan
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 orang	300 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 Orang	290 Orang	96,67%	Kec. Lakarsantri
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Mulyorejo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	90 Orang	90 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	100 Orang	100 Orang	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 orang	180 orang	100,00%	Kec. Pakal
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	360 orang	360 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	360 Orang	360 Orang	100,00%	Kec. Rungkut
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Sambikerep
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	280 Orang	280 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	280 orang	280 orang	100,00%	Kec. Sawahan
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	140 Orang	140 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	140 orang	140 orang	100,00%	Kec. Semampir
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	300 Orang	300 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	180 Orang	180 Orang	100,00%	Kec. Simokerto
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 orang	210 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100,00%	Kec. Sukolilo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	120 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	120 orang	120 orang	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Tambaksari
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Tandes
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	250 Orang	250 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	250 Orang	250 Orang	100,00%	Kec. Tegalsari

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	175 Orang	175 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	175 Orang	175 Orang	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 Orang	200 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	200 orang	200 orang	100,00%	Kec. Wiyung
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 Orang	240 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Wonocolo
0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 Orang	210 Orang	100.00%	Jumlah kader lingkungan yang dibina tentang pengelolaan persampahan dan lingkungan	210 orang	210 orang	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>					Proporsi entitas yang membangun dan menggunakan energi baru dan terbarukan	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	
					Rasio jumlah gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 yang mendapat grade A dalam hal penggunaan teknologi Hijau (ramah lingkungan) tahun T terhadap jumlah gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 seluruhnya sebesar 5%	5,00%	6,85%	137,00%	
					Jumlah mobil yang menggunakan BGG yang terdaftar	150 mobil	257 mobil	171,33%	
0001 Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pengusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih					Jumlah Pembinaan dan Pengawasan serta pengusahaan Aneka Energi Terbarukan dan energi bersih	1 paket	1 paket	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0002 Penyusunan Rencana Konservasi Energi Kota					Jumlah dokumen penyusunan rencana konservasi energi kota	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	Badan Lingkungan Hidup
0005 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha					jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor industri dan usaha	1 paket	1 paket	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0004 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman					jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor bangunan gedung dan permukiman	1 paket	1 paket	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0003 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Perhubungan					jumlah pengusahaan konservasi energi pada sektor perhubungan	1 paket	1 paket	100,00%	Dinas Perhubungan
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan kebutuhan 8 jenis barang dan jasa	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Lingkungan Hidup
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.09 Pertanahan</b>									
<b>1.09.19 Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota</b>	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	647	580	89,64%	Jumlah aset pemkot yang tersertifikat	687	611	88,94%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0001 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Waktu Pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengelolaan arsip tanah/bangunan aset daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0002 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Lokasi Tanah Aset/Barang Daerah yang diajukan proses sertifikasi	35 Bidang	14 Bidang	40.00%	Lokasi tanah aset/barang daerah yang diajukan proses sertifikasi	40 bidang	25 bidang	62,50%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0003 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengamanan dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Surabaya	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengamanan dan Monitoring Aset Pemerintah Kota Surabaya	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.10 Kependudukan dan</b>									
<b>1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	% penduduk yang berKTP	93,00%	93,79%	100,85%	% penduduk yang berKTP	95,00%	93,16%	98,06%	
	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	99,92%	111,02%	Cakupan penerbitan akte kelahiran	90,00%	99,55%	110,62%	
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu pelaksanaan 13 jenis Layanan Publik dalam Bidang Kependudukan yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	13 layanan	13 layanan	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0015 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Waktu pelaksanaan 5 Layanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Bidang catatan sipil	5 layanan	5 layanan	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0016 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Waktu Publikasi bidang kependudukan yang dilaksanakan melalui 10 media	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Publikasi bidang kependudukan	10 media	10 media	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0017 Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak	1 dokumen	1 dokumen	100.00%	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perkembangan dan pengendalian kependudukan yang dicetak	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0018 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah dokumen profil Perkembangan kependudukan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	200.00%	Jumlah dokumen profil Perkembangan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Asemrowo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Benowo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bulak
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Gayungan
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Jambangan
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Karangpilang
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Kenjeran

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sambikerep
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
<b>1.11 Pemberdayaan</b>									

Urusan-Program-Kegiatan	Indikator	2014			2015			SKPD	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1.11.16 Program Penguatan Kelembagaan	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	85 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 Lembaga	83 Lembaga	97.65%	Bapemas dan KB
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Lembaga berbasis gender yang dibina	85 Lembaga	85 Lembaga	100.00%	Jumlah Lembaga berbasis gender dan anak yang dibina	85 Lembaga	83 Lembaga	97.65%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0006 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	1000 orang	1,000 orang	100.00%	Jumlah peserta yang dilatih dalam meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	1.000 Orang	1.000 Orang	100.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Asemrowo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Benowo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Bubutan
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Bulak
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Gayungan
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Genteng
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Gubeng
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Gunung Anyar
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Jambangan
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Karangpilang
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Kenjeran
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Krembangan
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Lakarsantri
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Mulyorejo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Pabean Cantian
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Pakal
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Kec. Rungkut
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Kec. Sambikerep

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Sawahan
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	Kec. Semampir
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	Kec. Simokerto
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Sukolilo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	Kec. Tambaksari
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 lembaga	2 lembaga	100,00%	Kec. Tandes
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Tegalsari
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Wiyung
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Wonocolo
0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan pengarusutamaan gender dan anak	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>1.11.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan</b>	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan anak yang dilaporkan dan ditangani	100%	100,00%	100,00%	Bapemas dan KB
0008 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terfasilitasi	200 kasus	217 kasus	108.50%	Jumlah kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terfasilitasi	200 Kasus	287 Kasus	143,50%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0010 Fasilitasi Pengembangan Kota Peduli Perempuan Dan Kota Layak Anak	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>									
<b>1.12.15 Program Keluarga Berencana</b>	Persentase peserta KB aktif	80,26%	81,42%	101,45%	Persentase peserta KB aktif	81,00%	80,20%	99,01%	Bapemas dan KB
0001 Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	424 orang	311 orang	73.35%	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	424 Orang	410 Orang	96,70%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0005 Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah pelaksana program keluarga berencana yang dibina	6725 orang	6,725 orang	100.00%	Jumlah pelaksana program keluarga berencana yang dibina	5.559 Orang	5.035 Orang	90,57%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0007 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 1577 Institusi Masyarakat Perkotaan Peduli Keluarga Berencana	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi 1568 Institusi Masyarakat Perkotaan Peduli Keluarga Berencana	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0008 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Yang Disediakan Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana	5 Item	5 Item	100.00%	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga Berencana	5 Item	4 Item	80,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengadaan 3 jenis sarana Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1.13 Sosial</b>									
<b>1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi</b>									
0019 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi					Lokasi Pengadaan Tanah dan/atau untuk Rehabilitasi Sosial	1 Lokasi	10 Lokasi	1.000,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan serta pemberian permakanaan	3977 Orang	4.383 Orang	110.21%					Dinas Sosial
0007 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial	2804 Orang	2.902 Orang	103.50%	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan, pembinaan, pelatihan, pemulangan dan penyaluran ke panti sosial	1.446 Orang	1.370 Orang	94,74%	Dinas Sosial
0008 Penyusunan Kebijakan Pelayanandan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Dinas Sosial
0010 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Waktu penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0013 Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni di 20 kelurahan	622 Unit	602 Unit	96.78%	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan perbaikan rumah tidak layak huni	725 Unit	723 Unit	99,72%	Dinas Sosial
0014 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 128 Orang Penghuni UPTD Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 120 Orang Penghuni UPTD Lingkungan Sosial Kusta Babat Jerawat	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0015 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Kampung Anak Negeri jo	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada 35 orang penghuni UPTD Kampung Anak Negeri	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0016 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1300 Orang Penghuni UPTD Liponsos Keputih	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 1400 Orang Penghuni UPTD Liponsos Keputih	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0017 Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanaan bagi Lanjut Usia	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan, pelayanan, pelatihan ketrampilan dan pemberian permakanaan	13648 Orang	16,611 Orang	121.71%	Jumlah Lansia yang mendapat pembinaan, pelayanan, pelatihan ketrampilan dan pemberian permakanaan	19.136 Orang	18.051 Orang	94,33%	Dinas Sosial

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0018 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 50 Orang Lanjut Usia Penghuni UPTD Griya Werdha	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Yang Diberikan Kepada 75 Orang Lanjut Usia Penghuni UPTD Griya Werdha	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0020 Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat					Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial dan pelatihan serta pemberian permakanan	4.686 Orang	4.636 Orang	98,93%	Dinas Sosial
0021 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu					Waktu penyediaan kebutuhan dasar bagi 180 pansos/ orsos dan permakanan bagi 6455 anak yatim, piatu dan yatim piatu	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0022 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kaliudan					Waktu pelaksanaan Pelayanan yang diberikan kepada 85 orang penghuni UPTD Pondok Sosial Kaliudan dan pemberian beasiswa kepada 254 mahasiswa	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Sosial
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Asemrowo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Benowo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Bubutan
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Bulak
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Gayungan
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Genteng
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Gubeng
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Jambangan
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Karangpilang
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Kenjeran
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Krembangan
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	5 Laporan	83,33%	Kec. Pabean Cantian
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Pakal
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Rungkut
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Sambikerep
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Sawahan
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100.00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Semampir



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Simokerto
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Sukolilo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Tambaksari
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 laporan	6 laporan	100,00%	Kec. Tandes
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Tegalsari
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Wiyung
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Wonocolo
0012 Pendataan PMKS Dan PSKS	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Jumlah laporan pendataan PMKS dan PSKS yang disusun	6 Laporan	6 Laporan	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60% (791)	91,87% (1.209)	153,12%	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	70% (923)	94,83%	135,47%	Dinas Sosial dan Kecamatan
0002 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha Masyarakat yang dibina	550 Orang	560 Orang	101,82%	Jumlah Pelaku Usaha Masyarakat yang dibina	200 Orang	240 Orang	120,00%	Dinas Sosial
0005 Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	1582 Orang	1,715 Orang	108,41%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	2.574 Orang	2.195 Orang	85,28%	Dinas Sosial
0006 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 6 MPN/TMP yang bernilai kepahlawanan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
0007 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial / Organisasi Sosial	Waktu penyediaan kebutuhan dasar bagi 180 pansos/ orsos dan permakanan bagi 5949 anak yatim, piatu dan yatim piatu	12 Bulan	12 Bulan	100,00%					Dinas Sosial
0008 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi umat beragama 23330 orang	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu penyelenggaraan kegiatan keagamaan bagi umat beragama 21746 orang	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Kebutuhan Barang dan Jasa	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Sosial
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/Pengadaan 4 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Sosial
<b>1.14 Ketenagakerjaan</b>									
<b>1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5,00%	5,01%	100,20%	% Penempatan pencari kerja pada pasar kerja	6,00%	6,12%	102,00%	Dinas Tenaga Kerja
0002 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan	14 kali	13 kali	92,86%	Jumlah fasilitasi akses ke pasar kerja yang dapat dilaksanakan	14 kali	12 kali	85,71%	Dinas Tenaga Kerja
0004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal	1400 orang	1,338 orang	95,57%	Jumlah pencari kerja yang dilatih keterampilan kerja formal	935 orang	593 orang	63,42%	Dinas Tenaga Kerja
0005 Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha	1420 orang	1,233 orang	86,83%	Jumlah masyarakat yang difasilitasi mendapatkan ketrampilan alternatif untuk berwirausaha	580 orang	552 orang	95,17%	Dinas Tenaga Kerja
0008 Pelatihan Usaha Mandiri Berbasis Masyarakat	Jumlah masyarakat yang dilatih keterampilan usaha mandiri	1670 orang	714 orang	42,75%					Dinas Tenaga Kerja

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0009 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di 31 Kecamatan	2 dokumen	0 dokumen	0.00%	Jumlah dokumen hasil Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan di 31 Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
0010 Pengembangan Produktivitas Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih produktivitas	100 orang	78 orang	78.00%					Dinas Tenaga Kerja
<b>1.14.17 Program Perlindungan dan Pengembangan</b>	Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	75,00%	80,87%	107,83%	Persentase penyelesaian sengketa pekerja-pengusaha	76,00%	76%	100,25%	Dinas Tenaga Kerja
0002 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial	516 perusahaan	484 perusahaan	93.80%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial	220 perusahaan	229 perusahaan	104,09%	Dinas Tenaga Kerja
0003 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1670 perusahaan	655 perusahaan	39.22%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	1.316 perusahaan	525 perusahaan	39,89%	Dinas Tenaga Kerja
0004 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3	3550 perusahaan	1,199 perusahaan	33.77%	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan konsep dan penerapan norma kerja serta aspek K3	3.040 perusahaan	1.037 perusahaan	34,11%	Dinas Tenaga Kerja
0005 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja	2600 perusahaan	1,007 perusahaan	38.73%	Jumlah perusahaan yang diidentifikasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja	2.000 perusahaan	860 perusahaan	43,00%	Dinas Tenaga Kerja
0009 Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Lembaga Latihan Kerja, Dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah LPKS, BLK, dan perusahaan yang dimonitoring dan dibina	250 lembaga	143 lembaga	57.20%	Jumlah lembaga pelatihan, lembaga penempatan dan perusahaan pengguna TKA yang dibina	150 lembaga	109 lembaga	72,67%	Dinas Tenaga Kerja
0010 Identifikasi Kebutuhan Hidup Layak	Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak di 3 lokasi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jangka Waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan hidup layak di 3 lokasi	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
<b>Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas</b>					Persentase Masyarakat yang mendapat sertifikat kompetensi dibanding angkatan kerja tahun (t-2)	0,21%	0,17%	80,95%	Dinas Tenaga Kerja
0001 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi Untuk Menyongsong Asean Economic Community (AEC)					Pelaksanaan Sertifikasi Kerja	3.052 Orang	2.613 Orang	85,62%	Dinas Tenaga Kerja
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Terpelihara dan tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 4 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terpeliharanya Dan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran 3 Jenis	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Tenaga Kerja
<b>1.15 Koperasi dan Usaha</b>									
<b>1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 Kelompok	60 Kelompok	101,69%	jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	69 Kelompok	65 Kelompok	94,20%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0006 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibangun	5 unit	5 unit	100.00%	Jumlah sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibangun	10 unit	10 unit	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0007 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	Jumlah kelompok usaha mikro-kecil yang difasilitasi menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha	5 kelompok	11 kelompok	220.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jangka waktu pendampingan pembinaan usaha bagi 5 kelompok usaha mikro-kecil	12 bulan	11 bulan	91.67%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0009 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm	23 kegiatan	19 kegiatan	82.61%	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk UMKM	17 kegiatan	19 kegiatan	111,76%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0006 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	2 Lokasi	0 Lokasi	0.00%	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pendukung Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	1 lokasi	0 lokasi	0,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0008 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil Dan Industri Menengah	Jumlah Industri Kecil yang dibina	429 UKM	429 UKM	100.00%	Jumlah industri kecil yang dibina	433 UKM	433 UKM	100,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0009 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah event promosi yang diikuti oleh 55 UKM	12 event	12 event	100.00%	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi promosi	72 UKM	109 UKM	151,39%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0012 Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi	15 sentra	15 sentra	100.00%	Jumlah sentra industri potensial yang memperoleh fasilitasi	18 Sentra	18 Sentra	100,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0013 Fasilitasi Pengembangan UKM	Jumlah UKM yang Memperoleh Fasilitasi pengembangan usaha	380 UKM	380 UKM	100.00%	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi pengembangan usaha	300 UKM	90 UKM	30,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0015 Pemberian Dan Penerbitan Perijinan Perdagangan Dan Industri	Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan	25996 ijin	23,544 ijin	90.57%	Jumlah ijin industri dan perdagangan yang diterbitkan	26.261 Ijin	24.783 Ijin	94,37%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0016 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	820 perusahaan	850 perusahaan	103.66%	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	1.149 Perusahaan	1.162 Perusahaan	101,13%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0017 Penerbitan Surat Keterangan Dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Perdagangan yang diterbitkan	140 rekom	184 rekom	131.43%	Jumlah rekomendasi perdagangan yang diterbitkan	140 Rekom	286 Rekom	204,29%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.15.18 Program Peningkatan Kualitas</b>	Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 unit	306 unit	177,91%	Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	170 unit	268 unit	157,65%	
	Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	100 unit	20 unit	20,00%	Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	66 unit	79 unit	119,70%	
	Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit	54 unit	180,00%	Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 unit	31 unit	103,33%	
0003 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian					Jumlah koperasi yang dipetakan kinerja usahanya	500 koperasi	554 koperasi	110,80%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0004 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian	1630 orang	1,489 orang	91.35%	Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoperasian	1.730 orang	1.629 orang	94,16%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0006 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha	150 koperasi	150 koperasi	100.00%	Jumlah koperasi simpan pinjam yang difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha	120 koperasi	102 koperasi	85,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0010 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk	30 koperasi	30 koperasi	100.00%	Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat dibentuk	30 koperasi	31 koperasi	103,33%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0011 Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya	300 koperasi	300 koperasi	100.00%	Jumlah koperasi aktif yang mendapatkan bintek pengembangan usaha	60 koperasi	54 koperasi	90,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0012 Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT	Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan konsistensi pengelolaannya	200 koperasi	189 koperasi	94.50%	Jumlah koperasi ber RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan koperasi	200 koperasi	217 koperasi	108,50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0013 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT	Jumlah koperasi aktif belum RAT yang ditingkatkan kualitas kelembagaannya	120 koperasi	108 koperasi	90.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0015 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT yang direvitalisasi	100 koperasi	20 koperasi	20,00%	Jumlah koperasi tidak aktif dan tidak RAT yang mendapatkan bintek pengelolaan lembaga dan usaha perkoperasian	66 koperasi	79 koperasi	119,70%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0016 Fasilitasi Persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha Koperasi Simpan Pinjam					Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk persiapan Sertifikasi Kompetensi Usaha	150 koperasi	117 koperasi	78,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Tersedianya 8 jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Tersedianya 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>1.16 Penanaman Modal</b>									
<b>1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>									
	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90,00%	75,32%	83,69%	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	95,00%	74,75%	78,68%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0002 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Jumlah kegiatan Fasilitasi kemitraan UMKM dengan Pengusaha Skala Nasional	3 kali	3 kali	100,00%	Jumlah kegiatan Fasilitasi kerjasama strategis antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	3 kali	3 kali	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0010 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pelayanan perijinan	120 perusahaan	171 perusahaan	142,50%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi pelayanan perijinan	120 perusahaan	226 perusahaan	188,33%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0011 Pelayanan UPTSA	Waktu pelaksanaan Pelayanan UPTSA	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan Pelayanan UPTSA	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0012 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah even promosi investasi yang dilaksanakan	2 even	2 even	100,00%	Jumlah even promosi investasi yang dilaksanakan	3 even	3 even	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0013 Penyusunan Pemetaan Potensi Investasi	jumlah dokumen pemetaan potensi investasi yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%					Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0014 Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaksanaan PMA/PMDN	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Pengawasan Penanaman Modal kepada 160 Perusahaan	1 setahun	1 setahun	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0015 Monitoring Dan Evaluasi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan Yang Mendukung Investasi	Waktu pelaksanaan monitoring Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan monitoring Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
0016 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	Waktu pengelolaan dan pemutakhiran data investasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Jumlah update informasi penanaman modal	12 kali setahun	12 kali setahun	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
<b>1.17 Kebudayaan</b>									
<b>1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>									
	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	200 Kelompok seni	211 Kelompok seni	105,50%	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even / festival seni budaya	225 Kelompok seni	232	103,11%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0008 Pembangunan/Rehabilitasi serta Pengawasan Gedung Mitra	Jumlah gedung Mitra yang dibangun dan diawasi	1 unit	0 unit	0.00%					Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0001 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	waktu pelaksanaan fasilitas pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi 481 kelompok seni	12 bulan	12 bulan	100.00%	jangka waktu pelaksanaan fasilitas pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi 441 kelompok seni	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0005 Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti	10 Festival	10 Festival	100.00%	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan dan diikuti	9 Festival	9 Festival	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Jangka waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jangka waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jangka waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1.18 Kepemudaan dan Olah Raga</b>									
<b>1.18.16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>									
	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	75	75	100,00%	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda dalam pengembangan usaha mandiri	80	80	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0010 Fasilitas Peningkatan Peran Kepemudaan	Jumlah kegiatan peningkatan peran kepemudaan yang difasilitasi	24 kegiatan	25 kegiatan	104.17%	Jumlah kegiatan peningkatan peran kepemudaan yang difasilitasi	25 Kegiatan	25 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0011 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Mandiri	Jenis Pengembangan Kewira Usahaan Pemuda Mandiri	2 kegiatan	7 kegiatan	350.00%	Jenis Kegiatan Pengembangan Kewira Usahaan Pemuda Mandiri	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0012 Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	Jumlah Pengembangan Kreatifitas dan Aktualisasi Kepemudaan	5 kegiatan	4 kegiatan	80.00%	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kreatifitas dan Aktualisasi Kepemudaan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0013 Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	Jumlah kegiatan penumbuhan jiwa sosial kepemudaan yang dilaksanakan	9 kegiatan	9 kegiatan	100.00%	Jumlah Kegiatan Penumbuhan Jiwa Sosial kepemudaan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0014 Peningkatan Pemahaman Pemuda Dan Pencegahan Kenakalan Remaja	Jumlah Peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman pemuda dan pencegahan kenakalan remaja yang dilaksanakan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0015 Peningkatan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	jumlah kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan yang dilaksanakan	5 kegiatan	5 kegiatan	100.00%	Jumlah Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan dan dibina	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0016 Peningkatan Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	4505 Orang	2,652 Orang	58.87%	Jumlah pemuda mandiri yang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda	4.505 orang	2.050 orang	45,50%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>1.18.20 Program Pembinaan dan Pemasvarakatan</b>									
	meningkatkan Atlet/organisasi olahraga yang berprestasi	1578	1761	111,60%	meningkatkan Atlet/organisasi olahraga yang berprestasi	1736	1312	76%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	meningkatkan Prasarana olahraga yang dikembangkan	242	272	112,40%	meningkatkan Prasarana olahraga yang dikembangkan	282	346	123%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	meningkatkan Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	43	41	95,35%	meningkatkan Jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan	48	41	85%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0018 Pembangunan Lapangan THOR Tahap VI					Lapangan THOR yang dibangun pada tahap VI	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0005 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	Jumlah Peningkatan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100.00%	Jumlah Peningkatan kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0008 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi	Jumlah pelaku olahraga yang mendapatkan penghargaan	1852 orang	1,761 orang	95.09%	Jumlah Atlet dan Pelatih Olahraga Prestasi yang mendapatkan penghargaan	1.852 orang	1.312 orang	70,84%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0010 Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat	Jumlah Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan	18 Kegiatan	17 Kegiatan	94.44%	Jumlah Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat yang diselenggarakan	29 Kegiatan	16 Kegiatan	55,17%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0011 Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	8 Kegiatan	7 Kegiatan	87.50%	Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang dilaksanakan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0014 Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	6 kegiatan	5 kegiatan	83.33%	Jenis kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0019 Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	Waktu operasional dan pemeliharaan 4 Gedung dan Lapangan Olahraga	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu operasional dan pemeliharaan 4 Gedung dan Lapangan Olahraga	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0020 Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	jumlah kegiatan peningkatan SDM dan manajemen olahraga prestasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	5 kegiatan	166.67%	Jumlah kegiatan peningkatan SDM dan manajemen Olahraga prestasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0021 Peningkatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan	45 lokasi	68 lokasi	151.11%	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga yang dilaksanakan	45 lokasi	74 lokasi	164,44%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0022 Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga Prestasi	Penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi	13 Kali	13 Kali	100.00%	Penyelenggaraan pertandingan olahraga prestasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
0023 Operasional Dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo	12 bulan	16 bulan	133.33%	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pengadaan Fasilitas Gelora Bung Tomo	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>1.19 Kesatuan Bangsa dan</b>									
<b>1.19.16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>									
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100,00%	100,00%	100,00%	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	100%	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja
0002 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0006 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	Waktu pelaksanaan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengendalian kebisingan gangguan dari kegiatan masyarakat yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0007 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis	840 orang	840 orang	100.00%	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis	900 orang	849 orang	94,33%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0008 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan 3 kegiatan Pengendalian keamanan lingkungan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0009 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas	930 orang	915 orang	98.39%	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas	930 orang	905 orang	97,31%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0010 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Waktu pelaksanaan pengerahan dan pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengerahan dan pengendalian keamanan lingkungan bidang Linmas	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0011 Pemberdayaan Dan Fasilitas Parpol Dan Orkemas	Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol, ormas dan LSM	700 orang	700 orang	100.00%	Jumlah peserta yang mengikuti seminar pemberdayaan parpol orkemas	700 orang	614 orang	87,71%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0012 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan	400 orang	400 orang	100.00%	Jumlah Peserta yang mengikuti Seminar, talk Show, diskusi wawasan kebangsaan	400 orang	450 orang	112,50%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0013 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 kali	240 kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 3 Wilayah	240 kali	240 kali	100,00%	Kec. Asemrowo
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 kali	288 kali	100,00%	Kec. Benowo
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Bubutan
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Bulak
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Gayungan
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	312 Kali	312 Kali	100.00%	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 wilayah	312 Kali	300 Kali	96,15%	Kec. Genteng
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 kali	288 kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 6 Wilayah	288 kali	288 kali	100,00%	Kec. Gubeng
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	432 kali	432 kali	100.00%	Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 wilayah	432 kali	432 kali	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Jambangan
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	288 Kali	288 Kali	100,00%	Kec. Karangpilang
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	264 Kali	264 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 4 Wilayah	264 Kali	264 Kali	100,00%	Kec. Kenjeran
0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 Kali	240 Kali	100.00%	Jumlah pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja yang dilaksanakan di 5 Wilayah	240 Kali	240 Kali	100,00%	Kec. Krembangan





Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0004 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	1120 Orang	1,135 Orang	101.34%	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	1.231 Orang	1.231 Orang	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
0014 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bldang I	16925 Obyek	19,989 Obyek	118.10%	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang I	16.925 Obyek	21.763 Obyek	128,58%	Satuan Polisi Pamong Praja
0015 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang II	1600 Obyek	1,621 Obyek	101.31%	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang II	1.600 Obyek	1.732 Obyek	108,25%	Satuan Polisi Pamong Praja
0016 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang III	36550 Obyek	62,772 Obyek	171.74%	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Bidang III	36.550 Obyek	48.723 Obyek	133,31%	Satuan Polisi Pamong Praja
0017 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota	115800 Orang	118,762 Orang	102.56%	Jumlah Personil yang terlibat dalam Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan Keamanan Kota	115.800 Orang	116.053 Orang	100,22%	Satuan Polisi Pamong Praja
0018 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda					Penindakan Pelanggaran Perda	60 Kali	193 Kali	321,67%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pemeliharaan 2 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kependidikan dan</b>									
<b>1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan</b>									
	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti	6	4	66,67%	Jumlah Raperda usul prakarsa DPRD yang ditindak lanjuti	6	6	100%	
	Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	91%	83%	91,57%	Prosentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	92,00%	94,44%	102,65%	
	% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	86%	0,6536	76,00%	% keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	87,00%	87,83%	100,95%	
	Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5	5	100,00%	Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5	5	100,00%	
0001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Usul Prakarsa DPRD yang dibahas	7 Raperda	2 Raperda	28.57%	jumlah raperda Usul Prakarsa DPRD yang dibahas	6 raperda	6 raperda	100,00%	Sekretariat DPRD
0002 Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama	Jumlah Hearing atau Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat atau Tokoh	76 kegiatan	73 kegiatan	96.05%	jumlah hearing atau dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat atau tokoh agama	105 kali	106 kali	100,95%	Sekretariat DPRD
0003 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	945 kali	847 kali	89.63%	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	969 kali	1.072 kali	110,63%	Sekretariat DPRD
0004 Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat Paripurna yang dilaksanakan	60 Kali	59 Kali	98.33%	jumlah rapat paripurna	60 kali	40 kali	66,67%	Sekretariat DPRD
0005 Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses untuk 50 Anggota DPRD	2 Kali	2 Kali	100.00%	jumlah kegiatan reses	3 kali	3 kali	100,00%	Sekretariat DPRD
0006 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	50 kali	13 kali	26.00%	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	50 Kali	19 Kali	38,00%	Sekretariat DPRD

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	229 kali	229 kali	100.00%	Jumlah peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD (SDM)	270 kali	222 kali	82,22%	Sekretariat DPRD
0008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	600 orang	600 orang	100.00%	Jumlah peserta sosialisasi	600 orang	600 orang	100,00%	Sekretariat DPRD
0009 Pengkajian/penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah yang Dikaji atau Ditelaah	4 Dokumen	3 Dokumen	75.00%	Jumlah pengkajian/penelaahan kebijakan daerah	10 dokumen	10 dokumen	100,00%	Sekretariat DPRD
0010 Fasilitas Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Waktu Penyediaan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyediaan fasilitas peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Sekretariat DPRD
<b>1.20.17 Program peningkatan dan Pengembangan</b>	% Peningkatan PAD	22,22%	18,42%	82,90%	% Peningkatan PAD	(16,48%) Rp.535.188 (dln juta)	(22,01%) Rp.727.879 (dln juta)	133,54%	
	% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(11,72%) 304.600.131.916	(12,33%) 301.403.587.856	105,20%	% Peningkatan penerimaan daerah lainnya	(-1,48%) Rp-43.124 (dln juta)	(-5,89%) Rp-161.735 (dln juta)		
	% Laporan yang selesai tepat waktu	80,00%	100,00%	125,00%	% Laporan yang selesai tepat waktu	80%	94%	117,65%	
0022 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	Jumlah ijin gangguan yang diterbitkan	1000 ijin	1,114 ijin	111.40%	Prosentase Jumlah Permohonan Ijin Gangguan yang Ditindaklanjuti	100%	132300%	132,30%	Badan Lingkungan Hidup
0020 Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	monitoring 6 BUMD	12 bulan	12 bulan	100.00%	monitoring dan evaluasi	6 bumd	6 bumd	100,00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
0016 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Waktu pelaksanaan manajemen aset/barang daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan manajemen aset/barang daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Perlengkapan
0028 Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	125.00%	Jumlah dokumen evaluasi dan penghapusan aset/barang daerah	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50%	Bagian Perlengkapan
0021 Peningkatan Pelayanan Perizinan (IMB, izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diproses Bidang Tata Bangunan	Jumlah pelayanan perizinan (IMB, izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diproses	6002 berkas	13,131 berkas	218.78%	Jumlah pelayanan perizinan (IMB, izin Reklame dan Izin Layak Huni) yang diproses	6.002 berkas	12.858 berkas	214,23%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0034 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Pada Gedung Dan Perusahaan	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi	76857 alat	93,461 alat	121.60%	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dikenakan retribusi	84.543 Alat	106.396 Alat	125,85%	Dinas Kebakaran
0032 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan di 31 kecamatan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pelayanan kebersihan	31 kecamatan	31 kecamatan	100,00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
0033 Pelayanan Pendaftaran Usaha Kepariwisata	Jumlah ijin kepariwisataan yang diterbitkan	700 Ijin	839 Ijin	119.86%	Jumlah ijin kepariwisataan yang dikeluarkan	700 ijin	708 ijin	101,14%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0027 Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	100.00%	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0037 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keuangan	1 Dokumen	3 Dokumen	300.00%	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan keuangan	4 Dokumen	7 Dokumen	175,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0038 Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0039 Pengembangan Sistem Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak Daerah yang Dikembangkan	3 Sistem	3 Sistem	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0040 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan penetapan 749.595 wajib pajak daerah	108 Dokumen	108 Dokumen	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0041 Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun	15 Dokumen	15 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0042 Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	Waktu Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Jumlah Berkas Pelayanan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang diterbitkan	45.000 berkas	58.252 berkas	129,45%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0043 Monitoring Dan Evaluasi Pendapatan Dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Belanja Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0044 Penelitian Dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) Serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Jumlah berkas SPM dan SKPP yang diteliti, dinilai, dan diterbitkan	18840 Berkas	21,490 Berkas	114.07%	Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	22.000 berkas	30.585 berkas	139,02%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0045 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Jumlah Dokumen APBD, Perubahan APBD Tahun 2014 dan RAPBD Tahun 2015	18 Dokumen	18 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD	18 Dokumen	15 Dokumen	83,33%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0046 Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah Dokumen Bahan Anggaran kas yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0050 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Reklame Dan Hiburan					Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame, Hiburan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0051 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah					Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0052 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB Dan BPHTB					Jumlah dokumen Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN - PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0053 Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi Dan Kompensasi Pajak Daerah					Waktu Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0054 Penagihan Pajak Daerah					Waktu Pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0055 Koordinasi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) Dan Pendapatan Lain-Lain					Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak yang dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0047 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bagi Hasil Pajak	Jumlah kegiatan Koordinasi Bagi Hasil Pajak yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0048 Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang dilaksanakan	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0049 Pelaksanaan Penagihan, Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi Pajak Daerah	Jumlah kegiatan penagihan dan pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi pajak daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%					Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
0023 Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Jumlah dokumen hasil pendataan dan penelitian terhadap ijin pemakaian tanah yang dikelola	12 Buku	12 Buku	100.00%	Jumlah dokumen hasil Pendataan dan Penelitian terhadap ijin pemakaian tanah yang dikelola	12 buku	12 buku	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0024 Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya	24 Buku	6 Buku	25.00%	Jumlah laporan pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemkot Surabaya	24 buku	24 buku	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0025 Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Jumlah laporan monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset Pemkot	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0026 Pengawasan Dan Pengelolaan Gedung Sewa Dan Jembatan penyeberangan Orang (JPO)	Jumlah laporan Pengawasan dan Pengelolaan Gedung sewa, Jembatan penyeberangan Orang (JPO)	12 Dokumen	12 Dokumen	100.00%	Jumlah laporan Pengawasan dan pengelolaan gedung sewa, jembatan penyeberangan orang (JPO)	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
0029 Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 20 jenis pendukung pelayanan UPTD Metrologi Legal	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0030 Pelayanan UPTD Pasar Turi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan 6 jenis pendukung pelayanan UPTD Pasar Turi	12 bulan	12 bulan	100.00%					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0031 Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi	Jumlah TPS Pasar Turi yang terbangun	580 unit	0 unit	0.00%					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0035 Pengelolaan Parkir	Waktu pengelolaan parkir	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pengelolaan parkir	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perhubungan
0036 Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak	3000960 lembar	2,033,460 lembar	67.76%	Jumlah blanko dan karcis retribusi di bidang perhubungan yang dicetak	21.799.564 Lembar	21.779.000 Lembar	99,91%	Dinas Perhubungan
<b>1.20.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan</b>	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203	27	186,70%	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	197	27	186,29%	Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat serta Bagian Bina Program
0013 Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota	100 SK	28 SK	28.00%	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang ditindak lanjuti dengan SK Walikota	50 SK	20 SK	40,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0014 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Waktu pelaksanaan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan selama	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan selama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Bina Program
0015 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja Belanja Langsung	Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak	100 Buku	100 Buku	100.00%	Dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja Belanja Langsung yang disusun sebanyak	100 Buku	147 Buku	147,00%	Bagian Bina Program
0005 Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen Inventarisasi dan Evaluasi hasil temuan pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah laporan kegiatan Inventarisasi dan Evaluasi hasil temuan pengawasan 2 Kali pertahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Inspektorat
0007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 2 Kali pertahun	2 Dokumen	3 Dokumen	150,00%	Inspektorat
0009 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparatur yang mendapatkan Penilaian Angka Kredit	27 Orang	25 Orang	92.59%	Jumlah kegiatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan terhadap 27 orang	2 kali pertahun	2 kali pertahun	100,00%	Inspektorat
0010 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah I	124 Laporan	68 Laporan	54.84%	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I pada 25 SKPD sebanyak 12 kali pertahun	107 Laporan	102 Laporan	95,33%	Inspektorat
0011 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah II	124 Laporan	93 Laporan	75.00%	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I pada 25 SKPD sebanyak 12 kali pertahun	107 Laporan	104 Laporan	97,20%	Inspektorat
0012 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pelaksanaan dan penanganan kasus pada inspektur pembantu wilayah III di lingkungan Kota Surabaya	123 Laporan	68 Laporan	55.28%	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III pada 24 SKPD sebanyak 12 kali pertahun	106 Laporan	103 Laporan	97,17%	Inspektorat
0016 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya					Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah I pada 25 SKPD sebanyak 12 kali pertahun	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	Inspektorat

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0017 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya					Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah II pada 24SKPD sebanyak 12 kali pertahun	16 Laporan	17 Laporan	106,25%	Inspektorat
0018 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya					Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring pada inspektorat pembantu wilayah III pada 24 SKPD sebanyak 12 kali pertahun	16 Laporan	16 Laporan	100,00%	Inspektorat
<b>1.20.24 Program Mengintensifkan Penanganan</b>	Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	100%	100%	100%	Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindak lanjuti	100%	100,00%	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0002 Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelayanan keluhan/pengaduan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	94,44%	97,30%	103,03%	Persentase MOU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	100%	100,00%	100,00%	Bagian Kerjasama
0005 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kerjasama Terhadap 8 Lembaga	8 Kegiatan	10 Kegiatan	125,00%	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Dengan Lembaga atau Instansi di Dalam Negeri	8 Kegiatan	19 Kegiatan	237,50%	Bagian Kerjasama
0006 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100,00%	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100,00%	Bagian Kerjasama
0007 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100,00%	Jumlah Kegiatan Pembentukan dan Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri	14 Kegiatan	17 Kegiatan	121,43%	Bagian Kerjasama
0008 Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan fasilitasi delegasi internasional yang Dilaksanakan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	110,00%	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri yang Dilaksanakan	10 Kegiatan	13 Kegiatan	130,00%	Bagian Kerjasama
0009 Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00%	Jumlah Dokumen Kajian dan Laporan Hasil Kerjasama Daerah Kota Surabaya yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Bagian Kerjasama
<b>1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100,00%	Bagian Hukum
0001 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	65 Perkara/Kasus	65 Perkara/Kasus	100,00%	Jumlah Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tertangani	65 perkara/kasus	65 perkara/kasus	100,00%	Bagian Hukum
0002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 Rancangan Produk Hukum	89 Rancangan Produk Hukum	127,14%	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	70 rancangan	80 rancangan	114,29%	Bagian Hukum
0004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Berlaku untuk 800 Orang	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100,00%	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Yang Berlaku untuk 800 Orang	8 kegiatan	8 kegiatan	100,00%	Bagian Hukum
0005 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui lembaran daerah dan berita daerah	70 Produk Hukum	100 Produk Hukum	142,86%	Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan melalui lembaran daerah dan berita daerah	70 Produk Hukum	73 Produk Hukum	104,29%	Bagian Hukum
0006 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru,lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	Jumlah Dokumen Hasil Kajian 12 Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	Bagian Hukum
<b>1.20.29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	96,71%	79,81%	82,53%	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat struktural	99,28%	84,32%	84,93%	
	Persentase penataan jabatan struktural	90,64%	88,78%	97,95%	Persentase penataan jabatan struktural	92,95%	96,20%	103,50%	
0001 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan	342 orang	342 orang	100,00%	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Prajabatan	1.221 orang	1.178 orang	96,48%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0002 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah	37 orang	25 orang	67,57%	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Struktural bagi PNS Daerah	60 Orang	60 Orang	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0003 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	1414 orang	1,283 orang	90.74%	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	766 orang	869 orang	113,45%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0004 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional	1030 orang	1,150 orang	111.65%	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Fungsional	201 orang	236 orang	117,41%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0006 Ujian Dinas Tingkat I	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I	45 orang	28 orang	62.22%	Jumlah Peserta yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I	31 Orang	31 Orang	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0007 Pembinaan Pola Karir Dan Bakat PNS	Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya	1007 orang	1,007 orang	100.00%	Jumlah Pegawai yang dibina karir dan bakatnya	525 orang	520 orang	99,05%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0008 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan	1 sistem	1 sistem	100.00%	Sistem Informasi Kepegawaian Daerah yang dikembangkan	1 Sistem	1 Sistem	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0009 Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang diberi Penghargaan	750 orang	661 orang	88.13%					Badan Kepegawaian dan Diklat
0011 Tes Kesehatan bagi Pegawai	Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan	540 orang	540 orang	100.00%	Jumlah Peserta yang mengikuti Tes Kesehatan	550 orang	560 orang	101,82%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0012 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Administrasi Calon Peserta IPDN	19060 orang	16,117 orang	84.56%	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi CPNS dan Administrasi Calon Peserta IPDN	10.080 orang	0 orang	0,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0013 Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Jumlah Pegawai ditingkatkan wawasannya	1268 orang	1,046 orang	82.49%	Jumlah Pegawai ditingkatkan wawasannya	225 orang	225 orang	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0014 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah PNS yang ditempatkan dan mengikuti fit and proper test	897 orang	901 orang	100.45%	Jumlah PNS yang ditempatkan dan mengikuti fit and proper test	512 orang	682 orang	133,20%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0015 Penataan Administrasi Kepegawaian	Waktu Pelaksanaan Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Penataan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0016 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Waktu pelaksanaan 4 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan 4 jenis kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
<b>1.20.31 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	44,00%	55,00%	125,00%	Prosentase pemrosesan produk inti (core Business) yang memiliki prosedur tetap	49,00%	77,00%	157%	
	Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	28,00%	29,17%	104,18%	Prosentase SKPD yang telah melaksanakan hasil analisa jabatan dan beban kerja	35,00%	57,00%	163%	
0001 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi pada 5 SKPD	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi pada 5 SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Standart Kompetensi yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0002 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah Dokumen Analisa Kelembagaan yang disusun	2 Dokumen	3 Dokumen	150.00%	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0003 Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Penyusunan SOP SKPD dan Pengkajian Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0005 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kerja yang Diukur IKM-nya	114 unit kerja	115 unit kerja	100.88%	Jumlah unit pelayanan yang dilakukan survey kepuasan masyarakat	114 Unit Pelayanan	125 Unit Pelayanan	109,65%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0008 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen LAKIP Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0009 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem dan Mekanisme Pelayanan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Jumlah Dokumen Hasil Pendampingan Pemrosesan Produk Inti	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0010 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen evaluasi road map reformasi birokrasi Pemerintah Kota Surabaya dan laporan pengendalian manajemen organisasi pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0011 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah SKPD yang Dimonitor dan Dievaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	12 SKPD	19 SKPD	158.33%	Jumlah SKPD yang Dimonitor dan Dievaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	12 SKPD	12 SKPD	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0014 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlayani	1200 Paket	1,575 Paket	131.25%	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terlayani	1.200 Paket	1.283 Paket	106,92%	Bagian Perlengkapan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0015 Penyusunan Analisa Kebutuhan Dan Harga Satuan Kebutuhan Barang Daerah	Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah dokumen analisa kebutuhan dan harga satuan barang daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Bagian Perlengkapan
0016 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	8096 Stel	8,137 Stel	100.51%	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang tersedia	8.510 Stel	8.520 Stel	100,12%	Bagian Perlengkapan
0012 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan 50 item sarana sistem persandian	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan 2 jenis pemeliharaan dan pengadaan 50 item sarana sistem persandian	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Umum dan Protokol
0013 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Waktu pelaksanaan penyediaan 5 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 5 jenis pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Umum dan Protokol
0141 Operasional Kelurahan Asemrowo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Asemrowo
0142 Operasional Kelurahan Genting	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Asemrowo
0143 Operasional Kelurahan Greges	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Asemrowo
0144 Operasional Kelurahan Kalianak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Asemrowo
0145 Operasional Kelurahan Tambaklanon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Asemrowo
0143 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso					Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Asemrowo
0144 Operasional Kelurahan Genting Kalianak					Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Asemrowo
0152 Operasional Kelurahan Kandangan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Benowo
0153 Operasional Kelurahan Klakahrejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Benowo
0154 Operasional Kelurahan Romokalisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Benowo
0155 Operasional Kelurahan Sememi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Benowo
0156 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Benowo
0032 Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0033 Operasional Kelurahan Bubutan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0034 Operasional Kelurahan Gundih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0035 Operasional Kelurahan Jepara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0036 Operasional Kelurahan Tembok Duku	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bubutan
0172 Operasional Kelurahan Bulak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bulak
0173 Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bulak
0174 Operasional Kelurahan Kenjeran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bulak
0175 Operasional Kelurahan Komplek Kenjeran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Bulak
0176 Operasional Kelurahan Sukolilo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Bulak
0176 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru					Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Bulak
0108 Operasional Kelurahan Duku Kupang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Duku Pakis
0109 Operasional Kelurahan Duku Pakis	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Duku Pakis
0110 Operasional Kelurahan Gunungsari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Duku Pakis
0111 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Duku Pakis
0112 Operasional Kelurahan Duku Menanggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Gayungan
0113 Operasional Kelurahan Gayungan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Gayungan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0114 Operasional Kelurahan Ketintang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Gayungan
0115 Operasional Kelurahan Menanggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Gayungan
0017 Operasional Kelurahan Genteng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0018 Operasional Kelurahan Kapasari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0019 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0020 Operasional Kelurahan Ketabang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0021 Operasional Kelurahan Peneleh	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Genteng
0064 Operasional Kelurahan Airlangga	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0065 Operasional Kelurahan Barata Jaya	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0066 Operasional Kelurahan Gubeng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0067 Operasional Kelurahan Kertajaya	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0068 Operasional Kelurahan Mojo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0069 Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gubeng
0076 Operasional Kelurahan Gununganyar	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0077 Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0078 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0079 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0116 Operasional Kelurahan Jambangan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Jambangan
0117 Operasional Kelurahan Karah	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Jambangan
0118 Operasional Kelurahan Kebonsari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Jambangan
0119 Operasional Kelurahan Padesangan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Jambangan
0104 Operasional Kelurahan Karangpilang	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Karangpilang
0105 Operasional Kelurahan Kebraon	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Karangpilang
0106 Operasional Kelurahan Kedurus	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Karangpilang
0107 Operasional Kelurahan Waru Gunung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Karangpilang
0037 Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Kenjeran
0038 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Kenjeran
0039 Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Kenjeran
0040 Operasional Kelurahan Tanah Kalkedinding	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Kenjeran
0051 Operasional Kelurahan Dupak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0052 Operasional Kelurahan Kemayoran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0053 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0054 Operasional Kelurahan Morokrembangan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0055 Operasional Kelurahan Perak Barat	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Krembangan
0157 Operasional Kelurahan Bangkingan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0158 Operasional Kelurahan Jeruk	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0159 Operasional Kelurahan Lakarsantri	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0160 Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0161 Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0162 Operasional Kelurahan Sumur Welut	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0092 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0093 Operasional Kelurahan Kalijudan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0094 Operasional Kelurahan Kaisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0095 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0096 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0097 Operasional Kelurahan Mulyorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0041 Operasional Kelurahan Bongkaran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0042 Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0043 Operasional Kelurahan Nyamplungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0044 Operasional Kelurahan Perak Timur	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0045 Operasional Kelurahan Perak Utara	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0167 Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0168 Operasional Kelurahan Benowo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0169 Operasional Kelurahan Pakal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0170 Operasional Kelurahan Sumberejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Pakal
0171 Operasional Kelurahan Tambakdono	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%					Kec. Pakal
0170 Operasional Kelurahan Sumber Rejo					Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Pakal
0031 Operasional Kelurahan Wonorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0070 Operasional Kelurahan Kalirungkut	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0071 Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0072 Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0073 Operasional Kelurahan Penjaringsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0074 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Rungkut
0163 Operasional Kelurahan Bringin	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sambikerep
0164 Operasional Kelurahan Lontar	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sambikerep
0165 Operasional Kelurahan Made	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sambikerep
0166 Operasional Kelurahan Sambikerep	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sambikerep
0125 Operasional Kelurahan Banyu Urip	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0126 Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0127 Operasional Kelurahan Pakis	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0128 Operasional Kelurahan Petemon	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0129 Operasional Kelurahan Putat Jaya	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0130 Operasional Kelurahan Sawahan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0046 Operasional Kelurahan Ampel	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0047 Operasional Kelurahan Pegirian	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0048 Operasional Kelurahan Sidotopo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0049 Operasional Kelurahan Ujung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0050 Operasional Kelurahan Wonokusumo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0022 Operasional Kelurahan Kapasan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0023 Operasional Kelurahan Sidodadi	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0024 Operasional Kelurahan Simokerto	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0025 Operasional Kelurahan Simolawang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0026 Operasional Kelurahan Tambakrejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0085 Operasional Kelurahan Gebang Putih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0086 Operasional Kelurahan Keputih	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0087 Operasional Kelurahan Klampisngasem	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0088 Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0089 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0090 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0091 Operasional Kelurahan Semolowaru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0146 Operasional Kelurahan Putat Gede	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0147 Operasional Kelurahan Simomulyo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0148 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0149 Operasional Kelurahan Sonokwijen	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0150 Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0151 Operasional Kelurahan Tanjungsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0056 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0057 Operasional Kelurahan Gading	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0058 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0059 Operasional Kelurahan Pacar Keling	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0060 Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0061 Operasional Kelurahan Ploso	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0062 Operasional Kelurahan Rangkah	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0063 Operasional Kelurahan Tambaksari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0135 Operasional Kelurahan Balongsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0136 Operasional Kelurahan Banjarsuaitan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0137 Operasional Kelurahan Karangpoh	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0138 Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0139 Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0140 Operasional Kelurahan Tandes	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0027 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0028 Operasional Kelurahan Kedungdoro	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0029 Operasional Kelurahan Keputran	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0030 Operasional Kelurahan Tegalsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0031 Operasional Kelurahan Wonorejo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0080 Operasional Kelurahan Kendangsari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0081 Operasional Kelurahan Kutisari	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0082 Operasional Kelurahan Panjanganjwo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0083 Operasional Kelurahan Prapen	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%					Kec. Tenggilis Mejoyo
0084 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0131 Operasional Kelurahan Babatan	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0132 Operasional Kelurahan Balas Klumprik	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0133 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0134 Operasional Kelurahan Wiyung	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0120 Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0121 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0122 Operasional Kelurahan Margorejo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0123 Operasional Kelurahan Sidosermo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0124 Operasional Kelurahan Siwalankerto	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0098 Operasional Kelurahan Darmo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0099 Operasional Kelurahan Jagir	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0100 Operasional Kelurahan Ngagel	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0101 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0102 Operasional Kelurahan Sawunggaling	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0103 Operasional Kelurahan Wonokromo	Waktu penyelenggaraan operasional kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyelenggaraan Operasional Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>1.20.32 Program Penataan Daerah Otonom</b>	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	44%	44%	100,00%	Persentase Penegasan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	50%	50%	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0001 Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah patok batas wilayah yang terpasang	260 Patok	260 Patok	100.00%	Jumlah patok batas wilayah yang terpasang	261 Patok	261 Patok	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0002 Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Jumlah peserta yang mengikuti dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	10646 orang	0 orang	0.00%	Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog dengan Tokoh-tokoh Masyarakat dan Penataan Manajemen Administrasi RT	31 kecamatan	6 kecamatan	19,35%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0003 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina administrasi umum dan pemerintahannya	191 SKPD	191 SKPD	100.00%	Jumlah pelaksanaan pembinaan administrasi umum pemerintahan pada kecamatan dan kelurahan	3 kali	3 kali	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0004 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan otonomi daerah	5 kegiatan	5 kegiatan	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0005 Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Toponimi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan toponimi	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0006 Lomba Kelurahan Berhasil	Jumlah peserta lomba kelurahan berhasil	160 Kelurahan	160 Kelurahan	100.00%	Pelaksanaan kegiatan lomba kelurahan berhasil di 154 kelurahan	1 kali	1 kali	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0009 Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan Di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggabungan Kelurahan di Kota Surabaya	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	120 orang	120 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	120 orang	120 orang	100,00%	Kec. Asemrowo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	270 orang	270 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	270 orang	270 orang	100,00%	Kec. Benowo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	360 orang	360 orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	360 Orang	360 Orang	100,00%	Kec. Bubutan
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 Orang	420 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 Orang	420 Orang	100,00%	Kec. Bulak
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	105 Orang	105 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	105 orang	105 orang	100,00%	Kec. Gayungan
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100,00%	Kec. Genteng
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	90 orang	90 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	90 orang	90 orang	100,00%	Kec. Gubeng
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	165 orang	165 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	165 orang	165 orang	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	315 Orang	315 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	315 orang	315 orang	100,00%	Kec. Jambangan
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Karangpilang
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100,00%	Kec. Kenjeran
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100,00%	Kec. Krembangan
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	204 orang	204 orang	100.00%	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	204 Orang	170 Orang	83,33%	Kec. Lakarsantri
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 orang	360 orang	85.71%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	420 orang	420 orang	100,00%	Kec. Mulyorejo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	180 Orang	180 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	180 Orang	180 Orang	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	150 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Pakal
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 orang	300 orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100,00%	Kec. Rungkut

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	192 orang	192 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Sambikerep
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	300 Orang	300 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	300 orang	300 orang	100,00%	Kec. Sawahan
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	105 Orang	105 Orang	100.00%	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	105 orang	105 orang	100,00%	Kec. Semampir
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100,00%	Kec. Simokerto
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 orang	300 orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	300 Orang	300 Orang	100,00%	Kec. Sukolilo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	75 orang	75 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	75 orang	75 orang	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	240 orang	240 orang	100.00%	jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	240 orang	240 orang	100,00%	Kec. Tambaksari
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	200 orang	200 orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	200 orang	200 orang	100,00%	Kec. Tandes
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	146 Orang	97.33%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100,00%	Kec. Tegalsari
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 Orang	120 Orang	100.00%	Jumlah Peserta Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan	120 Orang	120 Orang	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	100 Orang	100 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	100 orang	100 orang	100,00%	Kec. Wiyung
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 Orang	150 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	150 orang	150 orang	100,00%	Kec. Wonocolo
0008 Pembinaan, Penyuluhan Dan Optimalisasi Kecamatan	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	245 Orang	245 Orang	100.00%	Jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan optimalisasi kecamatan	245 orang	245 orang	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan 7 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran selama	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran selama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Bina Program
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 8 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Hubungan Masyarakat
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 Jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 Jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Hukum
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Kerjasama
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan jenis Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Penyediaan Kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Penyediaan 6 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Penyediaan 6 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 8 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	penyediaan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah



Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sawahan
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Semampir
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Simokerto
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 10 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Sukolilo
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tambaksari
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tandes
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Kec. Tegalsari
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wiyung
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonocolo
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu penyelenggaraan penyediaan sebanyak 11 jenis kebutuhan barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kec. Wonokromo
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	waktu pelaksanaan penyediaan 10 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Sekretariat DPRD
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan 46 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran selama	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Pelaksanaan Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran selama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Bina Program
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana prasaranaWaktu Pelaksaaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Hubungan Masyarakat
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 Jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Hukum
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Kerjasama
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan/ Pengadaan jenis Sarana prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah







Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.21.16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	Pola Pangan harapan	92,92	92,93	100,01%	Pola Pangan harapan	95	95	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
0009 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitas Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (Urban Farming)	3000 KK	3,000 KK	100,00%	Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang disediakan	106 Paket	106 Paket	100,00%	Dinas Pertanian
0020 Pengembangan Perbenihan/perbibitan	Jenis benih dan bibit tanaman yang dikembangkan	24 Jenis	24 Jenis	100,00%	Jenis benih dan bibit tanaman yang dikembangkan	45 Jenis	45 Jenis	100,00%	Dinas Pertanian
0034 Pengembangan Perikanan	Jumlah KK Miskin Yang Mendapatkan Urban Farming Perikanan	2000 KK	2,000 KK	100,00%	Jumlah Sarana Produksi Perikanan Budidaya yang disediakan	334 Paket	334 Paket	100,00%	Dinas Pertanian
0035 Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Waktu pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan	193 kali	193 kali	100,00%	Dinas Pertanian
0036 Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	64 kali	64 kali	100,00%	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	64 kali	63 kali	98,44%	Dinas Pertanian
0022 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Jumlah orang yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan	871 Orang	871 Orang	100,00%	Jumlah orang yang dilatih dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan	300 Orang	300 Orang	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
0030 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak	500 Orang	500 Orang	100,00%	Jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan sumber pangan alternatif sebanyak	1.890 Orang	1.890 Orang	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
0032 Promosi Hasil Pengelolaan Pangan Lokal	Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan	2 Event	3 Event	150,00%	Jumlah Event Promosi yang diikuti dan diselenggarakan	2 Event	2 Event	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
0033 Monitoring Ketersediaan Dan Keamanan Pangan	waktu pelaksanaan Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan Monitoring Ketersediaan dan Keamanan Pangan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>									
<b>1.22.20 Program Penanggulangan Kemiskinan</b>	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 orang	1655 orang	111,30%	jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1487 Orang	1725 orang	116%	Bapemas dan KB
0003 Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	2500 Orang	2,500 Orang	100,00%	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	2.500 Orang	2.500 Orang	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0004 Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pemanfaatan sumber daya alam	1487 orang	1,487 orang	100,00%	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pemanfaatan sumber daya alam	1.487 Orang	1.359 Orang	91,39%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0006 Fasilitas Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Waktu Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0007 Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan	9872 orang	9,816 orang	99,43%	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan	2.575 Orang	2.542 Orang	98,72%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0008 Fasilitas Pelaksanaan Program Beras Miskin	Waktu Pelaksanaan program beras miskin	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan program beras miskin	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0009 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	Jumlah Peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan	1052 orang	1,052 orang	100,00%	Jumlah Peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan	1.052 Orang	1.052 Orang	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0010 Fasilitas Program Penanggulangan Kemiskinan	Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0011 Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data gakin	160 Kelurahan	160 Kelurahan	100.00%	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga miskin	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100,00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
0002 Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan	Biaya Operasional Kegiatan (BOP) Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)	3 bulan	5 bulan	166.67%	Waktu penyediaan operasional penunjang pelaksanaan kegiatan PNPM mandiri perkotaan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Asemrowo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Benowo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Bubutan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Bulak
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Dukuh Pakis
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Gayungan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Genteng
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Gubeng
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Gunung Anyar
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Jambangan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Karangpilang
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Kenjeran
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Krembangan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Lakarsantri
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Mulyorejo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Pabean Cantian
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Pakal
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Rungkut
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Sambikerep
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Sawahan
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Semampir
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah Laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Simokerto
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	22 laporan	91.67%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Sukolilo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Sukomanunggal
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	23 laporan	95.83%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Tambaksari
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100.00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 laporan	24 laporan	100,00%	Kec. Tandes
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100.00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Tegalsari

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring dan pendataan Kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Wiyung
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Wonocolo
0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Jumlah laporan kegiatan monitoring dan pendataan kemiskinan yang disusun	24 Laporan	24 Laporan	100,00%	Kec. Wonokromo
<b>1.24 Kearsipan</b>									
<b>1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku)	83,00%	83,00%	100,00%	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (Sistem Baku)	100%	100,00%	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
0008 Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah unit kerja yang mendapat pembinaan sistem kearsipan	193 Unit Kerja	193 Unit Kerja	100,00%	Jumlah kegiatan pembinaan sistem kearsipan di 226 unit kerja	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0009 Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	jumlah unit kerja yang mendapatkan penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah	51 Unit Kerja	51 Unit Kerja	100,00%	Jumlah kegiatan pendampingan penataan dan pendataan sistem kearsipan daerah pada 51 unit kerja	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0010 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	Waktu Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan penyelamatan kearsipan	12 kali	12 kali	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0011 Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran	3 kali	3 kali	100,00%	Jumlah pelaksanaan kegiatan pameran	3 kali	3 kali	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0012 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 2 jenis sarana penyimpanan kearsipan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.25 Komunikasi dan Informatika</b>									
<b>1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	52.689 kunjungan	244.652 kunjungan	464,33%	Jumlah kunjungan rata-rata perbulan pada website www.surabaya.go.id	56.453 kunjungan	155.262 kunjungan	275,03%	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat.
0008 Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Waktu Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Waktu Pelaksanaan Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	12 bulan	12 bulan	100,00%	Bagian Hubungan Masyarakat
0009 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Waktu pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Bagian Hubungan Masyarakat
0010 Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00%	Jumlah Pembuatan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya	22 dokumen	22 dokumen	100,00%	Bagian Hubungan Masyarakat
0003 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan	20 Kali	19 Kali	95,00%	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilaksanakan	12 Kali	12 Kali	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0011 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id	1872 Materi	1.923 Materi	102,72%	Jumlah data dan informasi yang diupload di website www.surabaya.go.id	1.872 Materi	1.883 Materi	100,59%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0012 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan	107 kali	114 kali	106,54%	Jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan	78 Kali	78 Kali	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.25.19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	18,52% = 20 sistem	22,22% = 24 sistem	119,98%	Prosentase antara jumlah layanan publik berbasis TIK dengan jumlah total layanan publik (108 Pelayanan Publik)	23,15% = 25 sistem	26,85% = 29 sistem	115,98%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	7,00%	13,83%	197,57%	Prosentase antara jumlah pengguna layanan publik berbasis web dengan jumlah total pengguna layanan publik berbasis TIK	8,00%	39,23%	490,38%	
0001 Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Pembangunan Jaringan Fiber Optik	5 SKPD	5 SKPD	100,00%	Pembangunan CCTV sebanyak	196 Titik	196 Titik	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0002 Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	Jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data	10 Sistem	10 Sistem	100.00%	Jumlah sistem informasi pelayanan publik dan Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi ke pusat data	5 Sistem	5 Sistem	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0004 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan 4 jenis sistem informasi pelayanan publik	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan 4 jenis sistem informasi pelayanan publik	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0005 Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	Pengawasan dan penertiban perijinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi	36 Kali	36 Kali	100.00%	Pengawasan dan penertiban perijinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0006 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Jumlah pmbangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya	12 Gedung	12 Gedung	100.00%	Jumlah pembangunan grounding gedung Pemerintah Kota Surabaya	12 Gedung	12 Gedung	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0007 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis prasarana jaringan telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0008 Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan menara bersama	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0009 Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan opensource software	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
0010 Sosialisasi Dan Pembinaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK)	Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	20 Kali	20 Kali	100.00%	Pengelolaan Sarana Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	Waktu pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.26 Perpustakaan</b>									
<b>1.26.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan</b>									
0008 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Jumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%	Jumlah kegiatan Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	3 kegiatan	3 kegiatan	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0011 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	Bahan pustaka yang disediakan	141716 buku	141,716 buku	100.00%	Bahan pustaka yang disediakan	74.488 buku	74.488 buku	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0012 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Orang yang dibina tentang pengelolaan perpustakaan	250 orang	250 orang	100.00%	Jumlah petugas yang diberi pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan	225 orang	225 orang	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
0013 Pengelolaan Layanan Baca	Waktu Pengelolaan layanan baca di 519 lokasi	12 bulan	12 bulan	100.00%	Jumlah supervisi layanan baca di 918 titik lokasi	12 kali	12 kali	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Penyediaan 9 Jenis Barang dan Jasa Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan 3 Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>2.01 Pertanian</b>									

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>2.01.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>	Terbentuknya Sentra Produk Pertanian	30 sentra	30 sentra	100,00%	Terbentuknya Sentra Produk Pertanian	34 Sentra	34 sentra	100,00%	Dinas Pertanian
0006 Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah peserta pengembangan agribisnis peternakan	30 kelompok	30 kelompok	100,00%	Jumlah Ternak yang disediakan	29 Paket	29 Paket	100,00%	Dinas Pertanian
0007 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Peternakan	Jumlah sarana yang dibangun dan dipelihara	4 unit	4 unit	100,00%	Jumlah prasarana peternakan yang dibangun dan dipelihara	2 unit	2 unit	100,00%	Dinas Pertanian
0008 Pengembangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Jumlah lokasi pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	27 lokasi	27 lokasi	100,00%	Jumlah tanaman pangan dan hortikultura yang disediakan	4.848 unit	4.863 unit	100,31%	Dinas Pertanian
0009 Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh yang dilaksanakan	15 kali	15 kali	100,00%	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pembinaan tenaga penyuluh yang dilaksanakan	15 kali	8 kali	53,33%	Dinas Pertanian
0010 Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah peserta pengembangan agribisnis pertanian	405 orang	405 orang	100,00%	Jumlah peserta pengembangan agribisnis pertanian	405 orang	418 orang	103,21%	Dinas Pertanian
0011 Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	Waktu pelaksanaan 1 jenis pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan peliharaan	12 bulan	12 bulan	100,00%	Jumlah pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan peliharaan	240 kali	444 kali	185,00%	Dinas Pertanian
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pertanian
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100,00%	Dinas Pertanian
<b>2.04 Pariwisata</b>									
<b>2.04.15 Program Pengembangan</b>	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190.872 wisatawan	742.084 wisatawan	388,79%	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	196.390 wisatawan	638.583 wisatawan	325,16%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.296.157 wisatawan	15.929.745 wisatawan	192,01%	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8.509.348 wisatawan	15.099.061 wisatawan	177,44%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0004 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah forum Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata yang dilaksanakan	6 Forum	6 Forum	100,00%	Jumlah forum komunikasi dengan sektor pendukung pariwisata yang dilaksanakan	6 Forum	6 Forum	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Jumlah promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan	11 promosi	11 promosi	100,00%	Jumlah promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri yang dilaksanakan	11 Promosi	11 Promosi	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0009 Penyelenggaraan Festival Kuliner	Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan dan diikuti	4 Festival	4 Festival	100,00%	Jumlah festival kuliner yang diselenggarakan dan diikuti	3 Festival	3 Festival	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0010 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Ampel	Waktu Pelaksanaan 6 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel	12 bulan	12 bulan	100,00%	Pelaksanaan 5 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0011 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda Dan GNI	Waktu Pelaksanaan 10 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI	12 bulan	12 bulan	100,00%	Pelaksanaan 11 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Balai Pemuda dan GNI	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0012 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Kenjeran Dan Kalimas	Waktu Pelaksanaan 15 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Pelaksanaan 4 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Kenjeran dan Kalimas	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0013 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata THR	Waktu Pelaksanaan 112 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR	12 bulan	12 bulan	100,00%	Pelaksanaan 112 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0014 Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan Dan Museum 10 November	Waktu Pelaksanaan 4 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November	12 bulan	12 bulan	100,00%	Pelaksanaan 3 kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Tugu Pahlawan dan Museum 10 November	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0015 Penyelenggaraan Event Di Obyek Wisata	Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata	9 Event	9 Event	100,00%	Jumlah event wisata yang diselenggarakan di obyek wisata	6 Event	6 Event	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0016 Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata	Jumlah Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata yang dibina	150 Orang	160 Orang	106,67%	Jumlah SDM Bidang Pariwisata yang dibina	220 Orang	220 Orang	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0017 Penyusunan Direktori Pariwisata Kota Surabaya	Jumlah dokumen direktori pariwisata Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Jumlah dokumen direktori pariwisata Kota Surabaya yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	Terbentuknya destinasi wisata	19 lokasi	19 lokasi	100,00%	Terbentuknya destinasi wisata	22 Lokasi	22 lokasi	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan-Program-Kegiatan	2014				2015				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
0006 Pengembangan daerah tujuan wisata	waktu pelaksanaan kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata di 3 lokasi	12 bulan	12 bulan	100.00%					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0008 Pengelolaan Cagar Budaya	waktu pengelolaan 165 bangunan dan 10 situs cagar budaya	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	jangka waktu pengelolaan 245 bangunan dan 21 situs cagar budaya	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
0009 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Lokasi pengadaaan tanah dan/atau bangunan untuk pengembangan daerah tujuan wisata	1 lokasi	0 lokasi	0.00%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>2.05 Kelautan dan Perikanan</b>									
<b>2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>	Jumlah Kelurahan Pada Kawasan Pesisir yang Diberdayakan	17 kelurahan	17 Kelurahan	100,00%	Jumlah Kelurahan Pada Kawasan Pesisir yang Diberdayakan	21 Kelurahan	21 Kelurahan	100,00%	Dinas Pertanian
0002 Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Perikanan Dan Kelautan	Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih	1086 orang	1,086 orang	100,00%	Jumlah sumberdaya manusia bidang perikanan dan kelautan yang dilatih	1.163 orang	1.163 orang	100,00%	Dinas Pertanian
0003 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perikanan Dan Kelautan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang dibangun dan dipelihara	4 lokasi	4 lokasi	100,00%	Jumlah sarana dan prasarana perikanan dan kelautan yang dibangun dan dipelihara	5 lokasi	5 lokasi	100,00%	Dinas Pertanian
0004 Pengadaan Sarana Perikanan Dan Kelautan	Jumlah sarana perikanan dan kelautan yang disediakan	1041 Paket	1,041 Paket	100,00%	Jumlah sarana perikanan dan kelautan yang disediakan	372 paket	373 paket	100,27%	Dinas Pertanian
<b>2.06 Perdagangan</b>									
<b>2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</b>	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	87,00%	100,00%	114,94%	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	90,00%	100,00%	111,11%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0002 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan	36 kasus	16 kasus	44.44%	Jumlah sengketa konsumen yang terselesaikan	36 Kasus	8 Kasus	22,22%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0003 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi	139 lokasi	142 lokasi	102,16%	Jumlah lokasi peredaran barang yang diawasi	166 Lokasi	180 Lokasi	108,43%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
0005 Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri	Jumlah UKM yang mengikuti sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri	220 UKM	193 UKM	87.73%					Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>2.06.19 Program Pembinaan Pedagang</b>	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	9 sentra	180,00%	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	6 sentra	120%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
	jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra	36 sentra	100,00%	jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	41 sentra	38 sentra	92,68%	
0001 Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jangka waktu pendampingan pembinaan di 21 sentra PKL yang telah terbangun	12 bulan	8 bulan	66.67%	Jumlah Pendampingan Manajemen Usaha di Sentra PKL	41 sentra	45 sentra	109,76%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0003 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima Dan Asongan	Jumlah lokasi usaha PKL yang ditata	15 lokasi	12 lokasi	80.00%	Jumlah lokasi tempat usaha PKL dan asongan yang ditata per tahun	8 lokasi	6 lokasi	75,00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0005 Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah sentra PKL terbangun yang mendapatkan pengawasan mutu dagangan	36 sentra	9 sentra	25.00%					Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
0003 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana penunjang penataan pedagang kakilima dan asongan	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00%					Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>x.xx.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>									
0045 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 bulan	12 bulan	100.00%	Waktu pelaksanaan pemeliharaan 4 jenis sarana dan prasarana perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100,00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 2.115  
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun Berjalan  
Kota Surabaya

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.01 Pendidikan</b>					
<b>1.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.01.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	17.20%	17.20%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.01.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	15.00%	15.00%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	99%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99%			
1.01.15.0001 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Keberhasilan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	50.00%	50.00%	Dinas Pendidikan
1.01.15.0002 Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.15.0003 Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim	Persentase Keberhasilan Persiapan Hari Anak Nasional Tk. I Jatim	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.15.0004 Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD	Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Peraga Edukatif Siswa PAUD	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.15.0005 Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Persentase Keberhasilan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%			
	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke	100%			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	105%			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%			
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105.2 %			
	Angka Partisipasi Murni (APM)	95%			
1.01.16.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01.16.0002 Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	100%	43.45%	43.45%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0003 Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	100%	7.21%	7.21%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0004 Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Dasar	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0005 Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	100%	8.33%	8.33%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0007 Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	100%	31.25%	31.25%	Dinas Pendidikan
1.01.16.0008 Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKDAS	100%	20.10%	20.10%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.17 Program Pendidikan Menengah</b>	Angka Kelulusan (AL) SMA /MA	100%			
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	105%			



Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD	
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian		
	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke	100%				
	Angka Kelulusan (AL) SMK	100%				
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0%				
	Siswa kejuruan yang lulus ujian	100%				
	Angka Partisipasi Murni (APM)	100%				
	Angka Putus Sekolah (APS)SMK	0%				
1.01.17.0004	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.01.17.0001	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	100%	6.85%	6.85%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0002	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Jenjang Pendidikan Menengah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0005	Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Promosi Kompetensi Siswa Pendidikan Menengah	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0008	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa DIKMEN	100%	42.05%	42.05%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0009	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.17.0010	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	100%	38.27%	38.27%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.18 Program Pendidikan Non Formal</b>	Lembaga kursus dan pelatihan yang siap untuk diakreditasi		25%			
	Ketuntasan pendidikan kesetaraan		90%			
1.01.18.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	100%	32.82%	32.82%	Dinas Pendidikan
1.01.18.0002	Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penunjang Kursus dan Pelatihan Serta Pendidikan Masyarakat	100%	4.53%	4.53%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Pendidik yang kompeten		71.05 %			
1.01.20.0001	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.20.0002	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
1.01.20.0003	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	0.34%	0.34%	Dinas Pendidikan
<b>1.01.23 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik</b>	Peningkatan jumlah prestasi non akademik		78%			
1.01.23.0001	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	Persentase Keberhasilan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	100%	39.35%	39.35%	Dinas Pendidikan
<b>1.02 Kesehatan</b>						
<b>1.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		70%			
1.02.01.0001	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.08%	24.08%	Dinas Kesehatan
1.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	20.15%	20.15%	RSUD Bhakti Dharma Husada

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.02.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	30.93%	30.93%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
	<b>1.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.02.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	23.77%	23.77%	Dinas Kesehatan
	1.02.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.00%	20.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
	<b>1.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	82%			
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%			
		Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%			
	1.02.15.0003 Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	100%	14.71%	14.71%	Dinas Kesehatan
	1.02.15.0002 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
	1.02.15.0001 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	100%	25.00%	25.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
	<b>1.02.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Persentase Masyarakat Yang Terlayani Pelayanan Khusus	100%			
		Cakupan kelurahan mengalami KLB	100%			
		Jumlah sample yang memenuhi syarat	80%			
		Cakupan Kelurahan Yang Memiliki	10%			
	1.02.16.0001 Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Keberhasilan Peningkatan Surveylans Epidemiologi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	100%	17.33%	17.33%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0002 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	100%	37.76%	37.76%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0003 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	100%	13.92%	13.92%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0004 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	100%	18.99%	18.99%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0005 Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	100%	20.72%	20.72%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0006 Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0007 DAK Bantuan Operasional Kesehatan	Persentase Keberhasilan DAK Bantuan Operasional Kesehatan	100%	3.79%	3.79%	Dinas Kesehatan
	1.02.16.0008 DAK Jampersal	Persentase Keberhasilan DAK Jampersal	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
	<b>1.02.20 Program Perbaikan Gizi</b>	Prevalensi Balita Kurang Gizi (< 20 %)	20%			
	1.02.20.0001 Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	100%	3.80%	3.80%	Dinas Kesehatan
	<b>1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	Tercapainya Standar Pelayanan Mutu Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	71%			
		Jumlah sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar sarana kesehatan	100%			

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	Tercapainya Standar Pelayanan Mutu Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	75%			
	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100%			
1.02.23.0001 Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	100%	85.73%	85.73%	Dinas Kesehatan
1.02.23.0003 Akreditasi Puskesmas	Persentase Keberhasilan Akreditasi Puskesmas	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
1.02.23.0005 Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100%	25.12%	25.12%	Dinas Kesehatan
1.02.23.0006 Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	100%	19.86%	19.86%	Dinas Kesehatan
1.02.23.0009 Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	100%	1.15%	1.15%	Dinas Kesehatan
1.02.23.0002 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.23.0004 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.23.0012 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	100%	38.32%	38.32%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.23.0013 Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	100%	37.50%	37.50%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.23.0007 Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	100%	37.73%	37.73%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.23.0008 Pelayanan Medik Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pelayanan Medik Rumah Sakit	100%	33.33%	33.33%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.23.0010 Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Peningkatan Mutu SDM Rumah Sakit	100%	19.68%	19.68%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.02.23.0011 Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengembangan Manajemen Dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit	100%	0.00%	0.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
<b>1.02.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	100%			
1.02.24.0001 Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	26.19%	26.19%	Dinas Kesehatan
<b>1.02.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	72%			
1.02.25.0002 Operasional Pelayanan Kesehatan	Persentase Keberhasilan Operasional Pelayanan Kesehatan	100%	93.75%	93.75%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0003 Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0004 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kesehatan
1.02.25.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskemas Pembantu	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskemas Pembantu	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah</b>	Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie	75%			
	Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD Bhakti Dharma Husada	80%			
1.02.26.0007 Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.02.26.0001 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	100%	200.00%	200.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0006 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0009 Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	25.00%	25.00%	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.02.26.0002 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	Persentase Keberhasilan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Asap Rokok	100%	0.00%	0.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0003 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	100%	0.00%	0.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0004 Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari DAK Kesehatan	100%	25.00%	25.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
1.02.26.0008 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Persentase Keberhasilan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	100%	50.00%	50.00%	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
<b>1.02.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98%			
	Cakupan kunjungan bayi	90%			
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96%			
1.02.32.0001 Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesehatan Masyarakat	100%	4.84%	4.84%	Dinas Kesehatan
1.02.32.0002 Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	100%	15.26%	15.26%	Dinas Kesehatan
<b>1.03 Pekerjaan Umum</b>					
<b>1.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.03.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.08%	25.08%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.03.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.03%	25.03%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.03.28 Program Pengendalian Banjir</b>	tingkat genangan	30.7 -			
1.03.28.0001 Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	100%	24.51%	24.51%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0002 Perencanaan Pematusan Kota	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pematusan Kota	100%	13.00%	13.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0003 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0004 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.03.28.0005 Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.03.31 Program Pengelolaan dan</b>		Penambahan jalan baru	1000 m2			
		Persentase jalan dalam kondisi baik	94.95 %			
		Peningkatan Penyediaan Prasarana Pejalan Kaki	3.8 %			
	1.03.31.0001 Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	100%	19.05%	19.05%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0003 Koordinasi Jaringan Utilitas	Persentase Keberhasilan Koordinasi Jaringan Utilitas	100%	20.00%	20.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0004 Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0005 Pembangunan Kelengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Kelengkapan Jalan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0006 Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0007 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Kelengkapannya	100%	10.79%	10.79%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.31.0008 Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.03.32 Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</b>		Penambahan Jaringan Infrastruktur Air Bersih	2000 m			
	1.03.32.0001 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	Persentase Keberhasilan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air Bersih	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.03.32.0002 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	Persentase Keberhasilan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1,04 Perumahan</b>						
<b>1.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.04.01.0001 Penyediaan Barang Dan	Persentase Keberhasilan Penyediaan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebakaran
<b>1.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.04.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebakaran
<b>1.04.21 Program Utilitas Perkotaan</b>		Lama perbaikan PJU padam <6 jam	64%			
		Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2431470 meter			
		Persentase penggunaan LED untuk PJU	13%			
	1.04.21.0001 Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	100%	11.50%	11.50%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.04.21.0002 Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Persentase Keberhasilan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.04.22 Program Perumahan dan Permukiman</b>		Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana	591.51 Ha			

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah MBR yang telah mendapatkan rumah layak huni	3691 KK			
	1.04.22.0002 Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Makam	100%	6.00%	6.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.04.22.0001 Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan
	1.04.22.0003 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	100%	5.88%	5.88%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.04.22.0005 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.04.22.0004 Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	100%	24.39%	24.39%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.04.23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>		Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	90%			
		Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran	7427 Orang			
		Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal	66%			
	1.04.23.0001 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0002 Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	35.34%	35.34%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0004 Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	Persentase Keberhasilan Simulasi Dan Latihan Bersama Penanggulangan Kebakaran	100%	90.67%	90.67%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0005 Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0006 Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Dan Pemeriksaan Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Gedung/Bangunan	100%	23.85%	23.85%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0007 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100%	0.42%	0.42%	Dinas Kebakaran
	1.04.23.0003 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.05 Penataan Ruang</b>						
<b>1.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.05.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	134.40%	134.40%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.05.02.0001 Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.05.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	35.42%	35.42%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.05.18 Program Penataan Ruang</b>	proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota	20%			
1.05.18.0001 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.05.18.0015 Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.05.18.0002 Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	100%	33.84%	33.84%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0006 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0007 Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Persentase Keberhasilan Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	100%	12.65%	12.65%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0008 Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	100%	46.67%	46.67%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0010 Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	Persentase Keberhasilan Pendataan Bidang Tata Kota Dan Bangunan Berbasis GIS	100%	3.88%	3.88%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0011 Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Penyelenggaraan Bangunan	100%	32.20%	32.20%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0012 Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	100%	19.05%	19.05%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0016 Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0017 Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	100%	23.33%	23.33%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.05.18.0003 Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0004 Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	20.00%	20.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0005 Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Survey Dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	54.20%	54.20%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0009 Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Pemanfaatan Terhadap BTKD	100%	45.80%	45.80%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0013 Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	222.73%	222.73%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.05.18.0014 Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	Persentase Keberhasilan Penyusunan Peraturan Tentang Pengelolaan Dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.06 Perencanaan Pembangunan</b>					
<b>1.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.06.01.0003 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	20.83%	20.83%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	21.68%	21.68%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	18.95%	18.95%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>1.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.06.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	18.23%	18.23%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.92%	22.92%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	37.50%	37.50%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis	60%			
	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	88%			
1.06.21.0003 Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0010 Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0011 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	100%	33.70%	33.70%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0014 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0016 Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	100%	84.70%	84.70%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0029 Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	100%	9.13%	9.13%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0032 Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0037 Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0039 Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0040 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah	100%	15.35%	15.35%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota



Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.06.21.0041 Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0052 Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Persentase Keberhasilan Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0053 Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	Persentase Keberhasilan Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	100%	0.00%	0.00%	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.06.21.0023 Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	100%	8.13%	8.13%	Bagian Bina Program
1.06.21.0044 Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	100%	14.53%	14.53%	Bagian Bina Program
1.06.21.0049 Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	100%	50.73%	50.73%	Bagian Bina Program
1.06.21.0050 Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	100%	25.00%	25.00%	Bagian Bina Program
1.06.21.0017 Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Keluarga	100%	26.45%	26.45%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0048 Evaluasi Program Bidang Pendidikan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Pendidikan	100%	6.95%	6.95%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0051 Evaluasi Program Bidang Kesehatan	Persentase Keberhasilan Evaluasi Program Bidang Kesehatan	100%	9.73%	9.73%	Bagian Kesejahteraan Rakyat
1.06.21.0005 Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	100%	100.00%	100.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.06.21.0008 Evaluasi LAKIP SKPD	Persentase Keberhasilan Evaluasi LAKIP SKPD	100%	0.00%	0.00%	Inspektorat
1.06.21.0019 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Asemrowo
1.06.21.0007 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Benowo
1.06.21.0036 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Bubutan
1.06.21.0024 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Bulak
1.06.21.0009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.06.21.0022 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Gayungan
1.06.21.0035 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Genteng
1.06.21.0027 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Gubeng
1.06.21.0015 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Gunung Anyar
1.06.21.0025 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Jambangan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.06.21.0030 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Karangpilang
1.06.21.0043 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Kenjeran
1.06.21.0038 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Krembangan
1.06.21.0034 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Lakarsantri
1.06.21.0045 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Mulyorejo
1.06.21.0020 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Pabean Cantian
1.06.21.0018 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Pakal
1.06.21.0004 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Rungkut
1.06.21.0042 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Sambikerep
1.06.21.0033 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Sawahan
1.06.21.0028 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Semampir
1.06.21.0001 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Simokerto
1.06.21.0006 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Sukolilo
1.06.21.0002 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Sukomanunggal
1.06.21.0012 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Tambaksari
1.06.21.0026 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Tandes
1.06.21.0046 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Tegalsari
1.06.21.0047 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.06.21.0031 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Wiyung
1.06.21.0021 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Wonocolo
1.06.21.0013 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	100%	100.00%	100.00%	Kec. Wonokromo
<b>1.06.26 Program Pengendalian</b>	Peningkatan Kinerja BUMD	4 Laporan			
	Termanfaatkannya Hasil Monev atau Kajian Sebagai Dasar Kebijakan/Keputusan	1 Laporan			

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.06.26.0001 Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	Persentase Keberhasilan Peningkatan Fungsi Pembinaan Dalam Pengembangan BUMD	100%	15.78%	15.78%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
	1.06.26.0002 Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Perekonomian Kota Surabaya	100%	22.49%	22.49%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>1,07 Perhubungan</b>						
	<b>1.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.07.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.93%	24.93%	Dinas Perhubungan
	<b>1.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.07.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.15%	20.15%	Dinas Perhubungan
	<b>1.07.21 Program Pengembangan Sistem</b>	Rata-rata Headway Angkutan Umum	25.91 menit			
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Sekunder	30 km/jam			
		Penggunaan kendaraan umum (Load Factor)	35.54 %			
		Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di Jalan Arteri Primer	30 km/jam			
	1.07.21.0001 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	100%	11.15%	11.15%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100%	22.34%	22.34%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0003 Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0004 Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	100%	21.96%	21.96%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0005 Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	100%	2.76%	2.76%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0007 Pengadaan Perlengkapan Jalan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan	100%	25.80%	25.80%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0008 Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	100%	22.77%	22.77%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0009 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	100%	38.02%	38.02%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0010 Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	100%	25.00%	25.00%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0011 Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	100%	25.00%	25.00%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0012 Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	100%	12.90%	12.90%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0013 Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	100%	0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0014 Operasional Bis Sekolah	Persentase Keberhasilan Operasional Bis Sekolah	100%	22.92%	22.92%	Dinas Perhubungan
	1.07.21.0015 Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)	Persentase Keberhasilan Pengadaan Perlengkapan Jalan (DAK Transportasi)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Perhubungan
<b>1,08 Lingkungan Hidup</b>						

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.08.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	43.74%	43.74%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	37.00%	37.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.08.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.88%	25.88%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	67.53%	67.53%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.08.16 Program Pengendalian</b>		- Kualitas air limbah industri COD	71%			
		- Kualitas air limbah rumah sakit BOD	71%			
		- Kualitas air limbah hotel COD	47%			
		- Kualitas air limbah industri TSS	73%			
		- Kualitas air limbah rumah sakit COD	71%			
		- Kualitas air limbah hotel TSS	51%			
		- Kualitas air limbah domestik BOD	53%			
		- Kualitas air limbah rumah sakit TSS	73%			
		- Kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	86%			
		- Kualitas air limbah industri BOD	77%			
		- Kualitas air limbah domestik TSS	55%			
		- Kualitas air limbah hotel BOD	57%			
		- Kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	86%			
	1.08.16.0001 Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air	100%	0.00%	0.00%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0002 Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan	100%	24.17%	24.17%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0003 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	100%	33.50%	33.50%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0004 Pelaksanaan Car Free Day	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Car Free Day	100%	23.57%	23.57%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0005 Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Laut Di Kawasan Pesisir Dan Laut	100%	50.00%	50.00%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0006 Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	40.50%	40.50%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0008 Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	100%	38.22%	38.22%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0009 Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	100%	10.48%	10.48%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0010 Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	100%	24.00%	24.00%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0011 Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Laboratorium Lingkungan Hidup	100%	0.00%	0.00%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0012 Pemantauan Kualitas Air Limbah	Persentase Keberhasilan Pemantauan Kualitas Air Limbah	100%	29.82%	29.82%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0013 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Persentase Keberhasilan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	100%	3.34%	3.34%	Badan Lingkungan Hidup

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.08.16.0014 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100%	0.00%	0.00%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0015 Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	100%	7.33%	7.33%	Badan Lingkungan Hidup
	1.08.16.0007 Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	100%	19.88%	19.88%	Dinas Perhubungan
	<b>1.08.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	Persentase Luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	41.15 %			
	1.08.24.0003 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Taman Dan Jalur Hijau	100%	21.57%	21.57%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.24.0004 Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Prasarana Taman Rekreasi	100%	23.27%	23.27%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.24.0005 Pengembangan Dekorasi Kota	Persentase Keberhasilan Pengembangan Dekorasi Kota	100%	10.00%	10.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.24.0006 Penataan RTH	Persentase Keberhasilan Penataan RTH	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.24.0001 Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	Persentase Keberhasilan Pembangunan Dan Pemeliharaan Hutan Kota	100%	12.83%	12.83%	Dinas Pertanian
	1.08.24.0002 Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	100%	17.65%	17.65%	Dinas Pertanian
	<b>1.08.25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota</b>	Jumlah Sampah Yang Dikelola di TPA	1400 ton/hari			
		Rata - rata Jumlah Sampah Yang Diangkut dari TPS	3500 m3			
		Cakupan Layanan Kebersihan	187 TPS			
	1.08.25.0007 Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Persentase Keberhasilan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	100%	24.21%	24.21%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0012 Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Pengawasan Operasional Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0014 Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	100%	20.24%	20.24%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0019 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0020 Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	100%	7.14%	7.14%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0021 Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	Persentase Keberhasilan Operasional Pembersihan Sampah Di Saluran	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0028 Operasional Pengolahan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengolahan Sampah	100%	24.86%	24.86%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0031 Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan IPLT Keputih	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0032 Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Kebersihan	100%	67.32%	67.32%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0033 Operasional Pengangkutan Sampah	Persentase Keberhasilan Operasional Pengangkutan Sampah	100%	25.05%	25.05%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0036 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0037 Operasional Penyapuan Jalan	Persentase Keberhasilan Operasional Penyapuan Jalan	100%	29.13%	29.13%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.25.0040 Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	Persentase Keberhasilan Perencanaan Teknis Kebersihan Dan Pertamanan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.08.25.0002 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.83%	0.83%	Kec. Asemrowo
1.08.25.0008 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	20.00%	20.00%	Kec. Benowo
1.08.25.0018 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	30.00%	30.00%	Kec. Bubutan
1.08.25.0011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	18.18%	18.18%	Kec. Bulak
1.08.25.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Dukuh Pakis
1.08.25.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Gayungan
1.08.25.0017 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Genteng
1.08.25.0035 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Gubeng
1.08.25.0024 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	266.67%	266.67%	Kec. Gunung Anyar
1.08.25.0044 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Jambangan
1.08.25.0023 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	22.22%	22.22%	Kec. Karangpilang
1.08.25.0042 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Kenjeran
1.08.25.0006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	27.27%	27.27%	Kec. Krembangan
1.08.25.0038 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Lakarsantri
1.08.25.0009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Mulyorejo
1.08.25.0013 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	30.00%	30.00%	Kec. Pabean Cantian
1.08.25.0005 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	11.11%	11.11%	Kec. Pakal

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.08.25.0029 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Rungkut
	1.08.25.0041 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Sambikerep
	1.08.25.0016 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	20.00%	20.00%	Kec. Sawahan
	1.08.25.0022 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Semampir
	1.08.25.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Simokerto
	1.08.25.0039 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Sukolilo
	1.08.25.0010 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Sukomanunggal
	1.08.25.0043 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	12.50%	12.50%	Kec. Tambaksari
	1.08.25.0034 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	12.00%	12.00%	Kec. Tandes
	1.08.25.0027 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	10.00%	10.00%	Kec. Tegalsari
	1.08.25.0026 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
	1.08.25.0025 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	20.00%	20.00%	Kec. Wiyung
	1.08.25.0030 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	16.67%	16.67%	Kec. Wonocolo
	1.08.25.0015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan	100%	0.00%	0.00%	Kec. Wonokromo
<b>1,09 Pertanian</b>						
	<b>1.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.09.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	<b>1.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.09.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.00%	20.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.09.19 Program Sertifikasi Tanah Milik</b>		Rasio aset pemkot yang tersertifikat	55.72 %			
	1.09.19.0001 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	7.60%	7.60%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	1.09.19.0002 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	100%	2.50%	2.50%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	1.09.19.0003 Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	100%	150.00%	150.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.09.20 Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b>		Luas tanah dan / atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	43367 m2			
	1.09.20.0003 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk infrastruktur	100%	35.16%	35.16%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.09.20.0001 Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	1.09.20.0002 Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	1.09.20.0004 Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1,10 Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
<b>1.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.10.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	36.11%	36.11%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>1.10.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.10.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	108.40%	108.40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>1.10.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>		Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil	60.03 %			
		cakupan penerbitan akte kelahiran	99.92 %			
		Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk	85%			
		cakupan penerbitan akte kematian	73.01 %			
		Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%			
	1.10.15.0015 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.10.15.0018 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	1.10.15.0021 Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	100%	100.00%	100.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.10.15.0026 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.15.0027 Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya	100%	39.63%	39.63%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.10.15.0003 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Asemrowo
1.10.15.0012 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Benowo
1.10.15.0036 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Bubutan
1.10.15.0022 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Bulak
1.10.15.0010 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.10.15.0001 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Gayungan
1.10.15.0017 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	23.62%	23.62%	Kec. Genteng
1.10.15.0005 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Gubeng
1.10.15.0007 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Gunung Anyar
1.10.15.0016 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	22.70%	22.70%	Kec. Jambangan
1.10.15.0006 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.38%	18.38%	Kec. Karangpilang
1.10.15.0035 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Kenjeran
1.10.15.0013 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	27.30%	27.30%	Kec. Krembangan
1.10.15.0008 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	31.90%	31.90%	Kec. Lakarsantri
1.10.15.0028 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Mulyorejo
1.10.15.0004 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Pabean Cantian
1.10.15.0029 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	27.30%	27.30%	Kec. Pakal
1.10.15.0033 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Rungkut
1.10.15.0009 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Sambikerep
1.10.15.0002 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	22.70%	22.70%	Kec. Sawahan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.10.15.0019 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Semampir
1.10.15.0030 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Simokerto
1.10.15.0034 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	27.30%	27.30%	Kec. Sukolilo
1.10.15.0032 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Sukomanunggal
1.10.15.0014 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Tambaksari
1.10.15.0024 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Tandes
1.10.15.0020 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Tegalsari
1.10.15.0031 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	31.90%	31.90%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.10.15.0023 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Wiyung
1.10.15.0025 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	31.90%	31.90%	Kec. Wonocolo
1.10.15.0011 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	100%	18.10%	18.10%	Kec. Wonokromo
<b>1,11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
<b>1.11.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan</b>	Persentase Permasalahan Perempuan dan Anak yang ditangani	100%			
	Persentase indikator Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terpenuhi	86%			
	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	93%			
1.11.20.0007 Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sistem Pendataan Dinamika Gender	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.20.0014 Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	100%	35.68%	35.68%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.20.0022 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	100%	38.57%	38.57%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.20.0023 Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Persentase Keberhasilan Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	100%	19.68%	19.68%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.11.20.0024 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	17.29%	17.29%	Kec. Asemrowo
1.11.20.0016 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	40.73%	40.73%	Kec. Benowo
1.11.20.0004 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	29.63%	29.63%	Kec. Bubutan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.11.20.0031 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	36.42%	36.42%	Kec. Bulak
1.11.20.0019 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	43.18%	43.18%	Kec. Dukuh Pakis
1.11.20.0026 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	16.07%	16.07%	Kec. Gayungan
1.11.20.0028 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	19.27%	19.27%	Kec. Genteng
1.11.20.0029 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	15.36%	15.36%	Kec. Gubeng
1.11.20.0020 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100%	37.41%	37.41%	Kec. Gunung Anyar
1.11.20.0021 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	14.08%	14.08%	Kec. Jambangan
1.11.20.0018 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	4.97%	4.97%	Kec. Karangpilang
1.11.20.0035 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	43.18%	43.18%	Kec. Kenjeran
1.11.20.0013 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	27.17%	27.17%	Kec. Krembangan
1.11.20.0033 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	16.07%	16.07%	Kec. Lakarsantri
1.11.20.0005 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	2.48%	2.48%	Kec. Mulyorejo
1.11.20.0003 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	13.58%	13.58%	Kec. Pabean Cantian
1.11.20.0034 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	13.58%	13.58%	Kec. Pakal
1.11.20.0032 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	27.46%	27.46%	Kec. Rungkut
1.11.20.0001 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	18.55%	18.55%	Kec. Sambikerep
1.11.20.0030 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	24.08%	24.08%	Kec. Sawahan
1.11.20.0006 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	2.48%	2.48%	Kec. Semampir
1.11.20.0025 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	9.88%	9.88%	Kec. Simokerto
1.11.20.0012 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	4.97%	4.97%	Kec. Sukolilo
1.11.20.0002 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	28.39%	28.39%	Kec. Sukomanunggal
1.11.20.0017 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	29.94%	29.94%	Kec. Tambaksari
1.11.20.0011 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	3.73%	3.73%	Kec. Tandes

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.11.20.0015 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	16.07%	16.07%	Kec. Tegalsari
	1.11.20.0010 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	13.58%	13.58%	Kec. Tenggilis Mejoyo
	1.11.20.0027 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	45.03%	45.03%	Kec. Wiyung
	1.11.20.0009 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	34.52%	34.52%	Kec. Wonocolo
	1.11.20.0008 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Persentase Keberhasilan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	100%	13.58%	13.58%	Kec. Wonokromo
<b>1,12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>						
	<b>1.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.12.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.23%	22.23%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	<b>1.12.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.12.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	14.49%	14.49%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	<b>1.12.15 Program Keluarga Berencana</b>	Persentase Pasangan Usia Subur yang ber-KB Aktif	76.32 %			
	1.12.15.0001 Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	100%	16.58%	16.58%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	1.12.15.0002 Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Pembinaan Keluarga Berencana	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	1.12.15.0003 Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	100%	26.42%	26.42%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	1.12.15.0004 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	<b>1.12.25 Program Bina Keluarga</b>	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	23.9 %			
	1.12.25.0001 Pembinaan Ketahanan keluarga	Persentase Keberhasilan Pembinaan Ketahanan keluarga	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1,13 Sosial</b>						
	<b>1.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.13.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	28.72%	28.72%	Dinas Sosial
	<b>1.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.13.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	34.37%	34.37%	Dinas Sosial
	<b>1.13.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PMKS yang ditangani	60%			
	1.13.16.0002 Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	Persentase Keberhasilan Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Melalui Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	100%	7.70%	7.70%	Dinas Sosial
	1.13.16.0003 Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat	Persentase Keberhasilan Pelatihan Keterampilan Dan Pemberian Permakanan Bagi Penyandang Cacat	100%	23.05%	23.05%	Dinas Sosial
	1.13.16.0005 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Griya Werdha	100%	25.15%	25.15%	Dinas Sosial
	1.13.16.0006 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat Jerawat	100%	24.31%	24.31%	Dinas Sosial
	1.13.16.0009 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	100%	25.43%	25.43%	Dinas Sosial
	1.13.16.0012 Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pembinaan, Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Permakanan bagi Lanjut Usia	100%	18.44%	18.44%	Dinas Sosial
	1.13.16.0017 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Di UPTD Kampung Anak Negeri	100%	18.97%	18.97%	Dinas Sosial
	1.13.16.0028 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	100%	27.54%	27.54%	Dinas Sosial
	1.13.16.0033 Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu	Persentase Keberhasilan Penyediaan Kebutuhan Dasar Bagi Panti Sosial Dan Pemberian Permakanan Bagi Anak Yatim, Piatu, Dan Yatim Piatu	100%	18.88%	18.88%	Dinas Sosial
	1.13.16.0038 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Anak Luar Biasa Di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	100%	19.84%	19.84%	Dinas Sosial
	1.13.16.0040 Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Keberhasilan Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa	100%	22.39%	22.39%	Dinas Sosial
	1.13.16.0020 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	5.90%	5.90%	Kec. Asemrowo
	1.13.16.0030 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	13.52%	13.52%	Kec. Benowo
	1.13.16.0015 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	5.68%	5.68%	Kec. Bubutan
	1.13.16.0034 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.67%	16.67%	Kec. Bulak
	1.13.16.0013 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	27.17%	27.17%	Kec. Dukuh Pakis
	1.13.16.0018 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	22.38%	22.38%	Kec. Gayungan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.13.16.0011 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.67%	16.67%	Kec. Genteng
1.13.16.0021 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	23.33%	23.33%	Kec. Gubeng
1.13.16.0035 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	10.50%	10.50%	Kec. Gunung Anyar
1.13.16.0022 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	17.13%	17.13%	Kec. Jambangan
1.13.16.0023 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.67%	16.67%	Kec. Karangpilang
1.13.16.0039 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.67%	16.67%	Kec. Kenjeran
1.13.16.0016 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	15.00%	15.00%	Kec. Krembangan
1.13.16.0027 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	28.08%	28.08%	Kec. Lakarsantri
1.13.16.0007 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	22.38%	22.38%	Kec. Mulyorejo
1.13.16.0008 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	3.33%	3.33%	Kec. Pabean Cantian
1.13.16.0031 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	22.38%	22.38%	Kec. Pakal
1.13.16.0024 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	3.52%	3.52%	Kec. Rungkut
1.13.16.0036 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	28.08%	28.08%	Kec. Sambikerep
1.13.16.0001 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	11.71%	11.71%	Kec. Sawahan
1.13.16.0042 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	28.08%	28.08%	Kec. Semampir
1.13.16.0019 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.67%	16.67%	Kec. Simokerto
1.13.16.0032 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	59.58%	59.58%	Kec. Sukolilo
1.13.16.0037 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	27.63%	27.63%	Kec. Sukomanunggal
1.13.16.0004 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	20.33%	20.33%	Kec. Tambaksari
1.13.16.0025 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	27.63%	27.63%	Kec. Tandes
1.13.16.0041 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	23.33%	23.33%	Kec. Tegalsari
1.13.16.0010 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	16.85%	16.85%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.13.16.0026 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	21.92%	21.92%	Kec. Wiyung
1.13.16.0014 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	17.13%	17.13%	Kec. Wonocolo
1.13.16.0029 Pendataan PMKS Dan PSKS	Persentase Keberhasilan Pendataan PMKS Dan PSKS	100%	5.48%	5.48%	Kec. Wonokromo
<b>1.13.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	40%			
	Persentase terfasilitasinya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan	100%			
1.13.21.0002 Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	100%	15.68%	15.68%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.13.21.0001 Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Kepahlawanan	100%	21.65%	21.65%	Dinas Sosial
1.13.21.0003 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100%	27.00%	27.00%	Dinas Sosial

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.13.21.0004 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	100%	14.63%	14.63%	Dinas Sosial
	1.13.21.0005 Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pemberdayaan Relawan Sosial Dan Organisasi Sosial	100%	18.05%	18.05%	Dinas Sosial
<b>1,14 Ketenagakerjaan</b>						
	<b>1.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.14.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.58%	22.58%	Dinas Tenaga Kerja
	<b>1.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.14.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	13.97%	13.97%	Dinas Tenaga Kerja
	<b>1.14.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja	40%			
	1.14.16.0001 Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Persentase Keberhasilan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	100%	91.81%	91.81%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.16.0002 Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Identifikasi Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.16.0003 Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja	Persentase Keberhasilan Pendampingan Calon Wirausaha Baru dan Perluasan Kerja	100%	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.16.0004 Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	100%	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.16.0005 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	100%	38.58%	38.58%	Dinas Tenaga Kerja
	<b>1.14.18 Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</b>	Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	3.5 %			
	1.14.18.0001 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakkan Hukum	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan	100%	6.94%	6.94%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.18.0002 Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	100%	5.67%	5.67%	Dinas Tenaga Kerja
	<b>1.14.19 Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan</b>	Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi	50%			
	1.14.19.0001 Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	100%	4.36%	4.36%	Dinas Tenaga Kerja
	<b>1.14.20 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>	Persentase Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	4%			
	1.14.20.0001 Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Tenaga Kerja
	1.14.20.0002 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	24.12%	24.12%	Dinas Tenaga Kerja
<b>1,15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>						
	<b>1.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.15.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	15.56%	15.56%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	37.12%	37.12%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.15.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.65%	20.65%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	28.23%	28.23%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.15.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro</b>		Persentase peningkatan volume usaha Kecil menengah binaan	10%			
		Akumulasi jumlah Usaha Mikro yang mengisi sentra binaan	810 Pedagang			
		Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan	10%			
		Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan	68555718000 Rp			
		Akumulasi volume usaha mikro binaan	2928852360 Rp			
		Presentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat	20%			
	1.15.17.0003 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	Persentase Keberhasilan Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	100%	0.00%	0.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	1.15.17.0002 Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra	100%	14.56%	14.56%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.17.0006 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil	100%	1.90%	1.90%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.17.0007 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil	100%	24.23%	24.23%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.17.0011 Penataan Tempat Berusaha (Sentra)	Persentase Keberhasilan Penataan Tempat Berusaha (Sentra)	100%	0.00%	0.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.17.0012 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.15.17.0001 Fasilitasi Pengembangan UKM	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan UKM	100%	8.25%	8.25%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.15.17.0004 Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri	100%	23.67%	23.67%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.15.17.0005 Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Perijinan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100%	24.52%	24.52%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.15.17.0008 Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	100%	20.42%	20.42%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.15.17.0009 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri di Kampung dan Sentra	100%	45.26%	45.26%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.15.17.0010 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Kecil dan Menengah	100%	0.00%	0.00%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.15.19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi</b>		Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi	6%			
		Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas	15%			
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif	1%			



Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
		Meningkatnya jumlah anggota koperasi	1000 Orang			
	1.15.19.0001 Pembinaan SDM Koperasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan SDM Koperasi	100%	64.38%	64.38%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0002 Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sertifikasi SKKNI-KJK Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	100%	40.50%	40.50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0003 Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan Antar Koperasi Aktif, Distributor/Principle, dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan	100%	23.13%	23.13%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0004 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru	100%	6.92%	6.92%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0005 Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi	Persentase Keberhasilan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0006 Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	Persentase Keberhasilan Revitalisasi Koperasi Tidak Aktif Dan Tidak Ber RAT	100%	21.75%	21.75%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0007 Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP/USP-Koperasi	100%	14.63%	14.63%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0008 Sosialisasi Pemahaman Koperasi	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Pemahaman Koperasi	100%	2.80%	2.80%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	1.15.19.0009 Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif	100%	16.49%	16.49%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>1,16 Penanaman Modal</b>						
	<b>1.16.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.16.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.79%	22.79%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	<b>1.16.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.16.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	45.72%	45.72%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	<b>1.16.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	Persentase Meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi	6%			
	1.16.16.0001 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	100%	68.63%	68.63%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	1.16.16.0002 Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pemutakhiran Data Investasi	100%	58.15%	58.15%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	1.16.16.0003 Pengembangan Potensi Investasi	Persentase Keberhasilan Pengembangan Potensi Investasi	100%	0.00%	0.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.16.16.0004 Penyelenggaraan Promosi Investasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Promosi Investasi	100%	0.00%	0.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	1.16.16.0005 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	9.88%	9.88%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	1.16.16.0006 Pelayanan UPTSA	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTSA	100%	25.00%	25.00%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
<b>1,17 Kebudayaan</b>						
	<b>1.17.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.17.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	30.54%	30.54%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>1.17.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.17.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.11%	25.11%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>1.17.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik	91.5 %			
	1.17.16.0001 Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	<b>1.17.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	% kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	40%			
	1.17.17.0001 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	1.17.17.0002 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	100%	3.60%	3.60%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1,18 Kepemudaan dan Olah Raga</b>						
	<b>1.18.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.18.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	10.77%	10.77%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<b>1.18.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.18.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	21.57%	21.57%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	<b>1.18.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	Jumlah pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri	5 Orang			
		Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	11615 Orang			
		Jumlah pemuda sebagai pelopor pembangunan	5 Orang			
	1.18.16.0001 Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri	Persentase Keberhasilan Pengembangan Ketrampilan dan Wirausaha Organisasi Kepemudaan Mandiri	100%	50.00%	50.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.16.0002 Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Kreatifitas Dan Aktualisasi Kepemudaan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.16.0003 Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Peran Kepemudaan dengan Jiwa Kebangsaan	100%	23.38%	23.38%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.16.0004 Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Penumbuhan Jiwa Sosial Kepemudaan	100%	7.36%	7.36%	Dinas Pemuda dan Olahraga

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.18.16.0005 Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	100%	40.38%	40.38%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.16.0006 Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pemahaman Pemuda dan Pencegahan Kenakalan Remaja	100%	28.12%	28.12%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.16.0007 Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	Persentase Keberhasilan Peningkatan Jiwa Kepemimpinan Dan Kepeloporan Pemuda	100%	4.08%	4.08%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>1.18.20 Program Pembinaan dan</b>		Cakupan Pembinaan Atlet Olahraga	1937 Orang			
		Jumlah Prasarana Olahraga yang dikembangkan	322 Lokasi			
		Olahraga Rekreasi yang digali, dibina dan dikembangkan di Kota Surabaya	53 Jenis			
	1.18.20.0001 Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.18.20.0002 Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	Persentase Keberhasilan Operasional Dan Pemeliharaan Gedung Dan Lapangan Olahraga	100%	25.03%	25.03%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0003 Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pengembangan dan Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat	100%	11.54%	11.54%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0004 Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus	Persentase Keberhasilan Pengembangan Olahraga Bagi Lanjut Usia, Penyandang Cacat dan Anak Berkebutuhan Khusus	100%	17.23%	17.23%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0005 Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi	Persentase Keberhasilan Pemberian Penghargaan Kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi	100%	29.10%	29.10%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0006 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi	100%	19.05%	19.05%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0007 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	100%	14.17%	14.17%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0008 Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga	Persentase Keberhasilan Pembangunan, Perbaikan , dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Olahraga	100%	1.58%	1.58%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0009 Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo	Persentase Keberhasilan Operasional dan Pemeliharaan Olahraga Gelora Bung Tomo	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0010 Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Peningkatan SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi	100%	23.10%	23.10%	Dinas Pemuda dan Olahraga
	1.18.20.0011 Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pertandingan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>1,19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>						
<b>1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	1.19.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.12%	25.12%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
	1.19.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	130.66%	130.66%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1.19.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	1.19.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	13.05%	13.05%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.19.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	66.63%	66.63%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1.19.15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100%			
1.19.15.0001 Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kerjasama dan Pengendalian Bidang Keamanan	100%	15.15%	15.15%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0002 Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pengendalian Kebisingan Dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat Bidang Penanganan Strategis	100%	21.60%	21.60%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0003 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Linmas	100%	40.66%	40.66%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0004 Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	Persentase Keberhasilan Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Bidang Penanganan Strategis	100%	7.91%	7.91%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0005 Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	Persentase Keberhasilan Pengendalian Keamanan Lingkungan Bidang Linmas	100%	24.58%	24.58%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0006 Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Persentase Keberhasilan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	100%	11.28%	11.28%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0007 Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	100%	0.00%	0.00%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.19.15.0008 PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI PАРPOL DAN ORKEMAS	Persentase Keberhasilan PEMBERDAYAAN DAN FASILITASI PАРPOL DAN ORKEMAS	100%	9.43%	9.43%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
<b>1.19.16 Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak</b>	Persentase tertanganinya kasus pelanggaran peraturan	100%			
1.19.16.0038 Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	100%	10.58%	10.58%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.19.16.0014 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Asemrowo
1.19.16.0006 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	22.84%	22.84%	Kec. Benowo
1.19.16.0037 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	26.91%	26.91%	Kec. Bubutan
1.19.16.0004 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	25.00%	25.00%	Kec. Bulak
1.19.16.0017 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	42.18%	42.18%	Kec. Dukuh Pakis

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.19.16.0030 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	29.98%	29.98%	Kec. Gayungan
1.19.16.0015 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.63%	24.63%	Kec. Genteng
1.19.16.0021 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Gubeng
1.19.16.0007 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.81%	24.81%	Kec. Gunung Anyar
1.19.16.0019 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	27.41%	27.41%	Kec. Jambangan
1.19.16.0016 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Karangpilang
1.19.16.0032 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Kenjeran
1.19.16.0005 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Krembangan
1.19.16.0029 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.63%	24.63%	Kec. Lakarsantri
1.19.16.0036 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	25.00%	25.00%	Kec. Mulyorejo
1.19.16.0011 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Pabean Cantian
1.19.16.0012 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.63%	24.63%	Kec. Pakal
1.19.16.0026 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	26.33%	26.33%	Kec. Rungkut
1.19.16.0003 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	30.73%	30.73%	Kec. Sambikerep
1.19.16.0008 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.63%	24.63%	Kec. Sawahan
1.19.16.0010 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Semampir
1.19.16.0001 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Simokerto

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.19.16.0031 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	13.45%	13.45%	Kec. Sukolilo
1.19.16.0028 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Sukomanunggal
1.19.16.0033 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	24.63%	24.63%	Kec. Tambaksari
1.19.16.0020 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Tandes
1.19.16.0034 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	29.98%	29.98%	Kec. Tegalsari
1.19.16.0035 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.19.16.0022 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	31.48%	31.48%	Kec. Wiyung
1.19.16.0009 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	340.63%	340.63%	Kec. Wonocolo
1.19.16.0027 Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Persentase Keberhasilan Pengawasan Pengendalian Dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	100%	19.28%	19.28%	Kec. Wonokromo
1.19.16.0002 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	100%	87.64%	87.64%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0013 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	Persentase Keberhasilan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah	100%	40.79%	40.79%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0018 Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Persentase Keberhasilan Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	100%	30.25%	30.25%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0023 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	100%	20.45%	20.45%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0024 Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	100%	28.40%	28.40%	Satuan Polisi Pamong Praja
1.19.16.0025 Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Persentase Keberhasilan Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	100%	24.69%	24.69%	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1,20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian</b>					
<b>1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.20.01.0024 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	35.13%	35.13%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.01.0039 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	29.20%	29.20%	Bagian Bina Program
1.20.01.0035 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Bagian Hukum
1.20.01.0042 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.11%	25.11%	Bagian Kerjasama

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.01.0005 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.41%	24.41%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	31.00%	31.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.01.0022 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	15.01%	15.01%	Bagian Perlengkapan
1.20.01.0040 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	23.46%	23.46%	Bagian Umum dan Protokol
1.20.01.0014 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	21.26%	21.26%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.01.0019 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	23.36%	23.36%	Inspektorat
1.20.01.0007 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	20.55%	20.55%	Kec. Asemrowo
1.20.01.0017 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	28.84%	28.84%	Kec. Benowo
1.20.01.0028 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	72.75%	72.75%	Kec. Bubutan
1.20.01.0010 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	20.50%	20.50%	Kec. Bulak
1.20.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.43%	25.43%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.01.0013 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.35%	25.35%	Kec. Gayungan
1.20.01.0015 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.27%	22.27%	Kec. Genteng
1.20.01.0018 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.19%	25.19%	Kec. Gubeng
1.20.01.0033 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	32.37%	32.37%	Kec. Gunung Anyar
1.20.01.0041 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.98%	24.98%	Kec. Jambangan
1.20.01.0020 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	21.40%	21.40%	Kec. Karangpilang
1.20.01.0036 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	26.48%	26.48%	Kec. Kenjeran
1.20.01.0037 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.31%	24.31%	Kec. Krembangan
1.20.01.0026 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	28.70%	28.70%	Kec. Lakarsantri
1.20.01.0034 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	13.12%	13.12%	Kec. Mulyorejo
1.20.01.0003 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	21.10%	21.10%	Kec. Pabean Cantian
1.20.01.0025 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.44%	24.44%	Kec. Pakal
1.20.01.0021 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	13.23%	13.23%	Kec. Rungkut
1.20.01.0004 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.56%	24.56%	Kec. Sambikerep
1.20.01.0012 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	19.47%	19.47%	Kec. Sawahan
1.20.01.0009 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.25%	22.25%	Kec. Semampir
1.20.01.0011 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	28.72%	28.72%	Kec. Simokerto
1.20.01.0030 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	145.62%	145.62%	Kec. Sukolilo
1.20.01.0032 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	30.64%	30.64%	Kec. Sukomanunggal
1.20.01.0038 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	18.15%	18.15%	Kec. Tambaksari
1.20.01.0016 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.45%	22.45%	Kec. Tandes

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.01.0029 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	24.74%	24.74%	Kec. Tegalsari
1.20.01.0031 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	26.86%	26.86%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.01.0006 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	23.71%	23.71%	Kec. Wiyung
1.20.01.0008 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	22.66%	22.66%	Kec. Wonocolo
1.20.01.0023 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.45%	25.45%	Kec. Wonokromo
1.20.01.0027 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	18.47%	18.47%	Sekretariat DPRD
<b>1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.20.02.0033 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	31.26%	31.26%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.02.0030 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	33.75%	33.75%	Bagian Bina Program
1.20.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Bagian Hukum
1.20.02.0011 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	37.61%	37.61%	Bagian Kerjasama
1.20.02.0021 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	18.75%	18.75%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.02.0037 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	41.94%	41.94%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.02.0042 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	8.33%	8.33%	Bagian Perlengkapan
1.20.02.0010 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	29.36%	29.36%	Bagian Umum dan Protokol
1.20.02.0034 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	61.53%	61.53%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.02.0016 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.01%	25.01%	Inspektorat
1.20.02.0032 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.18%	22.18%	Kec. Asemrowo
1.20.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	18.94%	18.94%	Kec. Benowo
1.20.02.0006 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	34.35%	34.35%	Kec. Bubutan
1.20.02.0031 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.07%	22.07%	Kec. Bulak
1.20.02.0007 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.38%	22.38%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.02.0018 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	21.09%	21.09%	Kec. Gayungan
1.20.02.0036 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	23.04%	23.04%	Kec. Genteng



Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.02.0014 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	19.89%	19.89%	Kec. Gubeng
1.20.02.0027 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	58.93%	58.93%	Kec. Gunung Anyar
1.20.02.0017 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.38%	22.38%	Kec. Jambangan
1.20.02.0008 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.19%	20.19%	Kec. Karangpilang
1.20.02.0028 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	21.09%	21.09%	Kec. Kenjeran
1.20.02.0038 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.79%	20.79%	Kec. Krembangan
1.20.02.0019 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	14.16%	14.16%	Kec. Lakarsantri
1.20.02.0025 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	2.50%	2.50%	Kec. Mulyorejo
1.20.02.0039 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.64%	25.64%	Kec. Pabean Cantian
1.20.02.0005 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Kec. Pakal
1.20.02.0020 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	21.88%	21.88%	Kec. Rungkut
1.20.02.0024 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.61%	20.61%	Kec. Sambikerep
1.20.02.0029 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	23.75%	23.75%	Kec. Sawahan
1.20.02.0041 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.96%	22.96%	Kec. Semampir
1.20.02.0015 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	16.49%	16.49%	Kec. Simokerto
1.20.02.0023 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	220.00%	220.00%	Kec. Sukolilo
1.20.02.0012 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	25.00%	25.00%	Kec. Sukomanunggal
1.20.02.0026 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.32%	22.32%	Kec. Tambaksari
1.20.02.0035 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	21.88%	21.88%	Kec. Tandes
1.20.02.0040 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.61%	22.61%	Kec. Tegalsari
1.20.02.0003 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	22.38%	22.38%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.02.0009 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	15.93%	15.93%	Kec. Wiyung
1.20.02.0013 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	20.23%	20.23%	Kec. Wonocolo

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.02.0004 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	16.39%	16.39%	Kec. Wonokromo
1.20.02.0022 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	16.72%	16.72%	Sekretariat DPRD
<b>1.20.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	80%			
	Sistem Kepegawaian yang up date	100%			
	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	90%			
1.20.05.0001 Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	Persentase Keberhasilan Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	100%	1.55%	1.55%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0002 Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	100%	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0003 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	100%	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0004 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	100%	112.50%	112.50%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0005 Ujian Dinas Tingkat I	Persentase Keberhasilan Ujian Dinas Tingkat I	100%	80.95%	80.95%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0006 Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Sistem Data Pegawai	100%	25.00%	25.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0007 Penataan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Penataan Administrasi Kepegawaian	100%	16.57%	16.57%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0008 Tes Kesehatan bagi Pegawai	Persentase Keberhasilan Tes Kesehatan bagi Pegawai	100%	20.00%	20.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0009 Pembinaan Kinerja Pegawai	Persentase Keberhasilan Pembinaan Kinerja Pegawai	100%	51.21%	51.21%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0010 Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	Persentase Keberhasilan Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Administrasi Calon Praja IPDN	100%	0.00%	0.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0011 Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Keberhasilan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100%	25.70%	25.70%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0012 Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Persentase Keberhasilan Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	100%	7.45%	7.45%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.05.0013 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Persentase Keberhasilan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	100%	45.06%	45.06%	Badan Kepegawaian dan Diklat
<b>1.20.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik	100%			
1.20.15.0001 Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	Persentase Keberhasilan Protokol dan Pengendalian Sistim Keamanan	100%	46.95%	46.95%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0002 Informasi dan Pengolahan Data	Persentase Keberhasilan Informasi dan Pengolahan Data	100%	24.00%	24.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0003 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100%	37.25%	37.25%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0004 Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Persentase Keberhasilan Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	100%	96.62%	96.62%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0005 Rapat-rapat Paripurna	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Paripurna	100%	10.00%	10.00%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0006 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Persentase Keberhasilan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	100%	19.34%	19.34%	Sekretariat DPRD
1.20.15.0007 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Keberhasilan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	17.26%	17.26%	Sekretariat DPRD

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.20.15.0008 Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah	100%	0.00%	0.00%	Sekretariat DPRD
	1.20.15.0009 Kegiatan Reses	Persentase Keberhasilan Kegiatan Reses	100%	33.33%	33.33%	Sekretariat DPRD
	<b>1.20.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%			
	1.20.16.0001 Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	14.77%	14.77%	Bagian Umum dan Protokol
	1.20.16.0002 Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengadaan Sarana Sistem Persandian	100%	45.52%	45.52%	Bagian Umum dan Protokol
	<b>1.20.17 Program Peningkatan dan</b>	Rata-rata Peningkatan PAD	10%			
		Terkendalnya anggaran pendapatan	80%			
		% Dokumen keuangan yang selesai	100%			
		Laporan aset/barang daerah diterbitkan	100%			
		Rata-rata pertumbuhan dana	3.44 %			
	1.20.17.0001 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Dari Retribusi Ijin Gangguan	100%	27.56%	27.56%	Badan Lingkungan Hidup
	1.20.17.0011 Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi Dan Penghapusan Aset/barang Daerah	100%	0.00%	0.00%	Bagian Perlengkapan
	1.20.17.0021 Inventarisasi Aset / Barang Daerah	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Aset / Barang Daerah	100%	0.00%	0.00%	Bagian Perlengkapan
	1.20.17.0007 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran Pada Gedung Dan Perusahaan	100%	12.79%	12.79%	Dinas Kebakaran
	1.20.17.0009 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	100%	775.00%	775.00%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
	1.20.17.0013 Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemanfaatan Menara Bersama Telekomunikasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
	1.20.17.0022 Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	100%	14.50%	14.50%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	1.20.17.0002 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	1.20.17.0003 Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	1.20.17.0004 Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan	Persentase Keberhasilan Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Lain-lain Pendapatan	100%	75.00%	75.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	1.20.17.0006 Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan APBD, Perubahan APBD Dan RAPBD	100%	4.55%	4.55%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	1.20.17.0010 Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100%	18.64%	18.64%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	1.20.17.0012 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	Persentase Keberhasilan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.17.0014 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0016 Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	Persentase Keberhasilan Pelayanan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0017 Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Persentase Keberhasilan Penelitian dan Penilaian Surat Perintah Membayar (SPM) serta Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	100%	16.90%	16.90%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0018 Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	Persentase Keberhasilan Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0019 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0020 Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Persentase Keberhasilan Penyusunan Bahan Anggaran Kas	100%	50.00%	50.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0025 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0027 Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	Persentase Keberhasilan Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
1.20.17.0005 Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0008 Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0015 Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Monitoring Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0023 Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	Persentase Keberhasilan Pendataan Dan Penelitian Terhadap Ijin Pemakaian Tanah	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.20.17.0024 Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Persentase Keberhasilan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	100%	27.85%	27.85%	Dinas Perhubungan
1.20.17.0026 Pengelolaan Parkir	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Parkir	100%	28.83%	28.83%	Dinas Perhubungan
<b>1.20.20 Program Peningkatan Sistem</b>	Persentase Penanganan Pengaduan	100%			
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan	89.8 %			
1.20.20.0008 Penerapan Disiplin Pegawai	Persentase Keberhasilan Penerapan Disiplin Pegawai	100%	44.00%	44.00%	Badan Kepegawaian dan Diklat
1.20.20.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	Persentase Keberhasilan Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	100%	21.43%	21.43%	Inspektorat
1.20.20.0002 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Inspektorat

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.20.20.0003 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	29.68%	29.68%	Inspektorat
	1.20.20.0004 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	55.99%	55.99%	Inspektorat
	1.20.20.0005 Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Inspektorat
	1.20.20.0006 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	8.22%	8.22%	Inspektorat
	1.20.20.0007 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	100%	31.27%	31.27%	Inspektorat
	1.20.20.0009 Inventarisasi Temuan Pengawasan	Persentase Keberhasilan Inventarisasi Temuan Pengawasan	100%	9.23%	9.23%	Inspektorat
	1.20.20.0010 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	Persentase Keberhasilan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengawasan	100%	50.00%	50.00%	Inspektorat
	<b>1.20.25 Program Peningkatan Kerjasama</b>	Persentase MoU kerjasama antar	80%			
		Persentase MOU kerjasama luar negeri	50%			
		Jumlah MoU yang Dievaluasi	22.22 %			
	1.20.25.0001 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	100%	19.70%	19.70%	Bagian Kerjasama
	1.20.25.0002 Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri	100%	43.20%	43.20%	Bagian Kerjasama
	1.20.25.0003 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri	100%	0.00%	0.00%	Bagian Kerjasama
	1.20.25.0004 Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	Persentase Keberhasilan Fasilitasi/pembentukan Kerjasama Antar Lembaga	100%	60.00%	60.00%	Bagian Kerjasama
	1.20.25.0005 Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	Persentase Keberhasilan Penyusunan Kajian Dan Laporan Kerjasama	100%	15.50%	15.50%	Bagian Kerjasama
	1.20.25.0006 Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Delegasi Internasional Di Dalam Negeri	100%	10.00%	10.00%	Bagian Kerjasama
	<b>1.20.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100%			
		Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%			
		Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%			
	1.20.26.0001 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persentase Keberhasilan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	100%	25.00%	25.00%	Bagian Hukum
	1.20.26.0002 Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	100%	19.70%	19.70%	Bagian Hukum

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.26.0003 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	100%	6.19%	6.19%	Bagian Hukum
1.20.26.0004 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	100%	19.50%	19.50%	Bagian Hukum
1.20.26.0005 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	20.00%	20.00%	Bagian Hukum
<b>1.20.28 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	Persentase Jenis Pelayanan yang Memiliki SOP	44%			
	Tidak Terjadi Tumpang Tindih Tugas Pokok dan Fungsi pada SKPD	100%			
1.20.28.0001 Survey Kepuasan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	0.00%	0.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0002 Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Beban Kerja Dan Standart Kompetensi	100%	0.00%	0.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0003 Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	100%	63.64%	63.64%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0004 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	100%	18.68%	18.68%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0005 Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	100%	0.00%	0.00%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0006 Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100%	42.30%	42.30%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1.20.28.0007 Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	100%	20.05%	20.05%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
<b>1.20.29 Program Penataan Daerah Otonom</b>	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100%			
1.20.29.0005 Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya	100%	0.00%	0.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0019 Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	Persentase Keberhasilan Dialog Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat Dan Penataan Manajemen Administrasi RT	100%	3.50%	3.50%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0026 Lomba Kelurahan Berhasil	Persentase Keberhasilan Lomba Kelurahan Berhasil	100%	0.00%	0.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0029 Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan	100%	0.00%	0.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0031 Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Toponimi Di Kota Surabaya	100%	0.00%	0.00%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0032 Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Keberhasilan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	39.80%	39.80%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0059 Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	100%	15.57%	15.57%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
1.20.29.0035 Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genting Kalianak	100%	45.32%	45.32%	Kec. Asemrowo
1.20.29.0075 Operasional Kelurahan Asemrowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Asemrowo	100%	45.32%	45.32%	Kec. Asemrowo

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.29.0076 Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	100%	45.32%	45.32%	Kec. Asemrowo
1.20.29.0036 Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Osowilangon	100%	44.77%	44.77%	Kec. Benowo
1.20.29.0054 Operasional Kelurahan Romokalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Romokalisari	100%	44.89%	44.89%	Kec. Benowo
1.20.29.0077 Operasional Kelurahan Kandangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kandangan	100%	44.77%	44.77%	Kec. Benowo
1.20.29.0090 Operasional Kelurahan Sememi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sememi	100%	44.77%	44.77%	Kec. Benowo
1.20.29.0010 Operasional Kelurahan Bubutan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bubutan	100%	45.32%	45.32%	Kec. Bubutan
1.20.29.0055 Operasional Kelurahan Jepara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jepara	100%	45.32%	45.32%	Kec. Bubutan
1.20.29.0120 Operasional Kelurahan Gundih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gundih	100%	45.32%	45.32%	Kec. Bubutan
1.20.29.0141 Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Alon-alon Contong	100%	45.32%	45.32%	Kec. Bubutan
1.20.29.0160 Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	100%	45.32%	45.32%	Kec. Bubutan
1.20.29.0041 Operasional Kelurahan Bulak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak	100%	44.77%	44.77%	Kec. Bulak
1.20.29.0082 Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Cowek	100%	43.89%	43.89%	Kec. Bulak
1.20.29.0083 Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	100%	44.77%	44.77%	Kec. Bulak
1.20.29.0134 Operasional Kelurahan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kenjeran	100%	44.77%	44.77%	Kec. Bulak
1.20.29.0044 Operasional Kelurahan Gunungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gunungsari	100%	42.00%	42.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.29.0052 Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	100%	42.00%	42.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.29.0065 Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Prada Kali Kendal	100%	42.00%	42.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.29.0088 Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	100%	42.00%	42.00%	Kec. Dukuh Pakis
1.20.29.0051 Operasional Kelurahan Ketintang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketintang	100%	40.87%	40.87%	Kec. Gayungan
1.20.29.0058 Operasional Kelurahan Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menanggal	100%	43.51%	43.51%	Kec. Gayungan
1.20.29.0070 Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	100%	43.51%	43.51%	Kec. Gayungan
1.20.29.0071 Operasional Kelurahan Gayungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gayungan	100%	36.72%	36.72%	Kec. Gayungan
1.20.29.0061 Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	100%	43.51%	43.51%	Kec. Genteng
1.20.29.0084 Operasional Kelurahan Genteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Genteng	100%	42.68%	42.68%	Kec. Genteng
1.20.29.0085 Operasional Kelurahan Kapasari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasari	100%	43.51%	43.51%	Kec. Genteng
1.20.29.0086 Operasional Kelurahan Ketabang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ketabang	100%	45.32%	45.32%	Kec. Genteng
1.20.29.0087 Operasional Kelurahan Peneleh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Peneleh	100%	46.15%	46.15%	Kec. Genteng
1.20.29.0091 Operasional Kelurahan Airlangga	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Airlangga	100%	42.13%	42.13%	Kec. Gubeng
1.20.29.0092 Operasional Kelurahan Barata Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Barata Jaya	100%	38.82%	38.82%	Kec. Gubeng
1.20.29.0093 Operasional Kelurahan Kertajaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kertajaya	100%	45.56%	45.56%	Kec. Gubeng

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.29.0094 Operasional Kelurahan Mojo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mojo	100%	35.72%	35.72%	Kec. Gubeng
1.20.29.0095 Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pucang Sewu	100%	42.13%	42.13%	Kec. Gubeng
1.20.29.0107 Operasional Kelurahan Gubeng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gubeng	100%	41.46%	41.46%	Kec. Gubeng
1.20.29.0009 Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar Tambak	100%	42.00%	42.00%	Kec. Gunung Anyar
1.20.29.0045 Operasional Kelurahan Gununganyar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gununganyar	100%	43.38%	43.38%	Kec. Gunung Anyar
1.20.29.0048 Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	100%	44.77%	44.77%	Kec. Gunung Anyar
1.20.29.0144 Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	100%	44.77%	44.77%	Kec. Gunung Anyar
1.20.29.0047 Operasional Kelurahan Karah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karah	100%	47.53%	47.53%	Kec. Jambangan
1.20.29.0068 Operasional Kelurahan Kebonsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebonsari	100%	47.53%	47.53%	Kec. Jambangan
1.20.29.0105 Operasional Kelurahan Pagesangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pagesangan	100%	47.53%	47.53%	Kec. Jambangan
1.20.29.0109 Operasional Kelurahan Jambangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jambangan	100%	47.53%	47.53%	Kec. Jambangan
1.20.29.0004 Operasional Kelurahan Kedurus	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedurus	100%	39.36%	39.36%	Kec. Karangpilang
1.20.29.0020 Operasional Kelurahan Warugunung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Warugunung	100%	39.36%	39.36%	Kec. Karangpilang
1.20.29.0040 Operasional Kelurahan Kebraon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kebraon	100%	42.00%	42.00%	Kec. Karangpilang
1.20.29.0115 Operasional Kelurahan Karangpilang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpilang	100%	39.36%	39.36%	Kec. Karangpilang
1.20.29.0013 Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambak Wedi	100%	46.15%	46.15%	Kec. Kenjeran
1.20.29.0043 Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Kenjeran
1.20.29.0150 Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bulak Banteng	100%	46.15%	46.15%	Kec. Kenjeran
1.20.29.0151 Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	100%	44.22%	44.22%	Kec. Kenjeran
1.20.29.0027 Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Krembangan
1.20.29.0028 Operasional Kelurahan Morokrembangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Morokrembangan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Krembangan
1.20.29.0135 Operasional Kelurahan Dupak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dupak	100%	46.15%	46.15%	Kec. Krembangan
1.20.29.0136 Operasional Kelurahan Perak Barat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Barat	100%	46.15%	46.15%	Kec. Krembangan
1.20.29.0152 Operasional Kelurahan Kemayoran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kemayoran	100%	46.33%	46.33%	Kec. Krembangan
1.20.29.0008 Operasional Kelurahan Sumur Welut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumur Welut	100%	44.77%	44.77%	Kec. Lakarsantri
1.20.29.0066 Operasional Kelurahan Lakarsantri	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lakarsantri	100%	46.15%	46.15%	Kec. Lakarsantri
1.20.29.0112 Operasional Kelurahan Bangkingan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bangkingan	100%	47.53%	47.53%	Kec. Lakarsantri
1.20.29.0114 Operasional Kelurahan Jeruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jeruk	100%	44.77%	44.77%	Kec. Lakarsantri
1.20.29.0121 Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Kulon	100%	44.77%	44.77%	Kec. Lakarsantri
1.20.29.0129 Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lidah Wetan	100%	44.77%	44.77%	Kec. Lakarsantri



Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.29.0025 Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	100%	41.11%	41.11%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0122 Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	100%	38.69%	38.69%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0142 Operasional Kelurahan Kalijudan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalijudan	100%	1,142.91%	1,142.91%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0145 Operasional Kelurahan Kalisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalisari	100%	41.33%	41.33%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0146 Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	100%	41.33%	41.33%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0153 Operasional Kelurahan Mulyorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Mulyorejo	100%	39.36%	39.36%	Kec. Mulyorejo
1.20.29.0037 Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Krembangan Utara	100%	46.15%	46.15%	Kec. Pabean Cantian
1.20.29.0038 Operasional Kelurahan Nyamplungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nyamplungan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Pabean Cantian
1.20.29.0039 Operasional Kelurahan Perak Utara	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Utara	100%	46.15%	46.15%	Kec. Pabean Cantian
1.20.29.0042 Operasional Kelurahan Bongkaran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bongkaran	100%	46.33%	46.33%	Kec. Pabean Cantian
1.20.29.0062 Operasional Kelurahan Perak Timur	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Perak Timur	100%	46.15%	46.15%	Kec. Pabean Cantian
1.20.29.0011 Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babat Jerawat	100%	43.51%	43.51%	Kec. Pakal
1.20.29.0063 Operasional Kelurahan Benowo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Benowo	100%	43.51%	43.51%	Kec. Pakal
1.20.29.0130 Operasional Kelurahan Pakal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakal	100%	43.51%	43.51%	Kec. Pakal
1.20.29.0131 Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sumber Rejo	100%	43.51%	43.51%	Kec. Pakal
1.20.29.0034 Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Ayu	100%	43.41%	43.41%	Kec. Rungkut
1.20.29.0116 Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo	100%	41.43%	41.43%	Kec. Rungkut
1.20.29.0117 Operasional Kelurahan Penjaringansari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Penjaringansari	100%	41.43%	41.43%	Kec. Rungkut
1.20.29.0118 Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedung Baruk	100%	42.13%	42.13%	Kec. Rungkut
1.20.29.0119 Operasional Kelurahan Kalirungkut	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kalirungkut	100%	40.77%	40.77%	Kec. Rungkut
1.20.29.0133 Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	100%	45.48%	45.48%	Kec. Rungkut
1.20.29.0132 Operasional Kelurahan Bringin	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bringin	100%	44.77%	44.77%	Kec. Sambikerep
1.20.29.0137 Operasional Kelurahan Lontar	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Lontar	100%	47.53%	47.53%	Kec. Sambikerep
1.20.29.0138 Operasional Kelurahan Made	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Made	100%	44.77%	44.77%	Kec. Sambikerep
1.20.29.0139 Operasional Kelurahan Sambikerep	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sambikerep	100%	44.77%	44.77%	Kec. Sambikerep
1.20.29.0030 Operasional Kelurahan Putat Jaya	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Jaya	100%	46.00%	46.00%	Kec. Sawahan
1.20.29.0053 Operasional Kelurahan Sawahan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawahan	100%	46.00%	46.00%	Kec. Sawahan
1.20.29.0098 Operasional Kelurahan Banyu Urip	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banyu Urip	100%	42.68%	42.68%	Kec. Sawahan
1.20.29.0103 Operasional Kelurahan Petemon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Petemon	100%	46.00%	46.00%	Kec. Sawahan
1.20.29.0106 Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kupang Krajan	100%	42.68%	42.68%	Kec. Sawahan
1.20.29.0110 Operasional Kelurahan Pakis	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pakis	100%	46.00%	46.00%	Kec. Sawahan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.29.0015 Operasional Kelurahan Ampel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ampel	100%	44.77%	44.77%	Kec. Semampir
1.20.29.0016 Operasional Kelurahan Sidotopo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidotopo	100%	44.77%	44.77%	Kec. Semampir
1.20.29.0017 Operasional Kelurahan Wonokusumo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokusumo	100%	44.77%	44.77%	Kec. Semampir
1.20.29.0060 Operasional Kelurahan Pegirian	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pegirian	100%	44.77%	44.77%	Kec. Semampir
1.20.29.0161 Operasional Kelurahan Ujung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ujung	100%	72.97%	72.97%	Kec. Semampir
1.20.29.0056 Operasional Kelurahan Kapasan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapasan	100%	44.77%	44.77%	Kec. Simokerto
1.20.29.0072 Operasional Kelurahan Simokerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simokerto	100%	166.28%	166.28%	Kec. Simokerto
1.20.29.0073 Operasional Kelurahan Simolawang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simolawang	100%	44.77%	44.77%	Kec. Simokerto
1.20.29.0074 Operasional Kelurahan Tambakrejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambakrejo	100%	44.77%	44.77%	Kec. Simokerto
1.20.29.0089 Operasional Kelurahan Sidodadi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidodadi	100%	44.77%	44.77%	Kec. Simokerto
1.20.29.0096 Operasional Kelurahan Klampisngasem	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Klampisngasem	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0123 Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Medokan Semampir	100%	43.51%	43.51%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0124 Operasional Kelurahan Semolowaru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Semolowaru	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0125 Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	100%	45.02%	45.02%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0126 Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0127 Operasional Kelurahan Keputih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputih	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0128 Operasional Kelurahan Gebang Putih	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gebang Putih	100%	43.51%	43.51%	Kec. Sukolilo
1.20.29.0006 Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sukomanunggal	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0067 Operasional Kelurahan Putat Gede	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Putat Gede	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0069 Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0078 Operasional Kelurahan Simomulyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Simomulyo	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0108 Operasional Kelurahan Tanjungsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tanjungsari	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0140 Operasional Kelurahan Sonokwijenan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sonokwijenan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Sukomanunggal
1.20.29.0001 Operasional Kelurahan Rangkah	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Rangkah	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0113 Operasional Kelurahan Gading	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Gading	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0154 Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dukuh Setro	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0155 Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0156 Operasional Kelurahan Pacar Keling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Keling	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0157 Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Pacar Kembang	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0158 Operasional Kelurahan Ploso	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ploso	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.20.29.0159 Operasional Kelurahan Tambaksari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tambaksari	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tambaksari
1.20.29.0003 Operasional Kelurahan Banjarsugihan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Banjarsugihan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tandes
1.20.29.0012 Operasional Kelurahan Tandes	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tandes	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tandes
1.20.29.0046 Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Kulon	100%	42.00%	42.00%	Kec. Tandes
1.20.29.0079 Operasional Kelurahan Balongsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balongsari	100%	42.84%	42.84%	Kec. Tandes
1.20.29.0080 Operasional Kelurahan Karangpoh	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Karangpoh	100%	46.15%	46.15%	Kec. Tandes
1.20.29.0081 Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Manukan Wetan	100%	43.51%	43.51%	Kec. Tandes
1.20.29.0018 Operasional Kelurahan Wonorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonorejo	100%	45.32%	45.32%	Kec. Tegalsari
1.20.29.0064 Operasional Kelurahan Keputran	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Keputran	100%	45.32%	45.32%	Kec. Tegalsari
1.20.29.0147 Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	100%	41.33%	41.33%	Kec. Tegalsari
1.20.29.0148 Operasional Kelurahan Kedungdoro	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kedungdoro	100%	45.32%	45.32%	Kec. Tegalsari
1.20.29.0149 Operasional Kelurahan Tegalsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tegalsari	100%	45.32%	45.32%	Kec. Tegalsari
1.20.29.0033 Operasional Kelurahan Kendangsari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kendangsari	100%	44.15%	44.15%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.29.0049 Operasional Kelurahan Kutisari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Kutisari	100%	50.30%	50.30%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.29.0050 Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	100%	68.55%	68.55%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.29.0057 Operasional Kelurahan Panjangjiwo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Panjangjiwo	100%	42.75%	42.75%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.20.29.0007 Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	100%	46.15%	46.15%	Kec. Wiyung
1.20.29.0022 Operasional Kelurahan Babatan	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Babatan	100%	46.15%	46.15%	Kec. Wiyung
1.20.29.0101 Operasional Kelurahan Balas Klumprik	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Balas Klumprik	100%	46.15%	46.15%	Kec. Wiyung
1.20.29.0111 Operasional Kelurahan Wiyung	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wiyung	100%	46.15%	46.15%	Kec. Wiyung
1.20.29.0002 Operasional Kelurahan Siwalankerto	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Siwalankerto	100%	42.13%	42.13%	Kec. Wonocolo
1.20.29.0024 Operasional Kelurahan Margorejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Margorejo	100%	42.13%	42.13%	Kec. Wonocolo
1.20.29.0100 Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonocolo
1.20.29.0104 Operasional Kelurahan Sidosermo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sidosermo	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonocolo
1.20.29.0143 Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Bendul Merisi	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonocolo
1.20.29.0014 Operasional Kelurahan Ngagel	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonokromo
1.20.29.0021 Operasional Kelurahan Sawunggaling	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Sawunggaling	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonokromo
1.20.29.0023 Operasional Kelurahan Jagir	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Jagir	100%	47.53%	47.53%	Kec. Wonokromo
1.20.29.0097 Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	100%	43.43%	43.43%	Kec. Wonokromo
1.20.29.0099 Operasional Kelurahan Darmo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Darmo	100%	44.77%	44.77%	Kec. Wonokromo
1.20.29.0102 Operasional Kelurahan Wonokromo	Persentase Keberhasilan Operasional Kelurahan Wonokromo	100%	103.93%	103.93%	Kec. Wonokromo

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.20.30 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	75%			
	Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana	90%			
1.20.30.0001 Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	Persentase Keberhasilan Pengadaan Pakaian Dinas Dan Kelengkapannya	100%	1.21%	1.21%	Bagian Perlengkapan
1.20.30.0002 Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	Persentase Keberhasilan Penyusunan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	100%	0.00%	0.00%	Bagian Perlengkapan
1.20.30.0003 Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	100%	77.36%	77.36%	Bagian Perlengkapan
1.20.30.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	11.37%	11.37%	Bagian Perlengkapan
1.20.30.0005 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	100%	46.40%	46.40%	Bagian Perlengkapan
<b>1,21 Ketahanan Pangan</b>					
<b>1.21.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.21.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	21.33%	21.33%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>1.21.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.21.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	46.41%	46.41%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>1.21.30 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)</b>	Tersedianya Informasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan	100%			
	Tingkat Keamanan Produk Pangan	80%			
1.21.30.0005 Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Persentase Keberhasilan Pengawasan Dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	100%	27.68%	27.68%	Dinas Pertanian
1.21.30.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan sayur dan buah-buahan	100%	14.58%	14.58%	Dinas Pertanian
1.21.30.0007 Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pertanian
1.21.30.0001 Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif	Persentase Keberhasilan Pengembangan pemanfaatan sumber pangan alternatif	100%	47.05%	47.05%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.30.0002 Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar	Persentase Keberhasilan Pengawasan dan Pemeriksaan produk pangan segar	100%	20.00%	20.00%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.30.0003 Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Persentase Keberhasilan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	100%	16.67%	16.67%	Kantor Ketahanan Pangan
1.21.30.0004 Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Persentase Keberhasilan Monitoring Ketersediaan dan Distribusi Pangan	100%	25.00%	25.00%	Kantor Ketahanan Pangan
<b>1,22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>					
<b>1.22.20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>	Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Miskin	100%			
	Persentase Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya	1%			
1.22.20.0008 Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.22.20.0009 Bulan Bhakti Gotong Royong	Persentase Keberhasilan Bulan Bhakti Gotong Royong	100%	0.00%	0.00%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	1.22.20.0010 PEMBERDAYAAN EKONOMI	Persentase Keberhasilan PEMBERDAYAAN EKONOMI	100%	42.54%	42.54%	Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Keluarga BERENCANA
	1.22.20.0012 Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Persentase Keberhasilan Dinamisasi Data Keluarga Miskin	100%	0.00%	0.00%	Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Keluarga BERENCANA
	1.22.20.0013 Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	100%	58.35%	58.35%	Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Keluarga BERENCANA
	1.22.20.0014 Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	100%	25.00%	25.00%	Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Keluarga BERENCANA
	1.22.20.0037 Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat dan Keluarga BERENCANA
	1.22.20.0019 Penunjang Kegiatan PNPMM Mandiri Perkotaan (P2KP)	Persentase Keberhasilan Penunjang Kegiatan PNPMM Mandiri Perkotaan (P2KP)	100%	25.00%	25.00%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	1.22.20.0006 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Asemrowo
	1.22.20.0028 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Benowo
	1.22.20.0039 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Bubutan
	1.22.20.0023 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Bulak
	1.22.20.0026 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Dukuh Pakis
	1.22.20.0036 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Gayungan
	1.22.20.0027 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Genteng
	1.22.20.0030 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Gubeng
	1.22.20.0022 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Gunung Anyar
	1.22.20.0020 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Jambangan
	1.22.20.0016 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Karangpilang
	1.22.20.0034 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Kenjeran
	1.22.20.0004 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Krembangan
	1.22.20.0029 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Lakarsantri
	1.22.20.0038 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Mulyorejo
	1.22.20.0003 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Pabean Cantian
	1.22.20.0025 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Pakal
	1.22.20.0032 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Rungkut
	1.22.20.0035 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Sambikerep
	1.22.20.0015 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Sawahan

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.22.20.0011 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Semampir
1.22.20.0021 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Simokerto
1.22.20.0033 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Sukolilo
1.22.20.0001 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	18.51%	18.51%	Kec. Sukomanunggal
1.22.20.0007 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Tambaksari
1.22.20.0002 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Tandes
1.22.20.0018 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Tegalsari
1.22.20.0017 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.22.20.0024 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Wiyung
1.22.20.0031 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Wonocolo
1.22.20.0005 Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	Persentase Keberhasilan Monitoring Dan Pendataan Kemiskinan	100%	25.00%	25.00%	Kec. Wonokromo
<b>1,24 Kearsipan</b>					
<b>1.24.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan</b>	Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	10.7 %			
1.24.15.0001 Pembinaan Sistem Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Sistem Kearsipan	100%	37.05%	37.05%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0002 Layanan Informasi Kearsipan	Persentase Keberhasilan Layanan Informasi Kearsipan	100%	0.00%	0.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.15.0003 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	100%	51.73%	51.73%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.24.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	Jumlah SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	6 SKPD			
1.24.16.0001 Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	Persentase Keberhasilan Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan Dan Penyelamatan Kearsipan	100%	16.13%	16.13%	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.24.16.0002 Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Persentase Keberhasilan Penataan Dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	100%	38.07%	38.07%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>1,25 Komunikasi dan Informatika</b>					
<b>1.25.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.25.01.0002 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	25.11%	25.11%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	16.67%	16.67%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.25.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.25.02.0002 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	28.71%	28.71%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	26.67%	26.67%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.25.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	Jumlah rata-rata kunjungan per bulan pada website <a href="http://www.surabaya.go.id">www.surabaya.go.id</a>	199768 kunjungan			
	Jumlah partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	57154 kunjungan/peserta			
1.25.15.0002 Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	100%	25.00%	25.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0003 Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	Persentase Keberhasilan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	100%	20.92%	20.92%	Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
1.25.15.0004 Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	15.75%	15.75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0005 Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Persentase Keberhasilan Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	100%	15.01%	15.01%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0006 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	100%	9.00%	9.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.15.0001 Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar, Dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan	100%	37.50%	37.50%	Dinas Pendidikan
<b>1.25.19 Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	Persentase layanan publik yang berbasis TIK	46.1 %			
1.25.19.0001 Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	100%	22.75%	22.75%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0003 Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	100%	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0004 Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0005 Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	100%	21.04%	21.04%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0006 Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	Persentase Keberhasilan Peningkatan Dan Pendayagunaan Opensource Software	100%	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0007 Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	100%	22.28%	22.28%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0008 Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	100%	0.00%	0.00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0009 Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	Persentase Keberhasilan Pembinaan, Pengawasan Dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	100%	39.43%	39.43%	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.25.19.0002 Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	Persentase Keberhasilan Pemeliharaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pendidikan
<b>1.25.20 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat</b>	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	83%			
1.25.20.0001 Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	100%	25.00%	25.00%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.20.0002 Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Persentase Keberhasilan Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	100%	3.58%	3.58%	Bagian Hubungan Masyarakat
1.25.20.0003 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Jurnalistik	100%	22.43%	22.43%	Bagian Hubungan Masyarakat
<b>1,26 Perpustakaan</b>					
<b>1.26.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
1.26.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	31.50%	31.50%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>1.26.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
1.26.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	24.11%	24.11%	Badan Arsip dan Perpustakaan

Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>1.26.15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>		Jumlah kunjungan layanan baca	2470670 orang			
	1.26.15.0001 Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	100%	18.06%	18.06%	Badan Arsip dan Perpustakaan
	1.26.15.0002 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Persentase Keberhasilan Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	100%	0.00%	0.00%	Badan Arsip dan Perpustakaan
	1.26.15.0003 Pengelolaan Layanan Baca	Persentase Keberhasilan Pengelolaan Layanan Baca	100%	24.36%	24.36%	Badan Arsip dan Perpustakaan
	1.26.15.0004 Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	Persentase Keberhasilan Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah Dan Taman Bacaan Masyarakat	100%	21.46%	21.46%	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>2,01 Pertanian</b>						
<b>2.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70%			
	2.01.01.0001 Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	Persentase Keberhasilan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	100%	32.30%	32.30%	Dinas Pertanian
<b>2.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		Indeks Kepuasan Karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70%			
	2.01.02.0001 Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Persentase Keberhasilan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	100%	27.23%	27.23%	Dinas Pertanian
<b>2.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>		Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan	3.73 Ton/Ha			
	2.01.19.0001 Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan	Persentase Keberhasilan Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian/ perkebunan	100%	15.88%	15.88%	Dinas Pertanian
	2.01.19.0002 Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan	Persentase Keberhasilan Pelatihan pemanfaatan teknologi pertanian/ perkebunan perkotaan	100%	7.25%	7.25%	Dinas Pertanian
	2.01.19.0003 Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan	Persentase Keberhasilan Fasilitasi pemasaran hasil produksi hortikultura petani binaan	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pertanian
<b>2.01.21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak</b>		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan	28.62 %			
		Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi	89.69 %			
	2.01.21.0001 Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase Keberhasilan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	100%	14.34%	14.34%	Dinas Pertanian
	2.01.21.0002 Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Hewan	100%	136.54%	136.54%	Dinas Pertanian
<b>2.01.22 Program Peningkatan Produksi</b>		Produktivitas di bidang peternakan	2 Ekor/Kelompok			
	2.01.22.0001 Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyebaran dan Pengembangan Ternak	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pertanian
	2.01.22.0002 Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak	Persentase Keberhasilan Penyediaan Sarana Prasarana Pengembangan Ternak	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pertanian
<b>2.01.25 Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/Perkebunan,</b>		Cakupan sebaran penyediaan bibit pada pembudidaya	75%			
		Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	80%			
	2.01.25.0001 Penyediaan bibit	Persentase Keberhasilan Penyediaan bibit	100%	30.00%	30.00%	Dinas Pertanian
	2.01.25.0002 Peningkatan Sumber Daya Pertanian	Persentase Keberhasilan Peningkatan Sumber Daya Pertanian	100%	38.54%	38.54%	Dinas Pertanian
<b>2,03 Energi dan Sumberdaya Mineral</b>						
<b>2.03.18 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi</b>		Jumlah perusahaan Energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	4 kegiatan			
	2.03.18.0001 Pembinaan Dan Pengawasan Serta Perusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih	Persentase Keberhasilan Pembinaan Dan Pengawasan Serta Perusahaan Aneka Energi Terbarukan Dan Energi Bersih	100%	0.00%	0.00%	Badan Lingkungan Hidup



Urusan-Program-Kegiatan		2016 (Triwulan I)				SKPD
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
	2.03.18.0003 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Industri Dan Usaha	100%	0.00%	0.00%	Badan Lingkungan Hidup
	2.03.18.0002 Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	Persentase Keberhasilan Pengusahaan Konservasi Energi Pada Sektor Bangunan Gedung Dan Permukiman	100%	0.00%	0.00%	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>2,04 Pariwisata</b>						
<b>2.04.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	772000 wisatawan mancanegara			
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	16478019 wisatawan nusantara			
	2.04.15.0001 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	100%	13.49%	13.49%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.15.0002 Penyelenggaraan Festival Kuliner	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Festival Kuliner	100%	0.00%	0.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.15.0003 Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan	Persentase Keberhasilan Pelayanan Pendaftaran dan pengawasan Usaha Kepariwisataaan	100%	25.00%	25.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.15.0004 Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata	Persentase Keberhasilan Pembinaan Pendukung Usaha Pariwisata	100%	33.33%	33.33%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.15.0005 Penyelenggaraan Event Wisata	Persentase Keberhasilan Penyelenggaraan Event Wisata	100%	23.10%	23.10%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.15.0006 Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	100%	19.44%	19.44%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2.04.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke ODTW	3100000 wisatawan nusantara			
		Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW	6000 wisatawan mancanegara			
	2.04.16.0001 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ampel dan Kenjeran	100%	14.02%	14.02%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.16.0002 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Persentase Keberhasilan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	100%	50.00%	50.00%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	2.04.16.0003 Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan	Persentase Keberhasilan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata THR, Balai Pemuda dan Tugu Pahlawan	100%	25.35%	25.35%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>2,05 Kelautan dan Perikanan</b>						
<b>2.05.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</b>		Produktivitas Hasil Olahan Perikanan	14.16 Ton/Orang			
		Produktivitas Usaha Garam	81.47 Ton/Ha			
	2.05.15.0001 Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Pengolah Hasil Perikanan	100%	31.22%	31.22%	Dinas Pertanian
	2.05.15.0002 Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Petambak Garam	100%	34.55%	34.55%	Dinas Pertanian
<b>2.05.21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>		Produktivitas tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)	3.2 Ton/Orang			
	2.05.21.0001 Pembinaan dan Pengembangan Nelayan	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Nelayan	100%	11.80%	11.80%	Dinas Pertanian
<b>2.05.25 Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>		Produktivitas budidaya perikanan	2.13 Ton/Ha			
	2.05.25.0001 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat	Persentase Keberhasilan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Darat	100%	11.40%	11.40%	Dinas Pertanian
<b>2,06 Perdagangan</b>						

Urusan-Program-Kegiatan	2016 (Triwulan I)				SKPD
	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	
<b>2.06.15 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	Persentase peningkatan Jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	15%			
	Persentase Peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Tertib ukur	3%			
2.06.15.0001 Pelayanan UPTD Metrologi Legal	Persentase Keberhasilan Pelayanan UPTD Metrologi Legal	100%	56.49%	56.49%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.06.15.0002 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Persentase Keberhasilan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	100%	35.39%	35.39%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.06.15.0003 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	Persentase Keberhasilan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pengaduan Konsumen	100%	1.58%	1.58%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target yang direncanakan.

Permasalahan Daerah Yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dijelaskan pada berikut :

Tabel 2.116  
Tabel Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas  
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah	Kapasitas daya tampung sekolah untuk tingkat pendidikan dasar masih kurang memadai (jumlah siswa per rombel melebihi kapasitas standar)  Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya sesuai standar  Masih ada anak putus sekolah	Seluruh warga kota Surabaya sudah melek huruf  Tersedianya dana BOS dan BOPDA yang dapat membantu operasional sekolah  Rata-rata lama sekolah warga kota Surabaya sudah baik
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar warga kota Surabaya yang bersekolah tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain
Program Pendidikan Non Formal	Akses anak terhadap informasi sedemikian pesat dan minat anak terhadap hal-hal baru sangat besar. Pendidikan formal yang mengedepankan sisi akademis belum sepenuhnya mengantisipasi hal-hal di luar/non akademis yang akan membentuk karakter siswa	Pendidikan non formal berkembang pesat di kota Surabaya

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas, kompetensi, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> <li>- Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> <li>-Penataan dan pemerataan jumlah dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan belum merata</li> </ul>	Tenaga pendidik sudah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi yang sesuai standar (sertifikasi)
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian penyebaran penyakit tropis dan penyakit serius lainnya, serta penyebaran HIV/AIDS dan NAPZA</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan belum merata</li> <li>-Pengembangan kawasan terbatas merokok/penyediaan area khusus merokok dalam gedung belum maksimal</li> </ul>	<p>Angka Kematian Ibu dan Bayi yang semakin menurun</p> <p>Balita di kota Surabaya sudah memiliki status gizi yang baik. Tidak ada balita gizi buruk</p>
<p>Program Pengadaan. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</p> <p>Program Pengadaan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p>	<p>Jumlah tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kota (pasien) yang dilayani</p> <p>Penanganan penyakit menular seperti diare, pneumonia, dan TB yang belum optimal</p>	- Penanganan kesehatan bagi warga miskin semakin baik
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif)	- Penanganan kesehatan bagi warga miskin semakin baik
Program Pengendalian Banjir	Masih ada wilayah yang mengalami genangan air saat musim penghujan (drainase kurang memadai dan belum semua tersambung)	- Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana (termasuk banjir dan kebakaran) sudah berjalan baik

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Kapasitas jalan di kota Surabaya belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan bermotor	Kondisi jalan di kota Surabaya hampir seluruhnya sudah dalam kondisi baik dan dapat diakses kendaraan roda 4
Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kapasitas produksi dengan pemanfaatan idle capacity dan penurunan kebocoran belum maksimal</li> <li>- Penambahan tekanan air pada Sambungan Pelanggan melalui pembangunan resevoir distribusi/pelayanan belum maksimal</li> <li>- Pengembangan sistem jaringan air bersih, terutama pada kawasan-kawasan pemanfaatan terbatas, antara lain KAI, Sempadan Sungai, Pelindo, dsb belum maksimal</li> </ul>	Seluruh warga kota Surabaya dapat mengakses air minum yang aman
Program Utilitas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan pemasangan PJU belum maksimal</li> <li>- Biaya pemeliharaan dan operasional PJU tinggi</li> <li>- Pengembangan PJU dengan memanfaatkan belum teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan</li> <li>- Kualitas sistem manajemen pemeliharaan dan operasional PJU masih rendah</li> </ul>	Sebagian besar perumahan dan kawasan permukiman di kota sudah terlayani listrik (termasuk PJU). dan air bersih
Program Perumahan dan Permukiman	<p>Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang masih kurang</p> <p>Kawasan permukiman yang dikelola pengembang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai</p>	Luasan permukiman kumuh di kota Surabaya semakin berkurang

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aksesibilitas evakuasi pada sekitar area kejadian kebakaran belum memadai</li> <li>- Penerapan standar keamanan bangunan khususnya proteksi kebakaran belum maksimal</li> <li>- Sarana prasarana dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum memadai</li> <li>- Pemahaman masyarakat terhadap wawasan pencegahan dan penanggulangan/penanganan awal bencana kebakaran belum merata</li> </ul>	Upaya mitigasi dan penanggulangan bencana (termasuk banjir dan kebakaran) sudah berjalan baik
Program Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada bangunan di kota Surabaya yang belum berizin</li> <li>Pembangunan fisik di kota Surabaya belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah</li> <li>Konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kota Surabaya (aktivitas dari hulu ke hilir) belum optimal</li> <li>Sistem penataan ruang di kota Surabaya belum terintegrasi dengan baik</li> </ul>	- Komitmen Pemerintah Kota untuk melakukan integrasi dalam penataa ruang Kota

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data-data yang dapat mendukung perencanaan secara teknokratik belum tersedia secara komprehensif. Belum ada mekanisme data tunggal yang dikelola untuk kepentingan perencanaan</li> <li>- Tidak semua organisasi perangkat daerah paham tentang perencanaan dan menyadari kepentingan perencanaan dalam organisasi</li> <li>- Perencanaan masih ada yang bersifat sektoral. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan lintas sektor dan berkelanjutan belum direncanakan secara terintegrasi sehingga permasalahan yang sesungguhnya dan target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik</li> </ul>	<p>Tingkat partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan kota Surabaya sudah cukup tinggi</p>
<p>Program Pengembangan Sistem Transportasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi</li> <li>Kurangnya moda transportasi massa yang aman, nyaman serta mudah diakses masyarakat</li> <li>Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara</li> <li>Belum ada kebijakan yang terintegrasi tentang pembatasan kendaraan pribadi</li> <li>Pengaturan pengujian kendaraan untuk Uji Tipe yang kewenangannya ditarik ke Pusat menyulitkan bagi dunia usaha</li> </ul>	<p>Jumlah dan kondisi pelabuhan laut/udara/terminal bis/stasiun K.A memadai</p>

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<p>Pelayanan pengurusan izin yang berkaitan dengan lingkungan masih membutuhkan waktu lama</p> <p>Pencemaran air karena limbah industri belum terpantau dengan baik</p> <p>Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga secara terpadu belum tersedia</p>	Kebijakan Pemerintah Kota untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola limbah domestik dan industri
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH belum sepenuhnya berfungsi optimal secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi	- Perbandingan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah sesuai ketentuan
Program Pengelolaan Kebersihan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan pengolahan sampah belum maksimal</li> <li>- Sarana prasarana dalam upaya pengelolaan dan pengolahan sampah belum merata</li> <li>- Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kebersihan belum merata</li> <li>- Peraturan atau regulasi terkait kebersihan kota kurang ditegakkan</li> </ul>	<p>Sampah di kota Surabaya sudah ditangani dengan baik (perbandingan TPS dengan jumlah penduduk memadai)</p> <p>Kebijakan Pemerintah Kota untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan bersih dan nyaman (program green and clean)</p>
Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota	<p>Belum semua asset tanah milik pemerintah Kota Surabaya terinventarisasi dalam sistem informasi barang daerah, memiliki sertifikat, memiliki bukti kepemilikan yang lengkap (dikuasai pihak lain)</p> <p>Proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum memerlukan waktu yang panjang</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dan nilai ekonomis asset</p> <p>Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Warga kota Surabaya sudah memiliki kesadaran tinggi akan tertib administrasi atas kepemilikan tanah. Sebagian besar tanah di kota Surabaya sudah mempunyai dokumen kepemilikan (sertifikat)</li> <li>- Kasus tanah negara dapat diselesaikan dengan baik</li> </ul>



Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
	infrastruktur	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	<p>Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP</p> <p>Database penduduk perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal untuk menetapkan kebijakan atau program yang berbasis penduduk</p>	Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah berjalan dengan baik (online). dan tanpa retribusi
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat minim karena faktor kesadaran masyarakat yang rendah dan ada perasaan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya karena anggapan masalah kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah masalah domestik keluarga (tabu)	<p>Adanya kesadaran warga kota Surabaya untuk tidak mempekerjakan anak (tenaga kerja di bawah umur)</p> <p>Tingkat kesetaraan gender di kota Surabaya sudah cukup tinggi</p>
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta sudah cukup tinggi
Program Keluarga Berencana	<p>Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja/beraktivitas di kota Surabaya</p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak ber-KB (PUS Unmet Need) masih tinggi</p>	<p>Ketersediaan dan keterjangkauan alat kontrasepsi memadai bagi warga kota Surabaya</p> <p>Tingkat kesadaran warga kota (laki-laki) untuk menjadi peserta KB tinggi</p>
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kurangnya fungsi koordinasi (termasuk dengan pihak Provinsi dan Pusat) dengan berbagai pihak dalam penanganan PMKS di kota Surabaya	Sarana dan prasarana Liponsos kota Surabaya memadai dan mampu menampung PMKS

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
<p>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial belum maksimal</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan dasar dan sarana prasarana panti sosial bagi PMKS belum merata</li> <li>- Adanya kelompok PMKS yang tidak dapat diberdayakan</li> <li>- Ketidakkuratan database PMKS dalam menunjang perencanaan kebijakan yang tepat sasaran</li> <li>- Belum ada sinkronisasi pada program penanganan PMKS</li> </ul>	<p>Keterlibatan pihak swasta untuk penanganan PMKS cukup tinggi</p>
<p>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</p>	<p>Supply-demand tenaga kerja belum terpetakan dengan baik</p> <hr/> <p>Data pencari kerja baru berasal dari Kartu Kuning. Belum ada data riil pencari kerja untuk penduduk kota Surabaya</p> <hr/> <p>Perluasan lapangan kerja sektor formal belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja</p>	<p>Upaya pemerintah kota Surabaya untuk memfasilitasi penempatan pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja sudah cukup baik</p>
<p>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</p>	<p>Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama)</p> <hr/> <p>Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia, termasuk kota Surabaya</p> <hr/> <p>Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja</p>	<p>Minat kerja masyarakat sudah mengarah kepada menciptakan lapangan kerja melalui kegiatan wirausaha dan tidak mengandalkan sepenuhnya pada kesempatan kerja di sektor formal</p>

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
<p>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</p>	Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah angkatan kerja yang terserap di UMKM sangat tinggi</li> <li>- Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Surabaya tinggi</li> <li>- Potensi industri kreatif yang terbuka luas di kota Surabaya</li> </ul>
	Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil	
	Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro	
	Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif	
	Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya	
	Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan	
	Perluasan jaringan pemasaran	
	Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional	
	Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan	
	Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota	
	Kurang jiwa enterpreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak	

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
	bertahan lama	
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi	Meningkatnya jumlah Koperasi yang berkualitas di kota Surabaya
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	<p>Belum tersedianya data potensi investasi kota Surabaya yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Surabaya</p> <p>Mempertahankan iklim investasi yang kondusif</p> <p>Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK</p> <p>Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi</p> <p>Kepastian persyaratan pengurusan Izin dan ketepatan waktu penerbitan Izin usaha pada pelayanan perijinan penunjang investasi masih kurang memuaskan</p> <p>Upah minimum kota yang cenderung tinggi serta tingkat keamanan kota menjadi faktor yang menghambat masuknya investor ke Surabaya</p> <p>Bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan perizinan penunjang investasi belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yang berdampak pada terbatasnya hak dan kewenangan mengakses dan memproses izin pada nominal tertentu</p>	<p>- Pelayanan penerbitan izin penunjang investasi sudah terfasilitasi menggunakan teknologi informasi (Surabaya Single Window)</p> <p>-Beberapa pelayanan publik tidak lagi dipungut retribusi</p>
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	<p>Pelestarian Warisan Budaya</p> <p>Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian</p>	<p>- Jumlah kelompok seni yang berprestasi meningkat</p> <p>-Kota Surabaya memiliki ragam budaya yang sangat</p>

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
	<p>Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda</p> <p>Selama ini pelestarian budaya masih difokuskan pada budaya berbentuk fisik (bangunan dan lingkungan cagar budaya). Belum ada bentuk/wadah yang disediakan kota sebagai bentuk pelestarian budaya yang berwujud non fisik</p> <p>Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya</p> <p>Pengembangan pusat-pusat kebudayaan</p> <p>Warga kota Surabaya sebagian adalah pendatang yang memiliki budaya lokal masing-masing yang beragam.</p>	kaya
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	<p>Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral</p> <p>Kurangnya minat pemuda dalam kegiatan kepemudaan di kota Surabaya</p> <p>Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi</p>	- Jumlah pemuda di kota Surabaya yang semakin meningkat
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	<p>Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA</p> <p>Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga</p> <p>Pembinaan dan pengembangan tenaga atlit dan pelatih profesional.</p>	<p>Prestasi olahraga yang diraih kota Surabaya di tingkat regional dan nasional meningkat</p> <p>Tersedianya sarana olahraga baik untuk olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi, berupa gedung olahraga, taman, maupun jalur khusus sepeda</p> <p>Penyelenggaraan car free day setiap minggu yang merupakan ajang olahraga rekreasi bagi warga kota Surabaya</p>
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin	Upaya pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pengendalian ketenteraman

<b>Program Pembangunan</b>	<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
	ketenteraman dan ketertiban	dan ketertiban sudah cukup baik
	Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong	Seluruh kegiatan Ormas, LSM dan Parpol di kota Surabaya terpantau dengan baik dan cenderung kondusif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Assessment Center belum dioptimalkan pemanfaatannya, termasuk dalam hal penempatan personil Aparatur Sipil Negara berdasarkan kompetensi dan minat kerja	Kinerja Aparatur Sipil Negara sudah diukur dan dievaluasi secara berkala sesuai dengan capaian dan kontribusi atas target kinerja yang ditetapkan
	Pengadaan dan penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai antara kebutuhan riil dengan formasi pegawai yang ditempatkan	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Integrasi antar pihak belum maksimal	Upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Keterbatasan pemahaman SKPD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah	Kota Surabaya memiliki APBD yang cukup memadai untuk melaksanakan pembangunan
	Sistem manajemen aset, khususnya yang terkait dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan pemutakhiran data aset, belum optimal	Hasil pemeriksaan keuangan menunjukkan bahwa semua transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan (WTP)
	Fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan secara internal perlu ditingkatkan	Adanya pengelolaan keuangan berbasis elektronik
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kurangnya SDM untuk melakukan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kompetensi dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di kota Surabaya sudah sangat baik
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tindak lanjut atas roadmap reformasi birokrasi belum dijalankan secara optimal	Adanya koordinasi yang baik dengan instansi vertikal

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
		Kerjasama antar lembaga dan antar daerah yang dibangun oleh pemerintah kota Surabaya sangat banyak
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Belum semua peraturan dan perundang-undangan sinkron. Ada aturan di tingkat UU yang tidak dapat dijalankan di daerah karena tidak ada aturan teknis di bawahnya	Upaya Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan regulasi/kebijakan dalam rangka mendukung pelayanan publik
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<p>Struktur organisasi perangkat daerah beserta tugas pokok dan fungsi organisasi sudah tidak sesuai dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah</p> <p>Penempatan personil belum sepenuhnya berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja</p> <p>Kinerja organisasi perangkat daerah termasuk aparatur sipil negara masih diukur dari capaian output kegiatan dan belum mengarah kepada outcome dan dampak (tingkatan Program, Sasaran, dan Tujuan)</p>	Upaya Kota Surabaya dalam melakukan sinkronisasi terkait perundang-undangan terkait kelembagaan dan ketatalaksanaan
Program Penataan Daerah Otonom	Pelimpahan kewenangan ke tingkat Kecamatan belum berjalan optimal	Upaya Pemerintah Kota untuk melakukan pemerataan informasi ke kecamatan
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi belum cepat dan aman	Komunikasi masyarakat termasuk penanganan pengaduan masyarakat sudah dikelola dengan baik
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	<p>Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok</p> <p>Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat</p> <p>Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif</p>	<p>Tingkat ketersediaan pangan di kota Surabaya sudah mencukupi dan tidak ada daerah rawan pangan</p> <p>Pemerintah kota Surabaya dapat menjamin stabilitas harga dan pasokan pangan</p> <p>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di kota Surabaya sudah memenuhi standar yang ditetapkan</p>

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu dengan Gresik dan Mojokerto	Informasi pasokan. harga dan akses pangan sudah tersedia secara memadai
	Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban	
Program Penanggulangan Kemiskinan	Pemantauan dan pembinaan atas kelompok ekonomi masyarakat yang sudah terbentuk sangat kurang sehingga perkembangan kesejahteraann masyarakat melalui kelompok tersebut (pendapatan dan daya saing) sulit diketahui	Kebijakan Pemerintah Kota memberdayakan masyarakat cukup berhasil melalui pembentukan kekompok-kelompok ekonomi berbasis masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin
	Konsep tentang penggunaan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum diwujudkan secara nyata	
	Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun	
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal	Seluruh arsip penting milik Pemerintah Kota Surabaya terlindungi dengan baik
	Pelaksanaan pemusnahan arsip daerah belum berjalan optimal	
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pemerataan akses internet untuk masyarakat	- Kota Surabaya memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan dalam mengolah data menjadi informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan



Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
	Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik	- Kota Surabaya sudah menerapkan tata laksana berbasis teknologi (e-government) yang mengedepankan kecepatan dan transparansi, seperti e-budgeting, e-procurement, e-controlling, e-surat, dsb
	Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik	
Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi	Pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi (e-government) di kota Surabaya sudah berjalan baik
	Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung data skala kota yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih)	Sistem keamanan informasi yang diterapkan pemerintah kota Surabaya dijamin kehandalannya melalui sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS ISO 27001)
	Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya	
	Ada kecenderungan media massa memberitakan hal-hal yang kurang sesuai tentang program/kegiatan serta kinerja pemerintah	
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Sarana dan prasarana di TBM kurang memadai untuk menarik minat baca masyarakat	Minat baca warga kota Surabaya setiap tahun meningkat
	Penyediaan media bacaan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan minat baca karena akses membaca saat ini sudah mudah didapat melalui teknologi informasi	
	Informasi yang tersedia saat ini sangat beragam dan sangat mudah diakses, namun tidak seluruhnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak disertai ulasan mendalam	

<b>Program Pembangunan</b>	<b>Permasalahan Pembangunan</b>	<b>Faktor Penentu Keberhasilan</b>
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Surabaya sebagai kota perdagangan tidak memiliki lahan pertanian luas. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi	Potensi Surabaya sebagai kota perdagangan
	Hasil pertanian dan peternakan tidak signifikan terhadap kontribusi PDRB	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) milik Pemerintah Kota Surabaya kurang memiliki daya tarik bagi wisatawan	Jumlah wisatawan di kota Surabaya terus meningkat
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya	Potensi Surabaya sebagai kota besar dan terdiri dari berbagai macam suku
	Sarana dan prasarana pendukung akses ke tujuan wisata belum terintegrasi dengan baik, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota	
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	80% area budidaya garam adalah milik pengembang	Meningkatnya hasil perikanan budidaya
	Menurunnya hasil perikanan tangkap	
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok	Sebagai kota perdagangan dan jasa, perdagangan di kota Surabaya memiliki kontribusi yang besar pada PDRB kota  Sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia timur, kota Surabaya memiliki potensi besar sebagai penghubung perdagangan antar kota dan antar negara
	Upaya perlindungan konsumen	
	Sinergitas peraturan pusat dan daerah	
	Proses perijinan masih belum efisien	
	Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal	
	Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan	
	Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional	
	Minat masyarakat terhadap produk domestik	
	Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada menurunnya perdagangan luar negeri di kota Surabaya	

Program Pembangunan	Permasalahan Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing	Upaya Pemerintah Kota dalam membangun sentra pedagang kaki lima
	Pembangunan sentra perdagangan kurang mendapat respon positif dari pedagang UMKM karena lokasinya sulit dijangkau pelanggan	
	Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas	

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.116  
Tabel Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Fokus Kesejahteraan Masyarakat	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas daya tampung sekolah untuk tingkat pendidikan dasar masih kurang memadai (jumlah siswa per rombel melebihi kapasitas standar)</li> <li>2. Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya sesuai standar</li> <li>3. Masih ada anak putus sekolah</li> <li>4. Belum optimalnya implementasi Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>5. Akses anak terhadap informasi sedemikian pesat dan minat anak terhadap hal-hal baru sangat besar. Pendidikan formal yang mengedepankan sisi akademis belum sepenuhnya mengantisipasi hal-hal di luar/non akademis yang akan membentuk karakter siswa</li> </ol>
		Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit masih rendah (Semakin tingginya warga usia produktif yang menderita penyakit degeneratif)</li> </ol>

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
		Ketenagakerjaan	1. Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia. termasuk kota Surabaya
	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	Kebudayaan	1. Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya masih kurang
Aspek Pelayanan Umum	Fokus Layanan Urusan Wajib	Pendidikan	1. Masih adanya siswa putus sekolah jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
			2. Masih adanya siswa putus sekolah jenjang pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK) serta tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
		Kesehatan	1. Jumlah tenaga kesehatan yang kurang dibanding dengan jumlah warga kota (pasien) yang dilayani
			2. Penanganan penyakit menular seperti diare, pneumonia, dan TB yang belum optimal
		Pekerjaan Umum	1. Masih ada wilayah yang mengalami genangan air saat musim penghujan (drainase kurang memadai dan belum semua tersambung)
			2. Kapasitas jalan di kota Surabaya belum dapat mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan bermotor
		Perumahan Rakyat	1. Ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau yang masih kurang
			2. Kawasan permukiman yang dikelola pengembang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai
		Penataan Ruang	1. Masih ada bangunan di kota Surabaya yang belum berizin
			2. Pembangunan fisik di kota Surabaya belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah
			3. Konektivitas pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di kota Surabaya (aktivitas dari hulu ke hilir) belum optimal
			4. Sistem penataan ruang di kota Surabaya belum terintegrasi dengan baik
Perhubungan	1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih cukup tinggi		

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
			2. Kurangnya moda transportasi massa yang aman, nyaman serta mudah diakses masyarakat
			3. Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara
			4. Belum ada kebijakan yang terintegrasi tentang pembatasan kendaraan pribadi
			5. Pengaturan pengujian kendaraan untuk Uji Tipe yang kewenangannya ditarik ke Pusat menyulitkan bagi dunia usaha
		Lingkungan Hidup	1. Pelayanan pengurusan izin yang berkaitan dengan lingkungan masih membutuhkan waktu lama
			2. Pencemaran air karena limbah industri belum terpantau dengan baik
			3. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik dan industri rumah tangga secara terpadu belum tersedia
			4. RTH belum sepenuhnya berfungsi optimal secara ekologi, sosial budaya, dan ekonomi
		Energi	1. Konservasi energi dan pengembangan energi alternatif
			2. Penyediaan infrastruktur yang berbasis ekologi
			3. Pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan
			4. Biaya konversi energi baru terbarukan mahal
		Pertanahan	1. Belum semua asset tanah milik pemerintah Kota Surabaya terinventarisasi dalam sistem informasi barang daerah, memiliki sertifikat, memiliki bukti kepemilikan yang lengkap (dikuasai pihak lain)
			2. Proses pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum memerlukan waktu yang panjang
			3. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dan nilai ekonomis asset
			4. Ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum non infrastruktur

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
		Kependudukan dan catatan sipil	1. Belum semua warga kota Surabaya yang wajib ber-KTP memiliki KTP
			2. Database penduduk perlu dilakukan sinkronisasi terlebih dahulu agar dapat digunakan secara optimal untuk menetapkan kebijakan atau program yang berbasis penduduk
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Data tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat minim karena faktor kesadaran masyarakat yang rendah dan ada perasaan enggan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami atau diketahuinya karena anggapan masalah kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah masalah domestik keluarga (tabu)
			2. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal
		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja/beraktivitas di kota Surabaya
			2. Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin menunda memiliki anak atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak ber-KB (PUS Unmet Need) masih tinggi
		Sosial	1. Kurangnya fungsi koordinasi (termasuk dengan pihak Provinsi dan Pusat) dengan berbagai pihak dalam penanganan PMKS di kota Surabaya
		Ketenagakerjaan	1. Supply-demand tenaga kerja belum terpetakan dengan baik
			2. Data pencari kerja baru berasal dari Kartu Kuning. Belum ada data riil pencari kerja untuk penduduk kota Surabaya
			3. Perluasan lapangan kerja sektor formal belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja
		Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1. Minat calon tenaga kerja untuk berwirausaha
			2. Jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil
3. Kompetensi dan daya saing koperasi serta pelaku usaha mikro			

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
			4. Dukungan terhadap pengembangan usaha kreatif
			5. Intervensi pelayanan pemerintah kota Surabaya dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat berbasis kelompok terutama bagi masyarakat miskin dan pelaku UMKM belum sinkron serta belum ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara organisasi perangkat daerah yang satu dengan lainnya
			6. Penyediaan infrastruktur yang mendukung perdagangan secara berkelanjutan
			7. Perluasan jaringan pemasaran
			8. Upaya peningkatan daya saing produk-produk lokal di pasar domestik dan internasional
			9. Keterbatasan UMKM untuk mengakses sumber permodalan
			10. Pembangunan sentra bagi PKL kurang berdaya guna. Lokasi sentra yang jauh dari calon pembeli menjadi faktor yang menyebabkan PKL tidak menempati sentra yang telah disediakan Pemerintah Kota
			11. Kurangnya jiwa entrepreneurship maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama
			12. Partisipasi masyarakat dalam berkoperasi
		Penanaman Modal	1. Belum tersedianya data potensi investasi kota Surabaya yang dapat dipromosikan untuk menunjang peningkatan jumlah investasi di kota Surabaya
			2. Mempertahankan iklim investasi yang kondusif
			3. Pengembangan sistem pelayanan investasi yang berbasis TIK
			4. Ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi
			5. Kepastian persyaratan pengurusan Izin dan ketepatan waktu penerbitan Izin usaha pada pelayanan perijinan penunjang investasi masih kurang memuaskan

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
			6. Upah minimum kota yang cenderung tinggi serta tingkat keamanan kota menjadi faktor yang menghambat masuknya investor ke Surabaya
			7. Bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan perizinan penunjang investasi belum mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yang berdampak pada terbatasnya hak dan kewenangan mengakses dan memproses izin pada nominal tertentu
		Kebudayaan	1. Pelestarian Warisan Budaya
			2. Pengembangan kearifan budaya lokal yang berkarakter dan berkepribadian
			3. Pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan pada generasi muda
			4. Selama ini pelestarian budaya masih difokuskan pada budaya berbentuk fisik (bangunan dan lingkungan cagar budaya). Belum ada bentuk/wadah yang disediakan kota sebagai bentuk pelestarian budaya yang berwujud non fisik
			5. Pengembangan pusat-pusat kebudayaan
		Kepemudaan dan Olahraga	1. Pengaruh negatif globalisasi, krisis budaya dan moral
			2. Kurangnya minat pemuda dalam kegiatan kepemudaan di kota Surabaya
			3. Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi
			4. Daya saing pemuda dalam menghadapi MEA
			5. Sebaran dan kualitas sarana dan prasarana olahraga
			6. Pembinaan dan pengembangan tenaga atlet dan pelatih profesional.
		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Kerjasama dengan berbagai pihak hingga di tingkat RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban
			2. Membangkitkan kembali karakter peduli, toleransi, menghargai, dan perilaku gotong-royong
		Ketahanan Pangan	1. Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok



Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
			2. Kualitas pangan dan bahan pokok yang aman dan layak dikonsumsi masyarakat
			Belum semua warga dapat mengakses pangan yang aman. Pengawasan keamanan pangan belum berjalan dengan efektif
			Ketersediaan beras dikelola oleh Bulog dan tidak ada data tersendiri untuk stok beras kota Surabaya (lumbung pangan lokal). Gudang Bulog terbagi ke dalam wilayah (divre). Kota Surabaya menjadi satu dengan Gresik dan Mojokerto
			Kelembagaan organisasi perangkat daerah di Kota Surabaya yang berkaitan dengan pangan berbentuk Kantor. Bentuk kelembagaan tersebut tidak sepadan dengan urusan yang diemban
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Pemantauan dan pembinaan atas kelompok ekonomi masyarakat yang sudah terbentuk sangat kurang sehingga perkembangan kesejahteraannya masyarakat melalui kelompok tersebut (pendapatan dan daya saing) sulit diketahui
			2. Konsep tentang penggunaan Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum diwujudkan secara nyata
			3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun
		Kearsipan	1. Implementasi pengelolaan arsip secara digital belum optimal
			2. Pelaksanaan pemusnahan arsip daerah belum berjalan optimal
		Perpustakaan	1. Sarana dan prasarana di TBM kurang memadai untuk menarik minat baca masyarakat
			2. Penyediaan media bacaan melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan minat baca karena akses membaca saat ini sudah mudah didapat melalui teknologi informasi
			3. Informasi yang tersedia saat ini sangat beragam dan sangat mudah diakses, namun tidak seluruhnya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak disertai ulasan mendalam

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
	Fokus Urusan Layanan Pilihan	Pariwisata	1. Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) milik Pemerintah Kota Surabaya kurang memiliki daya tarik bagi wisatawan
			2. Daya dukung infrastruktur obyek wisata yang menjadi ikon Surabaya
			3. Sarana dan prasarana pendukung akses ke tujuan wisata belum terintegrasi dengan baik, khususnya yang dikelola Pemerintah Kota
		Pertanian	1. Surabaya sebagai kota perdagangan tidak memiliki lahan pertanian luas. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi
			2. Hasil pertanian dan peternakan tidak signifikan terhadap kontribusi PDRB
		Kelautan dan Perikanan	1. 80% area budidaya garam adalah milik pengembang
			2. Menurunnya hasil perikanan tangkap
Aspek Daya Saing	Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	Perhubungan	1. Belum tersedia infrastruktur dan jalur transportasi yang dapat cepat menghubungkan pusat perdagangan (hub) di dalam kota maupun antar kota/negara
		Komunikasi dan Informatika	1. Pemerataan akses internet untuk masyarakat
			2. Penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik
			3. Pengelolaan infrastruktur jaringan dan aplikasi pelayanan publik
			4. Pengembangan Sistem Pelayanan publik administratif yang berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi
			5. Belum ada aplikasi tunggal untuk menampung data skala kota yang hasil pengolahannya bisa digunakan untuk berbagai kepentingan (aplikasi masih tumpang tindih)
			6. Pengendalian dan integrasi seluruh aplikasi yang dijalankan oleh pemerintah kota Surabaya
			7. Peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman

Aspek	Fokus	Urusan	Permasalahan
			8. Ada kecenderungan media massa memberitakan hal-hal yang kurang sesuai tentang program/kegiatan serta kinerja pemerintah
	Iklim Berinvestasi	Perdagangan	1. Kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok
			2. Upaya perlindungan konsumen
			3. Sinergitas peraturan pusat dan daerah
			4. Proses perijinan masih belum efisien
			5. Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal
			6. Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan
			7. Aktivitas perdagangan antar pulau dan nasional
			8. Minat masyarakat terhadap produk domestik
			9. Kondisi perdagangan dunia yang lesu berdampak pada menurunnya perdagangan luar negeri di kota Surabaya
			10. Masih banyak UMKM di kota Surabaya yang belum memiliki omzet yang memadai dan memiliki daya saing
			11. Pembangunan sentra perdagangan kurang mendapat respon positif dari pedagang UMKM karena lokasinya sulit dijangkau pelanggan
			12. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas
	Sumberdaya manusia	Ketenagakerjaan	1. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama)
			2. Kurangnya kompetensi tenaga kerja lokal untuk mengantisipasi terbukanya Masyarakat Ekonomi Asean yang masuk ke negara Indonesia, termasuk kota Surabaya
			3. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja

## **BAB III**

# **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

#### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 Dan Perkiraan Tahun 2016**

##### **a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perbaikan ekonomi dunia nampaknya masih berjalan sangat lambat, Tiap negara terus berupaya untuk membuat berbagai kebijakan strategis untuk menstimulus kinerja perekonomiannya agar tumbuh positif. Namun, berbagai kebijakan strategis yang dilakukan tersebut nyatanya belum menunjukkan hasil, seperti China yang terus menunjukkan perlambatan perekonomian. Kondisi yang sama juga terjadi di Amerika, dimanaperekonomian Amerika menunjukkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang moderat. Capaian ekonomi Amerika pada tahun 2015 didorong oleh rendah investasi dan pelemahan belanja pemerintah.

Moderatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju serta ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan terjadi seiring menurunnya harga komoditas dan nilai tukar dolar terhadap mata uang asing turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Mengingat perekonomian Kota Surabaya bagian dari perekonomian Jawa Timur dan Nasional serta perekonomian dunia, pergerakan perekonomian dunia yang juga turut berpengaruh terhadap perekonomian Kota Surabaya.

Kinerja perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan namun sedikit melambat. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga melambat seiring menurunnya daya beli masyarakat serta perlambatan kinerja ekspor sebagai dampak perlambatan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya seperti China, Amerika dan Jepang. Sementara dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi Kota Surabaya dipicu oleh melambatnya pertumbuhan industri pengolahan akibat tertekannya nilai tukar rupiah yang berdampak pada meningkatnyabiaya bahan baku industriterutama yang diimpor dari luar negeri. Pada tahun 2015

nilai PDRB Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp323.682.584,92 juta. Sementara pada tahun 2016 perekonomian Kota Surabaya diperkirakan optimis masih tumbuh lebih baik dibanding tahun 2015 meskipun pergerakannya masih moderat seiring moderasinya ekonomi negara-maju maju. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai PDRB Kota Surabaya pada tahun 2015 diperkirakan mencapai sebesar Rp343.589.063,88 juta.

Tabel 3.1  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2015*	2016**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	544.254,16	584.101,41
B	Pertambangan dan Penggalian	19.287,42	20.358,91
C	Industri Pengolahan	63.544.418,51	67.515.251,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.519.805,94	1.546.150,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	479.309,46	515.383,59
F	Konstruksi	32.287.990,94	33.760.263,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	91.681.928,75	97.504.758,52
H	Transportasi dan Pergudangan	15.878.997,20	16.767.146,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	45.780.530,20	48.789.647,07
J	Informasi dan Komunikasi	20.938.611,64	22.161.494,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.852.550,77	16.732.787,41
L	Real Estate	8.774.297,06	9.311.263,63
M,N	Jasa Perusahaan	7.437.646,67	8.074.343,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.032.041,91	4.397.940,01
P	Jasa Pendidikan	7.593.381,70	8.108.701,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.527.338,14	2.645.635,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.790.194,45	5.153.835,96
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>323.682.584,92</b>	<b>343.589.063,88</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Selaras dengan peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2016 diperkirakan meningkat sebesar Rp453.162.164,37 juta, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang hanya sebesar Rp407.703.251,80 juta. Peningkatan tersebut masih didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor sebagai pendorong utama seiring dengan tingginya share kedua komponen tersebut terhadap perekonomian Kota Surabaya dari sisi permintaan. Sementara dari

kinerja lapangan usahanya, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian Kota Surabaya ditahun 2016.

Tabel 3.2  
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2015*	2016**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	750.070,84	829.286,76
B	Pertambangan dan Penggalian	27.587,48	29.908,70
C	Industri Pengolahan	79.334.006,95	88.521.304,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.997.909,41	2.065.810,82
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	613.427,06	725.059,46
F	Konstruksi	41.833.616,63	46.721.019,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	109.971.647,28	123.214.792,49
H	Transportasi dan Pergudangan	21.544.921,57	23.337.851,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62.389.404,16	68.925.965,20
J	Informasi dan Komunikasi	22.080.942,63	25.150.500,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.872.423,78	24.017.594,71
L	Real Estate	10.420.100,50	10.982.024,38
M,N	Jasa Perusahaan	9.814.203,90	10.889.486,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.420.318,82	6.344.270,30
P	Jasa Pendidikan	10.444.758,10	11.555.544,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.210.798,99	3.489.348,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.977.113,72	6.362.396,29
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>407.703.251,80</b>	<b>453.162.164,37</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## b. Sumbangan Sektoral

Berdasarkan kinerja perkategori lapangan usaha, kinerja sektor ekonomi utama masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kota Surabaya, yaitu lapangan usaha kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta kategori industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada tahun 2015 kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan

sepeda motor sebesar 23,82 persen terhadap PDRB ADHK Kota Surabaya. Selanjutnya kategori industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,63 persenan dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 14,14 persen.

Sementara itu, kinerja kategori lapangan usaha pendukung lainnya memberikan kontribusi yang bervariasi. Kategori konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi cukup tinggi setelah kontribusi kategori penopang perekonomian Kota Surabaya. Di sisi lain, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian serta pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terendah terhadap perekonomian Kota Surabaya. Peranan per kategori lapangan usaha terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tahun 2015 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.3  
Peranan Ekonomi PerKategori Terhadap PDRB Kota Surabaya  
Atas Dasar Harga Konstan  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

Kategori	Uraian	2015*	2016**
		(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,63	19,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,47	0,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15
F	Konstruksi	9,98	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,32	28,38
H	Transportasi dan Pergudangan	4,91	4,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,14	14,20
J	Informasi dan Komunikasi	6,47	6,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,90	4,87
L	Real Estate	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,28
P	Jasa Pendidikan	2,35	2,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,48	1,50
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Pada tahun 2016 hampir seluruh kinerja kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya diperkirakan meningkat. Meskipun demikian, melihat perkembangan ekonomi terkini, kinerja kategori lapangan tersebut diperkirakan meningkat secara moderat. Kontribusi kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diperkirakan meningkat pada tahun 2015 sebesar 28,32 persen menjadisebesar 28,38 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan kategori industri pengolahan yang diperkirakan mengalami peningkatan dari 19,63 persen ditahun 2015 menjadi 19,65 persen di tahun 2016. Peningkatan tersebut diperkirakan karena tekanan biaya operasional industri berkurang seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak dan meredanya tekanan rupiah untuk permintaan bahan baku impor. Sementara peningkatan pada kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terutama didorong oleh tingginya konsumsi masyarakat Kota Surabaya terhadap permintaan makanan jadi selaras masyarakat kota memilikikarakteristik pola hidup modern. Disamping itu, semakin merebaknya berbagai macam usaha makanan dan hunian mulai dari yang kecil hingga yang besar turut mengkonfirmasi bahwa kategori penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh pesat di Kota Surabaya.

### c. Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 5,8%-6,2% yang moderat dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2015 yang mencapai 6,02 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan masih lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan Jawa Timur dan Nasional.

Tabel 3.4  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2015*	6,02
2016**	5,8-6,2

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016



\*) Angka Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Dari sisi permintaan, perkiraan perbaikan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 didorong oleh kembali meningkatnya konsumsi masyarakat Kota Surabaya seiring dengan membaiknya perekonomian nasional. Disamping itu, perkiraan perbaikan ekonomi pada beberapa mitra dagang Kota Surabaya akan berdampak terhadap kinerja perdagangan luar negeri.

Dari sisi penawaran, tumbuhnya kinerja kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tumbuh tinggi dibanding tahun sebelumnya.

#### d. Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar 3,43 persen turun signifikan dibanding inflasi Kota Surabaya di tahun 2014, yaitu 7,90 persen, namun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 3,08 persen dan Nasional sebesar 3,35 persen. Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding Jawa Timur dan nasional, namun Inflasi Kota Surabaya masih tergolong dalam kategori inflasi rendah. Penyumbang utama Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2015 ini mayoritas berasal dari kelompok *volatile food* sementara kelompok *administered price* pada tahun ini menjadi penahan inflasi Kota Surabaya. Mencermati perkembangan harga terkini, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan searah dengan sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0-5,0 persen.

Tabel 3.5  
Tingkat Inflasi Kota Surabaya  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016 (dalam persen)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi(%)
2015	3,43
2016**	4,0-5,0

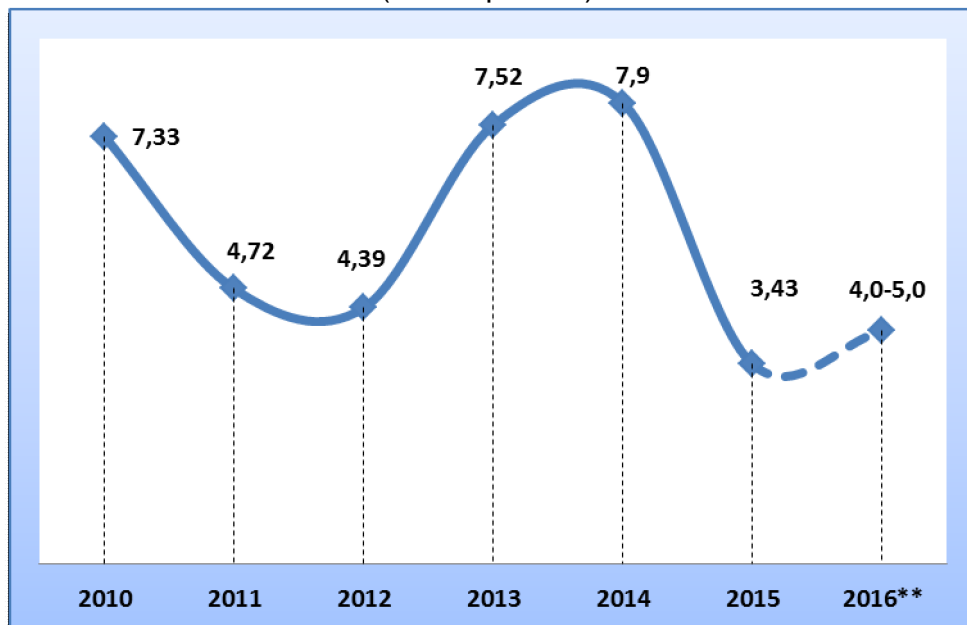
Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

\*) Data Sementara \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Secara series kondisi inflasi Kota Surabaya pada 5 tahun terakhir terangkum dalam Grafik. Seperti nampak pada grafik tersebut, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sedikit lebih tinggi dibanding tahun

2015. Berdasarkan kelompoknya, kelompok volatile food diperkirakan memberikan potensi lebih besar terhadap inflasi Kota Surabaya kedepan. Kemungkinan dampak lanjutan El Nino terhadap mundurnya panen raya dan kemungkinan musim hujan yang berakhir lebih cepat dan musim kemarau di tahun 2016 lebih panjang dari pola normalnya, berpotensi mendorong inflasi dari kelompok volatile food. Sementara inflasi dari kelompok administered price diperkirakan dirorong oleh penyesuaian berbagai penyesuaian kebijakan tarif energi seperti penyesuaian tarif LPG dan penyesuaian tarif listrik.

Gambar 3.1  
Inflasi Kota Surabaya Tahun 2010-2015 dan Perkiraan 2016  
(dalam persen)



Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016

\*\* ) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### e. Tingkat Investasi (PMA & PMDN)

Salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Surabaya adalah investasi yang ditanamkan. Perkembangan Kota Surabaya yang tumbuh pesat sebagai basis bisnis yang didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik untuk mendorong dan memperkuat dalam penanaman modal asing maupun penanaman dalam negeri. Selain itu, kemudahan akses dalam hal perizinan juga menjadi salah

satu daya dukung utama. Maka tidak heran bila Kota Surabaya semakin menarik bagi para investor.

Kinerja investasi Kota Surabaya pada tahun 2015 menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Hal tersebut ditunjukkan oleh realisasi nilai investasi yang dicapai, meskipun realisasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) mengalami penurunan dibanding sebelumnya, namun realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun 2015 ini mencapai realisasi tertinggi kedua selama 5 tahun terakhir setelah tahun 2012, yaitu sebesar Rp828.416.500.000. Berdasarkan data BKPPM Kota Surabaya, faktor pendorong akselerasi investasi PMDN pada tahun ini berasal dari realisasi investasi pembangunan pergudangan dan jasa penunjang angkutan; industri logam dasar, mesin dan elektronik; serta industri karet dan barang dari plastik.

Sementara itu, dari sisi investasi PMA, realisasi pada tahun 2015 mencapai USD14.675.100, yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu USD45.294.933. Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor serta perdagangan, reparasi dan perawatan mobil masih menjadi komponen terbesar dalam meningkatkan capaian realisasi investasi PMA di Kota Surabaya tahun 2015. Berdasarkan capaian realisasi investasi pertahun dan perkembangan ekonomi terkini maka nilai investasi Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp Rp635.643.951.322 yang berasal dari PMDN dan sebesar Rp USD25.831.000 dari PMA. Untuk selengkapnya terkait realisasi investasi dan perkiraannya terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 3.6  
Realisasi Nilai Investasi Kota Surabaya  
Tahun 2010-2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Tahun	Jumlah Penanaman Modal	
	PMDN	PMA
2010	Rp301.508.197.222	USD42.571.713
		Rp905.812.608.745
2011	Rp725.625.178.209	USD25.431.570
		Rp301.508.197.222
2012	Rp4.396.363.620.332	USD12.176.402
		Rp298.717.956.292
2013	Rp490.271.432.498	USD23.815.769
		Rp91.883.698.021
2014	Rp639.625.900.000	USD45.294.933
		Rp-
2015	Rp828.416.500.000	USD14.675.100
		Rp-
2016**	Rp635.643.951.322	USD25.831.000

Sumber data: BKPPM dan Bappeko Surabaya, 2016\*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan terkait investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). Selain itu, analisis besaran *ICOR* juga dapat digunakan untuk melihat produktivitas dan efisiensi dari investasi yang dilakukan. Besaran *ICOR* menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit usaha. Oleh karena itu besaran *ICOR* digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai *ICOR* semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai *ICOR* maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari Investasi yang ditanamkan,

Tabel 3.7  
*Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kota Surabaya*  
 Tahun 2010-2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014**	2015**
ICOR	3,21	2,94	2,92	2,90-3,2	2,90-3,2

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016\*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Rata-rata nilai ICOR Kota Surabaya sejak tahun 2011 hingga 2013 sebesar Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi yang ditanamkan di Kota Surabaya sudah cukup efisien. Berdasarkan teori, investasi dikatakan efisien jika memiliki nilai ICOR antara 3 – 4. Bahkan nilai ICOR Kota Surabaya tahun 2013 mencapai angka 2,92 atau dibawah angka 3 sehingga dapat disimpulkan bila investasi tersebut semakin lebih efisien. Pada tahun 2015 angka ICOR Kota Surabaya diperkirakan pada kisaran 2,90-3,2. Investasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktifitas ekonomi di Kota Surabaya, sehingga dapat mendorong peningkatan PDRB dan dapat memberikan *multiplier effect* yaitu membantu dalam perluasan lapangan pekerjaan.

#### f. Ekspor dan Impor

Kota Surabaya berdasarkan karakteristik dan lokasinya yang strategis memiliki peran sebagai kota bisnis, aktivitas perdagangan mulai dari perdagangan eceran maupun ritel berkembang pesat. Disamping itu, sebagai kota pelabuhan menjadi nilai tambah sebagai penghubung antar daerah khususnya wilayah Indonesia bagian timur dalam menunjang aktivitas perdagangan sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

Tabel 3.8  
 Ekspor Kota Surabaya Tahun 2015 dan  
 Perkiraan Tahun 2015

Tahun		2015	2016**
Ekspor	Nilai (US \$)	16.452.486.419	17.885.497.986
	Tingkat Perubahan (%)	-8,71	8,71
Impor	Nilai (US \$)	14.888.180.928	16.030.104.405
	Tingkat Perubahan (%)	-12,71	7,67

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2015 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

Pada tahun 2015 adanya tekanan yang cukup besar akibat melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang utama Kota Surabaya, terutama seperti China, Amerika cukup menyerap kinerja ekspor Kota Surabaya. Mengingat tingginya besaran *share* ekspor Kota Surabaya ketiga negara tersebut terhadap total ekspor Kota Surabaya, maka perlambatan ekonomi di kawasan tersebut berpengaruh terhadap menurunnya kinerja ekspor Kota Surabaya. Disamping itu, penurunan harga komoditas internasional turut mendorong penyusutan kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar US\$16.452.486.419 yang menurun dibandingkan tahun 2014 yang sebesar US\$18.022.413.011.

Meskipun kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami penurunan, namun kinerja impor mengalami penurunan yang lebih dalam di mana kinerja impor Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar USD14.888.180.928 yang turun sebesar -12,71 persen dibanding tahun 2014 sebesar USD17.056.615.375. Pelemahan impor Kota Surabaya tersebut disebabkan karena melambatnya kinerja industri pengolahan serta nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi di beberapa waktu di tahun 2015. Penyusutan yang lebih dalam dari sisi impor membuat neraca perdagangan Kota Surabaya pada tahun 2015 mengalami surplus sebesar USD1.564.305.491.

Memperhatikan kinerja sebelumnya dan mempertimbangkan perkiraan ekonomi ke depan maka kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2016 diperkirakan sebesar USD17.885.497.986 sementara kinerja impor sebesar USD16.030.104.405.

#### **g. Tingkat pengangguran Terbuka**

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kota Surabaya pada tahun 2015 lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur dan TPT Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surabaya masih menjadi tujuan favorit bagi pencari kerja di daerah Jawa Timur, sehingga nilai TPT di kota Surabaya cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, maupun Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan. Adapun perbandingan TPT di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tabel berikut.

Tabel 3.9  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2016

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Kota Surabaya	Jawa Timur	Nasional
2015	7,01	4,47	6,18
2016**	5,5 – 6,5	4,11-5,00	5,2-5,5

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2015 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### h. Incremental *Labour Output Ratio* (ILOR)

Indikator lain yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perekonomian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan dapat diukur dari pengukuran ILOR. ILOR yang merupakan kepanjangan *Incremental Labour Output Ratio* menggambarkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat meningkatkan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. ILOR dapat dilihat sebagai perbandingan antara perubahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan penambahan output perekonomian suatu wilayah.

Berdasarkan Data BPS, nilai perhitungan ILOR Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun angkanya cukup bervariasi. Nilai ILOR tertinggi terjadi pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 0,03. Sementara ILOR terendah terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 0,01. Kondisi ini memberikan arti bila kenaikan output pada tahun 2013 tidak dibarengi dengan penambahan penyerapan jumlah tenaga kerja. Melihat kondisi perekonomian terkini nilai ILOR Kota Surabaya pada tahun 2015 diperkirakan besarnya sama yaitu kisaran 0,01-0,02.

Tabel 3.10  
*Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kota Surabaya*  
 Tahun 2010-2013 dan Perkiraan Tahun 2015

Uraian	2011	2012	2013	2014**	2015**
ILOR	0,03	0,03	0,01	0,01-0,02	0,01-0,02

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Dan Tahun 2016

#### a. Analisis Kondisi Internal Kota Surabaya

##### a.1. Kekuatan

**Pertama** : Perekonomian Kota Surabaya yang relatif stabil dan terjaga dari sisi variabel ekonomi makronya, menjadi kekuatan bagi fundamental perekonomian Surabaya untuk beberapa tahun mendatang. Mengingat Kota Surabaya menganut sistem *small open economy* maka tidak stabilnya ekonomi dunia tentunya berdampak terhadap kinerja perekonomian Kota Surabaya. Namun besarnya konsumsi masyarakat disertai meningkatnya daya beli masih menjadi potensi yang tinggi dalam mendorong perekonomian Kota Surabaya setiap tahunnya.

**Kedua** : Pesatnya pertumbuhan ekonomi dari kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum masih menjadi salah satu kekuatan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tetap tinggi. Pesatnya pertumbuhan ekonomi kategori utama Kota Surabaya tersebut ditandai oleh maraknya bangunan mall-mall dan pusat perbelanjaan dan restoran yang tersebar di Kota Surabaya. Kondisi tersebut terjadi karena besarnya potensi dan daya dukung yang dimiliki Kota Surabaya seperti jumlah penduduk Kota Surabaya banyak, kondisi ekonomi yang aman dan kondusif, tingkat konsumsi yang tinggi, infrastruktur yang memadai menjadi daya tarik bagi pelaku-pelaku usaha baik ritel maupun eceran untuk berbisnis di Kota Surabaya.

**Ketiga** : Berdasarkan lokasinya yang strategis, Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan dan kota penghubung sehingga Kota Surabaya berperan penting terhadap perekonomian nasional dan wilayah-wilayah lainnya khususnya Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, Kota Surabaya



memiliki keuntungan sebagai kota pelabuhan karena dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di Kota Surabaya berkembang pesat sehingga mendorong terjadinya ekspor impor barang dan jasa.

**Keempat** : Kota Surabaya memiliki potensi yang besarkhususnya berupasumber daya manusia. Adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah Surabaya barat diperkirakan akan berdampak besar terhadap meningkatnya perekonomian kota Surabaya di masa yang akan datang dilihat dari tumbuhnya lapangan usaha kategori transportasi dan pergudagangan; perdagangan; industri pengolahan dan kategori jasa.

**Kelima** : Sesuai kebijakan pemerintah pusat terkait program ketahanan pangan untuk intensifikasi produk pertanian di Jawa Timur yang berdampak terhadap pasokan dan ketersediaan komoditas pertanian bagi Kota Surabaya.

**Keenam** : Dukungan infrastruktur semakin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kota Surabaya agar terus berkembang baik melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya, antara lain pembangunan jalan raya dan gorong-gorong. Pembangunan jalan raya bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di Kota Surabaya. Tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan investasi. Pembukaan jalan baru semacam jalan lingkar barat, jalan lingkar timur dan frontage Ahmad Yani, diharap dapat menghubungkan seluruh kawasan di Kota Surabaya. Sementara pembangunan gorong-gorong ditujukan untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Surabaya. Selain itu, rencana pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) sebagai modal transportasi modern yang akan direalisasikan pada tahun 2018, diharapkan menjadi salah satu solusi menghadapi kemacetan.

**Keenam:** Sebagai pusat dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, perbankan dan jasa-jasa yang dapat menunjang perkembangan perekonomian kota. Selain itu, situasi keamanan yang sangat kondusif (jarang terjadi kerusuhan maupun gejolak politik) menjadi insentif bagi para

investor untuk berinvestasi di Kota Surabaya sehingga perkembangan dan situasi sosial ekonomi juga relatif terkendali.

**Ketujuh** : Kinerja pengelolaan keuangan Kota Surabaya lebih baik. Hal ini terlihat dari APBD Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2014 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6,05 triliun dan Rp6,6 triliun. Ditargetkan, di tahun 2017 APBD Kota Surabaya dapat mencapai Rp7,4 triliun dan semakin meningkat jumlahnya di tahun-tahun yang akan datang, seiring dengan perekonomian Kota yang semakin stabil. APBD ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur di Kota Surabaya.

**Kedelapan** : Struktur belanja pemerintah yang produktif, di mana Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Ditinjau dari komposisi penggunaannya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar dalam menyerap belanja daerah. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabayaterus berupaya memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Surabaya dari berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya.

## **a.2. Kelemahan**

**Pertama** : Jumlah penduduk Kota Surabaya yaitu sebanyak 2,9 juta jiwa, menjadikan Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Mekanisme pengendalian dan penataan jumlah penduduk ini perlu dilakukan agar sumberdaya manusianya semakin berkualitas. Jumlah penduduk yang tidak terkendali pada akhirnya dapat menjadi beban bagi pemerintah daerah dan memunculkan masalah-masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan, wilayah kumuh, kriminalitas dan sebagainya.

**Kedua** : Kota Surabaya memiliki tingkat pertumbuhan PDRB setiap tahunnya namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh tingkat pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang meningkat di tahun 2015,

yaitu sebesar 7,01%. Ditargetkan angka ini semakin menurun pada tahun 2016 dan tahun-tahun yang akan datang.

**Ketiga** : Jaminan ketersediaan kebutuhan pangan dan bahan pokok Kota Surabaya yang masih rendah, mengingat Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil melainkan pengguna sehingga kebutuhan bahan makanan Kota Surabaya seperti sayur-sayuran, beras dan komoditas pertanian lainnya dipenuhi oleh daerah lain. Kondisi tersebut yang mendorong Kota Surabaya memiliki ketergantungan yang tinggi daerah penghasil sehingga jika terjadi ketidakstabilan pasokan maupun distribusi pada daerah penghasil secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan harga bahan pokok di Kota Surabaya yang akhirnya dapat memicu kenaikan inflasi.

**Keempat** : inflasi Kota Surabaya diperkirakan sama seperti sasaran inflasi nasional yaitu pada kisaran 4%-5%. Berdasarkan pemicunya, inflasi Kota Surabaya mayoritas dipicu oleh kelompok bahan makanan (*volatile food*). Namun demikian inflasi kelompok *administered price* juga memiliki potensi besar dalam menyumbang inflasi Kota Surabaya seperti peningkatan harga BBM, penyesuaian tarif kereta api, tarif angkutan umum, harga bahan bakar rumah tangga mengingat jumlah dan komposisi masyarakat Kota Surabaya yang sebagian besar dalam golongan tarif penyesuaian. Selama ini tidak ada yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah manapun ketika menghadapi inflasi yang disebabkan dari kelompok *administered price* (inflasi akibat kebijakan Pemerintah Pusat).

**Kelima** : Belum terealisasinya transportasi massal dalam kota yang murah dan cepat di Kota Surabaya sehingga sampai saat ini mayoritas penduduk Kota Surabaya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, konsumsi bahan bakar kendaraan dan volume kendaraan di Kota Surabaya semakin meningkat. Hal ini memicu kemacetan di Kota Surabaya.

**Keenam** : Beban dan belanja infrastruktur Kota Surabaya relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Disadari bahwa ketersediaan infrastruktur dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian pada suatu daerah dan selanjutnya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang mampu menopang pembiayaan infrastruktur Kota Surabaya kedepannya,

baik dalam format kerjasama dengan pihak swasta maupun mekanisme inovatif lain yang tersedia misalnya melalui surat berharga daerah maupun pinjaman atau pendanaan oleh pemerintah pusat.

**Ketujuh** : Kemudahan berbisnis di Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang masih rendah dibanding negara-negara kompetitor. Berdasarkan data *Ease of Doing Business* tahun 2015, indikator iklim investasi di Kota Surabaya dianggap belum baik, dari sisi biaya yang dibutuhkan untuk memulai bisnis dan izin untuk mendirikan bangunan yang dianggap masih cukup lama.

## **b. Analisis Kondisi Eksternal**

### **b.1. Peluang**

**Pertama** : Kota Surabaya sebagai Ibu Kota dari Provinsi Jawa Timur akan memberikan andil besar dalam momen Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya MEA tersebut menjadi peluang besar bagi Kota Surabaya untuk membuka jaringan yang lebih mudah dalam melakukan perdagangan internasional. Dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek

**Kedua** : adanya arus barang dan jasa dalam MEA berpotensi pada melimpahnya barang dan jasa. Disatu sisi menjadi sebuah keuntungan bagi Kota Surabaya, yakni masyarakat Kota Surabaya mendapatkan barang dan jasa dengan mudah dari banyak aneka jenis baik dari sisi kualitas maupun harga. Sisi lainnya, diharapkan Kota Surabaya tidak hanya menjadi tujuan pasar melainkan juga memproduksi sendiri yang mampu bersaing baik dari produk barang dan jasa sertatenaga kerja yang terampil. Salah satu komoditas yang menjadi prioritas adalah produk-produk UKM sehingga Kota Surabaya perlu memperkuat daya saing dari industri UKM.

**Ketiga** : Potensi perekonomian Kota Surabaya yang cukup besar dan menjanjikan dengan berbagai daya dukung infrastrukturnya yang memadai menjadikan Kota Surabaya sebagai sasaran target investasi dari luar negeri. Disamping itu, ketersediaan dan kemudahan terhadap akses kredit perbankan turut mendukung kinerja investasi di Kota Surabaya.

**Keempat** : Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan yang berperan sebagai pintu aktivitas perdagangan barang dan jasa di wilayah Indonesia bagian timur. Disamping itu, adanya pembangunan smelter di Gresik dan pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong di wilayah barat semakin mempercepat dan mempermudah aktivitas perdagangan di Kota Surabaya sehingga adanya pengembangan infrastruktur yang semakin lengkap memberikan peluang yang sangat besar untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai penghubung perdagangan barang dan jasa baik antara pulau, regional maupun perdagangan internasional.

## **b.2. Ancaman**

**Pertama** : Proses perbaikan ekonomi negara-negara maju masih berjalan lambat berimbas terhadap kinerja ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya juga akan berdampak pada perlambatan perekonomian Kota Surabaya pada sisi ekspor dan impor.

**Kedua** : Menurunnya harga komoditas di pasar internasional yang turut mempengaruhi kinerja ekspor Kota Surabaya yang berpotensi memperbesar defisit neraca perdagangan.

**Ketiga** : Masih tingginya nilai mata uang dolar terhadap rupiah berdampak pada peningkatan biaya impor yang lebih tinggi. Meningkatnya barang impor tersebut secara otomatis meningkatkan biaya produksi yang selanjutnya memicu inflasi.

## **c. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 Dan 2018**

### **1) Produk Domestik Regional Bruto**

Pada tahun 2017 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan mencapai Rp365.220.600,22 juta. Nilai tersebut diperkirakan dikontribusi oleh peningkatan seluruh kategori lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya khususnya kategori utama yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan tersebut diperkirakan sejalan dengan perkiraan membaiknya perekonomian Indonesia sehingga

mendorong kinerja konsumsi masyarakat dan kinerja ekspor Kota Surabaya yang meningkat selanjutnya akan mendorong kinerja lapangan usaha utama Kota Surabaya. Oleh karena itu, pada tahun 2018 nilai PDRB Kota Surabaya diperkirakan mencapai Rp388.610.226,11 juta. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11  
Perkiraan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Surabaya  
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 (dalam Juta)

Kategori	Uraian	2017**	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	620.023,65	641.206,87
B	Pertambangan dan Penggalian	21.171,98	233.166,14
C	Industri Pengolahan	71.986.270,87	76.517.353,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.691.823,12	1.787.607,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	577.079,69	621.776,36
F	Konstruksi	35.807.460,53	38.083.802,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	104.033.972,40	110.676.192,40
H	Transportasi dan Pergudangan	18.052.529,67	19.119.623,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	52.373.762,03	55.648.984,38
J	Informasi dan Komunikasi	23.524.426,54	24.987.637,54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.777.110,40	18.070.375,51
L	Real Estate	9.883.906,34	10.531.337,13
M,N	Jasa Perusahaan	8.388.555,20	8.976.896,22
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.559.509,47	4.818.766,80
P	Jasa Pendidikan	8.497.971,14	9.093.479,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.844.814,37	2.945.665,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.580.212,81	5.856.356,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>365.220.600,22</b>	<b>388.610.226,11</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 2) Pertumbuhan Sektoral

Sama seperti pola sebelumnya, perekonomian Kota Surabaya diperkirakan masih dikontribusi oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori industri pengolahan dan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada kategori perdagangan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih mampu berakselerasi seiring masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat

Kota Surabaya. Disamping itu, diperkirakan membaiknya kondisi ekonomi mintra dagang juga turut mendorong pertumbuhan kategori utama Kota Surabaya ini. Sementara pada kategori industri pengolahan juga diperkirakan kembali tumbuh seiring tekanan biaya operasional yang berkurang dengan meredanya tekanan rupiah untuk permintaan bahan baku impor. Selengkapnya terkait kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 3.12.

Tabel 3.12  
Perkiraan Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Surabaya  
Perkiraan Tahun 2017 dan 2018 ADHK (dalam Persen)

Kategori	Uraian	2017* (%)	2018** (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,17
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	19,71	19,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,42	0,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,16
F	Konstruksi	9,76	9,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,52	28,48
H	Transportasi dan Pergudangan	4,95	4,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,36	14,32
J	Informasi dan Komunikasi	6,45	6,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,60	4,65
L	Real Estate	2,71	2,71
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,25	1,24
P	Jasa Pendidikan	2,33	2,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,51
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2016 \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

### 3) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan meningkat namun peningkatannya mencapai 5,9%-6,3%. Nilai pertumbuhan tersebut diperkirakan akan meningkat kembali pada tahun 2018 mencapai 6,0%-6,5% dengan asumsi perekonomian domestik dan luar negeri tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya diperkirakan didorong oleh

tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan penanaman modal baik non bangunan maupun bangunan. Dari sisi lapangan usaha, nilai rupiah yang mulai stabil diperkirakan akan mendorong kinerja kategori utama Kota Surabaya dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur massal berpotensi tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya ke depan.

Tabel 3.13  
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018(dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9-6,3	6,0-6,5

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### 4) Tingkat Inflasi

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2017 diperkirakan sesuai dengan arah inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0% -5,0% dengan asumsi tidak ada gejolak inflasi akibat dari kebijakan pusat. Berdasarkan kelompoknya, inflasi Kota Surabaya ke depan memiliki pola yang sama, di mana lebih banyak dikontribusi oleh inflasi dari kelompok *volatile food* mengingat ketergantungan kota surabaya dengan kota-kota penghasil produk pertanian seperti malang, Banyuwangi, Nganjuk, kediri dan kota lainnya sangatlah tinggi maka terganggunya ketersediaan dan arus distribusi secara otomatis akan berpengaruh terhadap inflasi Kota Surabaya. akan produk pertanian. Pada tahun 2018 inflasi Kota Surabaya diperkkirakan juga selaras dengan arah inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0% -5,0%.

Tabel 3.14  
Perkiraan Inflasi Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018(dalam Persen)

Uraian	2017**	2018**
Inflasi (%)	4,0 -5,0	4,0 -5,0

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

#### 5) Tingkat Investasi (PMA dan PMDN)

Kota Surabaya memiliki potensi yang tinggi dalam berbagai aspek baik ekonomi, demografi serta daya dukung infrastruktur, yaitu softinfrastruktur maupun hard infrastruktur. Berdasarkan faktor-faktor



tersebut, Kota Surabaya banyak menjadi target investasi baik dari dalam negeri maupun dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, investasi Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan meningkat baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Pada tahun 2017 investasi Kota Surabaya diperkirakan sebesar Rp718,63milyar yang berasal dari PMDN sementara dari PMA sebesar USD 27,79 juta. Performa positif ini diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2018 dengan capaian investasi sebesar Rp765,42 milyar PMDN sementara dari PMA sebesar USD33,18 juta.

Tabel 3.15  
Proyeksi Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Nilai Investasi	
	PMDN ( dalam Milyar Rp)	PMA ( JutaUSD)
2017**	718,63	27,79
2018**	765,42	33,18

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 6) Ekspor dan Impor

Sejalan dengan perkiraan perbaikan sebagian mitra dagang Kota Surabaya serta meredanya tekanan nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika diperkirakan mampu mengakselerasi kinerja ekspor Kota Surabaya ke depan. Oleh karena itu, pada tahun 2017 kinerja ekspor Kota Surabaya diperkirakan mencapai US\$19.770.629.474 sementara kinerja impor diperkirakan sebesar US\$17.572.200.449 Kemudian kinerja ekspor impor pada tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai US\$22.583.990.048 untuk ekspor dan US\$19.591.246.281 untuk impor. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.16  
Perkiraan Ekspor – Impor Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018 (dalam US\$)

Tahun	2017**	2018**
Ekspor	19.770.629.474	22.583.990.048
Impor	17.572.200.449	19.591.246.281

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 7) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator makro penting lainnya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dengan semakin membaiknya tren pertumbuhan ekonomi, relatif stabilnya angka inflasi diharapkan tingkat pengangguran di Kota Surabaya juga menurun. Oleh karena itu, tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya pada tahun 2017 dan 2018 diperkirakan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.17  
Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya  
Tahun 2017 dan 2018 (dalam persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017**	5,5 - 6,5
2018**	5,5 - 6,5

Sumber data: \*\*) Data Proyeksi Bappeko Surabaya

## 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah Dan Kerangka Pendanaan

#### A. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. PAD Kota Surabaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari realisasi pajak daerah yang sangat besar.

Pendapatan daerah kota Surabaya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.18  
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah  
Tahun 2014-2017

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	6.052.441.118.039	3.307.323.863.978	54,64%
2	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	4.035.649.478.398	60,97%
3	Target 2016	6.977.961.370.513	3.839.158.391.769	55,02%
4	Proyeksi 2017	7.401.577.811.968	4.132.183.835.413	55,83%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Rincian obyek PAD berdasarkan kontribusi obyek pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 73,39% dan pada tahun 2017 sebesar 75,69% atau mengalami peningkatan sebesar 2,29% (tabel 3.19).

Tabel 3.19  
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	3.307.323.863.978	2.427.647.860.148	73,40%
2	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	2.738.899.424.558	67,87%
3	Target 2016	3.839.158.391.769	2.817.640.000.000	73,39%
4	Proyeksi 2017	4.132.183.835.413	3.127.522.197.439	75,69%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 9,70% dan 8,63% pada tahun 2017, atau mengalami penurunan 1,07% (tabel 3.20)

Tabel 3.20  
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	3.307.323.863.978	270.112.725.497	8,17%
2	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	537.319.752.463	13,31%
3	Target 2016	3.839.158.391.769	372.365.814.285	9,70%
4	Proyeksi 2017	4.132.183.835.413	356.434.317.471	8,63%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

3. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD pada tahun 2016 sebesar 3,34% dan pada tahun 2017 sebesar 4,02% atau mengalami peningkatan 0,67% (tabel 3.21).

Tabel 3.21  
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  
Dipisahkan terhadap PAD  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Kontribusi
1	Realisasi 2014	3.307.323.863.978	120.856.635.210	3,65%
2	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	135.324.221.731	3,35%
3	Target 2016	3.839.158.391.769	128.374.577.382	3,34%
4	Proyeksi 2017	4.132.183.835.413	165.911.576.799	4,02%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

4. Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap total PAD pada tahun 2016 sebesar 13,56% sedangkan Tahun 2017 diproyeksikan 11,67% atau mengalami penurunan sebesar 1,89%. (tabel 3.22).

Tabel 3.22  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	3.307.323.863.978	488.706.643.123	14,78%
2	Realisasi 2015	4.035.649.478.398	624.106.079.645	15,46%
3	Target 2016	3.839.158.391.769	520.778.000.102	13,56%
4	Proyeksi 2017	4.132.183.835.413	482.315.743.703	11,67%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Pada Tahun 2016 kontribusi Dana Perimbangan sebesar 24,79% sedangkan proyeksi Tahun 2017 sebesar 30,29% atau meningkat sebesar 5,50% sebagaimana tersaji pada tabel 3.23.

Tabel 3.23  
Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi
1	Realisasi 2014	6.052.441.118.039	1.488.374.891.545	24,59%
2	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.384.772.424.683	20,92%
3	Target 2016	6.977.961.370.513	1.729.650.056.310	24,79%
4	Proyeksi 2017	7.401.577.811.968	2.241.392.960.218	30,28%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016

Adapun gambaran dana perimbangan berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi bagi hasil pajak terhadap Dana Perimbangan pada Tahun 2016 sebesar 20,46% sedangkan Tahun 2017 sebesar 16,81% atau menurun 3,65% sebagaimana tersaji pada tabel 3.24.

Tabel 3.24  
Kontribusi Bagi Hasil Pajak terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.488.374.891.545	246.211.550.026	16,54%
1	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	206.314.915.900	14,90%
2	Target 2016	1.729.650.056.310	353.963.679.000	20,46%
3	Proyeksi 2017	2.241.392.960.218	376.768.897.269	16,81%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan Tahun 2016 sebesar 1,87% sedangkan Tahun 2017 sebesar 1,34% atau menurun 0,53% sebagaimana tersaji pada tabel 3.25.

Tabel 3.25  
Kontribusi Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014– 2017

No	Tahun	Dana Perimbangan	Bagi Hasil bukan Pajak	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.488.374.891.545	21.419.313.519	1,44%
2	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	23.946.332.783	1,73%
3	Target 2016	1.729.650.056.310	32.336.748.633	1,87%
4	Proyeksi 2017	2.241.392.960.218	29.926.061.989	1,34%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016

3. Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan Tahun 2016 sebesar 71,31% sedangkan Tahun 2017 sebesar 58,88% atau menurun 12,43% sebagaimana tersaji pada tabel 3.26.

Tabel 3.26  
Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokasi Umum	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.488.374.891.545	1.200.889.359.000	80,68%
2	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	1.147.385.486.000	82,86%
3	Target 2016	1.729.650.056.310	1.233.380.404.000	71,31%
4	Proyeksi 2017	2.241.392.960.218	1.319.717.032.280	58,88%

Sumber data: DPPK dan Bappeko diolah, 2016

4. Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan Tahun 2016 sebesar 6,42% sedangkan Tahun 2017 sebesar 22,98% kontribusinya meningkat signifikan hal ini dikarenakan untuk Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang berada pada kode rekening Dana penyesuaian dan otonomi khusus pada Tahun 2016 dipindahkan pada kode rekening DAK pada PAK Tahun 2016.

Tabel 3.27  
Kontribusi Dana Alokasi Khusus terhadap Dana Perimbangan  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Dana Perimbangan	Dana Alokas Khusus	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.488.374.891.545	19.854.669.000	1,33%
2	Realisasi 2015	1.384.772.424.683	7.125.690.000	0,51%
3	Target 2016	1.729.650.056.310	111.064.651.680	6,42%
4	Proyeksi 2017	2.241.392.960.218	514.980.968.680	22,98%

Sumber data : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Lainnya serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada Tahun 2016 kontribusi Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20,19% sedangkan proyeksi Tahun 2017 sebesar 13,89% atau menurun sebesar 6,31% sebagaimana tersaji pada tabel 3.28.

Tabel 3.28  
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah  
Tehadap Pendapatan Daerah  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	6.052.441.118.039	1.256.742.362.516	20,76%
2	Realisasi 2015	6.619.031.160.937	1.198.609.257.856	18,11%
3	Target 2016	6.977.961.370.513	1.409.152.922.343	20,19%
4	Proyeksi 2017	7.401.577.811.968	1.028.001.016.337	13,89%

Sumber data: DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Adapun gambaran lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan objek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Kontribusi proyeksi dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016 sebesar 70,88% sedangkan Tahun 2017 sebesar 99,53% maka kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 28,65% sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.29  
Kontribusi Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya terhadap  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.256.742.362.516	779.576.048.153	62,03%
2	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	707.673.658.856	59,04%
3	Target 2016	1.409.152.922.343	998.877.266.211	70,88%
4	Proyeksi 2017	1.028.001.016.337	1.023.211.516.337	99,53%

Sumber data: DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

2. Kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Dana Insentif Daerah terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2016 sebesar 0,35% sedangkan Tahun 2017 sebesar 0,47% maka

kontribusinya mengalami peningkatan sebesar 0,11% sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.30  
Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap  
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun 2014 – 2017

No	Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	Kontribusi
1	Realisasi 2014	1.256.742.362.516	23.629.261.000	1,88%
2	Realisasi 2015	1.198.609.257.856	24.802.882.000	2,07%
3	Target 2016	1.409.152.922.343	5.000.000.000	0,35%
4	Proyeksi 2017	1.028.001.016.337	4.789.500.000	0,47%

Sumber data: DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang kemudian dituangkan ke dalam tabel 3.31.



Tabel 3.31  
Pendapatan Daerah Kota Surabaya  
Realisasi 2014-2015, Target 2016, Proyeksi 2017

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>3.307.323.863.978</b>	<b>4.035.649.478.398</b>	<b>3.839.158.391.769</b>	<b>4.132.183.835.413</b>
	a. Pajak Daerah	2.427.647.860.148	2.738.899.424.558	2.817.640.000.000	3.127.522.197.439
	b. Retribusi Daerah	270.112.725.497	537.319.752.463	372.365.814.285	356.434.317.471
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	120.856.635.210	135.324.221.731	128.374.577.382	165.911.576.799
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	488.706.643.123	624.106.079.645	520.778.000.102	482.315.743.703
<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.488.374.891.545</b>	<b>1.384.772.424.683</b>	<b>1.729.650.056.310</b>	<b>2.241.392.960.218</b>
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	246.211.550.026	206.314.915.900	353.963.679.000	376.768.897.269
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	21.419.313.519	23.946.332.783	31.241.321.630	29.926.061.989
	c. Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000	1.319.717.032.280
	d. Dana Alokasi Khusus	19.854.669.000	7.125.690.000	111.064.651.680	514.980.968.680
<b>3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>1.256.742.362.516</b>	<b>1.198.609.257.856</b>	<b>1.409.152.922.434</b>	<b>1.028.001.016.337</b>
	a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	779.576.048.153	707.673.658.856	998.877.266.211	1.023.211.516.337
	b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	448.340.154.000	463.025.317.000	403.916.317.000	
	c. Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	2.836.580.000	3.107.400.000	1.359.339.223	
	d. Dana Bagi Hasil Lainnya	2.360.319.363			
	e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.629.261.000	24.802.882.000	5.000.000.000	4.789.500.000
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>6.052.441.118.039</b>	<b>6.619.031.160.937</b>	<b>6.977.961.370.513</b>	<b>7.401.577.811.968</b>

Sumber : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

Pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp6.619.031.160.937,- dan target tahun 2016 sebesar Rp6.977.961.370.513,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp7.401.577.811.968,- atau meningkat sebesar Rp423.616.441.455,- (6,07%) dapat dijelaskan dalam rincian sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan realisasi Tahun 2015 sebesar Rp4.035.649.478.398,- dan target tahun 2016 sebesar Rp3.839.158.391.769,- maka Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017

diperkirakan sebesar Rp4.132.183.835.413,- meningkat sebesar Rp293.025.443.644,- atau 7,63%.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari 9 jenis yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pemungutan jenis pajak tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Berdasarkan realisasi pajak daerah tahun 2015 sebesar Rp2.738.899.424.558,- dan target tahun 2016 sebesar Rp2.817.640.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp3.127.522.197.439,-

### **2. Retribusi Daerah**

Berdasarkan realisasi retribusi daerah tahun 2015 sebesar Rp537.319.752.463,- dan target tahun 2016 sebesar Rp372.365.814.285,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp356.434.317.471,-

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Berdasarkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2015 sebesar Rp135.324.221.731,- dan target tahun 2016 sebesar Rp128.374.577.382,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp165.911.576.799,-

### **4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp624.106.079.645,- dan target tahun 2016 sebesar Rp520.778.000.102,- maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah tahun 2017 sebesar Rp482.315.743.703,-

**b. Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan perumusan dasar alokasi pembagiannya sesuai dengan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.384.772.424.683,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.729.650.056.310,- maka tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp2.241.392.960.218,- terjadi peningkatan sebesar Rp511.742.903.908,- atau 29,59% dari tahun 2016.

Adapun rincian dana perimbangan menurut obyek pendapatan sebagai berikut :

**1. Dana Bagi Hasil Pajak**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp206.314.915.900,- dan target tahun 2016 sebesar Rp353.963.679.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp376.768.897.269,-.

**2. Bagi Hasil Bukan Pajak**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp23.946.332.783,- dan target tahun 2016 sebesar Rp31.241.321.630,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp29.926.061.989,-.

**3. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.147.385.486.000,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.233.380.404.000,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp1.319.717.032.280,-

**4. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp7.125.690.000,- dan target tahun 2016 sebesar Rp111.064.651.680,- maka proyeksi tahun 2017 sebesar Rp514.980.968.680,-

### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah realisasi tahun 2015 sebesar Rp1.198.609.257.856,- dan target tahun 2016 sebesar Rp1.409.152.922.434,- maka tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp1.028.001.016.337,- atau mengalami penurunan sebesar Rp381.151.906.097,- (27.05%).

Sumber-sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Perolehan pendapatan dari bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan realisasi tahun 2015 sebesar Rp707.673.658.856,- dan target tahun 2016 sebesar Rp998.877.266.211,- maka tahun 2017 diproyeksikan tetap yaitu sebesar Rp.1.023.211.516.337,- .
- 2) Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Dana Insentif Daerah realisasi tahun 2015 sebesar Rp24.802.882.000,- target tahun 2016 sebesar Rp5.000.000.000,- maka proyeksi tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp4.789.500.000,- karena Kota Surabaya berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.

#### 3.2.1.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

##### **Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2017**

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat ;

3. optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
4. peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien.

**Strategi pencapaian Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 meliputi:**

1. *Updating* data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak online
3. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif;
5. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
6. Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan update data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.

### **3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Arah Kebijakan Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama

antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

.Berdasarkan visi Kota Surabaya Tahun 2016- 2021 yaitu “**Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi**”, Belanja Daerah Kota Surabaya pada 2017 diarahkan untuk :

1. Menjamin terlaksananya program skala besar dan prioritas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dasar pada masyarakat sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan;
3. Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung;
4. Transparansi pengelolaan belanja daerah dengan didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, Dana Insentif Daerah dan BLUD) untuk menstimulasi capaian target kinerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
6. Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik kepada Pegawai Negeri Sipil Guru dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) non Guru;
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik;
8. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;

9. Alokasi belanja langsung dioptimalkan pada belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk menstimulasi pertumbuhan sektor riil.

Perkiraan belanja tahun 2017 sebesar Rp8.338.241.993.118,- yang terdiri dari :

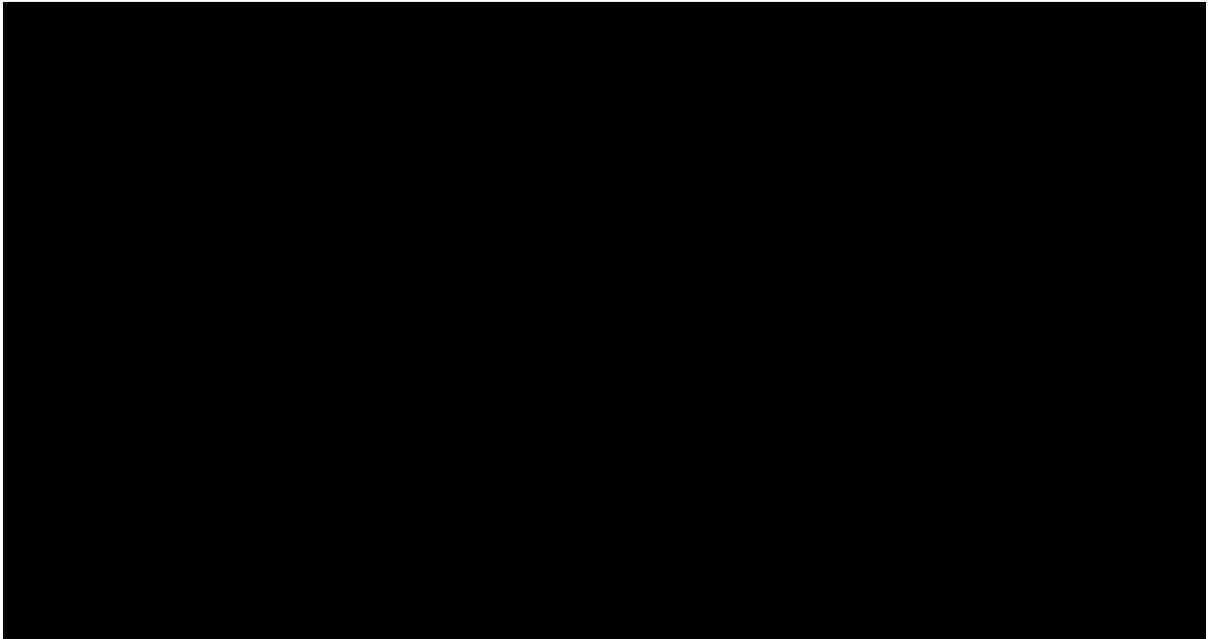
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2.418.291.491.012,- (29% dari total belanja)
2. Belanja Langsung sebesar Rp5.919.950.502.106,- (71% dari total belanja)

Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung tahun 2015 dan target APBD 2016 maka perkiraan belanja tidak langsung tahun 2017 sebesar Rp2.418.291.012,- dengan rincian :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp2.291.060.757.818,-
2. Belanja Subsidi sebesar Rp19.005.408.000,-
3. Belanja Hibah sebesar Rp95.398.455.891,-
4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp750.000.000,-
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp2.076.869.303,-
6. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.10.000.000.000,-

Adapun realisasi belanja daerah tahun 2015 serta target belanja daerah tahun 2016 dan proyeksi Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32  
Belanja Daerah Kota Surabaya  
Realisasi Tahun 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017



Sumber : DPPK dan Bappeko diolah, 2016.

### 3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, APBD Kota Surabaya mencakup pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana dari cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Kebijakan pembiayaan yang diambil meliputi:

1. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA) berupa pelampauan target pendapatan dan efisiensi belanja atas dasar kinerja.
2. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) kepada BUMD
3. Jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit yang akan diatasi dengan selisih proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi pengeluaran.



Sesuai penerimaan dan target 2017 maka penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp955.671.058.485,- sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 diperkirakan Rp19.006.877.335,- sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.33**  
**Pembiayaan Daerah Kota Surabaya**  
**Realisasi 2014-2015, Target 2016, Estimasi 2017**

No	Uraian	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Target 2016	Proyeksi 2017
<b>1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	977.089.154.745	1.311.544.540.067	981.113.956.843	955.671.058.485
b.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	29.733.336	5.865.433		
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>977.118.888.081</b>	<b>1.311.550.405.500</b>	<b>981.113.956.843</b>	<b>955.671.058.485</b>
<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.637.000.000	25.292.000.000	20.000.000.000	19.006.877.335
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>		<b>10.637.000.000</b>	<b>25.292.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>19.006.877.335</b>

Sumber : DPPK dan Bappeko diolah 2016.

## **BAB IV**

# **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 maka penyusunan RKPD Kota Surabaya berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, dan dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah pembangunan Periode Lima Tahunan Ketiga RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan mengacu pada sasaran pokok RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka tema pembangunan Kota Surabaya tahun 2017 adalah:

**“Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal melalui Percepatan  
Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan  
Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia”**

Dengan ditetapkannya tema pembangunan Kota Surabaya tersebut, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan pembangunan daerah Tahun 2017 harus realistis dan obyektif dengan mempertimbangkan potensi, isu permasalahan, hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya serta tingkat kepentingan berdasarkan usulan musrenbang. Tujuan dan sasaran pembangunan ini harus memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing visi dan misi diuraikan dalam matriks, sebagaimana yang terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pendidikan	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal
			Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin
			Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
			Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
			Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
			Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
		Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
			Meningkatkan distribusi pangan
		Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional
		Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
			Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan penanganan PMKS	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
		Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
	3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
			Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	Meningkatkan kualitas udara dan air Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
	5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
		Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
		Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
	6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan budaya lokal
		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
	7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	Peningkatan sistem manajemen city logistik
			Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi
	8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan
			Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN	
		Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien	
	9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Mendorong pementapan daya saing UMK pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa	
			Meningkatkan produktivitas koperasi	
				Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
				Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
				Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
		Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan	
		Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)	
	10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	
		Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	
			Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas	
			Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan	

VISI KOTA	MISI KOTA	TUJUAN	SASARAN
		Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Berdasarkan Tema Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 dan berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan maka prioritas pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 adalah sebagai berikut (sesuai dengan urutan prioritas) :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
2. Membangun infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata;
3. Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS;
4. Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan;
7. Mengembangkan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda;
8. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah;
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;
10. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak;
11. Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja;
12. Meningkatkan ketahanan pangan;
13. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi;
14. Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila;
15. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau.



Tabel 4.2  
Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Surabaya

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1. Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Ketersediaan anggaran pendidikan melebihi alokasi minimal yang disyaratkan secara nasional	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan  2. Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal
	Pemerataan dan kemudahan aksesibilitas pendidikan untuk semua jenjang	Pemenuhan layanan pendidikan anak usia dini		
	Ketersediaan dan kualifikasi tenaga pendidik sesuai standar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah	Mekanisme dan instrumen monitoring dan evaluasi layanan pendidikan		
	Sistem IT yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah	Perencanaan cakupan BOPDA pada PKBM untuk warga miskin		
	Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi (pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan tenaga pendidik)	Pemberian sanksi bagi lembaga pendidikan nonformal dan informal yang tidak berijin		
	Partisipasi dan dukungan dari stakeholder eksternal (perguruan tinggi, CSR, praktisi pendidikan, dewan pendidikan)	Ketersediaan data sarana dan prasarana pendidikan		
	Partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan dan kebutuhan pendidikan lifeskill (kursus keterampilan)	Overlapping regulasi terkait perijinan lembaga kursus		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		Kebijakan pengelolaan lembaga pendidikan menengah dan khusus yang pindah ke provinsi		
		Petunjuk teknis pelaksanaan dana / bantuan dari Pemerintah / Provinsi		
		Penyelenggaraan sistem pendidikan anak usia dini		
		Akreditasi lembaga pendidikan nonformal dan informal		
		Kenakalan remaja (narkoba, tawuran)		
		Penyerapan lulusan SMK di dunia kerja / industri		
	Anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah medis dan paramedis layanan kesehatan		
	Kompetensi SDM di bidang kesehatan	Kemerataan cakupan layanan kesehatan (Rumah Sakit)		
	Kapasitas dan jumlah sarana prasarana layanan dan operasional kesehatan	SIM rumah sakit belum terintegrasi secara menyeluruh		
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin</li> <li>2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta</li> </ol>	

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Sistem IT yang mendukung pelayanan kesehatan (e-health)	Beberapa regulasi tentang penyelenggaraan BLUD belum terealisasi		tata kelola layanan kesehatan
	Inovasi program unggulan untuk layanan kesehatan	Penyediaan tenaga medis dan paramedis PNS		4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat
	Kebijakan Pemerintah terkait program JKN	SDM kesehatan asing beroperasi ilegal		5. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar
	Dukungan organisasi akademisi, instansi swasta dan LSM dalam implementasi program kesehatan	Penyakit akibat mobilitas penduduk		
	Pemanfaatan perkembangan Teknologi Informasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah dan perkembangan produk RS pesaing		
	Dukungan Pemerintah Pusat dalam hal regulasi dan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan	Fluktuasi harga alat dan bahan kedokteran/kesehatan yang tinggi		
	Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan			
2. Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Adanya kewenangan dalam bidang ketahanan pangan	Bentuk Kelembagaan institusi Ketahanan Pangan	Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan
	Keberadaan Dewan Ketahanan Pangan	jumlah SDM (termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil keamanan pangan) tidak mencukupi		2. Meningkatkan distribusi pangan
		kompetensi SDM dalam hal pangan		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		<p>Sarana dan prasarana penunjang kegiatan kurang memadai</p> <p>data dan informasi terkait ketahanan pangan tidak mencukupi</p> <p>tumpang tindih kewenangan dengan SKPD lain</p>		
3. Peran Pemuda sebagai Penggerak Pembangunan dan Capaian Prestasi Olahraga	Agenda kegiatan pembinaan kepemudaan dan pelaksanaan event kejuaraan olahraga skala kota secara rutin	Sistem manajemen data dan informasi yang belum optimal	Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja	<p>1. Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan</p> <p>2. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional</p>
	Komitmen dan perhatian terhadap prestasi dan kesejahteraan atlet	Fasilitas penunjang operasional pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga		
	Sebaran dan jumlah prasarana olahraga di Kota Surabaya	Cabor unggulan skala kota		
	Kewenangan untuk mengintervensi kepemudaan dan olahraga	Pembinaan hanya pada olahraga dibawah naungan KONI Surabaya		
	Adanya UPTD yang khusus menangani pengawasan dan pemeliharaan prasarana olahraga	Overlapping peran SKPD dalam peningkatan potensi pemuda (pelatihan wirausaha)		
	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepemudaan dan olahraga	Kriminalitas dikalangan generasi muda / pemuda		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Potensi pemuda untuk berperan sebagai penggerak pembangunan	Era perdagangan bebas (MEA) yang mengakibatkan ketatnya persaingan dan menuntut peningkatan kemampuan manajerial dan skill		
	Potensi olahraga untuk dikembangkan sebagai kegiatan industri / usaha	Perkembangan dan persaingan dunia olahraga yang menuntut peningkatan kualitas atlit dan pelatih		
	Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana olahraga	Minat masyarakat terhadap seni dan olahraga tradisional		
	Perkembangan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan	Keterbatasan jumlah tenaga pelatih profesional		
4. Kualitas Angkatan Kerja yang Memiliki Karakter dan Berdaya Saing Global	Kewenangan ketenagakerjaan	Blue print perencanaan tenaga kerja per sektor	Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja	1. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja  2. Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
	Kebijakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja	Ketersediaan balai latihan kerja surabaya		
	Tingkat kesadaran penyelarasan dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri	Tingkat produktivitas tenaga kerja		
	Perkembangan industri	Perbandingan pertumbuhan pencari kerja dengan pertumbuhan lowongan pekerjaan		
	Partisipasi stakeholder dalam pelayanan ketenagakerjaan	Hard dan soft competencies calon tenaga kerja		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Kerjasama LKS Tripartit dan Bipartit Perkembangan teknologi informasi Kesempatan bekerja di luar negeri Kewenangan ketenagakerjaan	Jumlah SDM ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan dan penanganan perselisihan hubungan industrial keberadaan sanksi terkait pelanggaran ketenagakerjaan		
	pelayanan pendampingan penyusunan persyaratan kerja Kerjasama LKS Tripartit dan Bipartit lembaga jaminan ketenagakerjaan	Tingkat kesadaran perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan sistem pengupahan dan skala upah nasional		
		tingkat pemahaman norma kerja, k3 dan prinsip2 hubungan industrial tingkat produktivitas kasus/perselisihan ketenagakerjaan		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
5. Penanganan Penyandang Masalah Sosial (PMKS), Pemberdayaan Masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Anggaran untuk penanganan PMKS	Kompetensi SDM dalam penanganan PMKS	Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS	1. Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS  2. Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
	Kebijakan penanganan PMKS	Jumlah SDM dalam penanganan PMKS		
	Sarana dan prasarana penunjang kegiatan penanganan PMKS	Kesesuaian penerima manfaat dan sasaran		
	SOP pelayanan PMKS	Pendataan dan penentuan kriteria PMKS		
	Partisipasi PSKS dalam penanganan PMKS	PMKS dari luar Surabaya		
	Dukungan Pemerintah / Provinsi dalam penanganan PMKS	Kesadaran dan metalitas PMKS		
	Dukungan swasta melalui CSR dalam penanganan PMKS	Fasilitas penanganan PMKS dimanfaatkan oleh PMKS Non Kota Surabaya		
	Anggaran pelaksanaan kegiatan	Jumlah dan kompetensi SDM		
	Sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan	SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat		
	Pendataan keluarga miskin berbasis IT	Pemanfaatan data keluarga miskin		
	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Kesesuaian jenis pelatihan dengan penerima manfaat		
	Dukungan dari masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat	Overlapping program dan kegiatan antar SKPD		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Dukungan pihak swasta, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya	Penduduk luar Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
		Mentalitas sebagian masyarakat miskin		
		Penambahan data di luar data keluarga miskin yang telah ditetapkan		
	Anggaran kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Jumlah dan Kompetensi SDM		
	Sarana prasarana yang menunjang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak		
	Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah	Pemanfaatan data keluarga miskin		
	Dukungan dari masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat	Penduduk luar Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya		
Dukungan pihak swasta, akademisi, dan instansi pemerintah lainnya	Keterbukaan masyarakat dalam pelaporan			
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A)	Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak			



Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		Pengaruh komunitas / orang asing dalam perlindungan perempuan dan anak		
6. Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman sebagai Sendi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat	Inovasi dalam sistem dan mekanisme kerja	Jumlah personil penertiban	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
	Jumlah sarana pendukung operasional	Beban pemakaian sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penertiban		
	Kompetensi personil penertiban	Efektifitas regulasi dalam memberikan efek jera kepada pelanggar Perda		
	Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, jajaran samping dan lembaga lainnya dalam penegakan Perda	Regulasi yang mengatur tindak lanjut hasil penertiban PKL, tower dan bangunan liar		
		Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perda		
		Pihak ketiga yang mengintervensi terjadinya pelanggaran Perda		
	Kecepatan respon terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	Perencanaan kebutuhan jumlah tenaga dan peningkatan kompetensi personil		
Monitoring dan evaluasi terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemanfaatan data dan informasi untuk analisa keamanan dan kenyamanan lingkungan			

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Peraturan di Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan semua aspek IPOLEKSOSBUD	Sarana pendukung operasional pengamanan		Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama
	Kebebasan berdemokrasi dari Parpol, Ormas dan Perguruan Tinggi	Jumlah potensi permasalahan IPOLEKSOSBUD		
	Dukungan Pemerintah Pusat/Provinsi, jajaran samping dan lembaga lainnya untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecenderungan aksi demo yang mengarah ke anarkis		
7. Kualitas Penataan Ruang dan Pertanahan	Kelengkapan data dan informasi tentang rencana tata ruang Kota Surabaya	Tidak mengetahui data status lahan, sehingga kurang optimal dalam merencanakan kawasan dan tidak dapat mengintervensi langsung/ mendorong peningkatan peran kawasan budidaya	Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
	Sebagian besar wilayah di Kota Surabaya direncanakan sebagai kawasan budidaya, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan perekonomian kota	Belum ada kompilasi data perijinan		
	Kewenangan dalam proses penataan ruang mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	Kegiatan penataan ruang yang belum optimal terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Dukungan peraturan, SOP dan pedoman	Adanya rencana rinci tata ruang kota yang belum ditetapkan		
	Ketersediaan aplikasi berbasis TIK pelayanan perizinan yang telah terintegrasi	manajemen kearsipan belum optimal		
	Partisipasi dan peran aktif dari berbagai komponen masyarakat (akademisi, pengembang perumahan, swasta dll) dalam penataan ruang	Penerapan UU 23 tahun 2014 yang membatasi kewenangan penataan ruang pemerintah kota di wilayah air dan udara		
	Telah terbentuknya badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)	Munculnya potensi konflik pertanahan akibat penetapan peruntukan tata ruang		
	Peningkatan minat investasi di Kota Surabaya	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perijinan bangunan		
	Regulasi perbankan sebagai potensi PAD (IMB menjadi syarat jaminan kredit)	Sistem informasi yang belum terintegrasi antar SKPD dengan instansi vertikal		
	Kebijakan pemerintah pusat dalam penataan kawasan strategis			
	Jumlah dan sebaran aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota di berbagai wilayah Kota Surabaya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum	Sarana dan prasarana pendukung untuk pengadaan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset yang belum memadai		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Ketersediaan SOP dan pedoman untuk pelayanan perijinan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota	Koordinasi lintas sektor / antar SKPD dalam proses pengadaan tanah dan pengamanan aset belum optimal		Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
	Kewenangan dalam proses pengadaan tanah dan atau bangunan	Sistem manajemen informasi dan database pengelolaan aset yang belum memadai		
	Adanya unit pengelola (UPTD) yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan Gedung Sewa	Data - data dan informasi tentang manajemen pertanahan yang belum terintegrasi		
	Meningkatnya kebutuhan akan tanah seiring dengan perkembangan kota dan kebutuhan sarana dan prasarana kota	Ketergantungan proses pengadaan tanah dan atau bangunan kepada instansi lain serta Koordinasi lintas sektor dalam proses pengadaan tanah dan pengamanan aset belum optimal		Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
	Partisipasi dan peran aktif dari berbagai komponen masyarakat (akademisi, pengembang perumahan, swasta dll) dalam pengamanan aset	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi dan tertib administrasi pemanfaatan aset dan penghunian Rusunawa		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Dukungan peraturan terkait penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Tingginya potensi konflik dan/atau pemanfaatan aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota tanpa ijin		
	Minat masyarakat dalam memanfaatkan aset pemerintah kota	Kenaikan harga tanah seiring dengan perkembangan kota		
8. Sistem Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Kawasan Perkotaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Terdapat beberapa peraturan daerah atau perwali sebagai pedoman penyediaan RTH dan makam	Belum tersusunnya masterplan RTH	Peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	Adanya unit pengelola (UPTD) dan atau sebaran rayon yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan RTH dan makam	Terbatasnya ketersediaan fasilitas penunjang pengelolaan kebersihan, pemeliharaan RTH		
	Penyediaan dan sebaran RTH di seluruh kota Surabaya	Ketersediaan makam yang belum merata		
	Tingginya partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH	Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan pertamanan		
	Kerjasama regional, nasional dan internasional	Belum adanya sistem informasi manajemen terkait pengelolaan RTH		
	Perkembangan teknologi dalam penyediaan dan pengelolaan RTH	Perkembangan kota yang mengakibatkan semakin terbatasnya potensi RTH		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		Adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik, BBM dan UMK		
		Masih terdapat lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH namun belum dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya		
		Peningkatan kebutuhan SDM dan anggaran operasional dan pemeliharaan seiring dengan peningkatan penyediaan RTH		
	Terdapat beberapa peraturan daerah atau perwali sebagai pedoman pengelolaan kebersihan	Belum tersusunnya masterplan pengelolaan kebersihan yang mengatur rencana induk, kebijakan strategis dan operasional pengelolaan kebersihan		
	Adanya unit pengelola (UPTD) dan rayon yang secara khusus dan intensif menangani pengelolaan kebersihan	Terbatasnya ketersediaan fasilitas penunjang pengelolaan kebersihan		
	Adanya sistem manajemen pengelolaan kebersihan SWAT	Kelengkapan data dan proses analisa		
Ketersediaan SDM dan manajemen operasional pengelolaan kebersihan	Laju pertumbuhan penduduk dan aktivitas warga kota surabaya yang berpotensi menambah jumlah sampah yang dihasilkan		Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	partisipasi dan peran aktif dari masyarakat dan swasta dalam pengolahan sampah	Perkembangan kota yang mendorong peningkatan kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan,		
	Perkembangan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan sampah	Peningkatan Biaya pemeliharaan dan operasional		
	Potensi penambahan PAD melalui pajak dan retribusi	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan		
	Kerjasama regional, nasional dan internasional			
	Tersedianya pedoman pengendalian dan antisipasi dampak lingkungan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dll)	Keterbatasan jumlah (kuantitas) SDM serta prasarana dan sarana untuk pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan		
	Laboratorium uji kualitas lingkungan hidup yang telah tersertifikasi dan terakreditasi	Kegiatan pencegahan, pengawasan, pemulihan dan pengendalian dampak lingkungan yang belum optimal		
	SDM yang berkompeten dalam pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan	Belum optimalnya kegiatan pengendalian dan pengolahan limbah domestik perkotaan		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Adanya fasilitas Stasiun monitoring udara ambien	database informasi lingkungan serta perizinan yang terintegrasi berbasis TIK		Meningkatkannya kualitas udara dan air
	kewenangan pengelola IPAL perkotaan	master plan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup		
	Dukungan peraturan perundangan sebagai pedoman pengendalian dan antisipasi dampak lingkungan	Meningkatnya kegiatan industri, usaha dan transportasi yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara pada kawasan darat, pesisir dan laut		
	Adanya penghargaan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan motivasi dalam upaya pelestarian dan pengendalian lingkungan hidup	Pertumbuhan perumahan dan permukiman yang berpotensi mengakibatkan peningkatan limbah cair domestik		
	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup	Belum tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Nasional dan Propinsi		
	dukungan kerjasama dari pihak akademis (Universitas), komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait pengelolaan lingkungan	Belum optimalnya pengelolaan DAS secara terpadu sehingga berdampak terhadap Kota Surabaya yang berada di posisi hilir		



Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Perkembangan IPTEK yang dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup	Belum adanya kejelasan kewenangan apabila terjadi pencemaran di laut		
	Cakupan wilayah manajemen kebakaran 90%	Sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Mobil PMK, Mobil Tangga, Mobil Rescue, APD, dll)	1. Pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.  2. Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi	Pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.
	simulasi dan latihan penanggulangan kebakaran secara berkala	Pengawasan terhadap penerapan sarana pencegahan/penanggulan kebakaran pada gedung/bangunan		
	Koordinasi antar SKPD saat penanggulangan kebakaran	peraturan terkait sistem pencegahan/penanggulan kebakaran bangunan		
	Kecepatan waktu tanggap (response time) dan waktu pemadaman pada saat penanggulangan bencana kebakaran	Jumlah dan kompetensi personil pemadam kebakaran		
	Peningkatan kemampuan/skill SDM dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Sistem manajemen operasional dan mitigasi kebakaran		
	kesadaran masyarakat/pengembang untuk memenuhi standar keamanan kebakaran pada gedung/bangunan	Pertumbuhan permukiman, bangunan tinggi, dan kepadatan penduduk yang berdampak pada peningkatan potensi bahaya kebakaran		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Perkembangan teknologi/aplikasi berbasis TIK dalam penanggulangan kebakaran	aksesibilitas dan ketersediaan bahan baku pemadaman kebakaran (air, foam, dsb)		
	Peran serta masyarakat (Satlakar – Satuan Relawan Kebakaran)/swasta dalam mitigasi kebakaran	Pengaruh alam (iklim, cuaca, dll) dan non-alam (teknis, manusia, dll) sebagai pemicu kejadian kebakaran		
	Pengembangan sistem tanggap darurat bencana secara terpadu			
	Berkembangnya jenis-jenis material, dan bahan bangunan yang tahan api			
9. Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Berkualitas	Kebijakan prioritas penanganan kawasan permukiman kumuh	Ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang belum terpadu	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
	Ketersediaan sumber daya untuk pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Strategi perencanaan pembangunan kawasan kumuh		
	Pengelolaan rumah susun oleh Pemerintah Kota melalui peran UPTD	Manajemen/pengelolaan dan pemeliharaan rusunawa		
	Ketersediaan lahan milik pemerintah kota	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman (PSU) terhadap pertumbuhan hunian		
	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan skala lingkungan	Kesadaran penghuni rusunawa terhadap kewajiban administrasi dan pembayaran retribusi		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Tingkat investasi properti (perumahan dan rusun) di Kota Surabaya yang diikuti penyediaan PSU	Beban biaya operasional dan pemeliharaan rusunawa seiring meningkat usia bangunan		
	Dukungan masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan kawasan kumuh melalui CSR	Kesadaran penghuni rusunawa terhadap pemeliharaan lingkungan hunian		
	Dukungan dan komitmen pemerintah pusat dalam penyediaan perumahan (rusunawa) bagi masyarakat	Laju urbanisasi		
	Minat masyarakat untuk menghuni rumah susun	Status tanah untuk pembangunan RSDK		
10. Pemanfaatan Energi secara Efektif dan Efisien	Kemampuan penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energi alternatif	Keterbatasan jumlah (kuantitas) SDM serta prasarana dan sarana untuk mendukung upaya konservasi dan konversi energi	Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pengembangan energi alternatif	1. Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif  2. Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	masterplan pengembangan energi sebagai arahan kebijakan dalam bidang energi		
	Dukungan kerjasama dari pemerintah pusat dan akademisi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	SKPD Pemerintah Kota Surabaya yang khusus menangani energi (Dinas ESDM)		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	ketersediaan infrastruktur yang mendukung pemanfaatan energi alternatif		
	kerjasama lintas sektor dan lintas instansi (Kerjasama Pemerintah dengan Swasta-KPS) dalam upaya pemanfaatan energi alternatif	Peningkatan jumlah kegiatan rumah tangga, industri dan transportasi yang memanfaatkan sumber energi yang tak terbarukan		
		Belum adanya teknologi yang handal dan terjangkau untuk pemanfaatan energi alternatif		
11. Penggalan dan Penguatan Budaya dan Tradisi Lokal	Sekolah yang peka terhadap seni dan budaya	SDM kesenian dan budaya	Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila	1. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan budaya lokal  2. Meningkatkan pemanfaatan budaya lokal  3. Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda  Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
	Penetapan seni dan budaya lokal Kota Surabaya	Event atau festival seni dan budaya		
	Adanya seni dan budaya lokal yang berkembang	Kepekaan masyarakat terhadap seni dan budaya		
	Adanya bangunan bernilai sejarah	seni dan budaya asing yang berkembang		
	Adanya pelaku seni dan budaya			
	Anggaran cukup	Jumlah dan Jenis Koleksi Buku		
	Jumlah SDM	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpustakaan		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Sekolah yang berpartisipasi dalam meningkatkan minat dan budaya baca Forum pemerhati minat baca masyarakat Layanan baca yang disediakan oleh swasta, masyarakat, dll Event untuk meningkatkan minat baca	Integrasi Sistem Informasi Perpustakaan Jumlah pengunjung layanan baca		
12. Pengembangan Surabaya sebagai Penghubung Perdagangan/Jasa Antar Pulau, Regional, dan Internasional	Koordinasi dengan distributor terkait ketersediaan dan distribusi barang dan jasa Kewenangan penerbitan dan pengawasan tanda daftar gudang Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa Kemudahan pelayanan perijinan usaha Kompetensi SDM Anggaran	Kuantitas SDM (pengawasan barang dan jasa) kewenangan pengawasan barang beredar dan jasa (tupoksi) Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya Sarana Prasarana Pendukung (sarana transportasi) Keterbatasan, koordinasi dan informasi arus lalu lintas barang domestik, regional, nasional dan internasional (ekspor dan impor) Database potensi perizinan dan UTTP se-Surabaya	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau	1. Peningkatan sistem manajemen city logistik 2. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Aturan dan kelembagaan institusi dan standar pelayanan yang telah tersedia Sistem Informasi			
13. Peningkatan Kinerja dan Daya Saing Aktivitas Ekonomi Lokal	Kewenangan dalam pelestarian budaya dan membina pelaku usaha kepariwisataan	Keberadaan blue print pengembangan pariwisata	Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata	Meningkatkan produktivitas UMK sektor produksi barang dan jasa
	koordinasi dengan stake holder pariwisata dan budaya	Kebanggaan masyarakat Surabaya akan obyek wisata surabaya		Meningkatkan produktivitas koperasi
	Pertumbuhan infrastruktur dan jasa pendukung pariwisata			Meningkatkan produktivitas sektor pertanian
	Dukungan stakeholder eksternal bidang pariwisata			Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan
	Data perkembangan Koperasi berbasis IT (SIM K-UMK)	Mekanisme penegakan sanksi, Pembinaan / Pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK		Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
	Keberadaan sentra wisata kuliner	Rencana induk pengembangan koperasi dan UMK		Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
		Daya tahan berusaha pelaku UMK		Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
	Penetapan Kawasan konservasi	Blueprint pengembangan kawasan di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan		
	Validitas data potensi di Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan			

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Perkembangan IT dan Inovasi Teknologi di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Posisi dan Kondisi Geografis Kota Surabaya		
	Perkembangan IT dan Inovasi Teknologi di sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Posisi dan Kondisi Geografis Kota Surabaya		
	Permintaan dan Akses pemasaran produk Pertanian dan Perikanan	Penegakan Hukum terhadap praktek usaha tidak sehat di sektor Pertanian dan Perikanan		
14. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi	sistem informasi manajemen transportasi berbasis TIK	Kondisi angkutan umum dan pengelolaannya	Pengembangan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas
	sarana dan prasarana penunjang operasional dan perlengkapan jalan	Kemacetan lalu lintas		
	Rencana manajemen transportasi terkait parkir off Street (berupa Gedung Parkir atau Park n Ride)	Peningkatan kapasitas jalan terhadap pertumbuhan kendaraan, antara lain panjang maupun volume/kapasitas jalan		Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan
	regulasi penyediaan angkutan umum yang berkualitas dan berkelanjutan oleh pemerintah	Sistem jaringan jalan (persimpangan dsb)		
	Kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi	Kesesuaian kelas jalan dengan pemanfaatan fungsinya		
	perkembangan teknologi informasi di sektor transportasi	Manajemen pengelolaan parkir yang belum optimal		
	Dukungan dan komitmen pemerintah dan swasta dalam pembangunan dan	Ketersediaan sistem manajemen & informasi angkutan umum		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	pengembangan sarana prasarana transportasi di Kota Surabaya			
	Minat pengembangan usaha jasa transportasi berupa angkutan penumpang dan barang di Kota Surabaya	kualitas pelayanan perijinan bidang lalu lintas dan angkutan jalan kesediaan dan kemauan masyarakat menggunakan angkutan umum grand design transportasi terpadu sesuai dengan misi 7 walikota dalam konteks city logistic audit infrastruktur jalan dan jembatan regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan bermotor (pribadi, umum dan barang) Kesadaran Masyarakat Untuk Tertib Berlalu Lintas (Perilaku / disiplin pengguna jalan) Kewenangan pengelolaan prasarana jalan dukungan koordinasi oleh kepolisian terkait kanalisasi kendaraan bermotor Pertumbuhan penduduk/mobilisasi		



Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
15. Pembangunan Sarana Prasarana Pematusan	Peraturan/produk hukum tentang operasional pengelolaan dan pelayanan infrastruktur (PJU)	Ketersediaan dan pengolahan database terpadu jaringan utilitas terpasang di Kota Surabaya	Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien</li> <li>2. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan</li> </ol>
16. Peningkatan Pelayanan Utilitas Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan pertamanan (PJU)	Rencana induk, kebijakan strategis&operasional pengelolaan PJU	Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih</li> <li>2. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU</li> <li>3. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya</li> </ol>
	Pemanfaatan infrastruktur kota, antara lain gorong-gorong untuk penataan utilitas	Kapasitas waduk dan boezem kelola pemkot untuk penyediaan air baku kota cadangan		
	Pemanfaatan infrastruktur kota, antara lain gorong-gorong untuk penataan utilitas	Kapasitas waduk dan boezem kelola pemkot untuk penyediaan air baku kota cadangan		
	Tindakan tanggap PJU rusak (pemeliharaan PJU)	Pengendalian pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap rencana induk		
	Cakupan layanan air bersih	Penataan utilitas kota		
	Jumlah pengajuan ijin pemasangan utilitas	Perkembangan kota (infrastruktur jalan) dan penduduk yang mendorong peningkatan kebutuhan utilitas		
	Perkembangan teknologi ramah lingkungan, konversi dan konservasi energi	Biaya pemeliharaan dan operasional utilitas (yang dikelola Pemkot)		

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Sumber air umbulan di luar wilayah Kota Surabaya	Pelaksanaan pemasangan utilitas tidak sesuai rekomendasi Kemandirian kota terhadap penyediaan air baku/bersih Pertumbuhan jumlah penduduk terhadap kebutuhan air bersih Kualitas air baku Kota Surabaya		
17. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sistem informasi kepegawaian berbasis IT Kewenangan dalam bidang pengawasan internal Auditor yang kompeten Sistem manajemen kinerja, ANJAB dan ABK untuk penataan pegawai Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan profesional Diklat dari pemerintah pusat dan provinsi Kewenangan tentang penataan, penyelamatan dan pelestarian kearsipan (Barpus)	Assessment Center Kasus pelanggaran disiplin aparatur dan kasus tata kelola administrasi keuangan SOP untuk beberapa aktivitas pengawasan Komposisi kompetensi dan kapasitas pegawai Pemahaman beberapa SKPD terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Moratorium pegawai Implementasi tugas pokok dan fungsi SKPD (bag. Ortala)	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan 2. Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Ketersediaan data dari kecamatan dan kelurahan secara rutin (Bag. Pemerintahan)	Pemahaman SKPD terhadap pentingnya SOP, standar pelayanan (bag. Ortala)		
	Kemampuan respons dan adaptasi SDM dalam fasilitasi kegiatan DPRD (Sekwan)	Beberapa hasil kajian dan telaah belum implementatif (bag. Perekonomian & bag. kesra)		
	Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk menciptakan tata kelola administrasi Pemerintahan yang baik	Pemahaman SKPD terhadap produk perencanaan pembangunan (Bappeko)		
	Penawaran kerjasama dari dalam dan luar negeri karena potensi perkembangan Pemerintah Kota Surabaya (bag. Kerjasama)	Mekanisme analisa kebutuhan barang dan penghapusan barang (bag. Perlengkapan)		
	Pelayanan administrasi kependudukan berbasis TIK (dispenduk)	Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Pemerintah pusat (bag. Hukum)		
	Pelayanan perizinan yang telah terintegrasi dengan berbasis TIK (SKPD Pelayan perijinan)	Kuantitas SDM di bidang kehumasan (bag, humas)		
	Kewenangan mempublikasikan kinerja Pemkot (bag, humas)	Opini publik yang berkembang di media sosial (bag. humas)		
	Komunikasi dengan media massa (bag. Humas)			
	Tuntutan dan keinginan stakeholder untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik			

Permasalahan Pembangunan	Faktor Pendorong/Penghambat		Prioritas dan sasaran pembangunan	
	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan
	Perkembangan mobile apps (bag. Humas)			
	Reputasi Surabaya dibanding kota lain dalam hal pelayanan publik (disperindag)			
	Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif (disperindag)			
	Kewenangan pengelolaan sumber penerimaan (otonomi daerah)	sistem self asesment dalam pemungutan pajak		
	Peraturan daerah terkait pajak dan retribusi	koordinasi dengan pihak ketiga terkait data dan informasi		
	sistem informasi yang mendukung pelayanan pajak	penerimaan bagi hasil BUMD		
	Potensi penerimaan daerah	tingkat kepatuhan wajib pajak		
	pertumbuhan pelaku usaha	Transparansi Wajib Pajak terkait data-data transaksi usahanya		

Tabel 4.3.  
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017 dengan  
Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
1.	<b>Bidang Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang</b>					
	a. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan					
	b. Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintah yang Baik	1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		3.012.369.512		3.012.369.512
		2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		13.631.249.014		13.631.249.014
		3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal		4.607.319.609		4.607.319.609
		4. Program Pengendalian Pembangunan Daerah		4.856.985.197		4.856.985.197
		5. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		24.856.120.175		24.856.120.175
		6. Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah		93.385.511.998		93.385.511.998
		7. Program Penegakan Peraturan Daerah		36.032.432.204		36.032.432.204
		8. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan		30.064.763.838		30.064.763.838

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
		9. Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		2.245.140.044		2.245.140.044
		10. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		2.350.394.242		2.350.394.242
		11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		12.401.605.081		12.401.605.081
		12. Program Pengelolaan Keuangan Daerah		4.314.543.642		4.314.543.642
		13. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		3.795.534.482		3.795.534.482
		14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		375.241.849.299		375.241.849.299
	c. Pengarusutamaan Gender	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		167.131.549.240		167.131.549.240
		2. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial		2.484.106.164		2.484.106.164
	d. Pengarusutamaan Anti Narkoba					
	e. Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim					

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
<b>2.</b>	<b>Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</b>					
	a. Kependudukan dan Keluarga Berencana	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan		82.615.021.748		82.615.021.748
		2. Program Keluarga Berencana		3.659.343.548		365.9343.548
		3. Program Bina Keluarga		566.119.520		566.119.520
	b. Kesehatan	1. Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		188.539.039.724		188.539.039.724
		2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		29.896.272.005		29.896.272.005
		3. Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak		10.856.737.107		10.856.737.107
		4. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu		44.529.141.332		44.529.141.332
		5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu		44.682.840.522		44.682.840.522
		6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		112.644.700.386		112.644.700.386
		7. Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit		128.746.017.458		128.746.017.458
		8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit		81.953.157.514		81.953.157.514
		9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat		62.320.257.389		62.320.257.389

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
		10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		15.503.337.434		15.503.337.434
	c. Pendidikan	1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan		911.005.156.065		911.005.156.065
		2. Program Penerapan Kurikulum		32.348.778.392		32.348.778.392
		3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		135.863.392.952		135.863.392.952
		4. Program Peningkatan Prestasi		30.280.455.220		30.280.455.220
		5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan		1.415.731.232		1.415.731.232
		6. Program Pendidikan Kesetaraan		1.959.216.020		1.959.216.020
		7. Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan		37.156.694.583		37.156.694.583
	d. Perpustakaan	1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		24.360.755.751		24.360.755.751
	e. Pemuda dan Olahraga	1. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		3.196.562.483		3.196.562.483
		2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		120.689.012.120		120.689.012.120



No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	f. Agama					
	g. Kebudayaan	1. Program perlindungan seni dan nilai-nilai budaya lokal		1.054.042.409		1.054.042.409
		2. Program pengembangan dan pemanfaatan seni dan nilai-nilai budaya lokal		5.152.620.896		5.152.620.896
		3. Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal		9.569.963.598		9.569.963.598
	h. Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan		1.618.259.134		1.618.259.134
	i. Perlindungan Anak	1. Program perlindungan perempuan dan anak		6.963.980.218		6.963.980.218
<b>3.</b>	<b>Bidang Pembangunan Ekonomi</b>					
	a. Stabilitas Harga	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		29.314.189.793		29.314.189.793
	b. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1. Program perluasan jangkauan pemasaran UMK		38.143.011.937		38.143.011.937
		2. Program perkuatan permodalan UMK		203.218.529		203.218.529
		3. Program standarisasi produk UMK		4.908.806.737		4.908.806.737
		4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		2.130.984.258		2.130.984.258
		5. Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi		3.618.419.790		3.618.419.790

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
c. Perdagangan Dalam Negeri	1. Program kerjasama bidang perdagangan		444.647.729		444.647.729	
	2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		1.888.166.899		1.888.166.899	
	3. Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial		563.338.791		563.338.791	
d. Kerjasama Ekonomi Internasional	1. Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi		1.404.018.531		1.404.018.531	
e. Jasa Keuangan						
f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	1. Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah		384.920.519		384.920.519	
g. Data dan Informasi Statistik	1. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik		424.158.970		424.158.970	
h. Ketenagakerjaan	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja		4.188.531.523		4.188.531.523	
	2. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas		15.319.542.747		15.319.542.747	
	3. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja		2.448.288.870		2.448.288.870	
	4. Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan		1.141.719.517		1.141.719.517	

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
		1. Program Pemanfaatan Rumah Kreatif		2.203.416.033		2.203.416.033
		2. Program perkuatan permodalan usaha kreatif		142.927.048		142.927.048
		3. Program legalisasi usaha kreatif		123.588.395		123.588.395
		4. Program pengembangan destinasi wisata		3.674.084.003		3.674.084.003
		5. Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata		3.556.669.218		3.556.669.218
		6. Program Pemasaran Pariwisata		8.896.968.658		8.896.968.658
<b>4.</b>	<b>Bidang IPTEK</b>					
	a. NSPK Pembangunan IPTEK					
	b. Kerangka Regulasi					
<b>5.</b>	<b>Bidang Pembangunan Politik</b>					
		1. Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat		18.388.826.636		18.388.826.636
<b>6.</b>	<b>Bidang Aparatur</b>					
	a. Aparatur Negara	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		15.313.383.575		15.313.383.575
		2. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan		240.073.256.105		240.073.256.105
		3. Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		5.899.414.558		5.899.414.558

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
<b>7.</b>	<b>Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang</b>					
	a. Informasi Geospasial					
	b. Tata Ruang	1. Program Perencanaan Ruang Kota		6.461.295.027		6.461.295.027
		2. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota		6.997.806.262		6.997.806.262
	c. Pengembangan Kawasan Strategis					
	d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1. Program Penataan Daerah Otonom		89.499.384.272		89.499.384.272
<b>8.</b>	<b>Bidang Sarana dan Prasarana</b>					
	a. Perumahan dan Prasarana Dasar Pemukiman	1. Program perumahan permukiman		387.689.479.712		387.689.479.712
	b. Sarana dan Prasarana Transportasi	1. Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi		190.757.763.690		190.757.763.690
		2. Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan		30.708.152.901		30.708.152.901
		3. Program manajemen lalu lintas angkutan barang		421.062.558		421.062.558
		4. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan		276.821.594.194		276.821.594.194
	c. Komunikasi dan Informatika	1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		45.669.442.136		45.669.442.136

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
d.	Energi dan Ketenagalistrikan	1. Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif		3.977.318.863		3.977.318.863
		2. Program Upaya Konservasi Energi		277.903.610		277.903.610
e.	Ketahanan Pangan dan Air	1. Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan		5.678.024.661		5.678.024.661
		2. Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan		2.237.209.699		2.237.209.699
		3. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan		1.801.147.134		1.801.147.134
f.	Dukungan Terhadap Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	1. Program pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum		202.937.489.833		202.937.489.833
		2. Program pengamanan aset		7.401.282.173		7.401.282.173
		3. Program pengelolaan aset		16.390.459.327		16.390.459.327
		4. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota		656.287.614.781		656.287.614.781
		5. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJJU		194.318.944.708		194.318.944.708
		6. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota		635.053.856		635.053.856
g.	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur	1. Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik		35.747.712		35.747.712

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
<b>9.</b>	<b>Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>					
	a. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	1. Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.594.833.259		1.594.833.259
		2. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.809.665.598		1.809.665.598
		3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian		942.078.930		942.078.930
		4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak		622.868.656		622.868.656
		5. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan		1.954.789.169		1.954.789.169
		6. Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan		2.229.850.600		2.229.850.600
		7. Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan		362.670.697		362.670.697
	b. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan					
	d. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahat serta Restorasi Gambut					

No	Bidang-Bidang Pembangunan Nasional	Uraian			Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD	
		Program	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)	Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	Jumlah (Rp)
	e. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati					
	f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan	1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		80.271.918.804		80.271.918.804
		2. Program pengelolaan kebersihan		311.644.443.677		311.644.443.677
		3. Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan		9.712.538.574		9.712.538.574
		4. Program penanggulangan bencana		67.444.087.795		67.444.087.795

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah tersebut dijelaskan dalam program-program beserta tolok ukur kinerja sebagaimana Tabel 4.4 tentang Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4.4.  
Penjelasan Program Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2017

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
1	<b>Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan</b>			
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Prosentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	25%	Dinas Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Rata-rata rombel SD Negeri	13.4 rombel	
		3. Rata-rata rombel SMP Negeri	24.81 rombel	
		4. Rata-rata rombel SMA Negeri	29 rombel	
		5. Rata-rata rombel SMK Negeri	62.7 rombel	
		6. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	70%	
		7. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	75%	
		8. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar	75.89 %	
		9. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar	74.76 %	
	Program Penerapan Kurikulum	1. Peningkatan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	35.08 %	Dinas Pendidikan
		2. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%	
		3. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%	
		4. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80.14 %	
		5. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	79.61 %	



No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Peningkatan jumlah guru PAUD yang kompeten	62.18 %	Dinas Pendidikan
		2. Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki sertifikasi	65.66 %	
		3. Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki sertifikasi	74.39 %	
		4. Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki sertifikasi	71.88 %	
		5. Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki sertifikasi	68.49 %	
		6. Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95.43 %	
		7. Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97.93 %	
		8. Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95.17 %	
		9. Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	86.53 %	
		10. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	53.63 %	
		11. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SD yang kompeten	46.37 %	
		12. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMP yang kompeten	51.82 %	
		13. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMA yang kompeten	55.56 %	
		14. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMK yang kompeten	49.91 %	
	Program Peningkatan Prestasi	1. Tingkat prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	45.16 %	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%	
		3. Tingkat prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	63.64 %	
		4. Tingkat prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	25%	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan	1. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	56.82 %	Dinas Pendidikan
		2. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	39.6 %	
		3. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	64.44 %	
		4. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	38.78 %	
		5. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	50%	
		6. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	25%	
		7. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	59.6 %	
	Program Pendidikan Kesetaraan	1. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	70%	Dinas Pendidikan
		2. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88.12 %	
		3. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90.85 %	
	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan	1. Prosentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5.53 %	Dinas Pendidikan
		2. Tingkat cakupan anak didik yang mengikuti pendidikan masyarakat tiap minggu	120000 anak didik	
	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Pelayanan Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase masyarakat miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	11%	
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.45 %	Dinas Kesehatan
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96.94 %	
		3. Kunjungan neonatal lengkap	81%	
		4. Imunisasi dasar lengkap	93.81 %	
	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9.5 %	Dinas Kesehatan
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	1%	
		3. Prosentase Penimbangan balita	81.3 %	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		4. Prosentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94.62 %	
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu	1. Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	74%	Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Bagian Perlengkapan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	73%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		2. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	76%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
		3. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	82%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	82%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	1. Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		2. Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari	RSUD Bhakti Dharma Husada
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	47 menit	RSUD Bhakti Dharma Husada
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	48 hari	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%	RSUD Bhakti Dharma Husada
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD	100%	RSUD Dr. Mohamad

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		dr. M. Soewandhie		Soewandie
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Persentase rumah sehat	75%	Dinas Kesehatan
		2. Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	81%	
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	82%	
	Program Keluarga Berencana	1. Persentase peserta KB baru	81.15 %	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		2. Persentase peserta KB aktif	77.31 %	
		3. Menurunnya target angka drop out kontrasepsi	5.8 %	
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.85 %	
	Program Bina Keluarga	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	47.90 %	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
		2. Persentase Pasangan Usia Subur yang Pasangan Istrinya Kurang dari 20 Tahun	3.5 %	
<b>2</b>	<b>Pembangunan infrastruktur dan jaringan utilitas kota secara terpadu dan merata</b>			
	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota	1. Luas genangan (ha)	1098 ha	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2. Tinggi genangan (cm)	16 cm	
		3. Lama genangan (jam)	51 menit	
	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan	1. Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit)	583350 unit	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU	1. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan (m)	2540250 m	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		2. Peningkatan Penggunaan PJU Hemat Energi (titik)	3400 unit	
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota	1. Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>3</b>	<b>Meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS</b>			
	Program pelayanan dan rehabilitasi	1. Persentase PMKS yang ditangani	60%	Dinas Sosial 31 Kecamatan

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	kesejahteraan sosial			
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	1. Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	45%	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1. Persentase PMKS usia produktif yang dilatih/dibina	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 31 Kecamatan
<b>4</b>	<b>Meningkatkan kinerja investasi dan produktivitas pada sektor industri kreatif, pertanian dan pariwisata</b>			
	Program perluasan jangkauan pemasaran UMK	1. Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	20%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Pertanian 31 Kecamatan
		2. Persentase Usaha Kecil yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	40%	
		3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%	
		4. Peningkatan Pembangunan Fasilitas Ekonomi	171 unit	
	Program perkuatan permodalan UMK	1. Persentase UMK yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	Program standarisasi produk UMK	1. Prosentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha UMK	20%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pertanian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		2. Prosentase Usaha Kecil yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam peningkatan mutu produk	20%	
		3. Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	20%	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		4. Persentase produk Usaha Kecil yang layak diuji mutukan	0%	Dinas Pertanian
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1. Peningkatan jumlah anggota koperasi	176200 orang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		2. Presentase peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan	10%	
		3. Presentase peningkatan jumlah anggota dan pengurus yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kelembagaan	45%	
		4. Jumlah koperasi berklasifikasi AAB tahun (t)	400 koperasi	
	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi	1. Persentase peningkatan volume usaha koperasi	11%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	12%	Dinas Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian	1. Persentase jumlah pembudidaya yang omzetnya meningkat	61%	Dinas Pertanian
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak	1. Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	83%	Dinas Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	1. Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	1. Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	12%	Dinas Pertanian
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan	1. Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	Dinas Pertanian

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	dan Kelautan			
	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif	1. Persentase jumlah individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif	5%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Dinas Pertanian
		2. Persentase jumlah rumah kreatif yang beroperasi	40%	
	Program perkuatan permodalan usaha kreatif	1. Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	5%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program legalisasi usaha kreatif	1. Persentase jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	20%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program pengembangan destinasi wisata	1. Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	7%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	1. Jumlah Kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	2 kesepakatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Kunjungan di Objek Wisata	6800221 wisatawan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	1. persentase peningkatan realisasi investasi	8%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
		2. persentase Peningkatan jumlah minat dan rencana investasi	12%	
<b>5</b>	<b>Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan pembangunan sarana prasarana</b>			

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	<b>lingkungan dan pengembangan energi alternatif</b>			
	Program perumahan permukiman	1. Pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	170.862 m2	Dinas Sosial Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Permukiman	46%	
		3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%	
		4. Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	20%	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif	1. Lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	6 lingkungan	Badan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pertanian
		2. Penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit	
	Program Upaya Konservasi Energi	1. Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	124 kegiatan dan / atau usaha	Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>6</b>	<b>Peningkatan kualitas lingkungan melalui upaya peningkatan kebersihan dan penghijauan</b>			
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1. peningkatan jumlah RTH yang dipelihara dan diawasi	327.44 Ha	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pertanian Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Peningkatan luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	35.28 Ha	
	Program pengelolaan kebersihan	1. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi	28 unit	Dinas Kebersihan



No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		3R		dan Pertamanan 31 Kecamatan
		2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	1402 komunitas	
	Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan	1. Peningkatan ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	Badan Lingkungan Hidup Dinas Perhubungan
<b>7</b>	<b>Pengembangan sistem transportasi dan angkutan masal cepat yang terintegrasi inter moda dan antarmoda</b>			
	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Peningkatan panjang jalan (m)	1687116 m	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
		2. Peningkatan penyediaan prasarana pejalan kaki (m)	42540 m	
		3. Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	2.58 %	
	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi	1. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	29.19 km/jam	Dinas Perhubungan
	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan	1. Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit	Dinas Perhubungan
		2. Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43.32 menit	
<b>8</b>	<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan keuangan daerah</b>			
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	1. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur	100%	Inspektorat
		2. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan	100%	
		3. Kualitas Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah	63%	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	88.08 %	Badan Kepegawaian dan Diklat
		2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	35.58 %	
		3. Terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	20%	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		2. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) Perangkat Daerah, yang mengacu proses bisnis dan Standar Pelayanan, yang disusun	100%	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah yang dievaluasi	15%	
		4. Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%	
	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100%	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 31 Kecamatan
	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	Badan Arsip dan Perpustakaan
		2. Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan	22.6 %	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1. Persentase kajian/rekomendasi di semua sektor yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	62.5 %	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Program Peningkatkan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	Sekretariat DPRD
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	1. Persentase pemanfaatan aset	91%	Bagian Perlengkapan
		2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	1 sistem	
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	77%	
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74.36 %	
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	
		6. Ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
		7. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62%	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1. Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	Bagian Umum dan Protokol
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42.86 %	Bagian Kerjasama
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33.33 %	
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	42.1 %	
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	Perencanaan Pembangunan Kota
		2. Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD	65%	
	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Prosentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	Bagian Bina Program Badan Perencanaan Pembangunan Kota
		2. Tingkat penyerapan anggaran kegiatan	85%	
		3. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	Bagian Hukum
		2. Peningkatan produk hukum daerah yang dievaluasi	100%	
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%	Bagian Perlengkapan
	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik	1. Toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	Seluruh SKPD selain Kecamatan
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99.57 %	Dinas Kependudukan dan Catatan

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		2. Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	99.57 %	Sipil 31 Kecamatan
		3. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%	
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	86.55 %	
		5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93.92 %	
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Jumlah sistem informasi manajemen yang dilengkapi dengan digital signature	31.56 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	83%	Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Hubungan Masyarakat
		2. Jumlah Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8765 kunjungan	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Persentase temuan yang ditindak	70%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	14.19 %	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah	1. Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>9</b>	<b>Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum</b>			
	Program Penegakan Peraturan Daerah	1. Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
				Satuan Polisi Pamong Praja 31 Kecamatan 31 Kecamatan
	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase tertanganinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial
2. Persentase penurunan kejadian anarkis		3%		
3. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar		100%		
<b>10</b>	<b>Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak</b>			
	Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	1. Persentase kecamatan yang responsif gender	38.71 %	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
	Program perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 31 Kecamatan
		2. Tingkat efektifitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	65.21 %	
		3. Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	19 lembaga	
<b>11</b>	<b>Meningkatkan kualitas generasi muda dan angkatan kerja</b>			
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1. Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kepemimpinan dan kepeloporan	7500 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Jumlah pemuda yang mengikuti event pemilihan pemuda pelopor	25 orang	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1. Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Jumlah atlet yang dibina dan berprestasi	1107 orang	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri	5435 orang	Dinas Tenaga Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di luar negeri	94 orang	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
		2. Persentase wirausaha muda yang terbentuk	30 orang	
	Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas	1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi selain peserta pelatihan	62%	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase Pencari Kerja lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Lulus sertifikasi	62%	
		3. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus pelatihan	77%	
	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	1. Persentase Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	8%	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Persentase peningkatan jumlah perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	43%	Dinas Tenaga Kerja
<b>12</b>	<b>Meningkatkan ketahanan pangan</b>			
	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan	1. Angka Ketersediaan Energi	90%	Dinas Pertanian Kantor Ketahanan Pangan
		2. Angka Ketersediaan Protein	90 %	
		3. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	81%	Dinas Kesehatan
		4. Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	82%	Dinas Pertanian Kantor Ketahanan Pangan
		5. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95.5	Dinas Pertanian Kantor Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan	1. Tingkat Stabilitas dan Pasokan komoditas pangan	92%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>13</b>	<b>Mewujudkan sistem pengelolaan pertanahan, aset, penataan ruang dan ketahanan bencana yang terintegrasi</b>			
	Program Perencanaan Ruang Kota	1. Jumlah rencana induk sektoral yang disusun	9 dokumen	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Jumlah rencana rinci tata ruang yang disusun	7 dokumen	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	1. Prosentase jumlah bangunan yang ber IMB	52.07 %	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		3. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	100%	
	Program pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	1. Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	15.78 Ha	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
	Program pengamanan aset	1. Penambahan jumlah tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	871 bidang	Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian Perlengkapan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
		2. Peningkatan jumlah tanah aset yang tersertifikasi	725 bidang	
	Program pengelolaan aset	1. Peningkatan jumlah aset yang tercatat pemanfaatannya	1513 bidang	Bagian Perlengkapan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Program Penanggulangan Bencana	1. Jumlah kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	Dinas Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
		2. Jumlah kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian	
		3. Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit	95%	
		4. Peningkatan masyarakat yang memahami dan tanggap terhadap bahaya kebakaran	480 orang	
		5. Persentase waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana non kebakaran	100%	
		6. Persentase kelurahan tangguh bencana	29%	

No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab	
		Indikator	Target		
14	<b>Melestarikan budaya lokal dan wawasan kebangsaan berlandaskan Pancasila</b>				
	Program perlindungan seni dan nilai-nilai budaya lokal	1. Jumlah budaya lokal yang ditetapkan	4 budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	
		2. Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	274 situs		
	Program pengembangan dan pemanfaatan seni dan nilai-nilai budaya lokal	1. Jumlah budaya lokal yang layak tampil	283 kelompok	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pendidikan	
		2. Jumlah hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	9 lokasi		
		3. Cagar budaya yang dijadikan tempat pariwisata	15 situs		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Persentase peningkatan jumlah event literasi yang diselenggarakan	10%	Badan Arsip dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Kecamatan Semampir Kecamatan Rungkut	
		2. Persentase peningkatan jumlah koleksi buku	86.18 %		
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20.5 %		
		4. Persentase peningkatan jumlah perpustakaan yang berhasil dibina	12.9 %		
	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal	1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Pendidikan Dinas Sosial 31 Kecamatan	
		2. Tingkat partisipasi generasi muda di pusat kegiatan generasi muda	4%		
	15	<b>Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau</b>			
		Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi komoditas potensial	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	25%	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Dinas Perdagangan
2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar			30%		



No	prioritas / program	Kinerja		SKPD Penanggung jawab
		Indikator	Target	
				dan Perindustrian
	Program manajemen lalu lintas angkutan barang	1. Penurunan waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	0 N/A	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik	1. Peningkatan investasi fasilitas pendukung logistik	18%	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
	Program kerjasama bidang perdagangan	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	83.33 %	Bagian Kerjasama
		2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	80%	

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH**

Penyelenggaraan program kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2017, rencana program prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada perumusan sasaran serta evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun rencana program Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada Tabel 5.1 tentang Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017 sebagaimana berikut.

**Tabel 5.1**  
**Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2017**

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.01	Pendidikan			1,150,029,424,464	
1.1.1.01.01	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan	1. Prosentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarananya	25%	911,005,156,065	
		2. Rata-rata rombel SD Negeri	13.4 rombel		
		3. Rata-rata rombel SMP Negeri	24.81 rombel		
		4. Rata-rata rombel SMA Negeri	29 rombel		
		5. Rata-rata rombel SMK Negeri	62.7 rombel		
		6. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	70%		
		7. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	75%		
		8. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarananya sesuai standar	75.89 %		
		9. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarananya sesuai standar	74.76 %		
1.1.1.01.01.0001	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dibangun dan direhab	80 bangunan	226,944,588,715	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0002	Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah	Jumlah Fasilitas Gedung Pendidikan Menengah yang dibangun dan direhab	10 bangunan	19,794,633,262	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.01.01.0003	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah SD negeri, SMP Negeri dan SMP terbuka yang mendapatkan biaya pendidikan daerah	430 lembaga	274,609,863,232	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0004	Fasilitasi Pemberian Biaya Pendidikan Daerah Jenjang Pendidikan Menengah	Jumlah SMA Negeri, SMA Terbuka dan SMK Negeri yang mendapatkan Biaya Pendidikan Daerah	33 lembaga	176,075,559,082	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0005	Fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah peserta didik baru yang difasilitasi	1,000 orang	2,456,359,138	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0006	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKDAS	Jumlah jenis perlengkapan sekolah DIKDAS yang diberikan	8 jenis	33,557,451,114	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Sekolah DIKMEN	Jumlah jenis Perlengkapan Sekolah DIKMEN yang diberikan	8 jenis	2,440,541,899	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0008	Pengadaan sarana prasarana PAUD	Jumlah APE yang diberikan	216 unit	643,160,277	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0009	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Dasar	430 lembaga	41,885,491,904	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0010	Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	Jumlah sekolah yang mendapatkan Penunjang Operasional Sekolah Pendidikan Menengah	33 lembaga	102,090,733,702	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.01.0011	Penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah PAUD yang mendapatkan Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2,612 lembaga	30,506,773,740	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02	Program Penerapan Kurikulum	1. Peningkatan PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	35.08 %	32,348,778,392	
		2. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
		3. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80%		
		4. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	80.14 %		
		5. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	79.61 %		
1.1.1.01.02.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus DIKDAS	102 lembaga	23,191,541,952	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0002	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	Jumlah sekolah yang mendapatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Seni DIKMEN	6 lembaga	1,816,736,679	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0003	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian Nasional DIKDAS	45,315 orang	2,431,225,763	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0004	Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	Jumlah peserta yang mengikuti Pelaksanaan Ujian Nasional DIKMEN	20,085 orang	795,629,968	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0005	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKDAS	1,780 orang	1,678,853,654	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0006	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar DIKMEN	210 orang	1,954,356,752	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.02.0007	Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	Jumlah peserta Peningkatan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar PAUD	2,606 orang	480,433,626	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	10. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	53.63 %	<b>135,863,392,952</b>	
		11. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SD yang kompeten	46.37 %		
		12. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMP yang kompeten	51.82 %		
		13. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMA yang kompeten	55.56 %		
		14. Peningkatan jumlah tenaga kependidikan SMK yang kompeten	49.91 %		
		1. Peningkatan jumlah guru PAUD yang kompeten	62.18 %		
		2. Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki sertifikasi	65.66 %		
		3. Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki sertifikasi	74.39 %		
		4. Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki sertifikasi	71.88 %		
		5. Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki sertifikasi	68.49 %		
		6. Peningkatan jumlah guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95.43 %		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
		7. Peningkatan jumlah guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	97.93 %		
		8. Peningkatan jumlah guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	95.17 %		
		9. Peningkatan jumlah guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau AKTA 4	86.53 %		
1.1.1.01.03.0001	Fasilitasi Pendidikan Akademik Bagi Pendidik	Jumlah pendidik yang mengikuti pendidikan akademik	220 orang	2,045,726,835	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0002	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	25,000 orang	94,492,336,123	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0003	Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	Jumlah guru yang mengikuti Peningkatan Mutu Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho	1,570 orang	2,988,997,899	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.03.0004	Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	Jumlah Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidik PAUD	1 kali	36,336,332,095	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.01.04</b>	<b>Program Peningkatan Prestasi</b>	1. Tingkat prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	45.16 %	<b>30,280,455,220</b>	
		2. Tingkat prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	50%		
		3. Tingkat prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	63.64 %		
		4. Tingkat prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	25%		
		5. Peningkatan PAUD beprestasi			
1.1.1.01.04.0001	Fasilitasi Promosi Lembaga Pendidikan dan Kompetensi Siswa	Jumlah Kegiatan Promosi Kompetensi Siswa	1 kali	710,130,386	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0002	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	Jumlah siswa yang mendapatkan fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	3,000 orang	3,470,945,119	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0003	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti lomba dan dibina	31 lembaga	20,486,556,031	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0004	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan Dasar	2 kali	1,146,090,662	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0005	Penunjang Peningkatan Prestasi Jenjang Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan peningkatan prestasi jenjang pendidikan menengah	5 kali	481,549,966	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.04.0006	Penunjang Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	Jumlah Kegiatan Peningkatan Prestasi Pendidikan Luar Sekolah	1 kali	3,985,183,056	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.01.05</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan</b>	1. Peningkatan Jumlah lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	56.82 %	<b>1,415,731,232</b>	
		2. Peningkatan Jumlah lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	39.6 %		
		3. Peningkatan Jumlah lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	64.44 %		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
		4. Peningkatan Jumlah lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	38.78 %		
		5. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	50%		
		6. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan MA yang tertib administrasi	25%		
		7. Peningkatan jumlah lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	59.6 %		
1.1.1.01.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mengikuti Pengelolaan Manajemen Sekolah	950 Lembaga	1,415,731,232	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.01.06</b>	<b>Program Pendidikan Kesetaraan</b>	1. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	70%	<b>1,959,216,020</b>	
		2. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	88.12 %		
		3. Prosentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	90.85 %		
1.1.1.01.06.0001	Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	Jumlah lembaga yang difasilitasi dengan Pembinaan Pendidikan Kesetaraan	424 lembaga	1,959,216,020	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.01.07</b>	<b>Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan</b>	1. Prosentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftar proses akreditasi	5.53 %	<b>37,156,694,583</b>	
		2. Tingkat cakupan anak didik yang mengikuti pendidikan masyarakat tiap minggu	120000 anak didik		
1.1.1.01.07.0001	Fasilitasi Pelaksanaan TPA/TPQ dan Kelas Minggu	Jumlah guru ngaji dan kelas minggu yang mendapatkan peningkatan mutu	12,000 orang	36,105,269,417	Dinas Pendidikan
1.1.1.01.07.0002	Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan serta PKBM	Jumlah lembaga Kursus, Pelatihan dan Pendidikan Masyarakat yang di fasilitasi	800 lembaga	1,051,425,166	Dinas Pendidikan
<b>1.1.1.02</b>	<b>Kesehatan</b>			<b>704,168,163,438</b>	
<b>1.1.1.02.01</b>	<b>Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	1. Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	100%	<b>188,539,039,724</b>	
		2. Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	11%		
1.1.1.02.01.0001	Jaminan Kesehatan Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	188,539,039,724	Dinas Kesehatan
<b>1.1.1.02.02</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>	1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.45 %	<b>29,896,272,005</b>	
		2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	96.94 %		
		3. Kunjungan neonatal lengkap	81%		
		4. Imunisasi dasar lengkap	93.81 %		
1.1.1.02.02.0001	Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kelurahan Yang Melaksanakan Layanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak	154 Lembaga	29,896,272,005	Dinas Kesehatan
<b>1.1.1.02.03</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak</b>	1. Prevalensi Balita Gizi kurang	9.5 %	<b>10,856,737,107</b>	
		2. Prevalensi Balita gizi buruk	1%		
		3. Prosentase Penimbangan balita	81.3 %		
		4. Prosentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	94.62 %		
1.1.1.02.03.0001	Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Laporan Pelaksanaan Peningkatan Dan Perbaikan Gizi Masyarakat	12 dokumen	10,856,737,107	Dinas Kesehatan
<b>1.1.1.02.04</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu</b>	Ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	74%	<b>44,529,141,332</b>	

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.02.04.0001	Operasional Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang Terpenuhi Kegiatan Operasionalnya	65 Lembaga	11,465,629,707	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0002	Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas	63 Lembaga	2,201,680,380	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan	Jumlah Dokumen Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	352,690,974	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0004	Peningkatan Sarana dan Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah Jenis Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 jenis	5,148,923,925	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.04.0005	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang dibangun/direhab	7 bangunan	25,360,216,346	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.1.1.02.05</b>	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan puskesmas/puskesmas pembantu</b>	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100%	<b>44,682,840,522</b>	
1.1.1.02.05.0001	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Jenis Obat dan Perbekalan Kesehatan Yang Diadakan	200 jenis	41,163,531,873	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.05.0002	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Puskesmas Yang Diadakan Perbekalan Kesehatan Dasar di Puskesmas	84 jenis	3,519,308,649	Dinas Kesehatan
<b>1.1.1.02.06</b>	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	1. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	82%	<b>112,644,700,386</b>	
		2. Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin	82%		
		3. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	73%		
		4. Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	76%		
1.1.1.02.06.0001	Akreditasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	12 Lembaga	1,528,263,587	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0002	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sarana Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan	242 Lembaga	532,624,049	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0003	Pembinaan Dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah Kader dan SDM Kesehatan Yang Dibina dan Dikembangkan	155 orang	1,553,667,053	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0004	Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan	Jumlah dokumen Kegiatan Peningkatan Profesionalisme SDM Kesehatan Yang Dilaksanakan	15 dokumen	5,304,122,771	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0005	Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	Jumlah laporan Pelaksanaan Sertifikasi dan Akreditasi SDM Kesehatan	12 dokumen	346,046,750	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.06.0006	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan keperawatan	58,392 orang	4,173,651,547	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0007	Pelayanan Medik Rumah Sakit	Jumlah pasien RS yang mendapatkan pelayanan medik	1,680 orang	2,489,490,749	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0008	Pengembangan manajemen rumah sakit dan SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	275 orang	11,355,394,975	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0009	Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan yang dilaksanakan	8 kali	525,053,501	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.06.0010	Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	Terpenuhinya Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit	69,019 orang	5,105,445,314	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0011	Pelayanan medik rumah sakit	Terpenuhinya Pelayanan medik rumah sakit	2,823 orang	472,370,745	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0012	Pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	Jumlah keberhasilan pengembangan manajemen dan pelayanan administrasi rumah sakit	1 aplikasi	1,564,518,276	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.06.0013	Peningkatan kapasitas SDM kesehatan	Jumlah keberhasilan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	1,318 orang	77,694,051,069	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.02.07	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</b>	1. Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	78%	<b>128,746,017,458</b>	
		2. Ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	85%		
		3. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	10 hari		
		4. Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	47 menit		
		5. Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie	48 hari		
1.1.1.02.07.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung dan Peralatan RSUD	Jumlah gedung dan peralatan RSUD yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	15,465,846,419	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.02.07.0002	Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan RSUD BDH	1 jenis	13,230,213,735	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0004	Pengadaan Sarana Kesehatan yang Bersumber dari Pajak Rokok	Jumlah pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	1 jenis	4,907,449,929	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0005	Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Jumlah penyediaan / pemeliharaan alat kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	1 jenis	9,868,702,195	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.07.0006	Pengadaan alat kesehatan rumah sakit	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	46,648,933,731	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0007	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari DAK Kesehatan	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	3,601,372,699	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0008	Pengadaan sarana kesehatan yang bersumber dari Pajak Rokok	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	22,332,996,592	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.07.0009	Penyediaan / pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya	Terpenuhinya penyediaan/pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan	1 jenis	12,690,502,158	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.08	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan rumah sakit</b>	1. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	100%	<b>81,953,157,514</b>	
		2. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100%		
1.1.1.02.08.0001	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Jumlah ketersediaan Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	151,622 orang	24,125,509,162	RSUD Bhakti Dharma Husada
1.1.1.02.08.0002	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	Terpenuhinya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan rumah sakit	299,438 orang	57,827,648,353	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
1.1.1.02.09	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	1. Persentase rumah sehat	75%	<b>62,320,257,389</b>	
		2. Persentase TPM memenuhi	81%		
		3. Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	82%		
1.1.1.02.09.0001	Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan Non Fisik	Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik	63 Lembaga	17,776,396,649	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0002	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Kasus Penyakit Menular Yang Tertangani	1,750 dokumen	13,658,360,100	Dinas Kesehatan



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.02.09.0003	Preceganahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Laporan Pelaksanaan Bindu dan Kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	12 dokumen	2,685,619,262	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Poli Pengobatan Tradisional (BATRA)	31 Lembaga	25,234,251,205	Dinas Kesehatan
1.1.1.02.09.0005	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Sampel Penyehatan Air Yang Diperiksa	6,092 sampel	2,965,630,174	Dinas Kesehatan
<b>1.1.1.03</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			<b>1,143,323,455,963</b>	
<b>1.1.1.03.01</b>	<b>Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota</b>	Lama genangan (menit)	51 menit	<b>656,287,614,781</b>	
		Luas genangan (ha)	1209 ha		
		Tinggi genangan (cm)	16 cm		
1.1.1.03.01.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi pembangunan/rehab Saluran Drainase/Gorong-gorong	45 dokumen	15,195,802,709	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Sarana Pematusan	Rumah Pompa yang dioperasikan dan dipelihara	56 unit	25,121,247,450	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0003	Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	Luasan Pembangunan, Penyediaan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pematusan	80,125 meter persegi	560,339,392,691	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0004	Pengendalian Dan Normalisasi Saluran Drainase Dan Boezem	Volume pengerukan/pemeliharaan Saluran Pematusan/Sungai/Kali	300,000 meter kubik	46,513,690,306	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.01.0005	Perencanaan Pematusan Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pematusan Kota	100 dokumen	9,117,481,625	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.1.1.03.02</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	1. Peningkatan panjang jalan (m)	1687116 m	<b>276,821,594,194</b>	
		2. Peningkatan penyediaan prasarana pejalan kaki (m)	42540 m		
		3. Prosentase jalan kota dalam kondisi baik (%)	2.58 %		
1.1.1.03.02.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan/Rehab Jalan Dan Jembatan	60 dokumen	16,601,414,459	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0002	Operasional Dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	Waktu Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Dan Alat Angkut	162 unit	15,959,380,733	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0003	Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	Jumlah Lokasi Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD)	23,000 meter persegi	35,178,811,447	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0004	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya	Jumlah Lokasi Jalan, Jembatan dan kelengkapannya yang direhab / dibangun	206,646 meter persegi	198,364,484,545	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0005	Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	Waktu penyediaan operasional Penunjang pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)	24 kali	826,663,568	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.03.02.0006	Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan	87 dokumen	9,890,839,442	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.1.1.03.03</b>	<b>Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan</b>	Peningkatan jumlah pelanggan PDAM (unit)	583350 unit	<b>1,801,147,134</b>	
1.1.1.03.03.0001	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Monitoring, Evaluasi Dan	3 dokumen	113,968,520	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1.1.1.03.03.0002	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK Air Minum)	Jumlah lokasi jaringan pipa air bersih yang dibangun	3,000 meter	1,687,178,614	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
<b>1.1.1.03.04</b>	<b>Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU</b>	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	2540250 m	<b>194,318,944,708</b>	
		Peningkatan Penggunaan PJU Hemat Energi	3400 unit		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.03.04.0001	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU yang terpasang	2,000 unit	64,042,843,772	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.1.03.04.0002	Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum	5,722 rekening	122,946,664,291	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.1.03.04.0003	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	40,000 titik	7,329,436,646	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
<b>1.1.1.03.05</b>	<b>Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota</b>	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	100%	<b>635,053,856</b>	
1.1.1.03.05.0001	Koordinasi Jaringan Utilitas	Jumlah perijinan pembangunan jaringan utilitas yang memenuhi syarat terhadap yang diajukan	10 ijin	635,053,856	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan
<b>1.1.1.03.06</b>	<b>Program Perencanaan Ruang Kota</b>	1. Jumlah rencana induk sektoral yang disusun	9 dokumen	<b>6,461,295,027</b>	
		2. Jumlah rencana rinci tata ruang yang disusun	7 dokumen		
1.1.1.03.06.0001	Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen Pendukung Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1 dokumen	1,734,721,874	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.1.1.03.06.0002	Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	658,330,200	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
1.1.1.03.06.0003	Pendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Jumlah dokumen pendampingan pengesahan RDTRK Surabaya yang disusun	1 dokumen	4,068,242,953	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.1.1.03.07</b>	<b>Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota</b>	1. Prosentase jumlah bangunan yang ber IMB	52.07 %	<b>6,997,806,262</b>	
		2. Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran	100%		
1.1.1.03.07.0001	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Kearsipan	2 jenis	176,853,426	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0002	Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Penataan dan Penyelenggaraan Bangunan yang dilaksanakan	6,517 bangunan	1,007,951,116	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0004	Pendataan Dan Pemetaan Pemanfaatan Ruang	Jumlah persil pemanfaatan ruang yang didata dan dipetakan	7,770 persil	1,199,806,670	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0005	Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Bangunan	Jumlah bangunan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan	48 bangunan	914,298,891	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0006	Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota	Jumlah Dokumen Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Rencana Ruang Kota yang disusun	12 dokumen	690,240,705	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0007	Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa Konstruksi (IUJK)	Jumlah ijin usaha jasa konstruksi yang diterbitkan	500 ijin	149,156,278	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0008	Penunjang Sekretariat Verifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Jumlah Laporan Berita Acara Serah Terima Prasarana Sarana dan Utilitas yang disusun	7 dokumen	1,021,299,316	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0009	Survey Dan Pemetaan Peningkatan Infrastruktur Kota	Jumlah persil hasil pelaksanaan survey dan pemetaan peningkatan infrastruktur kota	100 persil	1,069,636,237	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.03.07.0010	Updating Peta Digital di Wilayah Kota Surabaya	Jumlah dokumen updating peta digital di wilayah Kota Surabaya	5 dokumen	768,563,624	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.1.1.04</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>387,689,479,712</b>	
<b>1.1.1.04.01</b>	<b>Program perumahan permukiman</b>	Pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	170.862 m2	<b>387,689,479,712</b>	
		Peningkatan Pelayanan	46%		
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	12%		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
		Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	20%		
1.1.1.04.01.0001	Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	Jumlah Lokasi Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	103,000 meter persegi	282,646,502,777	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
1.1.1.04.01.0002	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana dasar permukiman yang dibangun	8 bangunan	43,105,675,562	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0003	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	Jumlah lokasi bangunan pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)	5 bangunan	4,805,006,000	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.1.04.01.0004	Analisa dan Inventarisasi Rumah Ber-SIP Dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah dokumen hasil analisa dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya	2 dokumen	838,441,946	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang dikelola dan dipelihara	78 bangunan	21,016,015,057	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.1.04.01.0006	Perbaikan rumah tidak layak huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat perbaikan	1,244 bangunan	35,277,838,369	Dinas Sosial
<b>1.1.1.05</b>	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>			<b>133,541,283,837</b>	
<b>1.1.1.05.01</b>	<b>Program Penegakan Peraturan Daerah</b>	Persentase pelanggaran perda yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	100%	<b>36,032,432,204</b>	
1.1.1.05.01.0001	Pengawasan Pengendalian	Jumlah pelaksanaan	240 kali	121,298,351	Kec. Asemrowo
1.1.1.05.01.0002	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	218,328,229	Kec. Benowo
1.1.1.05.01.0003	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	137,550,501	Kec. Bubutan
1.1.1.05.01.0004	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	141,523,385	Kec. Bulak
1.1.1.05.01.0005	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	70,292,702	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.05.01.0006	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	74,210,755	Kec. Gayungan
1.1.1.05.01.0007	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	324 kali	154,338,525	Kec. Genteng
1.1.1.05.01.0008	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	221,992,949	Kec. Gubeng
1.1.1.05.01.0009	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	432 kali	248,684,942	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.05.01.0010	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	112,902,521	Kec. Jambangan
1.1.1.05.01.0011	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	138,774,484	Kec. Karangpilang
1.1.1.05.01.0012	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	264 kali	130,409,174	Kec. Kenjeran
1.1.1.05.01.0013	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	189,548,533	Kec. Krembangan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.05.01.0014	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	127,734,086	Kec. Lakarsantri
1.1.1.05.01.0015	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	145,307,192	Kec. Mulyorejo
1.1.1.05.01.0016	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	188,298,177	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.05.01.0017	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	101,493,553	Kec. Pakal
1.1.1.05.01.0018	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	211,964,669	Kec. Rungkut
1.1.1.05.01.0019	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	113,207,647	Kec. Sambikerep
1.1.1.05.01.0020	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	264 kali	314,456,858	Kec. Sawahan
1.1.1.05.01.0021	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	264 kali	113,366,098	Kec. Semampir
1.1.1.05.01.0022	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	140,481,120	Kec. Simokerto
1.1.1.05.01.0023	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	164,715,894	Kec. Sukolilo
1.1.1.05.01.0024	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	85,260,479	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.05.01.0025	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	312 kali	126,780,061	Kec. Tambaksari
1.1.1.05.01.0026	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	240 kali	141,523,385	Kec. Tandes
1.1.1.05.01.0027	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	252 kali	176,080,111	Kec. Tegalsari
1.1.1.05.01.0028	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	276 kali	90,393,143	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.05.01.0029	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	336 kali	109,068,266	Kec. Wiyung
1.1.1.05.01.0030	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	288 kali	83,970,164	Kec. Wonocolo
1.1.1.05.01.0031	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah pelaksanaan Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	300 kali	9,142,245	Kec. Wonokromo
1.1.1.05.01.0032	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang I	1,800 kali	8,335,595,025	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0033	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	Jumlah Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang II	2,453 kali	1,379,423,126	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.05.01.0034	Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	Jumlah Persentase Keberhasilan Penertiban, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi Pamong Praja Bidang III	44,226 kali	4,710,186,937	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0035	Penindakan Evaluasi Pelanggaran Perda	Jumlah Penindakan & Evaluasi Pelanggaran Perda	84 kali	282,155,838	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0036	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah	1,140 orang	167,776,317	Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1.05.01.0037	Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	Jumlah Penyiapan Tenaga Penanggulangan Keamanan Kota	400 orang	16,754,196,761	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>1.1.1.05.02</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan</b>	1. Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	<b>30,064,763,838</b>	
		2. Persentase penurunan kejadian anarkis	3%		
		3. Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi	100%		
1.1.1.05.02.0001	Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	Jumlah Pelatihan pengendalian keamanan dan ketenteraman kota	1,280 orang	1,115,574,137	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0002	Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Jumlah laporan Pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	46 dokumen	8,248,044,557	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0003	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	66 dokumen	393,368,183	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0004	Peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	Jumlah laporan peningkatan kerjasama dan pengendalian bidang keamanan	12 dokumen	3,290,235,745	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0005	Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	Jumlah kegiatan Peningkatan toleransi dan kehidupan beragama	30 laporan	3,314,619,486	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.02.0006	Penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Jumlah peserta kegiatan keagamaan yang difasilitasi	28,710 orang	13,702,921,730	Dinas Sosial
<b>1.1.1.05.03</b>	<b>Program penanggulangan bencana</b>	1. Jumlah kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	54 kejadian	<b>67,444,087,795</b>	
		2. Jumlah kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	110 kejadian		
		3. Presentase waktu tanggap kurang dari 15 menit	95%		
		4. Peningkatan masyarakat yang memahami dan tanggap terhadap bahaya kebakaran	480 orang		
		5. Persentase waktu tanggap penanggulangan kejadian bencana non kebakaran	100%		
		6. Persentase kelurahan tangguh bencana	29%		
1.1.1.05.03.0001	Pelatihan dan pengendalian keamanan, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat	Kader Linmas yang terdidik dan terampil	1,050 orang	3,081,188,909	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.1.05.03.0002	Operasional Pemasaman Kebakaran	Terlaksananya Operasional Pemasaman Kebakaran secara baik	782 orang	657,154,876	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.03.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	50 unit	4,925,734,794	Dinas Kebakaran

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.05.03.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan perkembangan pembangunan kota	1,889 unit	46,494,242,239	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.03.0005	Pengurangan Tingkat Resiko Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	Terlaksananya Pemeriksaan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan	5,560 bangunan	1,428,021,234	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.03.0006	Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran	1,200 orang	931,073,622	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.03.0007	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	8,240 orang	1,881,603,149	Dinas Kebakaran
1.1.1.05.03.0008	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Pemadam Kebakaran	jumlah Fasilitas Pemadam Kebakaran yang dibangun/direhab	2 bangunan	8,045,068,974	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
<b>1.1.1.06</b>	<b>Sosial</b>			<b>169,615,655,404</b>	
<b>1.1.1.06.01</b>	<b>Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial</b>	Persentase PMKS yang ditangani	60%	<b>167,131,549,240</b>	
1.1.1.06.01.0001	Pemberian beasiswa bagi	Jumlah mahasiswa dari	550 orang	8,243,180,262	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0002	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi anak yatim,	Jumlah anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang mendapat	6,282 orang	30,263,029,350	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0003	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi korban bencana	Jumlah laporan penyediaan permakanan, bahan pokok, dan sarana prasarana bagi korban bencana	36 laporan	2,598,767,925	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0004	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang mendapat permakanan	14,300 orang	70,097,596,306	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0005	Pemberian kebutuhan dasar permakanan bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang mendapat permakanan	4,750 orang	22,359,005,384	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0006	Pemberian pelayanan bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	1,725 orang	3,462,339,964	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Kampung Anak Negeri	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Kampung Anak Negeri	35 orang	1,796,925,775	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0008	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana anak luar biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Pondok Sosial Kalijudan	85 orang	2,653,287,384	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0009	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Babat Jerawat	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Babat Jerawat	115 orang	2,338,417,815	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0010	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Griya Werdha	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Griya Werdha	150 orang	3,967,467,931	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0011	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	Jumlah penghuni yang menerima pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial di UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	1,600 orang	16,362,343,377	Dinas Sosial
1.1.1.06.01.0012	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	51,318,776	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0013	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	32,961,244	Kec. Asemrowo
1.1.1.06.01.0014	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	77,722,955	Kec. Benowo
1.1.1.06.01.0015	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	32,961,244	Kec. Benowo

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.06.01.0016	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	45,808,799	Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0017	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,776,619	Kec. Bubutan
1.1.1.06.01.0018	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	51,318,776	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0019	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,656,349	Kec. Bulak
1.1.1.06.01.0020	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	41,859,099	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0021	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	47,166,829	Kec. Dukuh Pakis
1.1.1.06.01.0022	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	51,717,038	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0023	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	35,148,935	Kec. Gayungan
1.1.1.06.01.0024	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	54,632,793	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0025	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	100,579,694	Kec. Genteng
1.1.1.06.01.0026	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	50,791,884	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0027	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,776,619	Kec. Gubeng
1.1.1.06.01.0028	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	12 dokumen	35,099,453	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0029	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,776,619	Kec. Gunung Anyar
1.1.1.06.01.0030	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	47,745,236	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0031	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	33,813,613	Kec. Jambangan
1.1.1.06.01.0032	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	44,283,930	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0033	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	47,166,829	Kec. Karangpilang
1.1.1.06.01.0034	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	56,828,753	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0035	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	28,266,139	Kec. Kenjeran
1.1.1.06.01.0036	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	32,935,850	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0037	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	40,490,221	Kec. Krembangan
1.1.1.06.01.0038	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	40,688,891	Kec. Lakarsantri

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.06.01.0039	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,151,917	Kec. Lakarsantri
1.1.1.06.01.0040	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	31,841,216	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0041	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	26,404,906	Kec. Mulyorejo
1.1.1.06.01.0042	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	60,778,452	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0043	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	47,166,829	Kec. Pabean Cantian
1.1.1.06.01.0044	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	39,762,394	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0045	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,151,917	Kec. Pakal
1.1.1.06.01.0046	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	52,758,023	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0047	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	42,471,724	Kec. Rungkut
1.1.1.06.01.0048	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	56,828,753	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0049	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	32,456,812	Kec. Sambikerep
1.1.1.06.01.0050	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	42,710,643	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0051	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	59,895,343	Kec. Sawahan
1.1.1.06.01.0052	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	59,193,672	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0053	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	43,139,385	Kec. Semampir
1.1.1.06.01.0054	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	59,973,811	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0055	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	100,579,694	Kec. Simokerto
1.1.1.06.01.0056	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	49,013,769	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0057	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	42,471,724	Kec. Sukolilo
1.1.1.06.01.0058	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	43,175,666	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0059	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	43,767,434	Kec. Sukomanunggal
1.1.1.06.01.0060	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	45,380,317	Kec. Tambaksari
1.1.1.06.01.0061	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	28,386,410	Kec. Tambaksari



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.1.06.01.0062	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	43,175,666	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0063	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	43,828,525	Kec. Tandes
1.1.1.06.01.0064	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	42,249,169	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0065	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	93,903,086	Kec. Tegalsari
1.1.1.06.01.0066	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	120,731,740	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0067	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	37,776,619	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.1.06.01.0068	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	59,623,081	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0069	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	15 dokumen	18,371,497	Kec. Wiyung
1.1.1.06.01.0070	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	109,131,805	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0071	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	28,386,410	Kec. Wonocolo
1.1.1.06.01.0072	Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan PMKS dan PSKS	6 dokumen	50,205,081	Kec. Wonokromo
1.1.1.06.01.0073	Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Laporan Monitoring dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	12 dokumen	27,051,088	Kec. Wonokromo
<b>1.1.1.06.02</b>	<b>Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial</b>	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	45%	<b>2,484,106,164</b>	
1.1.1.06.02.0001	Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	80 orang	189,081,313	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0002	Pembinaan bagi lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang dibina	6,427 orang	943,381,842	Dinas Sosial
1.1.1.06.02.0003	Pembinaan , pemberdayaan relawan sosial dan organisasi sosial	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi dan dibina	2,318 orang	1,351,643,008	Dinas Sosial
<b>1.1.2.01</b>	<b>Tenaga Kerja</b>			<b>23,098,082,657</b>	
<b>1.1.2.01.01</b>	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	1. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan di dalam negeri	5435 orang	<b>4,188,531,523</b>	
		2. Jumlah pencari kerja yang	94 orang		
		3. Jumlah wirausaha muda yang terbentuk	30 orang		
1.1.2.01.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	600 orang	1,598,187,442	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.01.01.0002	Fasilitasi pemilihan bidang kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi	1,900 orang	432,116,712	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0003	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	50 lembaga	34,315,853	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0004	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja yang dibina	50 lembaga	154,485,494	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0005	Pembinaan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	Jumlah perusahaan pengguna TKA yang dibina	120 lembaga	24,934,460	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0006	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah bursa tenaga kerja yang dilaksanakan	7 kali	1,802,933,297	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.01.0007	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro Kota Surabaya	jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja makro kota surabaya	1 dokumen	141,558,265	Dinas Tenaga Kerja

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.01.02	<b>Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas</b>	1. Persentase Angkatan Kerja yang Lulus sertifikasi selain peserta pelatihan	62%	<b>15,319,542,747</b>	
		2. Persentase Pencari Kerja lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Lulus sertifikasi	62%		
		3. Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi yang lulus	77%		
1.1.2.01.02.0001	Fasilitasi pemagangan bagi pencari kerja	jumlah pencari kerja yang difasilitasi magang	120 orang	359,953,906	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0002	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang difasilitasi	2,000 orang	4,014,848,100	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0003	Fasilitasi sertifikasi profesi bagi peserta pelatihan	jumlah peserta pelatihan yang mengikuti sertifikasi	850 orang	1,511,408,956	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.02.0004	Penyiapan Calon Tenaga Kerja Siap Pakai Melalui Pelatihan berbasis kompetensi	jumlah peserta pelatihan	1,000 orang	9,433,331,785	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja</b>	Persentase Peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	8%	<b>2,448,288,870</b>	
1.1.2.01.03.0001	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dapat diselesaikan	110 lembaga	937,867,941	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.03.0002	Fasilitasi Syarat Kerja Perusahaan	Jumlah dokumen hasil koordinasi LKS Tripartit, jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dan jumlah	200 lembaga	1,510,420,929	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04	<b>Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan</b>	Persentase Perusahaan Yang Telah Diperiksa dan mematuhi Norma ketenagakerjaan dan/norma k3	43%	<b>1,141,719,517</b>	
1.1.2.01.04.0001	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang mendapatkan fasilitasi penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2,514 lembaga	571,699,741	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.01.04.0002	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	jumlah perusahaan yang dibina	3,620 lembaga	570,019,776	Dinas Tenaga Kerja
1.1.2.02	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>8,582,239,352</b>	
1.1.2.02.01	<b>Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</b>	Persentase kecamatan yang responsif gender	38.71 %	<b>1,618,259,134</b>	
1.1.2.02.01.0001	Pendataan Profil Gender	Jumlah Profil Gender yang	2 dokumen	312,099,755	Badan
1.1.2.02.01.0002	Penguatan dan Pengembangan Jaringan	Jumlah lembaga penguatan dan pengembangan jaringan	31 Lembaga	1,306,159,380	Badan Pemberdayaan
1.1.2.02.02	<b>Program perlindungan perempuan dan anak</b>	1. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	<b>6,963,980,218</b>	
		2. Tingkat efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	65.21 %		
		3. Meningkatnya jumlah jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan	19 lembaga		
1.1.2.02.02.0001	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	387 orang	1,806,695,181	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	Jumlah lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai	431 lembaga	998,209,059	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.02.02.0003	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	92,083,697	Kec. Asemrowo
1.1.2.02.02.0004	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	138,384,874	Kec. Benowo
1.1.2.02.02.0005	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	95,216,300	Kec. Bubutan
1.1.2.02.02.0006	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 dokumen	156,465,088	Kec. Bulak
1.1.2.02.02.0007	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	111,483,610	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.02.02.0008	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	11 dokumen	97,559,548	Kec. Gayungan
1.1.2.02.02.0009	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	15 dokumen	125,272,347	Kec. Genteng
1.1.2.02.02.0010	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	13 dokumen	182,668,017	Kec. Gubeng
1.1.2.02.02.0011	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 dokumen	132,853,370	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.02.02.0012	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 dokumen	137,145,633	Kec. Jambangan
1.1.2.02.02.0013	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	113,783,490	Kec. Karangpilang
1.1.2.02.02.0014	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	135,361,657	Kec. Kenjeran
1.1.2.02.02.0015	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	124,050,201	Kec. Krembangan
1.1.2.02.02.0016	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	143,824,722	Kec. Lakarsantri
1.1.2.02.02.0017	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	115,489,952	Kec. Mulyorejo
1.1.2.02.02.0018	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	152,290,297	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.02.02.0019	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	105,844,427	Kec. Pakal
1.1.2.02.02.0020	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	173,644,035	Kec. Rungkut
1.1.2.02.02.0021	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 dokumen	122,035,764	Kec. Sambikerep
1.1.2.02.02.0022	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	138,599,645	Kec. Sawahan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.02.02.0023	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	130,055,630	Kec. Semampir
1.1.2.02.02.0024	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	92,838,416	Kec. Simokerto
1.1.2.02.02.0025	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	155,785,558	Kec. Sukolilo
1.1.2.02.02.0026	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	12 dokumen	116,113,676	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.02.02.0027	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	144,678,073	Kec. Tambaksari
1.1.2.02.02.0028	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	16 dokumen	158,840,714	Kec. Tandes
1.1.2.02.02.0029	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	126,465,006	Kec. Tegalsari
1.1.2.02.02.0030	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	18 dokumen	118,736,285	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.02.02.0031	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	109,807,770	Kec. Wiyung
1.1.2.02.02.0032	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	14 dokumen	124,742,310	Kec. Wonocolo
1.1.2.02.02.0033	Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Laporan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	9 dokumen	286,955,864	Kec. Wonokromo
<b>1.1.2.03</b>	<b>Pangan</b>			<b>7,915,234,360</b>	
<b>1.1.2.03.01</b>	<b>Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan</b>	1. Angka Ketersediaan Energi	90%	<b>5,678,024,661</b>	
		2. Angka Ketersediaan Protein	90%		
		3. Tingkat keamanan bahan	81%		
		4. Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	82%		
		5. Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	95.5		
1.1.2.03.01.0001	Pembinaan dan Pengawasan Pangan siap saji	Jumlah Sampel Pangan Siap Saji Yang Diperiksa	3,208 sampel	1,962,680,121	Dinas Kesehatan
1.1.2.03.01.0002	Peningkatan Pengawasan Makanan Olahan	Jumlah Sampel Jajanan Anak Sekolah Yang Dibina dan Diawasi	390 sampel	541,475,568	Dinas Kesehatan
1.1.2.03.01.0003	Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Jumlah masyarakat yang dibina untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengembangan pangan	200 orang	370,204,139	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Ikan Segar	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan ikan segar	500 sampel	213,424,826	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0005	Pengawasan dan Pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan	Jumlah sampel pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan	900 sampel	408,517,096	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0006	Peningkatan konsumsi hasil perikanan	Jumlah kegiatan peningkatan konsumsi hasil perikanan	2 kali	334,294,088	Dinas Pertanian
1.1.2.03.01.0007	Analisa SKPG dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Dokumen Analisa SKPG dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan	1 dokumen	51,769,722	Kantor Ketahanan Pangan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.03.01.0008	Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Hasil Monitoring Bidang Ketahanan Pangan	7 kali	19,528,422	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0009	Monitoring Ketersediaan Bahan Pangan	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Ketersediaan Bahan Pangan	14 dokumen	830,414,836	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0010	Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	Jumlah Peserta Pembinaan Keamanan Pangan yang beredar	670 orang	349,620,928	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0011	Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	Jumlah Peserta Pembinaan Manajemen Cadangan Pangan dan Pencegahan Kerawanan Pangan	150 orang	55,332,797	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0012	Pengawasan dan Pemeriksaan Sayur dan Buah	Jumlah Sample Sayur dan Buah yang diawasi dan diperiksa	500 sampel	254,860,658	Kantor Ketahanan Pangan
1.1.2.03.01.0013	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	600 orang	285,901,462	Kantor Ketahanan Pangan
<b>1.1.2.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan</b>	1. Tingkat Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas	92%	<b>2,237,209,699</b>	
1.1.2.03.02.0001	Pengendalian Harga, ketersediaan Bahan Pangan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian Harga Pangan Daerah	14 dokumen	844,612,752	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1.1.2.03.02.0002	Penyusunan Laporan ketersediaan komoditas	Jumlah dokumen laporan ketersediaan komoditas	1 dokumen	99,901,857	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.03.02.0003	Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya yang diselenggarakan	12 kali	1,292,695,089	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.1.2.04</b>	<b>Pertanahan</b>			<b>226,729,231,334</b>	
<b>1.1.2.04.01</b>	<b>Program pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum</b>	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	15.78 Ha	<b>202,937,489,833</b>	
1.1.2.04.01.0001	Pengadaan Tanah dan/atau	Luas tanah dan / atau	10,000 meter	131,442,589,568	Dinas Pekerjaan
1.1.2.04.01.0002	Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Rehabilitasi Sosial/Pemberdayaan Ekonomi	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk rehabilitasi sosial/pemberdayaan ekonomi	500 meter persegi	119,395,593	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0003	Pengadaan Tanah Dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk ruang terbuka hijau	29,500 meter persegi	13,954,956,533	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.01.0004	Pengadaan Tanah dan/atau bangunan untuk Sarana Pelayanan Publik	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan untuk sarana pelayanan publik	72,950 meter persegi	57,420,548,140	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.1.2.04.02</b>	<b>Program pengamanan aset</b>	Penambahan jumlah tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	871 bidang	<b>7,401,282,173</b>	
		Peningkatan jumlah tanah aset yang tersertifikasi	725 bidang		
1.1.2.04.02.0001	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah tanah aset yang diamankan	100 bangunan	3,454,834,835	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0002	Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen arsip tanah/bangunan aset daerah yang dikelola	1 jenis	1,417,578,471	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.02.0003	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen sertifikasi tanah aset yang diajukan	30 dokumen	2,528,868,866	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.1.2.04.03</b>	<b>Program pengelolaan aset</b>	Peningkatan jumlah aset yang tercatat pemanfaatannya	1513 bidang	<b>16,390,459,327</b>	
1.1.2.04.03.0001	Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	943,986,740	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0002	Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa masalah bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	966,280,298	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0003	Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil analisa masalah tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	1 dokumen	966,280,298	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0004	Pendataan Dan Penelitian Dalam Rangka Pelayanan Perijinan Pemakaian Tanah	Jumlah Ijin Pemakaian Tanah yang dilakukan pendataan dan penelitian	7,000 ijin	1,072,847,839	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0005	Pengawasan Dan Pengelolaan Bangunan Sewa	Jumlah bangunan yang dikelola	24 bangunan	9,541,760,074	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.04.03.0006	Pengendalian Dan Penertiban Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah pengendalian / penertiban pemanfaatan tanah dan/atau bangunan aset yang dilakukan	4 kali	1,270,484,337	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
1.1.2.04.03.0007	Survey dan Pemetaan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Jenis laporan pemetaan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya	2 jenis	1,628,819,739	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
<b>1.1.2.05</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			<b>401,628,901,055</b>	
<b>1.1.2.05.01</b>	<b>Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau</b>	peningkatan jumlah RTH yang dipelihara dan diawasi	327.44 Ha	<b>80,271,918,804</b>	
		Peningkatan luas RTH yang	35.28 Ha		
1.1.2.05.01.0001	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Makam	Jumlah makam yang dipelihara	53 lokasi	19,961,916,302	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Taman dan Jalur Hijau	Jumlah taman dan jalur hijau yang dipelihara	390 lokasi	25,555,463,703	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0003	Pemeliharaan Dan Penyediaan Taman Rekreasi	Jumlah taman rekreasi yang dipelihara	21 lokasi	6,822,086,557	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0004	Penataan Taman dan Jalur Hijau	Jumlah PenataanTaman dan Jalur Hijau	37 lokasi	17,656,713,589	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0005	Pengembangan Dekorasi Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Dekorasi Kota	55 unit	6,358,203,834	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.01.0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Hutan Kota	Jumlah hutan kota yang dibangun dan dipelihara	8 lokasi	2,003,035,552	Dinas Pertanian
1.1.2.05.01.0007	Pengelolaan Kawasan Lindung Pesisir Pantai Surabaya	Jumlah lokasi kawasan lindung pesisir pantai Surabaya yang dikelola	1 lokasi	1,914,499,268	Dinas Pertanian
<b>1.1.2.05.02</b>	<b>Program pengelolaan kebersihan</b>	Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	28 unit	<b>311,644,443,677</b>	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	1402 komunitas		
1.1.2.05.02.0001	Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Rumah Kompos	Jumlah rumah kompos yang dikelola	25 bangunan	6,342,201,936	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0002	Operasional IPLT Keputih	Jumlah IPLT yang dioperasikan	1 bangunan	1,494,498,949	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0003	Operasional Pembersihan Jalan dan Jalur Pedestrian	Jumlah pelaksana pembersihan jalan dan jalur pedestrian	150,000 unit	57,823,444,696	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0004	Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	Jumlah Pelaksana Operasional Pembersihan Sampah di Saluran	45,000 unit	13,215,729,252	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0005	Operasional Pengangkutan Sampah	Jumlah volume sampah yang diangkut	13,096,565 meter kubik	34,799,472,881	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0006	Pembangunan dan Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan	2,500 unit	50,611,723,899	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0007	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	Pembayaran Operasional Pengolahan Sampah	547,500 ton	96,564,906,042	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0008	Pemeliharaan Sarana Penyapuan, Pengangkutan Sampah dan Toilet	Jumlah Sarana Penyapuan, Pengangkutan Sampah dan Toilet yang Dipelihara	302 unit	35,427,626,505	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0009	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana prasarana kebersihan yang dipelihara	15 bangunan	7,211,272,163	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0010	Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	Jumlah Pelaksana Pengawasan Operasional Penyapuan dan Pengangkutan Sampah	60 unit	1,629,376,093	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0011	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah dokumen peningkatan manajemen pengelolaan kebersihan dan pertamanan	1 dokumen	166,730,878	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0012	Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	Jumlah Pelaksana Operasional Peningkatan Pelayanan Posko Kebersihan	3,000 unit	1,640,226,912	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0013	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6 kali	3,613,012,494	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1.1.2.05.02.0014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	23,006,655	Kec. Asemrowo

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.05.02.0015	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	150 orang	25,937,292	Kec. Benowo
1.1.2.05.02.0016	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	350 orang	40,905,880	Kec. Bubutan
1.1.2.05.02.0017	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	385 orang	33,611,975	Kec. Bulak
1.1.2.05.02.0018	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	13,093,246	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.05.02.0019	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	15,174,589	Kec. Gayungan
1.1.2.05.02.0020	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	150 orang	15,338,534	Kec. Genteng
1.1.2.05.02.0021	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	20,976,640	Kec. Gubeng
1.1.2.05.02.0022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	200 orang	22,613,611	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.05.02.0023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	28,182,580	Kec. Jambangan
1.1.2.05.02.0024	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	17,583,823	Kec. Karangpilang
1.1.2.05.02.0025	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	23,692,003	Kec. Kenjeran
1.1.2.05.02.0026	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	275 orang	35,292,660	Kec. Krembangan
1.1.2.05.02.0027	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	37,163,733	Kec. Lakarsantri
1.1.2.05.02.0028	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	24,002,205	Kec. Mulyorejo
1.1.2.05.02.0029	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	32,673,157	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.05.02.0030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	180 orang	28,182,580	Kec. Pakal
1.1.2.05.02.0031	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	360 orang	51,103,053	Kec. Rungkut
1.1.2.05.02.0032	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	32,673,157	Kec. Sambikerep
1.1.2.05.02.0033	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	280 orang	181,271,792	Kec. Sawahan
1.1.2.05.02.0034	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	23,692,003	Kec. Semampir
1.1.2.05.02.0035	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	300 orang	27,250,325	Kec. Simokerto
1.1.2.05.02.0036	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	210 orang	23,432,097	Kec. Sukolilo
1.1.2.05.02.0037	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	120 orang	23,692,003	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.05.02.0038	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	18,194,538	Kec. Tambaksari
1.1.2.05.02.0039	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	220 orang	31,176,298	Kec. Tandes
1.1.2.05.02.0040	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	33,421,586	Kec. Tegalsari
1.1.2.05.02.0041	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	420 orang	36,314,233	Kec. Tenggilis Mejoyo

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.05.02.0042	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	200 orang	54,433,928	Kec. Wiyung
1.1.2.05.02.0043	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	240 orang	96,713,216	Kec. Wonocolo
1.1.2.05.02.0044	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader lingkungan yang dibina	250 orang	33,421,586	Kec. Wonokromo
<b>1.1.2.05.03</b>	<b>Program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan</b>	Peningkatan ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	50%	<b>9,712,538,574</b>	
1.1.2.05.03.0001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah tersusunnya dokumen non fisik adipura	1 dokumen	253,640,912	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0002	Monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	Jumlah laporan monitoring Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah	1 dokumen	270,910,251	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0003	Operasional dan Pengadaan Stasiun Monitoring Udara Ambien	Jumlah peralatan Stasiun Monitoring Udara Ambien yang diadakan	1 paket	3,054,101,164	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0004	Pelaksanaan Car Free Day	Jumlah pelaksanaan Car Free Day	161 kali	1,741,307,954	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0005	Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan	Jumlah pelajar yang mendapatkan penyuluhan lingkungan hidup	500 orang	156,900,116	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0006	Pemantauan Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir dan Laut	Jumlah sampel air laut yang diambil dan diuji untuk pengendalian pencemaran kawasan pesisir dan laut	32 sampel	251,319,491	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0007	Pemeliharaan Sistem Informasi Kualitas Lingkungan (SIKUALI)	Jumlah dokumen pemeliharaan sistem informasi kualitas lingkungan dan Status Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang disusun	2 dokumen	442,187,676	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0008	Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	75 kasus	363,006,896	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0009	Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Jumlah sampel untuk pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diuji dan dianalisa	614 sampel	1,526,729,379	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0010	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Peningkatan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren dan Eco Campuss	300 orang	485,049,366	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0011	Sosialisasi dan Pemantauan Sumber Daya Air	Jumlah kegiatan/ usaha pengguna sumber daya air yang dipantau	40 lembaga	140,654,754	Badan Lingkungan Hidup
1.1.2.05.03.0012	Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara Dari Sumber Bergerak	51 kali	1,026,730,615	Dinas Perhubungan
<b>1.1.2.06</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			<b>82,615,021,748</b>	
<b>1.1.2.06.01</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	1. Ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	99.57 %	<b>82,615,021,748</b>	
		2. Cakupan penerbitan akte	99.57 %		
		3. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100%		
		4. Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	86.55 %		
		5. Ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	93.92 %		
1.1.2.06.01.0001	Fasilitasi Kependudukan	Jumlah permohonan pelayanan Fasilitasi Kependudukan	300,000 berkas	716,393,099	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0002	Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan	11 kali	364,514,642	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.06.01.0003	Pelayanan Mutasi WNI dan Orang Asing	Jumlah permohonan pelayanan mutasi WNI dan Orang Asing	77,916 berkas	186,061,616	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0004	Pengembangan Teknologi Kependudukan	Sistem Kependudukan	1 aplikasi	814,991,472	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0005	Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	801,927,981	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0006	Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran, Pengakuan Anak dan Kematian	Jumlah permohonan layanan akta kelahiran, pengakuan anak dan kematian	75,130 berkas	499,584,383	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0007	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan, Pengesahaan Anak dan Perceraian	Jumlah permohonan layanan akta perkawinan, pengesahaan anak dan perceraian	6,125 berkas	540,986,479	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0008	Perencanaan Kependudukan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perkembangan Kependudukan	3 dokumen	3,502,452,885	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
1.1.2.06.01.0009	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,009,421,709	Kec. Asemrowo
1.1.2.06.01.0010	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,133,315,174	Kec. Benowo
1.1.2.06.01.0011	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,697,930,706	Kec. Bubutan
1.1.2.06.01.0012	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,195,755,606	Kec. Bulak
1.1.2.06.01.0013	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,090,678,744	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.06.01.0014	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	1,826,558,057	Kec. Gayungan
1.1.2.06.01.0015	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,656,627,830	Kec. Genteng
1.1.2.06.01.0016	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,977,242,223	Kec. Gubeng
1.1.2.06.01.0017	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,104,386,136	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.06.01.0018	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,016,991,136	Kec. Jambangan
1.1.2.06.01.0019	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	1,884,449,033	Kec. Karangpilang
1.1.2.06.01.0020	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,107,376,550	Kec. Kenjeran
1.1.2.06.01.0021	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,328,729,476	Kec. Krembangan
1.1.2.06.01.0022	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,716,883,947	Kec. Lakarsantri
1.1.2.06.01.0023	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,812,530,337	Kec. Mulyorejo
1.1.2.06.01.0024	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,348,231,002	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.06.01.0025	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,260,555,038	Kec. Pakal
1.1.2.06.01.0026	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,809,533,294	Kec. Rungkut
1.1.2.06.01.0027	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,226,328,792	Kec. Sambikerep

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.06.01.0028	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	3,105,641,939	Kec. Sawahan
1.1.2.06.01.0029	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,486,008,805	Kec. Semampir
1.1.2.06.01.0030	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,034,773,433	Kec. Simokerto
1.1.2.06.01.0031	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	3,071,577,876	Kec. Sukolilo
1.1.2.06.01.0032	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,433,509,365	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.06.01.0033	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	3,331,673,530	Kec. Tambaksari
1.1.2.06.01.0034	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,802,660,050	Kec. Tandes
1.1.2.06.01.0035	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,341,470,416	Kec. Tegalsari
1.1.2.06.01.0036	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,046,540,788	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.06.01.0037	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	1,795,229,855	Kec. Wiyung
1.1.2.06.01.0038	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	2,502,396,260	Kec. Wonocolo
1.1.2.06.01.0039	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12 dokumen	3,033,102,086	Kec. Wonokromo
<b>1.1.2.07</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			<b>15,503,337,434</b>	
<b>1.1.2.07.01</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>	PMKS usia produktif dari hasil pelatihan/pembinaan yang berproduksi	770 orang	<b>15,503,337,434</b>	
1.1.2.07.01.0001	Bulan Bhakti Gotong Royong	Jumlah Peserta yang	4,600 orang	561,695,325	Badan
1.1.2.07.01.0002	Dinamisasi Data Keluarga Miskin	Jumlah Kelurahan yang mendapat dinamisasi data keluarga miskin	154 lembaga	1,409,445,459	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
1.1.2.07.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin	Jumlah dokumen pelaksanaan program beras miskin	1 dokumen	549,580,481	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01.0004	Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	56 lembaga	2,317,651,834	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01.0005	Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen Program Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen	533,402,162	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01.0006	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kelurahan	Jumlah peserta pelatihan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kelurahan	1,046 orang	691,897,349	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01.0007	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan ketrampilan	2,734 orang	8,926,366,608	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.07.01.0008	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Jumlah peserta yang dilatih Pemanfaatan Sumber Daya Alam	200 orang	513,298,215	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1.1.2.08</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			<b>4,225,463,069</b>	
<b>1.1.2.08.01</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	1. Persentase peserta KB baru	81.15 %	<b>3,659,343,548</b>	
		2. Persentase peserta KB aktif	77.31 %		
		3. Menurunnya target angka	5.8 %		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
		4. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	20.85 %		
1.1.2.08.01.0001	Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah masyarakat peduli keluarga berencana yang dibina	1,568 orang	1,292,654,116	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0002	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah peserta pembinaan keluarga berencana	4,000 orang	627,259,851	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0003	Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pelayanan KB	424 orang	1,072,546,431	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.08.01.0004	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus bidang keluarga berencana	2 unit	666,883,150	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1.1.2.08.02</b>	<b>Program Bina Keluarga</b>	1. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	47.90 %	<b>566,119,520</b>	
		2. Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	3.5 %		
1.1.2.08.02.0001	Pembinaan Ketahanan keluarga	Jumlah peserta Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia yang dibina	1,500 orang	566,119,520	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
<b>1.1.2.09</b>	<b>Perhubungan</b>			<b>221,886,979,148</b>	
<b>1.1.2.09.01</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi</b>	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	29.19 km/jam	<b>190,757,763,690</b>	
1.1.2.09.01.0001	Pelaksanaan Pengujian	Jumlah Kendaraan Bermotor	97,000 unit	5,873,193,064	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0002	Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Bangunan Sarana Prasarana Transportasi Yang Dibangun	1 bangunan	58,775,085,933	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0003	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	2,510 orang	855,187,926	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0004	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11,718 unit	41,095,811,878	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0005	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana dan Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pemeliharaan	15 lokasi	7,262,285,017	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0006	Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	Waktu Pelaksanaan Penertiban, Pengawasan Dan Pengendalian Parkir, Terminal Dan LLAJ	760 kali	4,319,526,701	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0007	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Dilakukan Pemasangan	2,055 unit	28,974,924,138	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0008	Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	Jumlah Lokasi Pengadaan Perlengkapan Jalan Yang Dibiayai dari DAK Transportasi	20 unit	2,844,847,730	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0009	Pengelolaan Parkir	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Parkir	12 kali	10,002,034,632	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0010	Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi	Jumlah Lokasi Sarana Prasarana Transportasi Yang Dilakukan Pengembangan	3 bangunan	21,901,124,636	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0011	Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	waktu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Dan Keselamatan Angkutan	12 kali	4,598,872,946	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.01.0012	Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Lalu Lintas Yang Tersusun	8 dokumen	2,188,710,990	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.09.01.0013	Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi Bagi Pelajar	12 kali	2,066,158,100	Dinas Perhubungan
<b>1.1.2.09.02</b>	<b>Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan</b>	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	26 menit	<b>30,708,152,901</b>	
		Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	43.32 menit		
1.1.2.09.02.0001	Pengelolaan Terminal Angkutan Umum	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal	12 kali	8,461,925,165	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0002	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Jumlah Koridor Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan	2 layanan	20,523,806,805	Dinas Perhubungan
1.1.2.09.02.0003	Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	Jumlah Pelayanan Perijinan Angkutan Umum Yang Dikeluarkan	7,500 ijin	1,722,420,931	Dinas Perhubungan
<b>1.1.2.09.03</b>	<b>Program manajemen lalu lintas angkutan barang</b>	1. Penurunan waktu tempuh kendaraan barang dari dan menuju hub	0 N/A	<b>421,062,558</b>	
1.1.2.09.03.0001	Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Aksesibilitas Angkutan Barang Yang Tersusun	2 dokumen	421,062,558	Dinas Perhubungan
<b>1.1.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			<b>64,058,268,772</b>	
<b>1.1.2.10.01</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	1. Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	31.56 %	<b>45,669,442,136</b>	
1.1.2.10.01.0001	Pemanfaatan Menara Bersama	Jumlah Laporan Monitoring	12 dokumen	439,958,274	Dinas Komunikasi
1.1.2.10.01.0002	Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	jumlah Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	12 lokasi	218,929,550	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0003	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	9 unit	2,011,870,825	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0004	Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dan Sistem Informasi Manajemen Yang Terintegrasi Ke Pusat Data	Terbangunnya sistem informasi yang terintegrasi	15 aplikasi	1,250,481,582	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0005	Pembinaan, Pengawasan Dan Penterbitan Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	jumlah Peserta Pembinaan, Pengawasan Dan Penterbitan Penyelenggaraan Jasa Pos Dan Telekomunikasi	400 orang	167,580,472	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0006	Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen	104 aplikasi	1,293,033,930	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0007	Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	Terlaksana Pemeliharaan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	18 unit	2,892,070,409	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0008	Pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	Waktu pemeliharaan Sarana Jaringan Komunikasi Dan Informasi	12 laporan	18,344,013,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.01.0009	Pemeliharaan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	terlaksananya Pemeliharaan Sarana Utilitas Pendukung Keamanan	568 unit	19,051,503,893	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.1.2.10.02</b>	<b>Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat</b>	1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	83%	<b>18,388,826,636</b>	
		2. Jumlah Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	8765 kunjungan		
1.1.2.10.02.0001	Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya	156 kali	5,447,983,876	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0002	Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	Jumlah Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan	2,902 eksemplar	666,924,211	Bagian Hubungan Masyarakat
1.1.2.10.02.0003	Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	Jumlah Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan	106 kali	435,123,774	Bagian Hubungan Masyarakat

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.10.02.0004	Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	Pelaksanaan Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat	12 dokumen	356,394,509	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0005	Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi	500 orang	426,324,954	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0006	Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pengumpulan Data Dan Informasi Pemerintah Daerah	12 kali	802,706,865	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0007	Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	80 kali	3,745,997,624	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1.2.10.02.0008	Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	Pelaksanaan Sosialisasi Informasi dan Pembinaan TIK	12 kali	6,507,370,822	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>1.1.2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>			<b>51,331,445,679</b>	
<b>1.1.2.11.01</b>	<b>Program perluasan jangkauan pemasaran UMK</b>	1. Persentase Usaha Mikro yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	20%	<b>38,143,011,937</b>	
		2. Persentase Usaha Kecil	40%		
		3. Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	35%		
		4. Peningkatan Pembangunan Fasilitas Ekonomi	171 unit		
1.1.2.11.01.0001	Fasilitasi Pemasaran Produk Usaha Skala Mikro	Jumlah pemasaran produk usaha mikro yang dilaksanakan	9 kali	1,181,632,214	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0002	Penataan Lokasi Usaha Skala Mikro	Jumlah lokasi usaha mikro yang direhabilitasi	6 bangunan	5,151,435,694	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0003	Penyelenggaraan Event Promosi di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah event promosi sentra wisata kuliner yang diselenggarakan	25 kali	620,935,932	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.01.0004	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil	Jumlah Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil yang dibangun	15 bangunan	20,418,924,791	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.11.01.0005	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Usaha UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi pendampingan pengelolaan usaha	30 orang	434,465,751	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0006	Fasilitasi Sertifikasi Produk UKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi sertifikasi produk	180 orang	412,646,434	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0007	Pengelolaan Sentra UKM Surabaya	Jumlah Sentra UKM Surabaya yang dikelola	2 Lembaga	2,237,121,169	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0008	Pengembangan UKM Potensi Ekspor	Jumlah UKM Potensi Ekspor yang dikembangkan	1 dokumen	75,835,790	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0009	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sentra	Jenis Sarana dan Prasarana Sentra yang disediakan dan dipelihara	5 jenis	666,419,931	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0010	Penyediaan Stand Usaha di Mall	Jumlah stand usaha yang disediakan	2 Lembaga	3,450,635,137	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0011	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil	Jumlah event pameran yang diikuti	10 kali	2,900,942,743	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.01.0012	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Asemrowo
1.1.2.11.01.0013	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	29,850,607	Kec. Benowo
1.1.2.11.01.0014	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	25,155,502	Kec. Bubutan
1.1.2.11.01.0015	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	25,155,502	Kec. Bulak
1.1.2.11.01.0016	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Dukuh Pakis

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.11.01.0017	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Gayungan
1.1.2.11.01.0018	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Genteng
1.1.2.11.01.0019	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Gubeng
1.1.2.11.01.0020	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.11.01.0021	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Jambangan
1.1.2.11.01.0022	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Karangpilang
1.1.2.11.01.0023	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Kenjeran
1.1.2.11.01.0024	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Krembangan
1.1.2.11.01.0025	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Lakarsantri
1.1.2.11.01.0026	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Mulyorejo
1.1.2.11.01.0027	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Pabean Cantian
1.1.2.11.01.0028	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	34,545,711	Kec. Pakal
1.1.2.11.01.0029	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Rungkut
1.1.2.11.01.0030	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Sambikerep
1.1.2.11.01.0031	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	29,850,607	Kec. Sawahan
1.1.2.11.01.0032	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Semampir
1.1.2.11.01.0033	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Simokerto
1.1.2.11.01.0034	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Sukolilo
1.1.2.11.01.0035	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	20,460,397	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.11.01.0036	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Tambaksari
1.1.2.11.01.0037	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Tandes
1.1.2.11.01.0038	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Tegalsari
1.1.2.11.01.0039	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	15,765,292	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.11.01.0040	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	1,679,977	Kec. Wiyung
1.1.2.11.01.0041	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	1,679,977	Kec. Wonocolo
1.1.2.11.01.0042	Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	Jumlah Laporan Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM	12 dokumen	1,679,977	Kec. Wonokromo
<b>1.1.2.11.02</b>	<b>Program perkuatan permodalan UMK</b>	Persentase UMK yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	4%	<b>203,218,529</b>	

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.11.02.0001	Fasilitasi Kemitraan UMKM	Jumlah UKM yang memperoleh fasilitasi kemitraan	100 orang	138,211,250	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.11.02.0002	Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	Jumlah Kajian Perkuatan Permodalan UMK oleh PT. BPR Surya Artha Utama	1 dokumen	65,007,279	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>1.1.2.11.03</b>	<b>Program standarisasi produk UMK</b>	1. Prosentase Usaha Mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha UMK	20%	<b>4,908,806,737</b>	
		2. Prosentase Usaha Kecil yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam peningkatan mutu produk	20%		
		3. Persentase produk Usaha Mikro yang layak diuji mutukan	20%		
		4. Persentase produk Usaha Kecil yang layak diuji mutukan	0%		
1.1.2.11.03.0001	Fasilitasi Legalitas dan Standarisasi Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang difasilitasi legalitas dan standarisasi usaha nya	125 orang	46,110,664	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.03.0002	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku Usaha Skala Mikro	Jumlah pelaku usaha skala mikro yang Mendapatkan pelatihan mutu produk dan manajemen usaha	125 orang	517,542,492	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.03.0003	Pelatihan Peningkatan Mutu Produk di Sentra Wisata Kuliner	Jumlah pelaku usaha mikro di sentra yang mendapatkan pelatihan	550 orang	426,742,077	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.03.0004	Fasilitasi Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi di Bidang Industri	Jumlah UKM yang difasilitasi teknologi tepat guna (TTG)	50 orang	383,273,540	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.03.0005	Pembinaan Standarisasi UKM	Jumlah UKM yang memperoleh pembinaan standarisasi	220 orang	722,487,123	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.03.0006	Pembinaan pengolah hasil perikanan	Jumlah pengolah hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan	100 orang	2,812,650,841	Dinas Pertanian
<b>1.1.2.11.04</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Koperasi</b>	1. Peningkatan jumlah anggota koperasi	176200 orang	<b>2,130,984,258</b>	
		2. Presentase peningkatan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sesuai dengan ketentuan	10%		
		3. Presentase peningkatan jumlah anggota dan pengurus	45%		
		4. Jumlah koperasi berklasifikasi AAB tahun (t)	400 koperasi		
1.1.2.11.04.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi Dalam Aspek Kelembagaan	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan pelatihan	240 orang	387,467,792	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0002	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lembaga Koperasi Non RAT	Jumlah koperasi Non RAT yang difasilitasi peningkatan kualitas kelembagaannya	61 lembaga	1,189,380,898	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0003	Pemeringkatan Kinerja Koperasi	Jumlah Koperasi aktif ber RAT yang diperingkat	150 lembaga	155,208,421	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.04.0004	Sosialisasi Program Gerakan Memasyarakatkan Koperasi	Jumlah peserta sosialisasi koperasi	300 orang	398,927,147	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>1.1.2.11.05</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi</b>	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang meningkat volume usahanya	68%	<b>3,618,419,790</b>	
1.1.2.11.05.0001	Fasilitasi Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi	Jumlah Pemasaran Produk Unit Bisnis Koperasi aktif yang dilaksanakan	7 kali	891,339,772	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.11.05.0002	Fasilitasi Pembentukan Jaringan Kerjasama Bisnis dan Permodalan antar Koperasi,	Jumlah koperasi yang telah difasilitasi untuk pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan	143 lembaga	36,679,938	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.05.0003	Fasilitasi Uji Sertifikasi Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Koperasi Jasa Keuangan (SKKNI-KJK)	Jumlah koperasi yang pengelola usaha simpan pinjam - nya mengikuti uji sertifikasi	82 lembaga	317,605,134	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Aspek Usaha Koperasi yang disusun	5 dokumen	433,503,592	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.05.0005	Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Pengelola Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang pengelola usaha - nya telah mengikuti diklat berbasis kompetensi	142 lembaga	860,731,700	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.05.0006	Peningkatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha bisnis	665 lembaga	1,078,559,654	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<b>1.1.2.11.06</b>	<b>Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif</b>	Persentase jumlah individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif	5%	<b>2,203,416,033</b>	
		Persentase jumlah rumah kreatif yang beroperasi	43.75 %		
1.1.2.11.06.0001	Pembinaan Rumah Kreatif Kandungan	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	302,749,116	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
1.1.2.11.06.0002	Fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif	jumlah fasilitasi pelatihan seni budaya di rumah kreatif yang dilaksanakan	78 kali	601,268,370	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.11.06.0003	Pelatihan Usaha Kreatif di Bidang Kuliner	Jumlah pelaku usaha kreatif di bidang kuliner yang mendapatkan pelatihan	50 orang	38,794,734	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.06.0004	Pembinaan dan Pengembangan Bakat dan Kreatifitas Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan	100 orang	284,293,210	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.11.06.0005	Pengembangan Rumah Kreatif	Jumlah rumah yang dikelola	2 Lembaga	645,482,202	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1.2.11.06.0006	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Perikanan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan perikanan di rumah kreatif yang difasilitasi	25 orang	150,363,692	Dinas Pertanian
1.1.2.11.06.0007	Fasilitasi Pengembangan Usaha Hasil Olahan Peternakan di Rumah Kreatif	Jumlah pelaku usaha hasil olahan peternakan di rumah kreatif yang difasilitasi	200 orang	180,464,709	Dinas Pertanian
<b>1.1.2.11.07</b>	<b>Program legalisasi usaha kreatif</b>	Persentase jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	20%	<b>123,588,395</b>	
1.1.2.11.07.0001	Fasilitasi Legalitas Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi legalitas usahanya	25 orang	77,242,747	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1.1.2.11.07.0002	Fasilitasi Legalisasi Usaha Kreatif	Jumlah usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi legalisasi	15 orang	46,345,648	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.1.2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>			<b>1,582,693,292</b>	
<b>1.1.2.12.01</b>	<b>Program Peningkatan Investasi fasilitas pendukung logistik</b>	1. Peningkatan investasi fasilitas pendukung logistik	18%	<b>35,747,712</b>	
1.1.2.12.01.0002	Temu Usaha Logistik	Jumlah pelaku usaha logistik	100 lembaga	35,747,712	Badan Koordinasi
<b>1.1.2.12.02</b>	<b>Program perkuatan permodalan usaha kreatif</b>	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	5%	<b>142,927,048</b>	
1.1.2.12.02.0001	Fasilitasi Kemitraan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang difasilitasi kemitraan permodalan	25 orang	77,242,747	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.12.02.0002	Fasilitasi Kemitraan Pelaku Usaha Kreatif	Jumlah pelaku usaha kreatif yang memperoleh fasilitasi kemitraan	25 orang	65,684,301	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
<b>1.1.2.12.03</b>	<b>Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi</b>	1. persentase peningkatan realisasi investasi	8%	<b>1,404,018,531</b>	
		2. persentase Peningkatan jumlah minat dan rencana investasi	12%		
1.1.2.12.03.0001	Konsolidasi Perencanaan Kerjasama Investasi	Jumlah konsolidasi penanaman modal yang dilaksanakan	30 lembaga	211,446,060	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.03.0002	Pemetaan Data Pelaku Usaha di Surabaya	Jumlah pelaku usaha yang dipetakan	172 lembaga	427,337,858	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.03.0003	Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Investasi	Jumlah kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pemutakhiran data investasi yang dilaksanakan	1 aplikasi	206,058,445	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
1.1.2.12.03.0004	Penyelenggaraan Promosi Investasi	Jumlah promosi investasi yang dilaksanakan	2 kali	559,176,168	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
<b>1.1.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>123,885,574,603</b>	
<b>1.1.2.13.01</b>	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>	Jumlah pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	800 orang	<b>3,196,562,483</b>	
1.1.2.13.01.0001	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	1,400 orang	712,075,385	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0002	Peningkatan Jiwa Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan	500 orang	1,394,103,021	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.01.0003	Peningkatan Wawasan	Jumlah Pemuda yang	6,600 orang	1,090,384,077	Dinas Pemuda dan
<b>1.1.2.13.02</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	103 kelurahan	<b>120,689,012,120</b>	
		Jumlah atlet yang dibina dan berprestasi	1107 orang		
1.1.2.13.02.0001	Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang dibangun/direhabilitasi	1 bangunan	19,361,754,578	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
1.1.2.13.02.0002	Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Rekening Pembayaran Operasional Gedung dan Lapangan Olahraga	10 rekening	4,353,592,090	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0003	Pembangunan dan Peningkatan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun dan	67 bangunan	75,342,400,466	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0004	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Khusus dan Lansia	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	465 orang	4,154,004,580	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0005	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	1,588 orang	7,509,401,349	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0006	Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Dan Manajemen Olahraga Rekreasi dan Tradisional	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti kegiatan	600 orang	6,349,940,687	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.1.2.13.02.0007	Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi (42 Cabor)	84 kali	3,617,918,371	Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>1.1.2.14</b>	<b>Statistik</b>			<b>424,158,970</b>	
<b>1.1.2.14.01</b>	<b>Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik</b>	Toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	5%	<b>424,158,970</b>	
1.1.2.14.01.0001	Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi yang valid dan aktual	7 dokumen	424,158,970	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
<b>1.1.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>			<b>15,776,626,903</b>	
<b>1.1.2.16.01</b>	<b>Program perlindungan seni dan nilai-nilai budaya lokal</b>	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	274 situs	<b>1,054,042,409</b>	
1.1.2.16.01.0001	Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dapat dikelola	12 bangunan	1,054,042,409	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.16.02	<b>Program pengembangan dan pemanfaatan seni dan nilai-nilai budaya lokal</b>	1. Jumlah budaya lokal yang layak tampil	283 kelompok	<b>5,152,620,896</b>	
		2. Jumlah hotel, restoran, dan	9 lokasi		
1.1.2.16.02.0001	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan	11 kali	3,564,726,268	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0002	Monitoring pemanfaatan seni budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	Jumlah dokumen pemanfaatan seni dan budaya lokal pada ruang publik dan usaha pariwisata	48 dokumen	112,914,911	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0003	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah pelaksanaan pengembangan kesenian dan	6 kali	1,225,417,585	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.02.0004	Fasilitasi Pengembangan Seni di Sekolah	Jumlah peserta pengembangan seni di sekolah	2,700 orang	249,562,132	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03	<b>Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal</b>	1. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	15%	<b>9,569,963,598</b>	
		2. Tingkat partisipasi generasi muda di pusat kegiatan generasi muda	4%		
1.1.2.16.03.0001	Pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	Jumlah peserta pemberdayaan dan fasilitasi Parpol dan Ormas	600 orang	774,514,209	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0002	Peningkatan Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan bela negara	160 orang	1,278,665,926	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0003	Peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	600 orang	697,678,138	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
1.1.2.16.03.0004	Fasilitasi event peningkatan nilai kebangsaan	Jumlah peserta dalam kegiatan event peningkatan nilai kebangsaan	17,600 orang	1,626,775,380	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.1.2.16.03.0005	Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	Jumlah peserta yang mendapatkan Fasilitasi Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan di Sekolah	18,562 orang	1,882,404,644	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0006	Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	Jumlah kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Dan Kreatifitas Siswa PLS	20 kali	752,406,423	Dinas Pendidikan
1.1.2.16.03.0007	Fasilitasi kegiatan organisasi sosial kepahlawanan, pemeliharaan TMP dan MPN	Jumlah peserta kegiatan kepahlawanan yang difasilitasi	7,877 orang	1,773,012,781	Dinas Sosial
1.1.2.16.03.0008	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Asemrowo
1.1.2.16.03.0009	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	44,266,238	Kec. Benowo
1.1.2.16.03.0010	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	23,892,902	Kec. Bubutan
1.1.2.16.03.0011	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	100 orang	13,810,115	Kec. Bulak
1.1.2.16.03.0012	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Dukuh Pakis
1.1.2.16.03.0013	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Gayungan
1.1.2.16.03.0014	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	23,892,902	Kec. Genteng
1.1.2.16.03.0015	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	27,306,174	Kec. Gubeng
1.1.2.16.03.0016	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	27,306,174	Kec. Gunung Anyar
1.1.2.16.03.0017	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	12,429,104	Kec. Jambangan
1.1.2.16.03.0018	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Karangpilang
1.1.2.16.03.0019	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	44,266,238	Kec. Kenjeran
1.1.2.16.03.0020	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	20,479,631	Kec. Krembangan
1.1.2.16.03.0021	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	80 orang	11,048,092	Kec. Lakarsantri
1.1.2.16.03.0022	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	22,096,185	Kec. Mulyorejo
1.1.2.16.03.0023	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	240 orang	40,959,261	Kec. Pabean Cantian

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.16.03.0024	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	22,133,119	Kec. Pakal
1.1.2.16.03.0025	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	59,021,650	Kec. Rungkut
1.1.2.16.03.0026	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	33,199,678	Kec. Sambikerep
1.1.2.16.03.0027	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Sawahan
1.1.2.16.03.0028	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	140 orang	44,266,238	Kec. Semampir
1.1.2.16.03.0029	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	12,429,104	Kec. Simokerto
1.1.2.16.03.0030	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	27,306,174	Kec. Sukolilo
1.1.2.16.03.0031	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	36,888,531	Kec. Sukomanunggal
1.1.2.16.03.0032	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	36,888,531	Kec. Tambaksari
1.1.2.16.03.0033	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	120 orang	31,355,252	Kec. Tandes
1.1.2.16.03.0034	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Tegalsari
1.1.2.16.03.0035	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	160 orang	36,888,531	Kec. Tenggilis Mejoyo
1.1.2.16.03.0036	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	12,429,104	Kec. Wiyung
1.1.2.16.03.0037	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	12,429,104	Kec. Wonocolo
1.1.2.16.03.0038	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	90 orang	15,359,723	Kec. Wonokromo
<b>1.1.2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>			<b>24,360,755,751</b>	
<b>1.1.2.17.01</b>	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	1. Persentase peningkatan jumlah event literasi yang diselenggarakan	10%	<b>24,360,755,751</b>	
		2. Persentase peningkatan jumlah koleksi buku	86.18 %		
		3. Persentase peningkatan jumlah siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	20.5 %		
		4. Persentase peningkatan jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	12.9 %		
1.1.2.17.01.0001	Pelaksanaan Tes Reading Text Levelling	Jumlah laporan pelaksanaan tes reading text levelling	12 dokumen	174,084,244	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0002	Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibina	100 lembaga	413,471,609	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0003	Pengelolaan Layanan Baca	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Baca	48 kali	18,347,878,693	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0004	Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat	56,572 buku	4,904,712,443	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0005	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	3 kali	288,261,552	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.17.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Budaya Baca dan Menulis di Sekolah	Jumlah kegiatan pengembangan budaya baca dan menulis	3 kali	220,192,569	Dinas Pendidikan
1.1.2.17.01.0007	Pembinaan Budaya Baca	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Budaya Baca	2 kali	12,154,640	Kec. Semampir
<b>1.1.2.18</b>	<b>Kearsipan</b>			<b>2,245,140,044</b>	
<b>1.1.2.18.01</b>	<b>Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	1. Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	20%	<b>2,245,140,044</b>	
		2. Persentase Perangkat daerah, Unit Kerja, BUMD dan Sekolah Negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai Ketentuan	22.6 %		
1.1.2.18.01.0001	Layanan Informasi Kearsipan	Jumlah Kegiatan Layanan Informasi Kearsipan	8 kali	82,844,960	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18.01.0002	Pembinaan Sistem Kearsipan	Jumlah Perangkat Daerah	70 Lembaga	128,057,319	Badan Arsip dan Perpustakaan
1.1.2.18.01.0003	Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Penataan dan	126 lembaga	515,479,721	Badan Arsip dan Perpustakaan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.1.2.18.01.0004	Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Kearsipan	32 jenis	1,518,758,043	Badan Arsip dan Perpustakaan
<b>1.2.2.01</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			<b>2,592,521,298</b>	
<b>1.2.2.01.01</b>	<b>Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan</b>	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	12%	<b>2,229,850,600</b>	
1.2.2.01.01.0001	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan	Jumlah sarana dan prasarana kelautan dan perikanan yang diadakan	3 jenis	2,229,850,600	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.01.02</b>	<b>Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan</b>	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	<b>362,670,697</b>	
1.2.2.01.02.0001	Pelatihan dan pendampingan	Jumlah peserta pelatihan	400 orang	362,670,697	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.02</b>	<b>Pariwisata</b>			<b>16,127,721,880</b>	
<b>1.2.2.02.01</b>	<b>Program pengembangan destinasi wisata</b>	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	7%	<b>3,674,084,003</b>	
1.2.2.02.01.0001	Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Pemeliharaan obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel yang dilaksanakan	3 bangunan	538,382,397	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0002	Pemeliharaan obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah Pemeliharaan Gedung, Jumlah pemeliharaan sarana gedung, jumlah pemeliharaan taman yang dilaksanakan	3 bangunan	1,309,175,417	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0003	Peningkatan kualitas SDM	Terlaksananya kegiatan	600 orang	86,292,457	Dinas Kebudayaan
1.2.2.02.01.0004	Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan Wisata Religi	Jumlah Revitalisasi obyek wisata THP Kenjeran dan	5 bangunan	1,359,494,665	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.01.0005	Revitalisasi obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	Jumlah revitalisasi yang dilakukan di obyek wisata Tugu Pahlawan, Balai Pemuda dan THR	3 bangunan	380,739,067	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1.2.2.02.02</b>	<b>Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata</b>	Jumlah Kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan	1 kesepakatan	<b>3,556,669,218</b>	
1.2.2.02.02.0001	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata	Jumlah Koordinasi kemitraan usaha jasa dan sarana pariwisata yang dilaksanakan	4 kali	153,380,813	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.02.0002	Pelaksanaan koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum	Jumlah koordinasi kemitraan usaha rekreasi dan hiburan umum yang dilaksanakan	6 kali	3,403,288,405	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1.2.2.02.03</b>	<b>Program Pemasaran Pariwisata</b>	Jumlah Kunjungan di Objek Wisata	6800221 wisatawan	<b>8,896,968,658</b>	
1.2.2.02.03.0001	Pemilihan duta wisata Cak & Ning	pemilihan duta wisata sebanyak 1 kali	1 kali	834,454,057	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0002	Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	Jumlah Penyelenggaraan event di UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel	13 kali	715,730,622	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0003	Penyelenggaraan event di UPTD Tugu Pahlawan Balai Pemuda dan THR	jumlah event di tugu pahlawan, balai pemuda dan THR	113 kali	1,054,459,894	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0004	Penyelenggaraan event wisata	Jumlah Even Wisata yang dilaksanakan	5 kali	1,385,398,974	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0005	Penyelenggaraan festival kuliner	Jumlah kegiatan 3 event	3 kali	1,580,230,018	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.2.2.02.03.0006	Penyelenggaraan promosi	Jumlah promosi yang diselenggarakan	3 kali	3,326,695,093	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>1.2.2.03</b>	<b>Pertanian</b>			<b>6,924,235,612</b>	
<b>1.2.2.03.01</b>	<b>Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	12%	<b>1,594,833,259</b>	

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.2.2.03.01.0001	Pengadaan sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diadakan	3 jenis	1,594,833,259	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.03.02</b>	<b>Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	<b>1,809,665,598</b>	
1.2.2.03.02.0001	Pelatihan dan pendampingan	Jumlah peserta pelatihan	300 orang	274,123,608	Dinas Pertanian
1.2.2.03.02.0002	Pembibitan	Jumlah jenis bibit dan sarana pembibitan yang disediakan	14 jenis	1,305,094,692	Dinas Pertanian
1.2.2.03.02.0003	Pembinaan Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang dibina	25 orang	230,447,298	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.03.03</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian</b>	Persentase jumlah pembudidaya yang omzetnya meningkat	61%	<b>942,078,930</b>	
1.2.2.03.03.0001	Promosi Pemasaran Produk Hasil Pertanian	Jumlah kegiatan promosi pemasaran hasil pertanian	14 kali	942,078,930	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.03.04</b>	<b>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan ternak</b>	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	83%	<b>622,868,656</b>	
1.2.2.03.04.0001	Pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan	Jumlah pelayanan yang dapat diberikan oleh klinik hewan	1,000 kali	366,393,327	Dinas Pertanian
1.2.2.03.04.0002	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan ternak	700 kali	256,475,329	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.03.05</b>	<b>Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan</b>	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	25%	<b>1,954,789,169</b>	
1.2.2.03.05.0001	Pelatihan dan pendampingan teknologi tepat guna budidaya peternakan	Jumlah peserta pelatihan teknologi tepat guna budidaya peternakan yang didampingi	400 orang	346,846,039	Dinas Pertanian
1.2.2.03.05.0002	Pengadaan Sarana Pelatihan Peternakan	Jumlah sarana pelatihan peternakan yang diadakan	1 unit	1,607,943,130	Dinas Pertanian
<b>1.2.2.05</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			<b>4,255,222,473</b>	
<b>1.2.2.05.01</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif</b>	Lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	6 lingkungan	<b>3,977,318,863</b>	
		Penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	33 unit		
1.2.2.05.01.0001	Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	Jumlah Pengusahaan dan Pengembangan Energi Alternatif	1 unit	529,485,876	Badan Lingkungan Hidup
1.2.2.05.01.0003	Pengusahaan Konservasi	Jumlah konservasi energi	1 bangunan	3,447,832,987	Dinas Pekerjaan
<b>1.2.2.05.02</b>	<b>Program Upaya Konservasi Energi</b>	Jumlah kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	124 kegiatan dan / atau usaha	<b>277,903,610</b>	
1.2.2.05.02.0001	Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengusahaan Konservasi Energi	1 dokumen	277,903,610	Badan Lingkungan Hidup
<b>1.2.2.06</b>	<b>Perdagangan</b>			<b>2,896,153,418</b>	
<b>1.2.2.06.01</b>	<b>Program pengembangan hub dan simpul logistik untuk mendukung distribusi</b>	1. Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	25%	<b>563,338,791</b>	
		2. Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	30%		
1.2.2.06.01.0001	Pembentukan Badan Usaha Pengelola Logistik	Jumlah Badan Usaha Pengelola Logistik yang terbentuk	1 dokumen	148,033,993	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
1.2.2.06.01.0002	Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	100 lembaga	308,970,988	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.01.0003	Penyusunan Rencana	Jumlah dokumen rencana	1 dokumen	106,333,810	Dinas Perdagangan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
1.2.2.06.02	<b>Program Kerjasama Bidang Perdagangan</b>	1. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yg telah ditandatangani	42.86 %	<b>444,647,729</b>	
		2. Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	66.67 %		
1.2.2.06.02.0001	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Perdagangan	Jumlah kerjasama perdagangan yang ditindaklanjuti	2 lembaga	444,647,729	Bagian Kerjasama
1.2.2.06.03	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan</b>	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	<b>1,888,166,899</b>	
1.2.2.06.03.0001	Pelayanan Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Tera/Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang diTera/Tera Ulang	17,969 unit	190,326,312	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.03.0002	Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan UPTD Metrologi legal yang dipelihara	20 unit	1,478,949,054	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.03.0003	Pengawasan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang diawasi	12 unit	152,012,708	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.2.2.06.03.0004	Penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta kegiatan penguatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	300 orang	66,878,825	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.01	<b>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</b>			<b>18,488,234,211</b>	
2.1.2.01.01	<b>Program Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	1. Prosentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	90%	<b>4,856,985,197</b>	
		2. Tingkat penyerapan anggaran kegiatan	85%		
		3. Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	96%		
2.1.2.01.01.0001	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang disusun	4 dokumen	225,844,834	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.01.0002	Monitoring Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Monitoring	5 dokumen	19,166,156	Badan Perencanaan
2.1.2.01.01.0003	Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan	Jumlah dokumen Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang disusun	12 dokumen	910,723,490	Bagian Bina Program
2.1.2.01.01.0004	Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	6 aplikasi	2,829,304,891	Bagian Bina Program
2.1.2.01.01.0005	Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD	Jumlah dokumen Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD yang disusun	40 dokumen	871,945,826	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	100%	<b>13,631,249,014</b>	
		Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD	65%		
2.1.2.01.02.0001	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.1.2.01.02.0002	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.01.02.0003	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0004	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.1.2.01.02.0005	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Lingkungan Hidup
2.1.2.01.02.0006	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.01.02.0007	Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus	2 dokumen	170,560,478	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0008	Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan	1 dokumen	608,854,555	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0009	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang dibangun dan dikembangkan	7 dokumen	583,558,071	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0010	Pendampingan Penyusunan Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan rencana kerja tahunan	42 Lembaga	248,495,989	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0011	Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	1 dokumen	301,948,838	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0012	Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan Dan Pematasan	1 dokumen	588,386,560	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0013	Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3 dokumen	745,418,022	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0014	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0015	Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya	7 dokumen	628,130,939	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0016	Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	479,135,235	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0017	Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan	1 dokumen	142,817,868	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0018	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana dan anggaran rencana pembangunan daerah yang disusun	8 dokumen	4,010,373,646	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0019	Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota Surabaya	3 dokumen	628,315,871	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0020	Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD	2 dokumen	573,334,451	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0021	Sosialisasi Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta sosialisasi Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,004 orang	264,550,400	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.1.2.01.02.0022	Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD	Jumlah dokumen RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 dokumen	924,988,549	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0023	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Bina Program
2.1.2.01.02.0024	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Hubungan Masyarakat
2.1.2.01.02.0025	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Hukum
2.1.2.01.02.0026	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Kerjasama

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.01.02.0027	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.01.02.0028	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.01.02.0029	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.01.02.0030	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.1.2.01.02.0031	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Perlengkapan
2.1.2.01.02.0032	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Bagian Umum dan Protokol
2.1.2.01.02.0033	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Kebakaran
2.1.2.01.02.0034	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.1.2.01.02.0035	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2.01.02.0036	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.1.2.01.02.0037	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Kesehatan
2.1.2.01.02.0038	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.2.01.02.0039	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.1.2.01.02.0040	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.1.2.01.02.0041	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.2.01.02.0042	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.1.2.01.02.0043	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.01.02.0044	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Pendidikan
2.1.2.01.02.0045	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.1.2.01.02.0046	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.01.02.0047	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Perhubungan
2.1.2.01.02.0048	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Pertanian
2.1.2.01.02.0049	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	48,677,504	Dinas Sosial
2.1.2.01.02.0050	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Dinas Tenaga Kerja
2.1.2.01.02.0051	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Inspektorat
2.1.2.01.02.0052	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Kantor Ketahanan Pangan



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.01.02.0053	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	19,347,906	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0054	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Asemrowo
2.1.2.01.02.0055	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0056	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Benowo
2.1.2.01.02.0057	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	32,268,128	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0058	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Bubutan
2.1.2.01.02.0059	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0060	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Bulak
2.1.2.01.02.0061	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	25,583,548	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0062	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.01.02.0063	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	25,583,548	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0064	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Gayungan
2.1.2.01.02.0065	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0066	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Genteng
2.1.2.01.02.0067	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	22,441,900	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0068	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Gubeng
2.1.2.01.02.0069	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	17,746,795	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0070	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.01.02.0071	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	24,915,887	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0072	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Jambangan
2.1.2.01.02.0073	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	25,583,548	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0074	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Karangpilang
2.1.2.01.02.0075	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,654,647	Kec. Kenjeran

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.01.02.0076	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Kenjeran
2.1.2.01.02.0077	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,654,647	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0078	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Krembangan
2.1.2.01.02.0079	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,654,647	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0080	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Lakarsantri
2.1.2.01.02.0081	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	17,746,795	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0082	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Mulyorejo
2.1.2.01.02.0083	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	25,616,859	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0084	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.01.02.0085	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,654,647	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0086	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Pakal
2.1.2.01.02.0087	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	16,970,066	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0088	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Rungkut
2.1.2.01.02.0089	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0090	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Sambikerep
2.1.2.01.02.0091	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	29,589,512	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0092	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Sawahan
2.1.2.01.02.0093	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	16,970,066	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0094	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Semampir
2.1.2.01.02.0095	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	25,583,548	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0096	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Simokerto
2.1.2.01.02.0097	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Sukolilo
2.1.2.01.02.0098	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Sukolilo

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.01.02.0099	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,654,647	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0100	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.01.02.0101	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	10,734,425	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0102	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Tambaksari
2.1.2.01.02.0103	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	23,409,398	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0104	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Tandes
2.1.2.01.02.0105	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	21,276,807	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0106	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Tegalsari
2.1.2.01.02.0107	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	13 dokumen	8,356,585	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0108	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.01.02.0109	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	15,033,193	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0110	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Wiyung
2.1.2.01.02.0111	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	8,356,585	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0112	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Wonocolo
2.1.2.01.02.0113	Monitoring dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan monitoring dan pelaksanaan musrenbang RKPD Tingkat kecamatan	12 dokumen	10,359,568	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0114	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	21,533,624	Kec. Wonokromo
2.1.2.01.02.0115	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.1.2.01.02.0116	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.1.2.01.02.0117	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Satuan Polisi Pamong Praja
2.1.2.01.02.0118	Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi perencanaan strategis	9 dokumen	30,581,410	Sekretariat DPRD
<b>2.1.2.02</b>	<b>Keuangan</b>			<b>34,013,653,954</b>	
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	80%	<b>4,314,543,642</b>	
2.1.2.02.01.0001	Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	jumlah Dokumen hasil Evaluasi dan Koordinasi Pendapatan dan Belanja Daerah	4 dokumen	224,026,645	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0002	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	Pelayanan Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran	66,009 berkas	1,411,915,278	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.02.01.0003	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerimaan serta Pengeluaran Daerah	jumlah berkas pengelolaan dan penatausahaan penerimaan serta pengeluaran daerah	30,000 berkas	161,188,447	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0004	Penyusunan APBD,	Jumlah Dokumen	15 dokumen	1,139,607,244	Dinas Pendapatan
2.1.2.02.01.0005	Penyusunan Bahan Anggaran Kas	Jumlah dokumen Penyusunan Bahan Anggaran Kas	1 dokumen	95,732,387	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0006	Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	19 dokumen	1,227,420,175	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.01.0007	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen Perencanaan Pengelolaan Keuangan	15 dokumen	54,653,466	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah</b>	1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah	14.19 %	<b>29,314,189,793</b>	
2.1.2.02.02.0001	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Bidang Kebersihan Dan Pertamanan	Monitoring dan Rekapitulasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	31 kali	302,581,871	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.1.2.02.02.0002	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Reklame	24 dokumen	8,148,334,717	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.02.0003	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran Dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	36 dokumen	5,749,590,696	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.02.0004	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN - PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	Jumlah Dokumen Hasil Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Parkir, PPJ PLN-PPJ Non PLN, PBB dan BPHTB	48 dokumen	11,233,614,171	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.02.0005	Koordinasi DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan	Jumlah Dokumen Hasil DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak, Bagi	13 lembaga	111,446,116	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
2.1.2.02.02.0006	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Hotel, Restoran dan Air Tanah	2,480 berkas	754,378,044	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.02.0007	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan	8,246 berkas	614,472,316	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.1.2.02.02.0008	Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan, pelayanan pengurangan, angsuran, restitusi dan kompensasi PBB, BPHTB dan PPJ PLN-PPJ Non PLN	419,937 berkas	2,399,771,861	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
<b>2.1.2.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah</b>	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	67%	<b>384,920,519</b>	
2.1.2.02.03.0001	Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Jumlah Laporan Monev Kinerja BUMD	5 dokumen	384,920,519	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>2.1.2.03</b>	<b>Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah</b>			<b>235,200,334,320</b>	
<b>2.1.2.03.01</b>	<b>Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>	1. Persentase Standar Pelayanan (SP), yang di dalamnya mencakup proses bisnis, yang tersusun	100%	<b>3,012,369,512</b>	
		2. Persentase Pendampingan Penyusunan POS (Prosedur Operasional Standar) SKPD	100%		
		3. Persentase Prosedur Operasional Standar (POS)	15%		
		4. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan evaluasi kelembagaan	100%		
2.1.2.03.01.0001	Pelaksanaan Analisa Jabatan	Jumlah pelaksanaan analisa	2 dokumen	1,295,509,269	Bagian Organisasi

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.01.0002	Pelaksanaan Analisa Kelembagaan	Jumlah dokumen pelaksanaan analisa kelembagaan	1 dokumen	148,033,993	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0003	Pembinaan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan tata naskah dinas	1 dokumen	154,736,796	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0004	Peningkatan Sistem Dan Mekanisme Pelayanan	Jumlah peningkatan sistem dan mekanisme pelayanan	274 Lembaga	180,140,538	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0005	Peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan	Jumlah peningkatan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan	48 Lembaga	333,429,465	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0006	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah Laporan Kinerja (LKj) Kota Surabaya yang disusun	1 dokumen	147,306,545	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0007	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen penyusunan road map reformasi birokrasi	1 dokumen	181,858,753	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.1.2.03.01.0008	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	571,354,155	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
<b>2.1.2.03.02</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	1. Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	<b>3,795,534,482</b>	
		2. Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	100%		
		3. Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%		
		4. Persentase Produk hukum yang disebarluaskan	100%		
2.1.2.03.02.0001	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi produk hukum Daerah	12 dokumen	129,694,262	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0002	Penanganan Permasalahan Bidang Hukum	Jumlah penanganan permasalahan Bidang Hukum	65 dokumen	1,227,277,433	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0003	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah hasil Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	71 dokumen	1,780,996,992	Bagian Hukum
2.1.2.03.02.0004	Publikasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasi	70 dokumen	657,565,795	Bagian Hukum
<b>2.1.2.03.03</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonom</b>	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	100%	<b>89,499,384,272</b>	
2.1.2.03.03.0001	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3 dokumen	245,940,824	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0002	Pembakuan Nama Rupabumi di Kota Surabaya	Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi di Kota Surabaya	2 dokumen	195,551,583	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0003	Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan	Jumlah dokumen pembinaan administrasi umum pemerintahan	5 dokumen	1,049,162,118	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0004	Pembinaan dan Penataan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang menerima pembinaan dan penataan administrasi lembaga kemasyarakatan	9,118 orang	2,576,622,951	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0005	Pembinaan dan Penataan Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan penataan wilayah kecamatan	2 dokumen	1,704,218,316	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.1.2.03.03.0006	Operasional Kelurahan Asemrowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	636,348,181	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0007	Operasional Kelurahan Genting Kalianak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	458,302,120	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0008	Operasional Kelurahan Tambak Sarioso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	382,918,467	Kec. Asemrowo
2.1.2.03.03.0009	Operasional Kelurahan Kandangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	523,688,111	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0010	Operasional Kelurahan Romokalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	282,156,452	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0011	Operasional Kelurahan Sememi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	621,234,876	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0012	Operasional Kelurahan Tambak Osowilangun	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	271,365,568	Kec. Benowo
2.1.2.03.03.0013	Operasional Kelurahan Alon-Alon Contong	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	595,681,605	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0014	Operasional Kelurahan Bubutan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	646,877,789	Kec. Bubutan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.03.0015	Operasional Kelurahan Gundih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	645,285,151	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0016	Operasional Kelurahan Jepara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	649,118,276	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0017	Operasional Kelurahan Tembok Dukuh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	637,233,445	Kec. Bubutan
2.1.2.03.03.0018	Operasional Kelurahan Bulak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	527,379,774	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0019	Operasional Kelurahan Kedung Cowek	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	283,375,838	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0020	Operasional Kelurahan Kenjeran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	382,914,586	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0021	Operasional Kelurahan Sukolilo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	462,488,036	Kec. Bulak
2.1.2.03.03.0022	Operasional Kelurahan Dukuh Kupang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	482,578,407	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0023	Operasional Kelurahan Dukuh Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	493,161,213	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0024	Operasional Kelurahan Gunung Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	416,471,798	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0025	Operasional Kelurahan Pradah Kalikendal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	431,817,089	Kec. Dukuh Pakis
2.1.2.03.03.0026	Operasional Kelurahan Dukuh Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	435,630,829	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0027	Operasional Kelurahan Gayungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	498,947,013	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0028	Operasional Kelurahan Ketintang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	487,640,620	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0029	Operasional Kelurahan Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	445,587,708	Kec. Gayungan
2.1.2.03.03.0030	Operasional Kelurahan Embong Kaliasin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	605,465,168	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0031	Operasional Kelurahan Genteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	605,465,168	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0032	Operasional Kelurahan Kapasari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	605,465,168	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0033	Operasional Kelurahan Ketabang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	626,653,868	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0034	Operasional Kelurahan Peneleh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	605,465,168	Kec. Genteng
2.1.2.03.03.0035	Operasional Kelurahan Airlangga	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	602,634,483	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0036	Operasional Kelurahan Baratajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	591,289,863	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0037	Operasional Kelurahan Gubeng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	455,879,832	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0038	Operasional Kelurahan Kertajaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	657,106,515	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0039	Operasional Kelurahan Mojo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	848,422,704	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0040	Operasional Kelurahan Pucang Sewu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	513,057,669	Kec. Gubeng
2.1.2.03.03.0041	Operasional Kelurahan Gunung Anyar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	577,375,246	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0042	Operasional Kelurahan Gunung Anyar Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	478,463,185	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0043	Operasional Kelurahan Rungkut Menanggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	427,456,238	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0044	Operasional Kelurahan Rungkut Tengah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	517,706,857	Kec. Gunung Anyar
2.1.2.03.03.0045	Operasional Kelurahan Jambangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	379,046,597	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0046	Operasional Kelurahan Karah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	537,877,368	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0047	Operasional Kelurahan Kebonsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	352,308,594	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0048	Operasional Kelurahan Pagesangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	350,596,208	Kec. Jambangan
2.1.2.03.03.0049	Operasional Kelurahan Karangpilang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	359,068,096	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0050	Operasional Kelurahan Kebraon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	529,338,952	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0051	Operasional Kelurahan Kedurus	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	539,292,140	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0052	Operasional Kelurahan Warugunung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	308,575,062	Kec. Karangpilang
2.1.2.03.03.0053	Operasional Kelurahan Bulak Banteng	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	627,086,891	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0054	Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	915,341,197	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0055	Operasional Kelurahan Tambak Wedi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	414,927,550	Kec. Kenjeran

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.03.0056	Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	864,488,318	Kec. Kenjeran
2.1.2.03.03.0057	Operasional Kelurahan Dupak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	540,542,339	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0058	Operasional Kelurahan Kemayoran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	591,958,775	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0059	Operasional Kelurahan Krembangan Selatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	593,757,431	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0060	Operasional Kelurahan Morokrembangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	650,327,627	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0061	Operasional Kelurahan Perak Barat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	537,791,580	Kec. Krembangan
2.1.2.03.03.0062	Operasional Kelurahan Bangkingan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	381,044,191	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0063	Operasional Kelurahan Jeruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	291,225,522	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0064	Operasional Kelurahan Lakarsantri	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	329,313,541	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0065	Operasional Kelurahan Lidah Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	451,020,015	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0066	Operasional Kelurahan Lidah Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	376,838,877	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0067	Operasional Kelurahan Sumur Welut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	283,476,081	Kec. Lakarsantri
2.1.2.03.03.0068	Operasional Kelurahan Dukuh Sutorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	544,614,364	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0069	Operasional Kelurahan Kalijudan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	443,776,636	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0070	Operasional Kelurahan Kalisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	593,532,658	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0071	Operasional Kelurahan Kejawan Putih Tambak	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	362,581,539	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0072	Operasional Kelurahan Manyar Sabrangan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	547,878,922	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0073	Operasional Kelurahan Mulyorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	368,025,722	Kec. Mulyorejo
2.1.2.03.03.0074	Operasional Kelurahan Bongkaran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	531,713,433	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0075	Operasional Kelurahan Krembangan Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	617,214,035	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0076	Operasional Kelurahan Nyamplungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	562,976,651	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0077	Operasional Kelurahan Perak Timur	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	591,731,688	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0078	Operasional Kelurahan Perak Utara	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	688,703,608	Kec. Pabean Cantian
2.1.2.03.03.0079	Operasional Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	778,349,069	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0080	Operasional Kelurahan Benowo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	401,749,577	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0081	Operasional Kelurahan Pakal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	377,145,896	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0082	Operasional Kelurahan Sumber Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	441,412,986	Kec. Pakal
2.1.2.03.03.0083	Operasional Kelurahan Kalirungkut	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	723,399,888	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0084	Operasional Kelurahan Kedung Baruk	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	495,080,874	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0085	Operasional Kelurahan Medokan Ayu	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	722,740,767	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0086	Operasional Kelurahan Penjarangan Sari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	545,823,073	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0087	Operasional Kelurahan Rungkut Kidul	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	594,623,838	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0088	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	505,970,060	Kec. Rungkut
2.1.2.03.03.0089	Operasional Kelurahan Bringin	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	303,656,609	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0090	Operasional Kelurahan Lontar	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	782,223,756	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0091	Operasional Kelurahan Made	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	392,694,332	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0092	Operasional Kelurahan Sambikerep	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	615,789,293	Kec. Sambikerep
2.1.2.03.03.0093	Operasional Kelurahan Banyu Urip	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	697,641,783	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0094	Operasional Kelurahan Kupang Krajan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	595,936,025	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0095	Operasional Kelurahan Pakis	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	809,518,117	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0096	Operasional Kelurahan Petemon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	633,228,137	Kec. Sawahan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.03.0097	Operasional Kelurahan Putat Jaya	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	595,936,025	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0098	Operasional Kelurahan Sawahan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	683,792,761	Kec. Sawahan
2.1.2.03.03.0099	Operasional Kelurahan Ampel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	687,927,449	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0100	Operasional Kelurahan Pegirian	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	681,147,065	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0101	Operasional Kelurahan Sidotopo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	696,402,929	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0102	Operasional Kelurahan Ujung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	813,021,902	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0103	Operasional Kelurahan Wonokusumo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	1,127,035,965	Kec. Semampir
2.1.2.03.03.0104	Operasional Kelurahan Kapasan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	519,524,754	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0105	Operasional Kelurahan Sidodadi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	453,254,616	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0106	Operasional Kelurahan Simokerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	686,949,564	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0107	Operasional Kelurahan Simolawang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	538,009,415	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0108	Operasional Kelurahan Tambak Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	533,919,446	Kec. Simokerto
2.1.2.03.03.0109	Operasional Kelurahan Gebang Putih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	375,393,254	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0110	Operasional Kelurahan Keputih	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	569,369,412	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0111	Operasional Kelurahan Klampis Ngasem	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	492,570,958	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0112	Operasional Kelurahan Medokan Semampir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	562,727,136	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0113	Operasional Kelurahan Menur Pumpungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	540,257,239	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0114	Operasional Kelurahan Nginden Jangkungan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	572,500,096	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0115	Operasional Kelurahan Semolowaru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	630,104,598	Kec. Sukolilo
2.1.2.03.03.0116	Operasional Kelurahan Putat Gede	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	351,192,338	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0117	Operasional Kelurahan Simomulyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	572,086,623	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0118	Operasional Kelurahan Simomulyo Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	750,726,448	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0119	Operasional Kelurahan Sonokwijen	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	419,509,150	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0120	Operasional Kelurahan Sukomanunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	393,422,010	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0121	Operasional Kelurahan Tanjungsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	428,355,282	Kec. Sukomanunggal
2.1.2.03.03.0122	Operasional Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	561,813,121	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0123	Operasional Kelurahan Gading	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	723,688,547	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0124	Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	710,462,398	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0125	Operasional Kelurahan Pacar Keling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	652,195,855	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0126	Operasional Kelurahan Pacar Kembang	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	817,982,575	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0127	Operasional Kelurahan Ploso	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	739,052,512	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0128	Operasional Kelurahan Rangkah	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	533,718,583	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0129	Operasional Kelurahan Tambaksari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	625,225,210	Kec. Tambaksari
2.1.2.03.03.0130	Operasional Kelurahan Balongsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	392,852,254	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0131	Operasional Kelurahan Banjar Sugihan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	381,184,069	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0132	Operasional Kelurahan Karang Poh	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	508,177,547	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0133	Operasional Kelurahan Manukan Kulon	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	812,314,588	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0134	Operasional Kelurahan Manukan Wetan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	358,521,339	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0135	Operasional Kelurahan Tandes	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	425,515,308	Kec. Tandes
2.1.2.03.03.0136	Operasional Kelurahan Dr. Soetomo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	613,448,971	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0137	Operasional Kelurahan Kedungdoro	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	584,917,902	Kec. Tegalsari



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.03.0138	Operasional Kelurahan Keputran	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	481,723,163	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0139	Operasional Kelurahan Tegalsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	596,989,688	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0140	Operasional Kelurahan Wonorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	622,416,128	Kec. Tegalsari
2.1.2.03.03.0141	Operasional Kelurahan Kendangsari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	383,820,458	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0142	Operasional Kelurahan Kutisari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	435,204,274	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0143	Operasional Kelurahan Panjang Jiwo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	465,242,113	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0144	Operasional Kelurahan Tenggilis Mejoyo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	436,591,301	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.1.2.03.03.0145	Operasional Kelurahan Babatan	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	638,815,828	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0146	Operasional Kelurahan Balasklumprik	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	457,822,533	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0147	Operasional Kelurahan Jajar Tunggal	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	377,358,406	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0148	Operasional Kelurahan Wiyung	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	461,597,976	Kec. Wiyung
2.1.2.03.03.0149	Operasional Kelurahan Bendul Merisi	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	532,776,356	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0150	Operasional Kelurahan Jemur Wonosari	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	559,531,640	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0151	Operasional Kelurahan Margorejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	406,542,999	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0152	Operasional Kelurahan Sidosemo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	412,157,169	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0153	Operasional Kelurahan Siwalankerto	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	425,638,597	Kec. Wonocolo
2.1.2.03.03.0154	Operasional Kelurahan Darmo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	706,733,689	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0155	Operasional Kelurahan Jagir	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	620,516,042	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0156	Operasional Kelurahan Ngagel	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	421,329,575	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0157	Operasional Kelurahan Ngagel Rejo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	893,481,988	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0158	Operasional Kelurahan Sawunggaling	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	669,171,782	Kec. Wonokromo
2.1.2.03.03.0159	Operasional Kelurahan Wonokromo	Jumlah Laporan Operasional Kelurahan	12 dokumen	715,133,183	Kec. Wonokromo
<b>2.1.2.03.04</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah</b>	Persentase kajian/rekomendasi di semua sektor yang termanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	62.5 %	<b>2,350,394,242</b>	
2.1.2.03.04.0001	Evaluasi Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Bidang Kesehatan	2 dokumen	391,380,684	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0002	Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Program Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Masyarakat	2 dokumen	380,718,374	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0003	Monitoring dan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi program bidang kesejahteraan sosial	2 dokumen	354,915,857	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0004	Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Monitoring Pengendalian Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	1 dokumen	1,045,874,239	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.1.2.03.04.0005	Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Kota Surabaya	8 dokumen	177,505,088	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
<b>2.1.2.03.05</b>	<b>Program Peningkatan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah</b>	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	<b>93,385,511,998</b>	
2.1.2.03.05.0001	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48 laporan	4,493,360,551	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0002	Informasi dan Pengolahan Data	Jumlah informasi yang tersedia	100 jenis	7,751,204,962	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.05.0003	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan reses untuk 50 anggota DPRD	3 kali	11,690,087,322	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0004	Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD	Jumlah Kunjungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	86 kali	41,486,031,866	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah usul prakarsa DPRD yang dibahas	6 dokumen	17,622,219,547	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0006	Pengkajian / Penelaahan Kebijakan Daerah	Jumlah Dokumen yang dikaji atau ditelaah	10 dokumen	1,235,907,915	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0007	Protokol dan Pengendalian Sitem Keamanan	Jumlah laporan terkendalinya keamanan	12 dokumen	3,540,011,253	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0008	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan	969 kali	2,900,288,701	Sekretariat DPRD
2.1.2.03.05.0009	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan	50 kali	2,666,399,881	Sekretariat DPRD
<b>2.1.2.03.06</b>	<b>Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	<b>5,899,414,558</b>	
2.1.2.03.06.0001	Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	14 jenis	5,899,414,558	Bagian Umum dan Protokol
<b>2.1.2.03.07</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	1. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	42.86 %	<b>12,401,605,081</b>	
		2. Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	33.33 %		
		3. Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	42.1 %		
2.1.2.03.07.0001	Fasilitasi Delegasi Internasional di Dalam Negeri	Jumlah fasilitasi delegasi internasional di dalam negeri	10 lembaga	1,300,049,778	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.07.0002	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Dalam Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama dalam negeri non perdagangan	16 lembaga	1,265,012,935	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.07.0003	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri non Perdagangan	Jumlah fasilitasi/pembentukan kerjasama luar negeri non perdagangan	4 lembaga	993,470,500	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.07.0004	Fasilitasi Pengiriman Delegasi Pendidikan ke Luar Negeri	Jumlah delegasi pendidikan yang difasilitasi ke luar negeri	68 orang	8,685,015,395	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.07.0005	Monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kerjasama daerah	6 dokumen	93,049,195	Bagian Kerjasama
2.1.2.03.07.0006	Penyusunan road map kerjasama daerah	Jumlah dokumen road map kerjasama daerah	1 dokumen	65,007,279	Bagian Kerjasama
<b>2.1.2.03.08</b>	<b>Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	72%	<b>24,856,120,175</b>	
2.1.2.03.08.0001	Klinik Investasi	Jumlah perusahaan PMA/PMDN dan UMKM yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan penanaman modal	500 lembaga	178,738,561	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.1.2.03.08.0002	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring penanaman modal yang dilaksanakan	18 dokumen	33,541,718	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.1.2.03.08.0003	Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang memperoleh fasilitasi pelayanan perijinan / non perijinan	90 berkas	51,987,674	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.1.2.03.08.0004	Pelayanan UPTSA	Jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang dihasilkan	31,000 berkas	6,390,302,615	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.1.2.03.08.0005	Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah petugas pelayanan perizinan dan non perizinan	450 orang	92,977,415	Badan Koordinasi Pelayanan dan

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.03.08.0006	Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen lingkungan yang diterbitkan	500 berkas	4,209,166,231	Badan Lingkungan Hidup
2.1.2.03.08.0007	Pelayanan Perijinan Pembuangan Air Limbah	Jumlah Ijin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	26 ijin	263,425,103	Badan Lingkungan Hidup
2.1.2.03.08.0008	Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pengawasan Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan ijin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun yang terlayani dan terverifikasi	30 berkas	239,027,280	Badan Lingkungan Hidup
2.1.2.03.08.0009	Pelayanan Pendaftaran dan Pengawasan Usaha Kepariwisata	Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran dan pengawasan usaha kepariwisataan	12 dokumen	226,626,850	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.1.2.03.08.0010	Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan	Jumlah Pelayanan Perizinan Bidang Tata Bangunan yang ditingkatkan	7,252 ijin	2,241,582,446	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.1.2.03.08.0011	Bintek Penyusunan Informasi Industri	Jumlah UKM yang mengikuti bintek Informasi Industri	300 orang	150,832,340	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.03.08.0012	Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan	Jumlah wajib daftar perusahaan yang dibina	600 orang	535,951,357	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.03.08.0013	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perijinan	Jumlah sistem informasi penunjang pelayanan perijinan dan non perijinan yang dipelihara	1 aplikasi	3,416,889,979	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.03.08.0014	Pengawasan Perijinan di Bidang Industri	Jumlah perijinan bidang industri yang diawasi	344 dokumen	271,617,229	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.03.08.0015	Pengawasan Perijinan di Bidang Perdagangan	Jumlah ijin di bidang perdagangan yang diawasi	5,357 lembaga	501,580,530	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.1.2.03.08.0016	Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	Jumlah Lembar Yang Tercetak Untuk Kegiatan Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah Bidang Perhubungan	14,714,600 lembar	5,569,824,798	Dinas Perhubungan
2.1.2.03.08.0017	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pertanian	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian yang diterbitkan	251 ijin	310,262,965	Dinas Pertanian
2.1.2.03.08.0018	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ketenagakerjaan	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan ketenagakerjaan yang diselesaikan tepat waktu	2,000 ijin	171,785,085	Dinas Tenaga Kerja
<b>2.1.2.04</b>	<b>Pengawasan</b>			<b>4,607,319,609</b>	
<b>2.1.2.04.01</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal</b>	1. Persentase Penanganan Disiplin Aparatur	100%	<b>4,607,319,609</b>	
		2. Persentase Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan	100%		
2.1.2.04.01.0001	Penerapan Disiplin Pegawai	Jumlah laporan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindak lanjuti	48 dokumen	396,934,454	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.1.2.04.01.0002	Evaluasi SAKIP SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi SAKIP SKPD	1 dokumen	50,533,920	Inspektorat
2.1.2.04.01.0003	Inventarisasi Temuan	Jumlah dokumen Inventarisasi	12 dokumen	178,305,542	Inspektorat
2.1.2.04.01.0004	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada	16 dokumen	56,767,965	Inspektorat
2.1.2.04.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	53,626,317	Inspektorat
2.1.2.04.01.0006	Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Monitoring Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	16 dokumen	2,864,277,213	Inspektorat
2.1.2.04.01.0007	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah I Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	301,083,846	Inspektorat

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.1.2.04.01.0008	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah II Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	85 dokumen	285,479,807	Inspektorat
2.1.2.04.01.0009	Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Pada Inspektorat Pembantu Wilayah III Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	50 dokumen	262,177,949	Inspektorat
2.1.2.04.01.0010	Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengawasan	2 dokumen	58,421,411	Inspektorat
2.1.2.04.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Inspektorat	14 dokumen	99,711,185	Inspektorat
<b>2.2.2.01</b>	<b>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			<b>15,313,383,575</b>	
<b>2.2.2.01.01</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			<b>15,313,383,575</b>	
		1. Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	88.08 %		
		2. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	35.58 %		
		3. Terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	20%		
2.2.2.01.01.0001	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Kepegawaian	800 dokumen	227,608,750	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0002	Pembentukan Assesment	Jumlah Dokumen Penyiapan	1 dokumen	136,831,830	Badan Kepegawaian
2.2.2.01.01.0003	Pembinaan Kinerja Pegawai	Jumlah Pembinaan Kinerja Pegawai	70 orang	203,006,400	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0004	Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penataan Administrasi Kepegawaian	10 dokumen	332,874,362	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0005	Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	512 orang	1,575,717,838	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0006	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	200 orang	1,210,861,404	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0007	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta Pendidikan Dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	37 orang	1,204,810,072	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0008	Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS Daerah	1,267 orang	7,018,243,557	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0009	Penempatan Pegawai Dan Promosi Jabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti assesment, evaluasi THL/non PNS, dan mutasi PNS	169 orang	446,547,027	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0010	Pengelolaan Sistem Data Pegawai	Jumlah Pengelolaan Sistem Data Pegawai	1 aplikasi	60,449,117	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0011	Pengembangan Wawasan Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan Wawasan Aparatur Dan Pemberian Bantuan Tugas Belajar	380 orang	698,260,745	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0012	Penyiapan Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	Jumlah Materi Diklat Pembelajaran (e-learning)	1 dokumen	251,873,302	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.01.01.0013	Seleksi Penerimaan Calon PNS	Jumlah Peserta Seleksi Penerimaan Calon PNS Dan Publikasi Penerimaan IPDN	10,000 CPNS	1,946,299,169	Badan Kepegawaian dan Diklat
<b>2.2.2.02</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>			<b>615,315,105,403</b>	
<b>2.2.2.02.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>375,241,849,299</b>	
		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	72%		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.01.0001	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	2,743,776,881	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.2.2.02.01.0002	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1,261,853,446	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.01.0003	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1,786,225,627	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0004	Penyediaan Barang dan Jasa	Jumlah Jenis Barang dan	112 jenis	1,554,380,739	Badan Koordinasi
2.2.2.02.01.0005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	1,118,951,710	Badan Lingkungan Hidup
2.2.2.02.01.0006	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	56 jenis	2,678,126,080	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
2.2.2.02.01.0007	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	1,905,880,303	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.2.2.02.01.0008	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	545,924,742	Bagian Bina Program
2.2.2.02.01.0009	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	52 jenis	1,247,926,255	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.01.0010	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	381,655,405	Bagian Hukum
2.2.2.02.01.0011	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	803,840,635	Bagian Kerjasama
2.2.2.02.01.0012	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	298,791,615	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.01.0013	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	344,503,129	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.2.2.02.01.0014	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	559,981,321	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.01.0015	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	550 jenis	209,015,965	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.2.2.02.01.0016	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	11 jenis	1,961,254,590	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.01.0017	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	204 jenis	48,959,841,440	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.01.0018	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	6 jenis	19,714,786,021	Dinas Kebakaran
2.2.2.02.01.0019	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	7 jenis	3,031,684,703	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.2.2.02.01.0020	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	114 jenis	10,635,845,833	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.01.0021	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	6,455,969,952	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.2.2.02.01.0022	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	12 jenis	75,712,001,581	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.01.0023	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	2,040,988,367	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.01.0024	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	23 jenis	1,664,029,981	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.2.2.02.01.0025	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	24 jenis	31,378,889,736	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan
2.2.2.02.01.0026	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	11 jenis	5,249,454,783	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.01.0027	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	3 jenis	1,733,999,084	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2.2.02.01.0028	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	677 jenis	6,119,410,777	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.2.2.02.01.0029	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	7,455,259,428	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.01.0030	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	2 jenis	2,711,378,110	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.01.0031	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	116 jenis	1,866,352,665	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.2.02.01.0032	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	9 jenis	10,894,048,796	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.01.0033	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	24 jenis	7,248,212,963	Dinas Pertanian
2.2.2.02.01.0034	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	49 jenis	2,951,547,551	Dinas Sosial
2.2.2.02.01.0035	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	76 jenis	1,968,060,167	Dinas Tenaga Kerja
2.2.2.02.01.0036	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	67 jenis	1,384,365,216	Inspektorat
2.2.2.02.01.0037	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	60 jenis	786,133,560	Kantor Ketahanan Pangan
2.2.2.02.01.0038	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	350,953,303	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.01.0039	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	429,130,124	Kec. Benowo
2.2.2.02.01.0040	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	592,749,711	Kec. Bubutan
2.2.2.02.01.0041	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	578,580,019	Kec. Bulak
2.2.2.02.01.0042	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	462,808,816	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.01.0043	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	488,586,174	Kec. Gayungan
2.2.2.02.01.0044	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	539,885,470	Kec. Genteng
2.2.2.02.01.0045	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	678,166,797	Kec. Gubeng
2.2.2.02.01.0046	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	53 jenis	478,946,756	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.01.0047	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	413,077,324	Kec. Jambangan
2.2.2.02.01.0048	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	591,355,046	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.01.0049	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	632,699,996	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.01.0050	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	628,350,166	Kec. Krembangan
2.2.2.02.01.0051	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	470,503,922	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.01.0052	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	501,266,405	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.01.0053	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	496,056,275	Kec. Pabean Cantian

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.01.0054	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	678,166,797	Kec. Pakal
2.2.2.02.01.0055	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	477,303,902	Kec. Rungkut
2.2.2.02.01.0056	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	426,820,179	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.01.0057	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	539,970,610	Kec. Sawahan
2.2.2.02.01.0058	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	583,602,463	Kec. Semampir
2.2.2.02.01.0059	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	541,996,269	Kec. Simokerto
2.2.2.02.01.0060	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	423,165,404	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.01.0061	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	413,403,755	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.01.0062	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	480,093,166	Kec. Tambaksari
2.2.2.02.01.0063	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	470,820,943	Kec. Tandes
2.2.2.02.01.0064	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	528,134,666	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.01.0065	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	678,166,797	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.01.0066	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	412,992,184	Kec. Wiyung
2.2.2.02.01.0067	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	455,047,631	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.01.0068	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	10 jenis	668,878,128	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.01.0069	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	8 jenis	36,127,802,882	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.01.0070	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	2 jenis	45,877,133,760	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.01.0071	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	3 jenis	1,690,409,840	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.01.0072	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan	55 jenis	6,070,474,463	Sekretariat DPRD
<b>2.2.2.02.02</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan</b>	1. Persentase pemanfaatan aset	91%	<b>240,073,256,105</b>	
		2. Akumulasi jumlah sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	1 sistem		
		3. Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	77%		
		4. Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	74.36 %		
		5. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%		
		6. Ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana	100%		
		7. Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	62%		

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.02.0001	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	200 unit	482,868,103	Badan Arsip dan Perpustakaan
2.2.2.02.02.0002	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	33 unit	422,954,603	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.2.2.02.02.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	62 unit	1,275,568,018	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	20 unit	210,647,924	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal
2.2.2.02.02.0005	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	9 jenis	306,877,298	Badan Lingkungan Hidup
2.2.2.02.02.0006	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	123 unit	612,397,807	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
2.2.2.02.02.0007	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	40 unit	357,903,830	Badan Perencanaan Pembangunan Kota
2.2.2.02.02.0008	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	4 unit	763,019,831	Bagian Bina Program
2.2.2.02.02.0009	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang disediakan	10 jenis	1,187,208,091	Bagian Bina Program
2.2.2.02.02.0010	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	6 unit	296,825,905	Bagian Hubungan Masyarakat
2.2.2.02.02.0011	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	12 unit	130,769,178	Bagian Hukum
2.2.2.02.02.0012	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	20 unit	177,767,801	Bagian Kerjasama
2.2.2.02.02.0013	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	12 unit	82,299,179	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2.2.2.02.02.0014	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	24 unit	94,920,541	Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2.2.2.02.02.0015	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	41 unit	90,487,363	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2.2.2.02.02.0016	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 unit	88,059,116	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2.2.2.02.02.0017	Evaluasi dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	Jumlah dokumen penghapusan aset/barang daerah	6 dokumen	2,137,683,195	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0018	Pelayanan Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	1,000 dokumen	5,598,179,110	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0019	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	550 unit	6,798,526,224	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0020	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	4 unit	66,499,345	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0021	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	6,435 setel	3,322,250,384	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0022	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	2 jenis	61,902,699	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0023	Pengadaan Sarana Kedinasan	Jumlah sarana kedinasan yang diadakan	1 unit	485,100,000	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0024	Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah	Jumlah sistem informasi barang daerah yang dikembangkan	1 aplikasi	707,016,095	Bagian Perlengkapan
2.2.2.02.02.0025	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	8 unit	3,076,769,277	Bagian Umum dan Protokol
2.2.2.02.02.0026	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	56 unit	2,460,273,391	Dinas Kebakaran



KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.02.0027	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi Operasional Perangkat Daerah (OPD)	9 jenis	901,640,790	Dinas Kebakaran
2.2.2.02.02.0028	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	110 unit	1,327,585,463	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.2.2.02.02.0029	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	3 unit	133,697,545	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.2.2.02.02.0030	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	18 unit	556,400,696	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.2.02.02.0031	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	32 unit	1,421,184,582	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.2.2.02.02.0032	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	461 unit	4,094,653,471	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.02.0033	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	12 jenis	5,551,626,309	Dinas Kesehatan
2.2.2.02.02.0034	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	117 unit	506,692,247	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.02.0035	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi Operasional Perangkat Daerah (OPD)	40 jenis	1,100,100,476	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2.2.02.02.0036	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	19 unit	761,803,575	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.2.2.02.02.0037	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	7 unit	8,139,963,604	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
2.2.2.02.02.0038	Pembangunan/Rehabilitasi Dan Pengawasan Fasilitas Gedung Pemerintah Dan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang dibangun/ direhab	33 bangunan	142,861,462,064	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0039	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	101 unit	1,327,585,463	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0040	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	2 jenis	964,708,090	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
2.2.2.02.02.0041	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	11 unit	1,020,463,074	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2.2.02.02.0042	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	3 jenis	100,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2.2.02.02.0043	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	94 unit	4,794,477,354	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
2.2.2.02.02.0044	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	294 unit	1,732,563,323	Dinas Pendidikan
2.2.2.02.02.0045	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	3 unit	418,826,665	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
2.2.2.02.02.0046	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	210 unit	782,212,219	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2.2.2.02.02.0047	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	100 unit	5,644,221,593	Dinas Perhubungan
2.2.2.02.02.0048	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	65 unit	1,365,517,276	Dinas Pertanian
2.2.2.02.02.0049	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	104 unit	383,219,873	Dinas Sosial
2.2.2.02.02.0050	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	155 unit	671,780,128	Dinas Tenaga Kerja

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.02.0051	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	9 unit	251,454,806	Inspektorat
2.2.2.02.02.0052	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	27 unit	212,928,046	Kantor Ketahanan Pangan
2.2.2.02.02.0053	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	15 unit	161,173,257	Kec. Asemrowo
2.2.2.02.02.0054	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	15 unit	161,226,153	Kec. Benowo
2.2.2.02.02.0055	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	19 unit	195,838,031	Kec. Bubutan
2.2.2.02.02.0056	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	16 unit	158,187,300	Kec. Bulak
2.2.2.02.02.0057	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	52 unit	173,580,511	Kec. Dukuh Pakis
2.2.2.02.02.0058	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	27 unit	211,572,922	Kec. Gayungan
2.2.2.02.02.0059	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	37 unit	213,500,518	Kec. Genteng
2.2.2.02.02.0060	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	19 unit	131,904,676	Kec. Gubeng
2.2.2.02.02.0061	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	22 unit	157,212,205	Kec. Gunung Anyar
2.2.2.02.02.0062	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	31 unit	163,818,996	Kec. Jambangan
2.2.2.02.02.0063	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	24 unit	157,738,740	Kec. Karangpilang
2.2.2.02.02.0064	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	25 unit	153,179,186	Kec. Kenjeran
2.2.2.02.02.0065	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	24 unit	162,960,990	Kec. Krembangan
2.2.2.02.02.0066	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	13 unit	145,665,196	Kec. Lakarsantri
2.2.2.02.02.0067	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	18 unit	123,811,508	Kec. Mulyorejo
2.2.2.02.02.0068	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	25 unit	157,931,500	Kec. Pabean Cantian
2.2.2.02.02.0069	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	23 unit	157,931,500	Kec. Pakal
2.2.2.02.02.0070	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	12 unit	130,555,359	Kec. Rungkut
2.2.2.02.02.0071	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	17 unit	161,120,360	Kec. Sambikerep
2.2.2.02.02.0072	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	25 unit	163,153,750	Kec. Sawahan
2.2.2.02.02.0073	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	28 unit	153,533,185	Kec. Semampir
2.2.2.02.02.0074	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	36 unit	194,642,358	Kec. Simokerto
2.2.2.02.02.0075	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	23 unit	131,128,815	Kec. Sukolilo
2.2.2.02.02.0076	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	9 unit	150,501,926	Kec. Sukomanunggal
2.2.2.02.02.0077	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	21 unit	124,389,787	Kec. Tambaksari

KODE	URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN	Output	Target Indikator	Nilai Rincian	SKPD
2.2.2.02.02.0078	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	26 unit	158,124,259	Kec. Tandes
2.2.2.02.02.0079	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	33 unit	179,379,953	Kec. Tegalsari
2.2.2.02.02.0080	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	20 unit	131,754,194	Kec. Tenggilis Mejoyo
2.2.2.02.02.0081	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	37 unit	155,513,678	Kec. Wiyung
2.2.2.02.02.0082	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	53 unit	188,457,397	Kec. Wonocolo
2.2.2.02.02.0083	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	26 unit	219,834,025	Kec. Wonokromo
2.2.2.02.02.0084	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	6 jenis	3,206,397,256	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.02.0085	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan	2 jenis	1,944,743,450	RSUD Bhakti Dharma Husada
2.2.2.02.02.0086	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	6 jenis	5,433,559,035	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.02.0087	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi Operasional Perangkat Daerah (OPD)	2 jenis	2,960,781,200	RSUD Dr. Mohamad Soewandie
2.2.2.02.02.0088	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	400 unit	968,611,374	Satuan Polisi Pamong Praja
2.2.2.02.02.0089	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	45 unit	2,208,298,514	Sekretariat DPRD
<b>TOTAL</b>				<b>5,919,950,502,105</b>	

## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 serta Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta digunakan sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan tahunan agar bisa berjalan dengan baik. Penyusunan RKPD dilakukan dengan memperhatikan sinergitas antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

RKPD Kota Surabaya tahun 2017 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2017, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan tahun 2017 yang mengacu pada isu-isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2017 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;

2. RKPD Tahun 2017 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD yang dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
4. Dalam hal RKPD Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah serta program dan kegiatan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD yang menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2017.

**WALIKOTA SURABAYA**

**ttd.**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006